







## **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013- 2033;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Serdang Bedagai adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.



19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
28. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RPJMD merupakan :

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. penyusunan Renja SKPD;
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
  - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran;
  - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan;

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

**BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

**BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB VI : STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VIII : INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

**BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

**BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

**BAB XI : PENUTUP**

## **BAB V**

### **ISI, URAIAN RPJMD DAN INDIKATOR KEBERHASILAN VISI**

#### **Pasal 5**

- (1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten yang UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN.
- (3) Indikator keberhasilan visi disebut dengan “21 peraihan”.
- (4) 21 peraihan sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. peningkatan APBD mencapai 2,4 Triliun;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 127 miliar;
  - c. tidak ada lagi daerah terisolir dan tidak teraliri listrik;
  - d. penambahan energy terbarukan melalui sumber daya air;
  - e. terbangunnya jalan dan jembatan penghubung dari ibukota kecamatan ke pemukiman penduduk;
  - f. terbangunnya jalan penghubung menuju objek wisata dan kawasan sentra produksi;
  - g. terbukanya lapangan kerja baru sebanyak 6.000 lapangan kerja;
  - h. terbentuknya wirausaha baru sebanyak 3.000 wirausaha;
  - i. tersedianya layanan dalam perlindungan tenaga kerja dan layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan public;
  - j. terbangunnya dan terpeliharanya jaringan irigasi dalam peningkatan produktivitas padi hingga mencapai 6,2 ton per hektar;
  - k. meningkatnya lembaga P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif di setiap daerah irigasi;
  - l. terbangunnya ruang terbuka hijau (RTH) di 17 kecamatan;
  - m. menurunnya persentase penduduk miskin dari 8,98% menjadi 5%;
  - n. bebas kawasan kumuh dan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 1180 unit;
  - o. tersambungny air bersih ke rumah tangga sebanyak 5.250 rumah tangga;
  - p. terciptanya 5 kampung budaya lokal, pelestarian budaya dalam peningkatan pariwisata;
  - q. menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu destinasi wisata dengan kunjungan wisata mencapai 1.000.000 wisatawan;
  - r. bertambahnya destinasi pariwisata dengan mengembangkan ekowisata;
  - s. terbangunnya gedung olah raga dan sarana olah raga dalam meningkatkan atlet yang berprestasi;
  - t. bertambahnya jumlah siswa SMA/SMK sederajat yang lulus di perguruan tinggi negeri menjadi 10%;
  - u. seluruh puskesmas sudah terakreditasi.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 7 September 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 7 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR : 1**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**SURIAN SYAHRIZAL, SH**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (77/2016)**



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021; \*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (sembilan) Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 (sembilan) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013- 2033;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Serdang Bedagai;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
44. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
45. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

+

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan



kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Serdang Bedagai adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
23. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

28. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
29. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengendalian kebijakan;
- b. Pengendalian pelaksanaan;
- c. Evaluasi hasil.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pengendalian Kebijakan**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan untuk menjamin bahwa Renstra OPD dan RPJM Desa telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, target 21 (dua puluh satu) peraian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan program strategis nasional.
- (2) Keselarasan dengan 21 (dua puluh satu) peraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelarasan program sesuai kegiatan prioritas OPD dan desa dalam rangka mencapai target 21 (dua puluh satu) peraian.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang periode RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengendalian Pelaksanaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, target 21 (dua puluh satu) peraian, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renstra OPD dan RPJM Desa telah dipedomani dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) OPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB) Desa.

- (2) Mempedomani target 21 (dua puluh satu) perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyusunan RKA OPD dan R-APB Desa harus menjamin pencapaian target 21 (dua puluh satu) perairan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan R-APB Desa dalam periode RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

### **Bagian Ketiga**

### **Evaluasi Hasil**

#### **Pasal 5**

- (1) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target 21 (dua puluh satu) perairan, capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan RPJM Desa periode tahun 2016-2021.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan atau perubahan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.

#### **Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Mei 2017

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**HADI WINARNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017  
NOMOR 24



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagai implikasi dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016, telah terjadi perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Perubahan OPD berupa penghapusan, pemisahan dan penggabungan beberapa OPD sebagai akibat dari perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Revisi RPJMD ini diharapkan OPD pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat menyusun Rencana Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian dokumen pini disusun, semoga terwujud sinkronisasi antara Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten dengan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

The official stamp of the Bupati Serdang Bedagai is a circular emblem. It features a central five-pointed star with a smaller star inside it. The text "UPAT" is at the top and "SERDANG BEDAGAI" is at the bottom of the circle. The name "BUPATI SERDANG BEDAGAI," is written across the middle of the stamp.  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soekirman", is written over the stamp.  
**Ir. H. SOEKIRMAN**



---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-20
1.5. Maksud dan Tujuan .....	I-24
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	 <b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-36
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-66
2.4. Aspek Daya Saing .....	II-168
 <b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA KEUANGAN .....</b>	 <b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-15
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-28
 <b>BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS .....</b>	 <b>IV-1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2. Isu-Isu Strategis .....	IV-30
 <b>BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	 <b>V-1</b>
5.1. Visi .....	V-1
5.2. Misi .....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran .....	V-2
 <b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	 <b>VI-1</b>
6.1. Arah Pembangunan RPJM Daerah 2016-2021 .....	VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	VI-2
6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2016-2021 .....	VI-15



---

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

<b>DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan .....	VII-2
7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN) 2015-2019 .....	VII-43
7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara) 2015-2019 .....	VII-45
7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Lintas Bidang .....	VII-47

## **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN**

<b>KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi .....	VIII-1
8.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan .....	VIII-2

## **BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....**

9.1. Indikator Kinerja Daerah .....	IX-1
9.2. Indikator Kinerja Penentu Keberhasilan Pembangunan Daerah .....	IX-2





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pada Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perda tentang RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 harus sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat tanggal 17 Agustus 2016, mengingat pelantikan Bapak Ir. H. Soekirman sebagai Bupati Serdang Bedagai dan Bapak Darma Wijaya, SE sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-785 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ir. H. Soekirman sebagai Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.12-786 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Darma Wijaya, SE sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah maka



RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

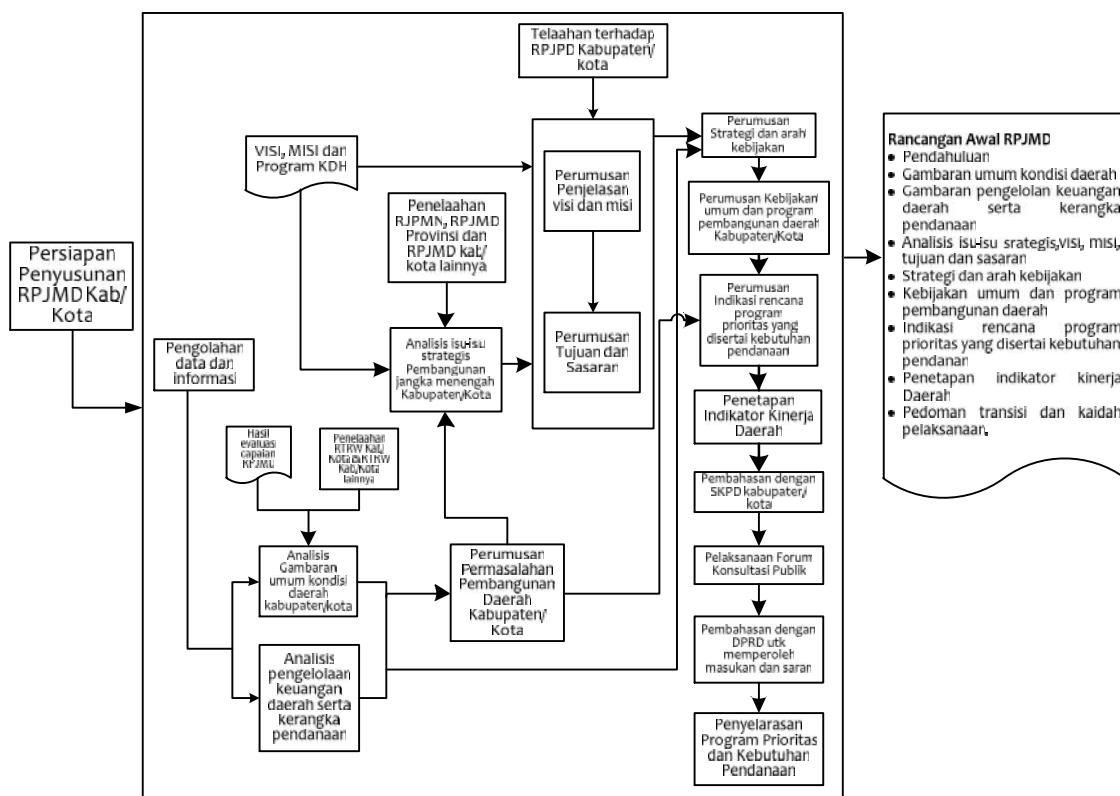
1. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah;
4. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian perencanaan dan pengawasan bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam rangka sinkronisasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033, kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

Sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025 di

dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. RPJPD dimaksud kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: tahap I (2005-2010), tahap II (2010-2015) dan saat ini memasuki tahap III (2016-2021).

Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Setiap SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya menjabarkan Renstra tersebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai yang disusun melalui berbagai tahapan sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD** di bawah ini.



**Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD**

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010



## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;



26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013–2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

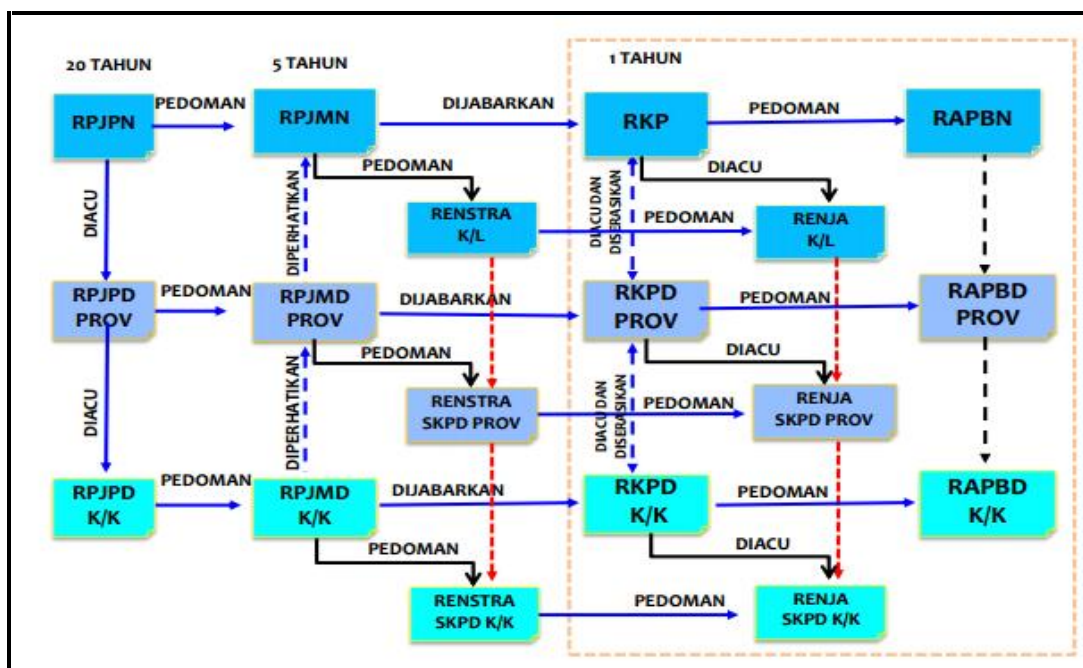
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Agar RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Berikut hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari **Gambar 1.2**.



**Gambar 1.2**

**Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**

*Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008 (diolah)*

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

#### **1. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019**

RPJM Nasional Tahun 2014-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2020 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut; 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi RPJMN Tahun 2014-2019 tersebut, pemerintah telah menetapkan Strategi Pembangunan Nasional sebagaimana tergambar pada **Gambar 1.3** yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan
2. Tiga Dimensi Pembangunan (Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, Dimensi pembangunan sektor unggulan dan Dimensi pemerataan dan kewilayahan)
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas (Kondisi perlu)
4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya)



**Gambar 1.3**

**Strategi Pembangunan Nasional**

*Sumber : Buku I RPJMN 2015-2019*

Adapun agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu;

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa,
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan ‘Nawa Cita’.

Agar RPJMN mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama pembangunan, RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 - 2021 wajib mengacu pokok-pokok Nawa Cita tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJMD.

Integrasi Nawa Cita dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 diantaranya pada agenda prioritas pembangunan nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

## **2. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018**

Visi pembangunan Sumatera Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2013-2018 adalah: “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”. Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean goverment*); 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi; 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerja sama antar daerah, swasta, regional dan internasional; 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, keselarasan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah; 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di samping itu, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memiliki 9 (Sembilan) prioritas pembangunan untuk Tahun 2013-2018 yaitu: 1) Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3) Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan; 4) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah; 5) Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian; 6) Peningkatan ekonomi kerakyatan; 7) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin; 8) Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; 9) Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

Sama halnya dengan RPJMN, substansi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 juga wajib menjadi acuan penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan.

Integrasi 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 diantaranya pada prioritas pembangunan pertama, kedua dan ketiga yang sejalan dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

### **3. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI YANG RELIGIUS, KOMPETITIF, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”** visi ini termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005–2025. Sesuai dengan arahan RPJP Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005–2025 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai yang produktif, mandiri, berdaya saing kuat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, berkeadilan dibawah pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang demokratis, bersih dan jujur.

Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :





1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Melestarikan nilai-nilai perjuangan bangsa dan mendorong penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat Serdang Bedagai yang madani..
4. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar kecamatan dan antar desa.
5. Membangun kerja sama antar daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta, serta membangun kerja sama regional dan internasional melalui partisipasi Kabupaten Serdang Bedagai di berbagai kegiatan kerjasama pembangunan.
6. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, agroindustri, pariwisata serta sektor andalan dan unggulan lainnya, dengan cara meningkatkan promosi peluang investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat Serdang Bedagai yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk membangun daerah Serdang Bedagai secara keseluruhan.
8. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam pemerintahan yang dalam perwujudannya dapat terlihat dari komposisi pejabat struktural di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Serdang Bedagai yang serasi dan harmonis.

RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan Tahap III dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai periode 2016-2021, juga berpedoman RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025, dalam upaya penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran pokok jangka panjang maka rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan secara bertahap dengan masing-masing tahapan berjangka waktu 5 tahun. Tahapan tersebut dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (RPJMD). Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai seluruhnya terdiri dari 4 RPJMD dan masing-masing RPJMD memiliki skala prioritas yang sifatnya berkesinambungan secara utuh dan konsisten untuk tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana telah termuat pada Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam setiap tahap pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 5 tahun masing-masing tahap memiliki fokus atau penekanan terhadap sektor-sektor sasaran tertentu. Namun tidak berarti sektor lain yang non-prioritas akan diabaikan. Sektor-sektor non-prioritas juga masih tetap mendapat alokasi anggaran yang wajar.

Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga fokus pembangunan setiap perodesasi RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai guna menuju Terwujudnya Masyarakat Serdang Bedagai yang Religius, Kompetitif, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan, adalah sebagai berikut :

- a. Periode 2005-2009 : Penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil dan demokratis
- b. Periode 2010-2015 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serdang Bedagai
- c. Periode 2016-2021 : Pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
- b. Periode 2021-2025 : Pemantapan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang lestari

#### **4. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 tentu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033 adalah **”Menjadikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan.”**

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Pengoptimalan posisi strategis wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap pesatnya perkembangan wilayah sekitar, yang

diwujudkan dengan strategi : mendukung penetapan Pulau Berhala sebagai kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan; mengembangkan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalipah dengan memanfaatkan jalan akses ke Bandara Kualanamu dan Jalan Susur Pantai timur sumatera dan mengembangkan Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Merawan sebagai kawasan wisata alam; menata Kawasan Cepat Tumbuh di sekitar akses Rencana Jalan Tol; menata pemanfaatan ruang sekitar koridor jalan arteri Medan-Tebing Tinggi;

2. Pengembangan lahan untuk kegiatan perkotaan dan permukiman, yang diwujudkan dengan strategi : prioritas pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan kawasan perkotaan pada lahan perkebunan swasta PT. PP. London Sumatera Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah seluas 35 Ha dan PTPN – III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu seluas 100 Ha; meningkatkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan pembangunan daerah; mengembangkan kawasan pendidikan dan rekreasi berupa sarana pendidikan bertaraf Internasional, kebun binatang, sarana olah raga, areal replika budaya dan fasilitas umum lainnya serta pengembangan kawasan permukiman pada lahan perkebunan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan seluas 80 hektar.
3. Peningkatan produktivitas wilayah melalui dukungan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang diwujudkan dengan strategi : memantapkan fungsi kawasan hutan melalui review tata batas dan penetapan tata batas serta disosialisasikan kepada masyarakat; mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan hidup manusia terhadap kerusakan-kerusakan hutan melalui relokasi permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung, pembatasan perluasan kawasan wisata *enclave* dalam kawasan hutan, antara lain pembatasan perkembangan

kawasan budidaya pada kawasan Lindung di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Serdang Bedagai; memanfaatkan kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain (APL) sesuai kondisi aktual di lapangan, bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan; menetapkan lahan pertanian berkelanjutan yang tersebar di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei Rampah, Bandar Khalipah, Sei Bambi, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Pegajahan dan Serbajadi; meningkatkan produktifitas tanaman pangan untuk mempertahankan/memantapkan swasembada pangan; mendorong pengembangan sektor industri yang berbasis pada industri pengolahan hasil pertanian dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup; memanfaatkan bahan pertambangan batuan di Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Perbaungan, Sei Rampah, Dolok Merawan, dan Serba Jadi berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan.

4. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah dan mitigasi bencana, yang diwujudkan dengan strategi : meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sampai pada tingkat desa terutama mendukung pusat produksi dan pengolahan pertanian dan kelautan serta daerah pemasaran; meningkatkan kapasitas layanan jalan dan jembatan menuju rencana Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Tanjung Beringin dan Jalur susur pantai timur serta membangun dan mengembangkan terminal regional, terminal lokal untuk mengatur arah pergerakan angkutan darat; mendorong peningkatan angkutan antar kota/transportasi pada semua ibukota Kecamatan dan hubungan keluar dari Kabupaten Serdang Bedagai ke kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara; meningkatkan transportasi melalui jalur laut dengan pengembangan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin; membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana serta utilitas seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, air bersih, telepon, listrik dan lain-lain yang ditujukan untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi; menjamin ketersediaan energi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pengembangan jaringan energi dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif seperti tenaga air, tenaga sekam dan tenaga angin; memperluas jaringan telekomunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya keseluruhan wilayah dengan mengutamakan pengembangan jaringan nirkabel yang dilayani dengan sistim tower bersama; mengembangkan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPA regional di Kecamatan Serba Jadi yang menerapkan sistim *Sanitary Landfill* dan *Control Landfill*; meminimalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dan membangun sarana pengendalian dampak bencana alam.

Kebijakan dan strategi penataan ruang ini merupakan salah satu dasar dalam menetapkan program pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 khususnya untuk program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **5. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Renstra SKPD**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra SKPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.



---

## **6. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

## **7. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)**

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

## **8. RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dengan Perencanaan Lainnya**

Sebagai sub sistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu:



1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
4. Sasaran dan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang menjadi acuan untuk melanjutkan pembangunan pasca Milinium Development Goals (MDGs) yang berakhir Tahun 2015 atau merupakan bentuk dari penyempurnaan MDGs;
5. Sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAN-PPK) dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAD-PPK);
6. Sasaran dan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
7. Sasaran dan target pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Randa PUG) Kabupaten Serdang Bedagai
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Serdang Bedagai seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun dan Kota Tebing Tinggi;
10. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah skema penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Serdang Bedagai terpilih yang terjabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Sebelumnya ditentukan pula indikator outcome dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya. Rumusan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan dokumen RPJMD yang meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Serdang Bedagai secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

**BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan Tahun 2010-2015 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2010-2015 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan

analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2016-2021, serta perhitungan kerangka pendanaannya.

**BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan itu sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai di masa yang akan datang.

**BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

**BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mengakomodir beberapa urusan pemerintah yang terkait urusan wajib dan pilihan. Untuk urusan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang menjadi pedoman

dalam perumusan kebijakannya adalah penerapan standar pelayanan minimal kementerian/lembaga yang telah ditetapkan.

**BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja.

**BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu disajikan pula program teknis bersama dan program bersama penunjang organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (*impact*) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (*outcome*) pada masing-masing program sebagaimana dimuat dalam Bab VII.

**BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD setiap tahunnya. Selain itu, RPJMD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

## BAB XI : PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

### **1.5. Maksud Dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya periode Tahun 2016 - 2021;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;





6. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala SKPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
7. Sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Luas area Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan kurang lebih 8.789,38 km<sup>2</sup> (878.938 Ha) yang meliputi, daratan seluas kurang lebih 1.952,38 km<sup>2</sup> (195.238 Ha) dan lautan seluas kurang lebih 6.837 km<sup>2</sup> (683.700 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dengan batas-batas wilayah administrasi kabupaten sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

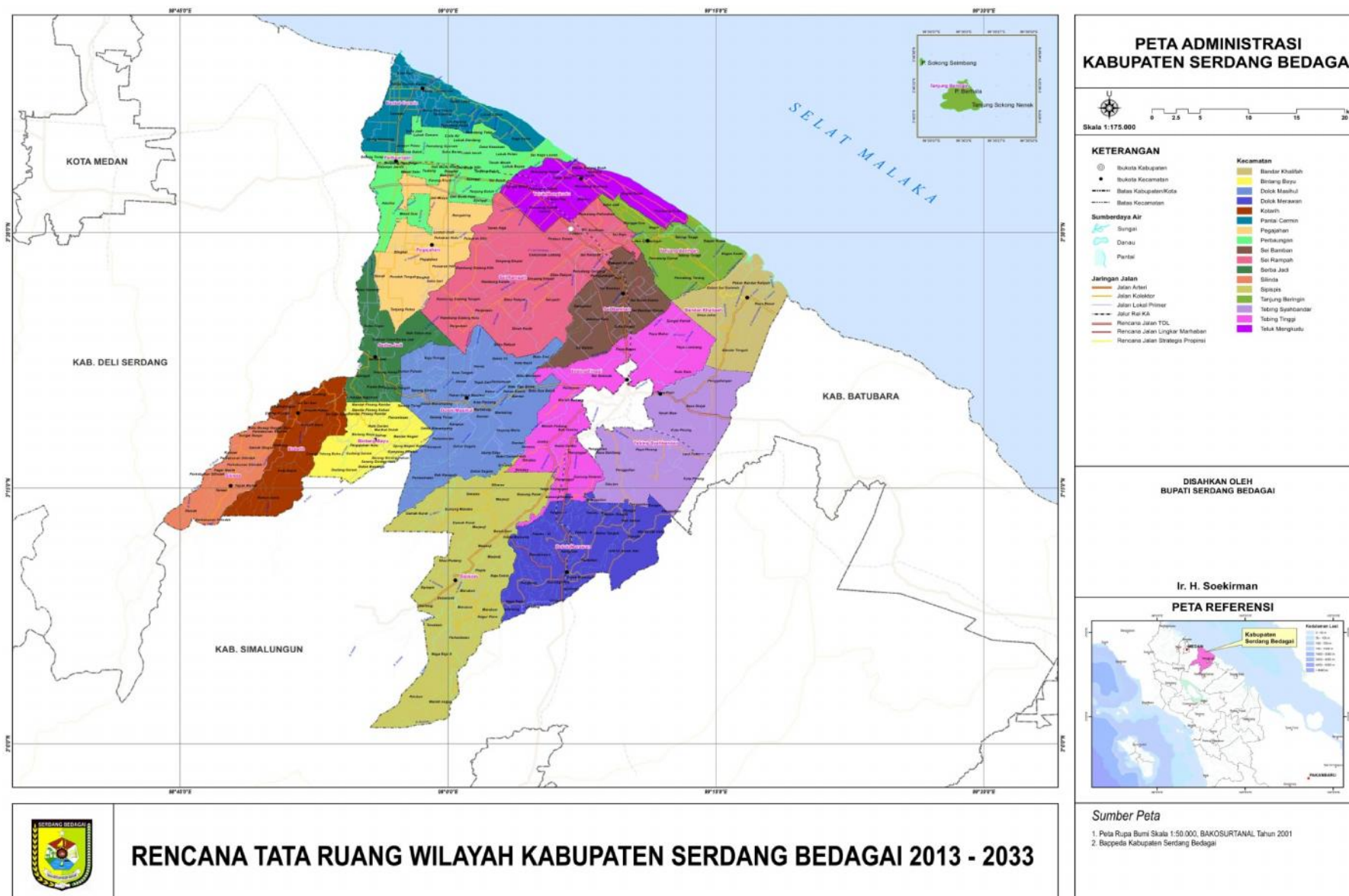
Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Sipispis mempunyai proporsi terluas 220,52 Km<sup>2</sup> (11,29 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Silinda dengan luas 56,54 Km<sup>2</sup> (2,89 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1 dan Gambar 2.1** berikut ini.



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Kecamatan**  
**Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kotarih	11 Desa	83,67
2.	Silinda	9 Desa	56,54
3.	Bintang Bayu	19 Desa	66,83
4.	Dolok Masihul	27 Desa / 1 Kelurahan	194,40
5.	Serbajadi	10 Desa	67,47
6.	Sipispis	20 Desa	220,52
7.	Dolok Merawan	17 Desa	141,70
8.	Tebing Tinggi	14 Desa	147,49
9.	Tebing Syahbandar	10 Desa	142,85
10.	Bandar Khalipah	5 Desa	82,59
11.	Tanjung Beringin	8 Desa	71,94
12.	Sei Rampah	17 Desa	214,65
13.	Sei Bamban	10 Desa	82,01
14.	Teluk Mengkudu	12 Desa	76,54
15.	Perbaungan	24 Desa / 4 Kelurahan	118,63
16.	Pegajahan	12 Desa / 1 Kelurahan	99,36
17.	Pantai Cermin	12 Desa	85,20
<b>Total</b>		237 Desa / 6 Kelurahan	1.952,38

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai



### Gambar 2.1

### Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi 03°01'2,5" – 03°46'33" Lintang Utara dan 98°44'22" – 99°19'01" Bujur Timur.

Kabupaten Serdang Bedagai secara posisi geografis sangat strategis (geostrategis) karena :

1. Dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu perairan yang paling padat di dunia;
2. Dekat dengan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan;
3. Dilalui oleh pembangunan jalan Tol Medan – Tebing Tinggi
4. Adanya kerjasama segitiga pertumbuhan antara Indonesia – Malaysia – Thailand (IMT – GT).

Di samping itu, Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas Sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau Sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah kabupaten Serdang Bedagai.

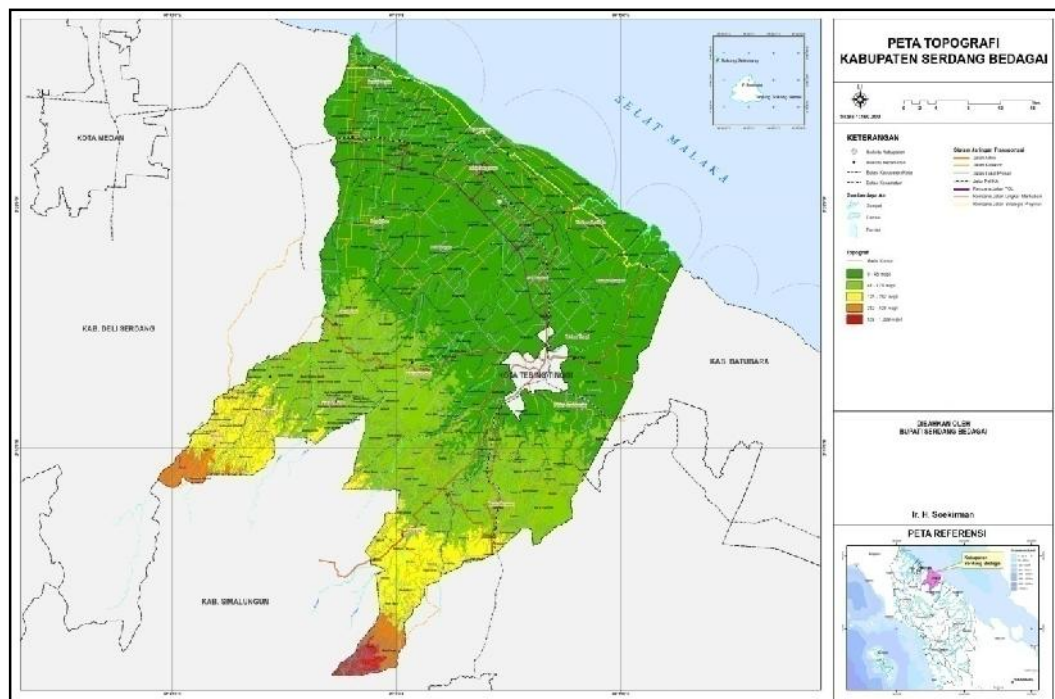
Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten Serdang Bedagai yang cukup beragam juga didukung oleh potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah, antara lain : Sumber Daya Kelautan, Sumber Daya Air, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertambangan dan Pariwisata.

#### **2.1.1.3. Topografi**

Kabupaten Serdang Bedagai terletak di daerah Pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak pada ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km dan 1 (satu) pulau terluar yaitu Pulau Berhala. Pembagian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan elevasi (ketinggian) dapat dibedakan sebagai berikut :

- Ketinggian 0–10 mdpl seluas 66.506,75 ha (34,63%) dari luas daerah Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat di beberapa kecamatan kecuali Kecamatan Kotarih dan Sipispis;
- Ketinggian 11–50 mdpl seluas 117.522,74 ha (61,20%), terdapat hampir diseluruh Kecamatan;
- Ketinggian 51–500 mdpl seluas 8.007,68 ha (4,17%) terdapat di Kecamatan Kotarih dan Sipispis.

Dari perincian tersebut di atas dapat dilihat bahwa  $\pm 96\%$  wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada ketinggian 0–500 mdpl, yaitu daerah yang dikategorikan sebagai daerah pantai atau dataran rendah. Penyebaran wilayah menurut ketinggian tempat diuraikan pada **Gambar 2.2.**



**Gambar 2.2**  
**Peta Topografi Kabupaten Serdang Bedagai**

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

Keadaan topografi Kabupaten Serdang Bedagai bervariasi mulai dari datar, bergelombang, berbukit, bergunung dan terjal. Jika diperinci menurut kemiringan dapat dibedakan atas :

- Datar dengan kemiringan 0-3% seluas 118.825 ha atau 45,89%;
- Agak bergelombang dengan kemiringan 8-15% seluas 51.182 ha atau 19,77%;





- c. Bergelombang dengan kemiringan 15-30% seluas 62.773 ha atau 24,24%;
- d. Berbukit, pegunungan dan terjal dengan kemiringan di atas 30% seluas 26.245 ha atau 10,14%.

Uraian mengenai penyebaran kemiringan lahan tersebut di setiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Kemiringan Lahan**

No	Kecamatan	Luas (ha)					Total Luas (ha)
		0-2 %	2-8 %	9-15 %	26-40 %	41-60 %	
1	Bandar Khalipah	7,602.32	0,00	15,09	0,00	0,00	7,617.41
2	Bintang Bayu	0.00	0,00	4,411.26	2,239.20	0,00	6,650.46
3	Dolok Masihul	3,479.00	0.08	15,951.59	0,00	0,00	19,430.66
4	Dolok Merawan	0.00	8,870.77	4,184.84	0.00	0.00	13,055.61
5	Kotarih	0.00	0.00	26,23	8,246.87	0.00	8,273.10
6	Pantai Cermin	8,466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.14
7	Pegajahan	2,787.74	2,425.99	4,682.30	0.00	0.00	9,896.03
8	Perbaungan	10,410.42	1,461.50	0.00	0.00	0.00	11,871.92
9	Sei Bamban	8,221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.84
10	Sei Rampah	6,880.05	5,134.16	9,329.23	0.00	0.00	21,343.44
11	Serba Jadi	1,540.70	0.00	4,121.86	1,087.50	0.00	6,750.06
12	Silinda	0.00	0.00	0.00	5,404.89	0.00	5,404.89
13	Sipispis	228.43	1,337.82	15,933.60	2,274.22	2,179.09	21,953.16
14	Tanjung Beringin	6,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.72
15	Tebing Syahbandar	795.37	734.91	12,731.73	0.00	0.00	14,271.00
16	Tebing Tinggi	7,350.08	2,135.42	5,007.91	0.00	0.00	14,493.42
17	Teluk Mengkudu	6,633.40	717.66	291.77	0.00	0.00	7,642.83

*Sumber: Peta Kesesuaian Lahan dan Penentuan Komoditi Unggulan Kab. Serdang Bedagai 2008,  
Bappeda Kab. Serdang Bedagai*

#### **2.1.1.4. Geologi**

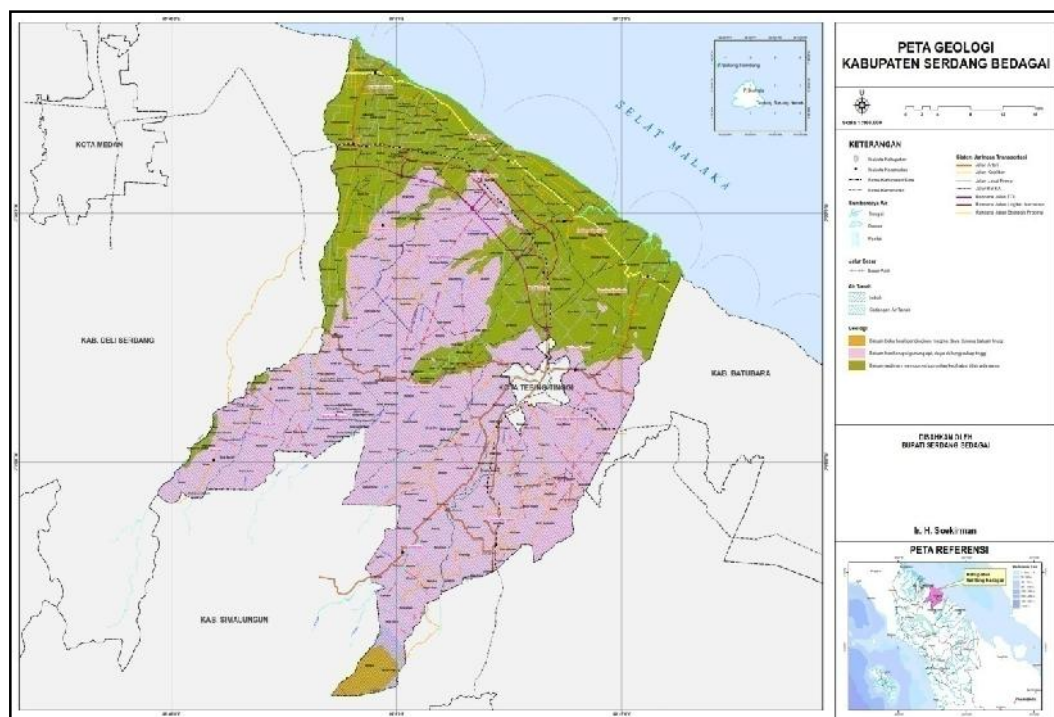
Secara geologi struktur tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

1. *Ordo Inceptisol* yang menyebar hampir di seluruh kecamatan;
2. *Ordo Oxisol* terdapat di Kecamatan Dolok Masihul, Sipispis, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi dan Serbajadi;

3. *Ordo Ultisol* berada di Kecamatan Kotarih, Silinda, Sipispis, Bintang Bayu dan Serbajadi;
4. *Ordo Entisol* di Kecamatan Pantai Cermin, Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu;
5. *Ordo Histosol* di Kecamatan Bandar Khalifah, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin dan Perbaungan.

Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 3 (tiga) jenis batuan yang terletak di 3 (tiga) daerah bagian yaitu:

- Batuan beku hasil pendinginan magma, daya dukung batuan tinggi tersebar di daerah pesisir seperti di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei Bamban, Bandar Khalifah dan Tebing Tinggi;
- Batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi tersebar di Kecamatan Pegajahan, Sei Rampah, Serba Jadi, Bintang Bayu, Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar, Dolok Merawan dan Sipispis;
- Batuan sedimen dengan propositas kecil atau tidak ada yang sama, tersebar di sebagian Kecamatan Sipispis. Sebaran jenis batuan di Kabupaten Serdang Bedagai disajikan dalam **Gambar 2.3**.



**Gambar 2.3**

**Peta Geologi Kabupaten Serdang Bedagai**

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

### 2.1.1.5.Hidrologi

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 5 (lima) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Ular, DAS Sialang Buah, DAS Bedagai, DAS Padang dan DAS Hapal dengan 24 buah sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Padang dan Sungai Bah Hilang dengan panjang masing-masing 25 km sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Mendaris dan Sungai Sei Rampah dengan panjang masing-masing 5 km. Sungai dengan permukaan terlebar juga Sungai Padang yakni 75 m sedangkan Sungai dengan permukaan paling kecil adalah Sungai Hitam 7 m. Di samping itu, sungai dengan debit maximum terbesar juga Sungai Padang yakni 89,4 m<sup>3</sup>/dtk sedangkan sungai dengan debit maximum paling kecil adalah Sungai Hitam yakni 3,33 m<sup>3</sup>/dtk. Gambaran lebih jelas mengenai kondisi 24 sungai besar dan kecil di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Inventarisasi Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015**

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m <sup>3</sup> /dtk)	
			Permukaan	Dasar		Max	Min
					0,00-1,00 s/d 1,00-2,50		
1	Sungai Ular	17000	60	55	1,00 s/d 1,30	39.68	19.5
2	Sungai Belutu	22800	17	15	1,00 s/d 1,50	14	7
3	Sungai Martebing	17000	13	11	0,80 s/d 1,20	6	3.1
4	Sungai Padang	25000	75	74	1,00 s/d 2,00	89.4	42.5
5	Sungai Hitam	10000	7	5	0,70 s/d 1,15	3.33	1.5
6	Sungai Buaya	15000	35	33	0,80 s/d 1,20	21.42	10.25
7	Sungai Lagunda	10000	12	10	1,00 s/d 1,50	6.88	3
8	Sungai Rampah	5000	20	18	1,00 s/d 1,50	35.63	17.2
9	Sungai Bedagai	10000	15	13	1,00 s/d 1,50	43.75	21.5
10	Sungai Rambung	12000	12	10	0,80 s/d 1,50	44.28	22.2
11	Sungai Lubuk Laban	8000	10	8	0,80 s/d 1,15	4.39	2
12	Sungai Mendaris	5000	13	11	0,85 s/d 1,54	9.32	4.5
13	Sungai Sibarau	18000	12	10	0,75 s/d 1,45	8.47	3.25
14	Sungai Kerapuh	12000	17	15	0,90 s/d 1,30	14.08	7
15	Sungai Sei Serimah	6000	15	13	0,95 s/d 1,20	7.53	3.5
16	Sungai Partuntungan	10800	12	10	0,80 s/d 1,15	16.5	8.25
17	Sungai Pangkalan	18000	8	6	0,70 s/d 1,30	17.5	8.5
18	Sungai Pegatalan	6300	10	8	0,75 s/d 1,25	31.5	15.35
19	Bah Hisam	15000	17	15	0,70 s/d 1,10	9.36	4.5
20	Bah Belading	17000	8	6	1,00 s/d 1,30	4.43	2.3
21	Bah Karal	12000	15	13	0,80 s/d 1,50	11.27	5.5
22	Bah Hilang	25000	12	10	0,95 s/d 1,75	11.88	5.5
23	Bah Sumbu	12000	15	13	0,85 s/d 1,50	11.52	5.75
24	Bah Tonang	12500	18	15	0,80 s/d 1,45	12.07	6.2

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

Kondisi sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air minum, pengairan (irigasi), pengendalian banjir, dan menunjang kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan air tawar, mengenai potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sumber Air minum yang akan dikelola oleh PDAM dengan sumber air dari sungai Ular;
- Mengairi daerah persawahan seluas 35.631 Ha yang terdiri dari 22.755 Ha luas sawah yang beririgasi teknis dan setengah teknis, dan sawah yang tidak dialiri dengan irigasi teknis seluas 12.876 Ha. Dan dapat berpotensi sebagai lumbung padi Sumatera Utara dan nusantara. Berdasarkan hasil kajian potensi kawasan sungai jaringan irigasi panjang kanan, kiri dan saluran tanah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 maka panjang irigasi 145.670 M dengan kondisi baik 5.679 M, kondisi rusak ringan 4.733 M, dan rusak berat 80.417 M dari total luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Belawan – Ular – Padang;
- Sebagai sumber air untuk perikanan darat di Kecamatan Perbaungan, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, Dolok Merawan, Sipispis, Silinda, Bintang Bayu, Kotarih dan Pantai Cermin;
- Memiliki Air terjun di kecamatan Dolok Merawan dan kecamatan Sipispis.

Selain itu, terdapat 5.925,05 ha daerah rawa/gambut yaitu Daerah Rawa Belidahan di Kecamatan Sei Rampah, Daerah Rawa Kayu Besar di Kecamatan Bandar Khalipah, Daerah Rawa Kendit di Kecamatan Tebing Tinggi dan Daerah Rawa Bogak Besar di Kecamatan Teluk Mengkudu.

**Tabel 2.4**  
**Daftar Inventarisasi Rawa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015**

No	Nama Rawa/Gambut	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m3)	Kedalaman (m)	Pemanfaatan
1	DR Belidahan	Desa Cempedak Lobak Kec. Sei Rampah	1414.97	1768.71	1-1.5	Sebahagian ditanami sawit, sebahagian lahan tidur
2	DR Bogak Besar	Desa Boga Besar Kec. Teluk Mengkudu	450.08	292.55	0.5-0.8	Persawahan pasang surut
3	DR Kendit	Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi	60	72	1-1.5	Tidak dimanfaatkan
4	DR Kayu Besar	Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah	4000	2400	0.5-0.7	Persawahan pasang surut dan irigasi

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

#### **2.1.1.6. Klimatologi**

Secara klimatologi, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa uap air dan hujan. Sedangkan dari bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari Selatan Tenggara menciptakan musim kemarau dengan sedikit uap air.

Menurut BMKG Stasiun Pengamatan Sampali yang terdapat pada Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2016, menunjukkan rata-rata kelembaban udara per bulan sekitar 83%, curah hujan berkisar antara 74 sampai dengan 489 mm per bulan dengan periodik tertinggi pada bulan Desember, hari hujan per bulan berkisar 4-24 hari dengan periode hari hujan yang besar pada bulan November. Rata-rata kecepatan angin berkisar 2,5 m/dt dengan tingkat penguapan sekitar 3,9 mm/hari. Rata-rata temperatur udara per bulan minimum 23,8<sup>0</sup> C dan maksimum 32,1<sup>0</sup> C.

### **2.1.1.7. Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan**

#### **a. Jenis Tanah**

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sangat bervariasi sebagai berikut:

- ❖ Alluvial, Regosol dan Organosol
- ❖ Hidromorfik Kelabu dan Glei Humus
- ❖ Andosol Coklat
- ❖ Latosol Coklat
- ❖ Podsolik Coklat Kekuningan
- ❖ Podsolik Merah Kekuningan
- ❖ Litosol, Podsolik dan Regosol

#### **b. Penggunaan Lahan**

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 telah ditetapkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Serdang Bedagai yang sekaligus merupakan penetapan terhadap kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

### **Kawasan Lindung**

Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten):

#### **1. Kawasan hutan**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No. 41 Tahun 1999).

Berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, bahwa di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat kawasan hutan seluas ± 9.685 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.



**Tabel 2.5**  
**Kawasan Hutan di Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Status Kawasan	Luas Lahan (Ha)	Lokasi
1	Hutan Lindung	± 5.534 Ha	Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah dan Sipispis
2	Hutan Produksi	± 4.086 Ha	Kecamatan Kotarih dan Bintang Bayu
3	Hutan Produksi Tetap	± 65 Ha	Kecamatan Pantai Cermin
Jumlah		± 9.685Ha	

Sumber : SK Menhut 579/Menhut - II/2014

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki hutan kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.589/Menhut-II/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 200 Ha sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan Desa Gudang Garam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pembangunan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai direncanakan seluas 1.295 ha yang berlokasi di Kecamatan Kotarih dengan seluas 689,5 ha dan Kecamatan Sipispis dengan luas 605,5 ha.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki kawasan bergambut sedangkan kawasan resapan air di Kabupaten Serdang Bedagai telah disatukan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi meliputi Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sipispis, Kotarih, dan Bintang Bayu serta di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai sempadan sungai dan kawasan sekitar bendungan/danau atau waduk.

Kawasan sempadan pantai adalah wilayah tertentu sepanjang yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki pantai sepanjang  $\pm 55$  km yaitu pantai sebelah Timur Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Mengingat kapasitas pantai yang hanya  $\pm 55$  km maka direncanakan adanya sempadan pantai dengan bentuk mengikuti bentuk fisik pantai. Lebar sempadan pantai bervariasi, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan pada Kecamatan Pantai Cemin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah.

Untuk kawasan sempadan sungai, berdasarkan hasil kajian potensi sungai maka luas kawasan sempadan sungai kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah 6.077 Ha (3,198 % dari total luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), yang meliputi sempadan sungai Ular, sungai Buaya, sungai Padang, sungai Belutu, sungai Bedagai, sungai Rampah, sungai Bah Hapal, sungai Martebing, sungai Baungan, sungai Bane, dan sungai kecil lainnya.

Sedangkan kawasan sempadan bendungan berada di sekitar bendungan Sungai Ular, di Kecamatan Serbajadi; Kawasan sempadan waduk/situ dalam ukuran kecil yang merupakan genangan air dan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat rekreasi seperti memancing di Kecamatan Dolok Masihul dan Bintang Bayu serta situ Lau Dendang di Kecamatan Sei Rampah.

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan Cagar Budaya yang ada di kabupaten Serdang Bedagai antara lain: Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin; Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan; Masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin;

Bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin; Bangunan kuno di lahan perkebunan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai; Pura Bali di Kecamatan Pegajahan; Bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pegajahan; dan Bangunan Kantor Bupati Serdang Bedagai/ex Kantor Camat Sei Rampah.

5. Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai berada pada Kawasan Pulau Berhala yang diarahkan sebagai Kawasan konservasi penyu, terumbu karang, jenis burung migran. Di kawasan ini juga direncanakan sebagai kawasan wisata bahari yang berwawasan lingkungan (*Ecomarinetourism*) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2005.

### **Kawasan Budidaya**

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan peternakan. Luas pertanian lahan basah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 40.598 ha (21,36% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan untuk pertanian lahan kering ditetapkan seluas 2.864 ha juga diarahkan tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peternakan dibedakan berdasarkan jenis hewan yang dibudidaya. Selain itu, telah dikembangkan juga Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan.

2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan pada tahun 2013 s/d 2033 adalah 101.689 ha yang terdistribusi di seluruh kecamatan dengan beragam jenis komoditi seperti kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kemiri, pinang, pala, aren dan sagu.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari wilayah dalam konsep kerjasama pengembangan Agromarinepolitan atau Kawasan Minapolitan sesuai Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 20/523/TAHUN 2014 menetapkan 6 (enam) kecamatan sebagai Kawasan Minapolitan pada 13 (tiga belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan penggerak kegiatan utama terdiri dari 5 (lima) lokasi Minapolitan Perikanan Budidaya dan 1 (satu) Kecamatan Perikanan Tangkap. Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan dan perikanan tangkap di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas :

- Kawasan minapolitan budidaya air tawar di Kecamatan Perbaungan (Kel. Tualang, Desa Kota Galuh), Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Kuta Baru, Desa Paya Lombang), Kecamatan Tebing Syahbandar (Desa Penggalan, Desa Penggalan, Desa Paya Pasir), Kecamatan Dolok Masihul (Desa Dolok Manampang) dan Kecamatan Serba Jadi (Desa Kelapa Bajohom).
- Kawasan minapolitan budidaya air payau di Kecamatan Pantai Cermin (Desa Kuala Lama, Desa Kota Pari, Desa Pantai Cermin Kiri, Desa Lubuk Saban), Kecamatan Teluk Mengkudu (Desa Sentang, Desa Sialang Buah, Desa Bogak Besar) dan Kecamatan Bandar Khalifah (Desa Kayu Besar).
- Kawasan minapolitan Perikanan Tangkap di Kecamatan Teluk Mengkudu (PPI Sialang Buah, Desa Sialang Buah, Desa Pekan Sialang Buah, Desa Bogak Besar, Desa Sentang, Desa Pasar Baru).

#### 4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan seperti : Mineral Batuan dan Non Batuan di Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Merawan, Silinda dan Pantai Cermin.

#### 5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan khusus dan pergudangan dalam sentra industri dan kawasan industri.

- Industri Besar : Industri CPO di Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Dolok Masihul, Serbajadi, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Dolok Merawan dan Silinda; industri pengolahan kayu di Kecamatan Tebing Syahbandar, dan Tebing Tinggi; Industri pengolahan ikan dan pakan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Pantai Cermin dan Tebing Tinggi; Industri karet di Kecamatan Dolok Merawan, Sipispis, Kotarih dan Sei Bamban; Kawasan industri Sei Bamban (MP3EI) di Kecamatan Sei Bamban; Kawasan industri terpadu di Kecamatan Tanjung Beringin
- Industri Menengah : Industri batu bata di Kecamatan Perbaungan, Sei Rampah, Pegajahan, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin; Industri tapioka di Kecamatan Tebing Syahbandar dan Dolok Masihul; Industri padi di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalipah, Tanjung Beringin, Sei Bamban; Industri furnitur kayu di Kecamatan Perbaungan, Tebing Syahbandar dan Bintang Bayu; Industri pengolahan logam di Kecamatan Teluk Mengkudu
- Industri Kecil dan Rumah Tangga : Agroindustri dan kerajinan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Syahbandar; Industri alat pembersih rumah di Kecamatan Sei Rampah dan Tanjung Beringin; Industri makanan ringan di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Tebing Syahbandar, Pantai Cermin, Sei Rampah dan Teluk Mengkudu; Industri tahu/tempe di Kecamatan Dolok Masihul, Sei Rampah, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin; Industri kerajinan anyaman di Kecamatan Pantai Cermin, Serbajadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Sei Bamban, Bintang bayu, Sipispis, Dolok Masihul dan Bandar Khalipah; Industri gula merah di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kotarih dan Bintang Bayu; Industri pengeringan ikan (ikan asin) di Kecamatan Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah dan Pantai Cermin.
- Industri Khusus dan Pergudangan.  
Peruntukan industri khusus dan pergudangan lokasinya dapat dikecualikan atau berada diluar kawasan industri. Industri khusus adalah jenis industri yang memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke

pasar. Industri khusus dan pergudangan dapat berlokasi dilokasi bahan baku atau jalur pelayaran dan pemasarannya. Penetapan jenis industri khusus dan pergudangan di Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai.

#### 6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai dibedakan atas:

- Pariwisata budidaya di Kecamatan Perbaungan, Tanjung Beringin, Pantai Cermin dan Sei Rampah
- Pariwisata alam di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Sipispis, Dolok Merawan dan Tanjung Beringin

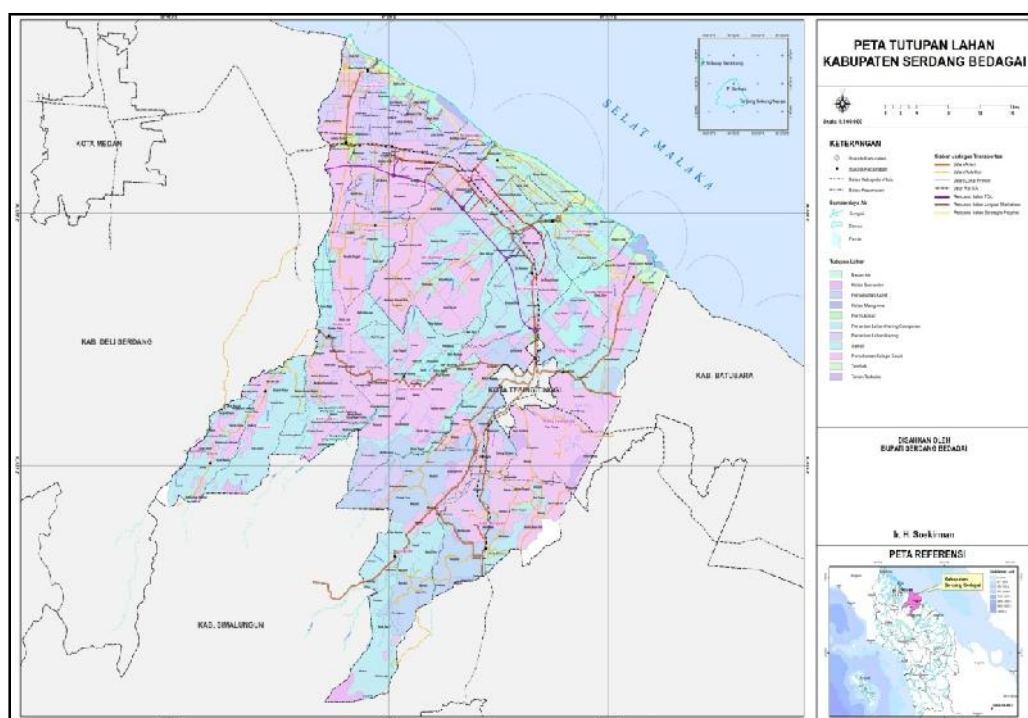
#### 7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan berlokasi di ibukota kecamatan dan merupakan kawasan pusat-pusat pelayanan sedangkan permukiman perdesaan berlokasi di luar kawasan pusat-pusat pelayanan.

#### 8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya antara lain adalah kawasan pertahanan dan keamanan, pusat pemerintahan dan perkantoran, kawasan pendidikan dan rekreasi.

Adapun peta tutupan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Gambar 2.4** berikut ini.





---

**Gambar 2.4****Peta Tutupan Lahan Kabupaten Serdang Bedagai**

*Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai*

---

**2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah****2.1.2.1. Kawasan Budidaya**

Berdasarkan letak wilayah, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki beberapa keuntungan strategis (*hinterland*) terkait pengembangan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang
2. Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang memiliki panjang 61,8 km dengan 5 (lima) pintu keluar dan 4 (empat) diantaranya berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun
4. Pengembangan pelabuhan HUB Internasional Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara
5. Pengembangan kawasan wisata Geopark Kaldera Toba

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033, berdasarkan keuntungan strategis wilayah tersebut di atas Kabupaten Serdang Bedagai memiliki rencana struktur ruang sebagai berikut:

1. Rencana Sistem Perkotaan
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota antara lain : Kota Kec. Sei Rampah dan Kota Kec. Perbaungan;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan ada 5 kecamatan yaitu Kota Kec. Dolok Masihul, Kota Kec. Tebing Tinggi, Kota Kec. Tanjung Beringin, Kota Kec. Sei Bampan dan Kota Kec. Kotarih;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu Kota Kec. Teluk Mengkudu, Kota Kec. Silinda, Kota Kec.



Bintang Bayu, Kota Kec. Serbajadi dan Kota Kec. Sipispis, Kota Kec. Pantai Cermin, Kota Kec. Pegajahan, Kota Kec. Bandar Khalipah, Kota Kec. Tebing Syahbandar, Kota Kec. Dolok Merawan.

**Tabel 2.6****Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai**

<b>No</b>	<b>Sistem perkotaan</b>	<b>Kota Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pelayanan</b>	<b>Fungsi Prioritas yang Diarahkan</b>	<b>Kebutuhan Sistem Pengembangan</b>
1.	PKL	<b>Sei Rampah</b>	Seluruh wilayah kabupaten	Pengembangan fungsi kota Sei Rampah sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pemerintahan dan Perkantoran</li> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan pusat pemerintahan terpadu</li> <li>- Utilitas Perkotaan</li> <li>- Hutan Kota</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Pusat Perbelanjaan dan Pasar</li> <li>- Terminal type C</li> </ul>
2.	PPL	<b>Teluk Mengkudu</b>	wilayah Kecamatan	Pengembangan fungsi kota Teluk Mengkudu sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Kawasan Minapolitan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.</li> <li>- Kawasan wisata bahari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPI</li> <li>- Cold Storage</li> <li>- Pasar Ikan</li> <li>- Pelabuhan Pengumpan Lokal</li> </ul>
3.	PKL	<b>Perbaungan</b>	seluruh wilayah kabupaten	Pengembangan fungsi kota Perbaungan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> <li>- Industri berbasis Pertanian dan Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitas Perkotaan</li> <li>- Pusat Perbelanjaan dan Pasar</li> <li>- Terminal Type C</li> </ul>
4.	PPL	<b>Pantai Cermin</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Pantai Cermin sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan</li> <li>- Pusat Kawasan Wisata Bahari</li> <li>- Kawasan pendukung minapolitan perikanan tangkap, budi daya air payau, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pendidikan Perikanan dan Kelautan</li> <li>- Pelabuhan Pengumpan regional</li> <li>- Prasarana dan sarana pariwisata</li> </ul>



No	Sistem perkotaan	Kota Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas yang Diarahkan	Kebutuhan Sistem Pengembangan
5.	PPL	<b>Pegajahan</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Pegajahan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan</li> <li>- Pusat Pendidikan bertaraf internasional, sarana olahraga, sarana budaya serta rekreasi. Sentra produksi rumahan/ pangan rumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pesantren Internasional</li> <li>- Kebun Binatang</li> <li>- Gedung Olah Raga</li> </ul>
6.	PPK	<b>Dolok Masihul</b>	Kecamatan Serbajadi, Bintang Bayu dan Sipispis	Pengembangan fungsi kota Dolok Masihul sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Pengolahan hasil perkebunan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> <li>- Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitas Perkotaan</li> <li>- Pasar</li> <li>- Terminal Type C</li> </ul>
7.	PPL	<b>Serbajadi</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Serba Jadi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan hasil Produksi perkebunan</li> <li>- Sentra produksi tanaman pangan dan peternakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>
8.	PPL	<b>Bintang Bayu</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Bintang Bayu sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Produksi Perkebunan.</li> <li>- Sentra produksi peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>
9.	PPL	<b>Sipispis</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Sipispis sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Produksi tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> </ul>
10	PPK	<b>Tebing Tinggi</b>	Kecamatan Tebing syahbandar dan Dolok Merawan	Pengembangan fungsi kota Kecamatan Tebing Tinggi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sentra produksi tanaman pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitas Perkotaan</li> <li>- Industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan</li> </ul>



No	Sistem perkotaan	Kota Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas yang Diarahkan	Kebutuhan Sistem Pengembangan
11	PPL	<b>Tebing Syahbandar</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Tebing Syah Bandar sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Produksi tanaman pangan dan peternakan;</li> <li>- Pengolahan Kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Industri Kayu</li> </ul>
12	PPL	<b>Dolok Merawan</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Dolok Merawan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>
13	PPK	<b>Tanjung Beringin</b>	Kecamatan Bandar Khalipah	Pengembangan fungsi kota Tanjung Beringin sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> <li>- Kawasan Industri Terpadu</li> <li>- Kawasan Pusat Perikanan Tangkap (Minapolitan Tangkap)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPI</li> <li>- Cold Storage</li> <li>- Pelabuhan Pengumpan regional</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Kawasan Industri Terpadu</li> <li>- Terminal Type B</li> </ul>
14	PPL	<b>Bandar Khalipah</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Bandar Kalipah sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra produksi tanaman pangan</li> <li>- Kawasan Pendukung Minapolitan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Payau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPI</li> <li>- Cold Storage</li> </ul>
15	PPK	<b>Kotarih</b>	Kecamatan Silinda	Pengembangan fungsi kota Kotarih sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Sentra Produksi Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitas Perkotaan</li> </ul>
16	PPL	<b>Silinda</b>	wilayah kecamatan	Pengembangan fungsi kota Silinda sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>- Sentra Produksi Perkebunan dan Peternakan</li> <li>- Industri holtikultura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>
17	PPK	<b>Sei Bamban</b>	Kecamatan Sei Bamban	Pengembangan fungsi kota Sei Bamban sebagai:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitas Perkotaan</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>



No	Sistem perkotaan	Kota Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas yang Diarahkan	Kebutuhan Sistem Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> <li>- Kawasan Industri (klaster karet)</li> <li>- Sentra Produksi Tanaman Pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Industri Sei Bambi</li> </ul>

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

## 2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

- Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan berdasarkan kewenangan seperti jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan berdasarkan fungsi seperti jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan;
- Rencana Pengembangan Terminal Penumpang yaitu rencana pembangunan Terminal Tipe C di Kec. Dolok Masihul, Kec. Sei Rampah dan Kec. Tanjung Beringin;
- Rencana Pengembangan Sub Terminal di setiap ibukota kecamatan;
- Rencana Pengembangan Sarana Angkutan Umum.

Sedangkan untuk rencana pengembangan terminal di Kabupaten Serdang Bedagai mencakup :

- Rencana Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan serta Tanjung Beringin.
- Pengembangan sub terminal angkutan umum di setiap ibukota Kecamatan untuk menghubungkan antar ibukota Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai

Di samping itu, transportasi kereta api di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini dalam kondisi baik dan melayani hingga ke Kota Pematang Siantar dan Kota Rantau Prapat ke arah timur dan Kota Binjai ke arah barat. Adapun stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang akan ditingkatkan pengembangannya yaitu Stasiun Perbaungan, Stasiun Sei

Rampah, Stasiun Teluk Mengkudu dan Stasiun Sei Bambi sebagai stasiun yang berfungsi untuk menaik-turunkan penumpang dan stasiun pembantu yaitu Stasiun Pasar Bengkel, Stasiun Teluk Mengkudu dan Stasiun Sei Bambi.

Semua stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dimungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan moda transportasi perkeretaapian sebagai dampak keberadaan Bandara Kuala Namu.

### 3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Serdang Bedagai diutamakan kepada pengembangan pelabuhan – pelabuhan pengumpan Regional dan lokal serta pelayaran rakyat sebagai penunjang pergerakan melalui laut bagi wilayah di sepanjang pantai yang memiliki potensi ekonomi yaitu:

- a. Pelabuhan Tanjung Beringin dan Pantai Cermin, dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan regional
- b. Pelabuhan Sialang buah dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal

### 4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

- a. Pembangkit Listrik yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Serdang Bedagai dikembangkan pembangkit listrik secara parsial dengan memanfaatkan potensi yang ada seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dikembangkan di wilayah yang memiliki banyak sungai antara lain aliran Sungai Buaya, Sungai Ular, Sungai Bane dan sungai di Kecamatan Sipispis, Kotarih, Bintang Bayu dan Silinda;
- b. Jaringan Energi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini masih menggunakan jaringan transmisi SUTT (150 kilovolt) dengan gardu di Kota Tebing Tinggi dan pengembangan jaringan pipa gas bumi nasional yaitu Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional Medan-Dumai-Duri.



### 2.1.2.2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah Pulau Berhala yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang Pertahanan Keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi merupakan bagian dari kawasan prioritas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa Kawasan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi, antara lain :

- a. Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar, yang merupakan bagian kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi;
- b. Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar, yang merupakan bagian kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi;

Sedangkan kawasan strategis di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

#### 1. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

**Tabel 2.7**  
**Rencana Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	KAWASAN STRATEGIS	JENIS	TIPOLOGI	LOKASI
1	Pusat Kota Sei Rampah & Perbaungan	Kawasan strategis ekonomi	Potensi ekonomi cepat tumbuh	Kecamatan Sei Rampah dan Perbaungan
2	Pelabuhan Tanjung Beringin	Kawasan strategis ekonomi	Kawasan Kegiatan Eksport – import dan pelayaran	Kecamatan Tanjung Beringin
3	Kawasan Industri Terpadu	Kawasan strategis ekonomi	Prioritas pengembangan kawasan guna mendukung Kegiatan di sektor industri, perdagangan, dan jasa secara terpadu.	Kecamatan Tanjung Beringin
4	Kawasan Mina Politan	Kawasan Strategis Ekonomi	Optimalisasi potensi SDA yang berbasis pada pemanfaatan potensi wilayah pesisir, perikanan dan kelautan.	Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar.
5	Kawasan Cepat Tumbuh akses	Kawasan Strategis	Potensi ekonomi cepat tumbuh	Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Sei



NO	KAWASAN STRATEGIS	JENIS	TIPOLOGI	LOKASI
	pintu tol Medan – Tebing Tinggi - Dumai	Ekonomi		Bamban, Tebing Syahbandar

Sumber:Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

## 2. Kawasan Strategis Kabupaten untuk Kepentingan Sosial Budaya

**Tabel 2.8**  
**Rencana Kawasan Strategis Sosial dan Budaya**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	KAWASAN STRATEGIS	JENIS	TIPOLOGI	LOKASI
1	Kawasan Pendidikan bertaraf Internasional	Kawasan strategis sosial budaya	Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya	Kecamatan Pegajahan
2	Kawasan Pemerintahan	Kawasan Strategis Sosial Budaya	Prioritas pemanfaatan lahan untuk kawasan Pusat Pemerintahan dan pusat perkantoran dan menjadi peluang dalam optimalisasi fungsi kota Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten Serdang Bedagai	Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Teluk Mengkudu

Sumber:Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

## 3. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

**Tabel 2.9**  
**Rencana Kawasan Strategis Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	KAWASAN STRATEGIS	JENIS	TIPOLOGI	LOKASI
1	Kawasan Wisata Pantai	Kawasan strategis ekonomi dan Strategis sumber daya alam	Kawasan Wisata Pantai	Kec. Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu,
2	Sekolah Perikanan	Kawasan Strategis Sumber daya alam dan teknologi tinggi	Prioritas pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas SDM dengan penerapan teknologi	Kecamatan Pantai Cermin, Teluk Mengkudu,
3	Pembangkit Listrik Tenaga Sekam Padi, Tenaga Air Mikrohidro, Tenaga Angin	Kawasan strategis ekonomi/teknologi tinggi	Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi	Tenaga Sekam, di Kecamatan Sei Bamban, Tebing Tinggi, Serbajadi, Tenaga Mikrohidro di Kecamatan Silinda, Kotarih, Sipispis, Bintang Bayu Tenaga angin di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah,

Sumber:Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

## 4. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Tabel 2.10

## Rencana Kawasan Strategis Lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai

NO	KAWASAN STRATEGIS	JENIS	TIPOLOGI	LOKASI
1	Konservasi penyu dan terumbu karang	Kawasan strategis sumber daya alam	Sumber daya alam yang melindungi ekosistem laut	Pulau Berhala, Kecamatan Tanjung Beringin
2	Kawasan Pesisir	Kawasan strategis Lingkungan	Daerah berada di pesisir yang terkena abrasi laut	Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah
3	TPA Regional	Kawasan strategis Lingkungan	Mewujudkan kebersihan dan sanitasi lingkungan	Kecamatan Serba Jadi

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

**2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Secara umum, peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki wilayah rawan banjir sesuai dengan bencana alam yang dihadapi seperti banjir, puting beliung, tanah longsor dan gelombang pasang air laut.

- Kawasan rawan bencana banjir berada di wilayah pesisir dan kawasan perkotaan seperti di Kecamatan Sei Bamban, Perbaungan, Tebing Syahbandar, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Silinda, Sipispis, Tanjung Beringin, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Tebing Tinggi, Sei Rampah dan Bandar Khalipah.
- Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Kecamatan Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pegajahan, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Sipispis, Tanjung Beringin, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Sei Rampah dan Bandar Khalipah
- Kawasan bencana tanah longsor di Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi di wilayah Kecamatan yang memiliki kemiringan  $> 45^{\circ}$  dan jenis tanah tertentu. Kawasan-kawasan yang sering terjadi bencana longsor tersebut terletak di Kecamatan Dolok Merawan, Silinda, Sipispis dan Bintang Bayu.



- d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut dengan luas sekitar 12.400 ha terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah.

**Tabel 2.11**  
**Potensi Bencana Alam Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	KECAMATAN	POTENSI BENCANA			
		BANJIR	PUTING BELIUNG	TANAH LONGSOR	GELOMBANG PASANG AIR LAUT
1.	Sei Bamban	- Pon - Sei bamban - Gempolan - Suka Damai - Sei Buluh	- Pon - Sei Bamban - Penggalangan		
2.	Perbaungan	- Pematang - Sijonam - Sei Buluh - Sei Sijenggi - Bengkel - Lidah Tanah - Tualang - Citaman Jernih	- Pematang Tatal - Cinta Air - Lubuk Cemara - Pematang Sijonam		- Sei Naga Lawan
3.	Tebing Syahbandar	- Paya Pasir - penggalan			
4.	Dolok Merawan	- Mainu Tengah	- Mainu Tengah - Pabatu - Afd. VI dolok Hilir	- Dolok Merawan	
5.	Dolok Masihul	- Pekan D. Masihul - Martebing - Bantan - Pekan Kamis - Batu 13 - Dolok Sagala - Bukit Cermin Hilir - Tegal Sari - Pardomuan - Dame - Malasori - Hutanauli	- Pekan Dolok Masihul		
6.	Silinda	- Pagar Manik - Kulasar		- Pagar Manik - Kulasar	
7.	Sipispis	- Sipispis - Marjanji - Buluh Duri - Sibarau	- Marjanji	- Sipispis	
8.	Tanjung Beringin	- Sukajadi - Tebing Tinggi - Pematang Cermal - Pematang Terang - Bagan Kuala	- Mangga Dua - Pematang Cermai - Bagan Kuala		- Bagan Kuala
9.	Pantai Cermin	- Dsn. II Kota Pari - Pantai Cermin Kanan - Kuala Lama - Lubuk Saban	- Ara Payung - Lubuk Saban - Pantai Cermin Kiri - Besar II terjun - Sementara - Pantai Cermin Kanan - Lubuk cemara - Kuala Lama - Cintaman		- Kota Pari - Pantai Cermin Kanan - Pantai Cermin Kiri - Kuala Lama - Lubuk Saban - Naga Kisar
10.	Bintang Bayu	- Sarang Ginting	- B. Pinang Lubu	- Marihat Dolok	



No.	KECAMATAN	POTENSI BENCANA			
		BANJIR	PUTING BELIUNG	TANAH LONGSOR	GELOMBANG PASANG AIR LAUT
		Hulu - Huta Durian - B. Pinang Hulu - Sigiling Kahean	- B. Pinang Kebun	- Huta Durian	
11.	Tebing Tinggi	- Bah Sumbu - Sei Periuk - Paya Lombang - Kota Baru - Paya Bagas - Naga Kesiangan - Bah Sidua-dua			
12	Sei Rampah	- Cempedak Lobang - Firdaus - Pematang Ganjang - P. Pelintahan - Silau Rakyat - Simpang Empat	- Firdaus - Silau Rakyat - Sei Rejo - Rampah - Pematang Ganjang - Pematang Pelintahan		
13	Bandar Khalipah	- Juhar - Gelam Sei Serimah - Bandar Tengah - Kayu Besar	- Gelam Sei Serimah - Kayu Besar		- Gelam Sei Serimah - Pekan Bandar Khalipah - Kayu Besar
14	Teluk Mengkudu	-	- Sialang Buah - Sentang - Bogak Besar - Pematang Kuala - Pematang Setrak		- Sialang Buah - Sentang - Bogak Besar - Pematang Kuala
15	Pegajahan	-	- Bingkat - Petuaran Hilir - Pegajahan		

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

#### 2.1.4. Kondisi Demografi

##### 2.1.4.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Kondisi dan perkembangan demografi berperan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki potensi yang strategis dalam penentuan kebijakan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 berjumlah 608.691 jiwa meningkat sebesar 2.324 jiwa dari tahun sebelumnya sebesar 606.367 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,38%. Komposisi jumlah penduduk laki – laki 305.513 jiwa dan perempuan 303.178 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 312 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk terbesar sebesar 871 jiwa/km<sup>2</sup> terdapat di Kecamatan Perbaungan sedangkan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Kotarih sebesar 97 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai per kecamatan dan kepadatan penduduk pada tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.12**.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai per Kecamatan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas(km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Kotarih	83,67	8.133	97
2.	Silinda	56,54	8.472	150
3.	Bintang Bayu	66,83	10.768	161
4.	Dolok Masihul	194,40	49.284	254
5.	Serbajadi	67,47	19.898	295
6.	Sipispis	220,52	32.182	146
7.	Dolok Merawan	141,70	17.306	122
8.	Tebing Tinggi	147,49	41.191	279
9.	Tebing Syahbandar	142,85	32.805	230
10.	Bandar Khalifah	82,59	25.238	306
11.	Tanjung Beringin	71,94	37.617	523
12.	Sei Rampah	214,65	64.864	302
13.	Sei Bambi	82,01	43.759	534
14.	Teluk Mengkudu	76,54	42.029	549
15.	Perbaungan	118,63	103.296	871
16.	Pegajahan	99,36	27.395	276
17.	Pantai Cermin	85,20	44.454	522
Jumlah		1.952,38	608.691	312

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

**Tabel 2.12** juga menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan masih tergolong sedang bahkan rendah. Penduduk yang banyak bertempat tinggal di pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Dolok Masihul tidak begitu padat karena luas wilayah ketiga kecamatan ini juga cukup besar. Di samping itu, secara umum pada tahun 2015, distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya semakin merata di Kabupaten Serdang Bedagai.



#### 2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jika dibandingkan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tidak begitu pesat bahkan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren menurun atau melambat. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 10.072 jiwa dengan rata-rata peningkatan sebesar 2.015 jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai per kecamatan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.

**Tabel 2.13**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai per Kecamatan dari Tahun 2011-2015**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kotarih	83,67	8.024	8.052	8.081	8.108	8.133
2.	Silinda	56,54	8.378	8.402	8.427	8.451	8.472
3.	Bintang Bayu	66,83	10.641	10.674	10.708	10.739	10.768
4.	Dolok Masihul	194,40	48.559	48.745	48.938	49.118	49.284
5.	Serba Jadi	67,47	19.671	19.729	19.790	19.846	19.898
6.	Sipispis	220,52	31.799	31.898	31.999	32.094	32.182
7.	Dolok Merawan	141,70	17.122	17.169	17.218	17.263	17.306
8.	Tebing Tinggi	147,49	40.533	40.702	40.876	41.039	41.191
9.	Tebing Syahbandar	142,85	32.386	32.493	32.605	32.708	32.805
10.	Bandar Khalifah	82,59	24.922	25.003	25.087	25.165	25.238
11.	Tanjung Beringin	71,94	37.097	37.231	37.368	37.497	37.617
12.	Sei Rampah	214,65	63.822	64.089	64.366	64.624	64.864
13.	Sei Bambi	82,01	43.083	43.256	43.436	43.604	43.759
14.	Teluk Mengkudu	76,54	41.394	41.557	41.725	41.883	42.029
15.	Perbaungan	118,63	100.857	101.481	102.126	102.729	103.296
16.	Pegajahan	99,36	27.026	27.121	27.219	27.310	27.395
17.	Pantai Cermin	85,20	42.105	43.599	43.903	44.189	44.454
	JUMLAH	1.952,38	598.619	601.201	603.872	606.367	608.691
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			0,713	0,431	0,444	0,413	0,41

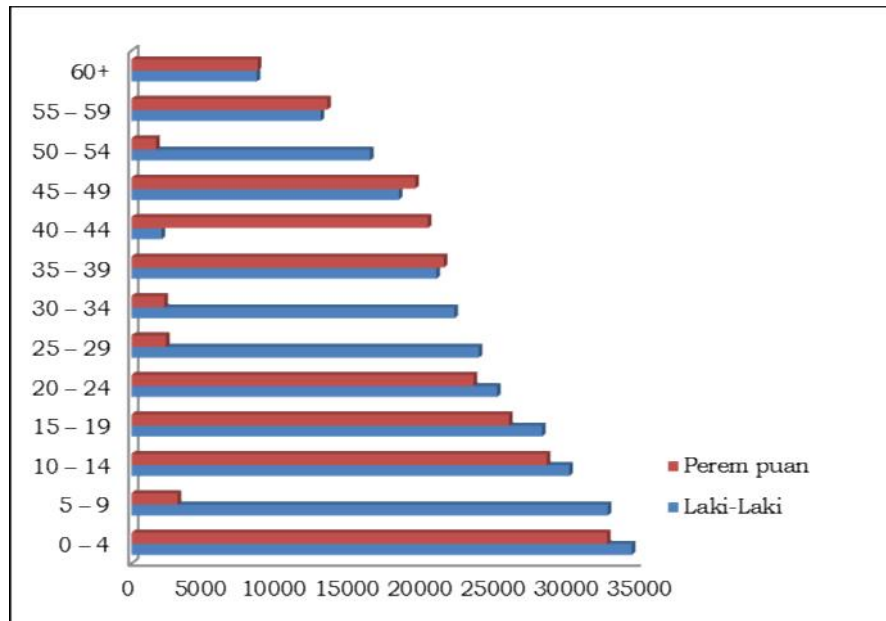
*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

Melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk di atas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil mewujudkan program keluarga berencana sebagai salah satu upaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, terkait dengan pengembangan Provinsi Sumatera Utara yakni adanya Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang dan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang memiliki panjang 61,8 km dengan 5 (lima) pintu keluar dan 4 (empat) diantaranya berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai akan berdampak pada bergesernya lokasi-lokasi perumahan keluar Kota Medan ke daerah-daerah *hinterland* diantaranya ke Kabupaten Serdang Bedagai. Keluarga-keluarga muda akan cenderung tinggal di luar kota untuk menyesuaikan daya beli terhadap rumah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai mungkin akan meningkat kembali di masa yang akan datang dengan banyak penduduk yang migrasi.

#### **2.1.4.3. Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur**

Selanjutnya penduduk Kabupaten Serdang Bedagai dapat dianalisis menurut kelompok umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Jika dilihat dari kelompok umur, pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Serdang Bedagai didominasi oleh penduduk pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) yakni sebesar 64,27%. Sisanya adalah penduduk usia muda (<15 tahun) sebesar 31,06% dan penduduk usia lanjut (>64 tahun) sebesar 4,67%. Untuk penduduk pada kelompok usia produktif, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cenderungimbang. Sementara itu, penduduk usia muda didominasi oleh penduduk laki-laki dan penduduk usia lanjut didominasi oleh penduduk perempuan.



**Gambar 2.5**

**Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur**

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab.Serdang Bedagai

**Tabel 2.14**

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2015**

No	Kelompok Umur	Komposisi Penduduk (jiwa)									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	0 – 4	33075	30888	34173	32172	35096	33259	34809	33037	34237	32546
2	5 – 9	33391	31698	31523	30359	32226	30933	32400	31071	32594	3135
3	10 – 14	31925	29951	31808	29831	30124	28629	29916	28425	29958	28413
4	15 – 19	28053	26173	29323	27070	28384	26295	28203	25971	28088	25819
5	20 – 24	24506	23642	24343	23217	25191	23585	24967	23424	25012	23403
6	25 – 29	24450	24447	23937	24280	24227	24068	23982	23725	23762	2351
7	30 – 34	22918	22853	22805	22948	22362	22752	22174	22559	22085	2243
8	35 – 39	20796	21261	20885	21370	20907	21314	20850	21273	20861	21363
9	40 – 44	20072	19979	20281	20245	20288	20186	20339	20209	2043	20275
10	45 – 49	17634	18721	17903	18972	17966	19069	18109	19229	18283	19413
11	50 – 54	15449	15263	11753	15825	15813	16044	16069	16371	16319	1668
12	55 – 59	11167	11134	7025	12014	12129	12384	12554	12913	12935	13384
13	60+	17950	22545	18568	22684	19210	23102	20031	23757	8565	8623
<b>JUMLAH</b>		<b>301386</b>	<b>298555</b>	<b>294327</b>	<b>300987</b>	<b>303923</b>	<b>301620</b>	<b>304403</b>	<b>301964</b>	<b>305513</b>	<b>303178</b>

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai

#### 2.1.4.4. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Struktur penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2011-2015 menunjukkan terjadinya peningkatan. Komposisi penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD mengalami penurunan dari 22,92% di tahun 2011, menjadi 21,05% di tahun 2015. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan.

Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat mengalami kemajuan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan kesadaran (*awereness*) akan arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan.

**Tabel 2.15**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut**  
**Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2011-2015**

No	Pendidikan	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak punya ijazah	22.92	22.37	20.61	21.05	21.05
2	Sekolah Dasar	27.14	26.17	28.39	27.12	27.12
3	SMP	22.85	22.52	23.84	24.01	24.01
4	SMU	24.06	25.27	23.97	24.8	24.8
5	Diploma I, II	0.56	0.27	0.49	0.27	0.27
6	Diploma III	0.62	0.67	0.59	0.53	0.53
7	Diploma IV/SI	1.86	2.72	2.14	2.22	2.22

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

Dari **Tabel 2.15** dapat dilihat bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah semakin menurun. Di sisi lain, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan SMP, SMU dan Diploma IV/SI semakin meningkat. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan Diploma I, II dan III semakin menurun karena semakin banyak penduduk yang lebih memilih pendidikan Diploma IV/SI daripada hanya sampai pada Diploma I, II ataupun III.

#### 2.1.4.5. Komposisi Penduduk Menurut Suku

Komposisi penduduk berdasarkan suku menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat diketahui bahwa penduduk Serdang Bedagai didiami oleh beragam suku diantaranya Melayu, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, Tapanuli, Dairi, Nias, Minangkabau, Jawa, Cina, Aceh dan lainnya. Lebih dari setengah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai bersuku Jawa seterusnya suku Tapanuli pada peringkat kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 80.842 orang sedangkan suku Melayu berada pada peringkat ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 54.194 orang sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010**

No	Suku	Jumlah
1	Melayu	54,194
2	Mandailing	27,671
3	Karo	6,615
4	Pakpak	317
5	Simalungun	35,951
6	Tapanuli	80,842
7	Dairi	38
8	Nias	910
9	Minangkabau	6,443
10	Jawa	327,740
11	Cina	8,351
12	Aceh	3,512
13	Lainnya	41,290
	Total	593,874

*Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS Kab. Serdang Bedagai*

#### 2.1.4.6. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Selanjutnya komposisi penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut juga diambil dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai mayoritas beragama Islam yakni sebanyak 83,74 persen diikuti oleh penduduk beragama Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Khonghucu dan Kepercayaan. Dengan pemeluk agama yang beragam ini, penduduk Kabupaten Serdang Bedagai dapat tetap hidup rukun dan damai serta saling menghargai satu sama lain terbukti dengan tidak pernah terjadinya konflik antar umat beragama di Kabupaten Serdang Bedagai. Komposisi penduduk Kabupaten Serdang Bedagai menurut agama dapat dilihat pada **Tabel 2.17** berikut ini.

**Tabel 2.17**  
**Komposisi Penduduk Menurut Agama Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK						
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONG HUCU	KEPERCAYAAN
1	PANTAI CERMIN	39,411	3,221	307	47	2,121	0	0
2	PERBAUNGAN	99,903	3,561	329	70	3,045	0	0
3	TELUK MENGKUDU	40,874	5,294	338	0	354	0	0
4	SEI RAMPAH	64,097	3,870	323	15	1,008	0	0
5	TANJUNG BERINGIN	33,293	6,505	353	1	141	0	0
6	BANDAR KHALIPAH	14,308	9,926	2,252	0	12	0	9
7	DOLOK MERAWAN	17,165	1,256	25	0	58	0	0
8	SIPISPIS	28,588	5,409	413	0	2	0	0
9	DOLOK MASIHL	39,571	9,763	1,093	7	292	7	0
10	KOTARIH	6,008	2,549	170	0	0	0	0
11	SILINDA	5,050	3,961	224	0	0	0	0
12	SERBAJADI	18,170	2,930	125	0	1	0	0
13	TEBING TINGGI	36,725	4,450	273	2	2	0	0
14	PEGAJAHAN	27,081	1,147	15	28	7	0	0
15	SEI BAMBAN	24,955	17,098	1,397	16	1,630	0	3
16	TEBING SYAHBANDAR	28,473	3,002	683	10	123	0	0
17	BINTANG BAYU	9,731	2,182	90	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		533,403	86,124	8,410	196	8,796	7	12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, 2016



## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang mencakup aspek menyeluruh serta lintas sektoral. Termasuk ke dalam evaluasi ini adalah yang menyangkut dengan evaluasi terhadap penyediaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Teknik Evaluasi Kinerja Makro (komprehensif) paling sederhana yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan daerah adalah dengan jalan membandingkan kondisi pembangunan sesudah rencana dilaksanakan dengan sebelumnya.

Indikator makro ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi atas dua tipe yakni PDRB atas dasar harga berlaku (perhitungan yang didasarkan pada harga-harga pada tahun perhitungan) dan PDRB atas dasar harga konstan (perhitungan yang didasarkan pada harga-harga pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan). Perhitungan PDRB dilakukan dengan melihat pendapatan yang dihasilkan berdasarkan lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai pada periode 2011-2015 menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, PDRB ADHB Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah Rp. 13.651 milyar, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 43,64 % sedangkan kontribusi terkecil dari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,012%.

Pada tahun 2015, nilai PDRB Kabupaten Serdang Bedagai atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat mencapai Rp 20.166 milyar. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 40,39% dibanding dengan 16 sektor lainnya. Disusul kemudian oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,53%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda Motor sebesar 14,72%, sektor konstruksi sebesar 10%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,33%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,98%, sektor real estate sebesar 2,69%, sektor jasa pendidikan sebesar 1,37% dan sektor lain yang memberikan kontribusi kurang dari 1%.

Struktur ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.18** berikut ini.

**Tabel 2.18**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Milyar)**

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5957	43.64	6480.6	43.23	7207.7	43.10	7636.9	41.42	8146.3	40.40
2	Pertambangan dan Penggalian	118.4	0.87	134	0.89	154.3	0.92	165.6	0.90	186.4	0.92
3	Industri Pengolahan	2717.7	19.91	2946.9	19.66	3177.6	19.00	3589.2	19.47	3938.5	19.53
4	Pengadaan Listrik dan Gas,	13.5	0.10	14.2	0.09	14.4	0.09	13.7	0.07	15.2	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.7	0.01	1.9	0.01	2.1	0.01	2.4	0.01	2.7	0.01
6	Konstruksi	1140.8	8.36	1350.9	9.01	1561.3	9.34	1773.9	9.62	2018.2	10.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1905.8	13.96	2070.4	13.81	2314.1	13.84	2650.6	14.38	2968.4	14.72
8	Transportasi dan Pergudangan	111.2	0.81	121.8	0.81	150.2	0.90	172.7	0.94	188.6	0.94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	396	2.90	439.8	2.93	487.4	2.91	551.2	2.99	601.2	2.98
10	Informasi dan Komunikasi	78.9	0.58	84.6	0.56	91.1	0.54	97.8	0.53	104.8	0.52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.6	0.47	73.4	0.49	85.8	0.51	96.1	0.52	108.1	0.54
12	Real Estate	324.5	2.38	345.5	2.30	424.9	2.54	483	2.62	543.7	2.70
13	Jasa Perusahaan	62.9	0.46	72.2	0.48	83.8	0.50	96.3	0.52	108.4	0.54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404.3	2.96	460.8	3.07	522.6	3.12	598.1	3.24	670.9	3.33
15	Jasa Pendidikan	186.6	1.37	203.5	1.36	227.8	1.36	255.8	1.39	276	1.37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.3	0.79	123.1	0.82	138.5	0.83	158.5	0.86	180.9	0.90
17	Jasa Lainnya	59.8	0.44	67.4	0.45	81.5	0.49	94.3	0.51	107.7	0.53
<b>PDRB ADHB</b>		<b>13651</b>	<b>100</b>	<b>14991</b>	<b>100</b>	<b>16725.1</b>	<b>100</b>	<b>18436.1</b>	<b>100</b>	<b>20166</b>	<b>100</b>

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

Dapat dilihat pada **Tabel 2.18** di atas bahwa sebenarnya telah terjadi pergeseran tren kontribusi untuk beberapa sektor pada struktur ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2011 sampai 2015. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin menurun sedangkan sektor konstruksi, jasa dan perdagangan atau sektor tersier semakin meningkat. Sementara itu, sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang berfluktuatif.

Jika dibandingkan dengan target PDRB ADHB sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 maka dapat dilihat pada **Tabel 2.19** bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian tertinggi di tahun 2015 sebesar 154,27%.

**Tabel 2.19**  
**Realisasi Capaian PDRB ADHB dari Target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Capaian (%)
2011	9.823,31	13.651	138,97
2012	10.635,52	14.991	140,95
2013	11.447,72	16.725,1	146,10
2014	12.259,93	18.436,1	150,38
2015	13.072,13	20.166	154,27

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2010, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serdang Bedagai juga mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Nilai PDRB Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011 hanya sebesar Rp. 12.780,1 milyar dan meningkat pada tahun 2015 mencapai Rp 15.841,7 milyar.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai, antara tahun 2011-2015, kontribusi terbesar juga berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai rata-rata 42,87% (berdasarkan harga konstan). Kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 18,88%. Secara umum sektor ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai adalah berasal dari sektor primer.

Uraian secara mendetail nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2011-2015, atas dasar harga konstan dituangkan dalam **Tabel 2.20** berikut ini.



**Tabel 2.20**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)**

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5627.9	44.04	5910.1	43.59	6189.1	43.14	6440.7	42.71	6791.4	42.87
2	Pertambangan dan Penggalian	106.2	0.83	113.8	0.84	123.1	0.86	131.7	0.87	139.2	0.88
3	Industri Pengolahan	2461.9	19.26	2624.7	19.36	2773.9	19.34	2891.1	19.17	2990.8	18.88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.9	0.11	15	0.11	15.6	0.11	16.6	0.11	17.9	0.11
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.6	0.01	1.7	0.01	1.8	0.01	1.9	0.01	2	0.01
6	Konstruksi	1074	8.40	1174.7	8.66	1271.7	8.86	1352.6	8.97	1434.2	9.05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1794.7	14.04	1909.6	14.08	2039.3	14.22	2182.5	14.47	2287.5	14.44
8	Transportasi dan Pergudangan	104.6	0.82	111.3	0.82	119.7	0.83	128.6	0.85	135.6	0.86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	380.2	2.97	405.2	2.99	426.9	2.98	458.4	3.04	478.8	3.02
10	Informasi dan Komunikasi	80.4	0.63	85.1	0.63	92.2	0.64	99.4	0.66	105.1	0.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	59.4	0.46	63.2	0.47	69	0.48	72.7	0.48	77.4	0.49
12	Real Estate	298.2	2.33	317.5	2.34	340.1	2.37	363.2	2.41	383.5	2.42
13	Jasa Perusahaan	59.4	0.46	63	0.46	67.4	0.47	72.2	0.48	76.2	0.48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	380.1	2.97	402.3	2.97	421.6	2.94	448.5	2.97	474.1	2.99
15	Jasa Pendidikan	178.8	1.40	188.6	1.39	205.2	1.43	218.4	1.45	231.6	1.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.2	0.81	112.2	0.83	122.4	0.85	131	0.87	139.9	0.88
17	Jasa Lainnya	55.6	0.44	60.9	0.45	66.6	0.46	71.6	0.47	76.5	0.48
<b>PDRB ADHK</b>		<b>12780.1</b>	<b>100</b>	<b>13558.9</b>	<b>100</b>	<b>14345.6</b>	<b>100</b>	<b>15081.1</b>	<b>100</b>	<b>15841.7</b>	<b>100</b>

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai*

Dari **Tabel 2.20** di atas dapat juga dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebelumnya memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai dan sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua, secara perlahan kontribusinya mengecil digantikan oleh peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan atau sektor tersier.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target PDRB ADHK sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 maka dapat dilihat pada **Tabel 2.21** bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan

dengan capaian tertinggi di tahun 2015 sebesar 255,66%. Walaupun demikian, penentuan target PDRB ADHK pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 masih menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 sedangkan angka realisasi capaian PDRB ADHK sudah menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.

**Tabel 2.21**  
**Realisasi Capaian PDRB ADHK 2010 dari Target RPJMD**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

Tahun	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Capaian (%)
2011	4.795,81	12.780,1	266,48
2012	5.108,02	13.498,0	264,25
2013	5.444,13	14.345,6	263,51
2014	5.806,16	15.081,1	259,74
2015	6.196,34	15.841,7	255,66

Untuk pertumbuhan kontribusi masing-masing sektor baik pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan. Sedangkan sektor konstruksi, jasa dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Meskipun demikian, ketiga sektor ini belum mampu melampaui besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan pada struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, struktur ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai masih berbasis primer.

Pertumbuhan kontribusi masing-masing sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.22** di bawah ini.



Tabel 2.22

**Pertumbuhan Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Sektor	Pertumbuhan	
		PDRB ADHB (%)	PDRB ADHK (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0.03	-0.07
2	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.07
3	Industri Pengolahan	-0.02	-0.02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	-0.24
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.08
6	Konstruksi	0.08	0.20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	0.03	0.05
8	Transportasi dan Pergudangan	0.05	0.15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.02	0.03
10	Informasi dan Komunikasi	0.05	-0.10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.05	0.15
12	Real Estate	0.04	0.13
13	Jasa Perusahaan	0.03	0.17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.01	0.12
15	Jasa Pendidikan	0.04	0.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.09	0.13
17	Jasa Lainnya	0.11	0.22

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai (diolah)*

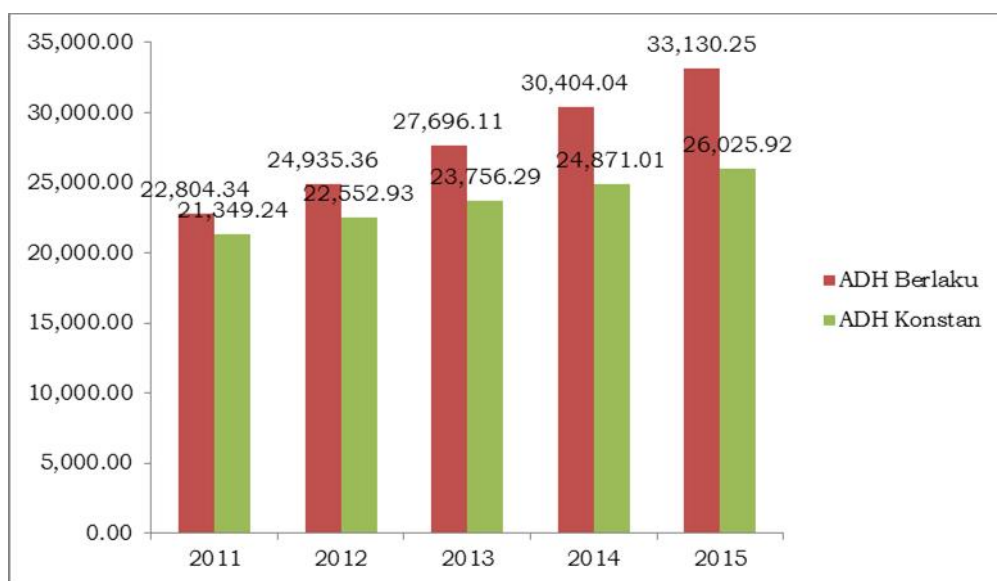
#### **2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita**

PDRB Per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

**Tabel 2.23**  
**PDRB Per kapita ADHB dan ADHK 2010 (Rp Ribu)/Tahun 2011-2015**

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2011	22.804,34	21.349,24
2012	24.935,36	22.552,93
2013	27.696,11	23.756,29
2014	30.404,04	24.871,01
2015	33.130,25	26.025,92

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai



**Gambar 2.6**  
**PDRB Per kapita ADHB dan ADHK 2010 (Rp Ribu)/Tahun 2011-2015**

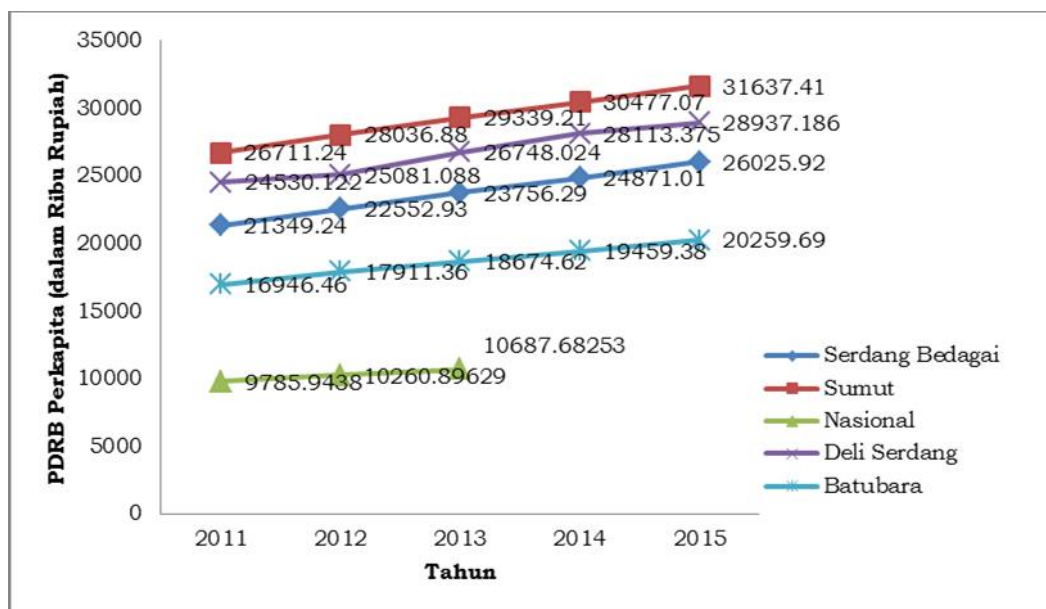
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Serdang Bedagai atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 22.804.340 pada tahun 2011 menjadi Rp. 33.130.250 pada tahun 2015. Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 9,79% per tahun. Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 9,79% per tahun. Sedangkan untuk pendapatan per kapita riil (harga konstan) pada tahun 2011 berada di level Rp. 21.349.240 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 26.025.920 di tahun 2015. Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 5,08% pertahun. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa lima tahun ke depan cenderung akan terus meningkat.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota sekitar, provinsi dan nasional, pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan) Kabupaten Serdang Bedagai berada di bawah provinsi tetapi di atas

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat Provinsi Sumatera Utara tetapi lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat nasional.

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, pendapatan per kapita Kabupaten Serdang Bedagai berada di bawah capaian Kabupaten Deli Serdang yang merupakan kabupaten induk Serdang Bedagai tetapi di atas capaian Kabupaten Batubara yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran baru di Provinsi Sumatera Utara selain Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian PDRB per kapita Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup baik untuk tingkat kabupaten/kota yang baru namun perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat sehingga dapat mempercepat peningkatan capaian PDRB per kapita ini di masa yang akan datang.



**Gambar 2.7**

**Perbandingan Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional Periode 2011-2015**

*Sumber: BPS Kab.Serdang Bedagai; BPS Kab. Batubara; BPS Kab. Deli Serdang; BPS Prov. Sumut; dan BPS Nasional*

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan target PDRB Per kapita ADHB sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 maka dapat dilihat pada **Tabel 2.24** bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian tertinggi di tahun 2015 sebesar 161,05%.

**Tabel 2.24**  
**Realisasi Capaian PDRB Per kapita ADHB dari Target RPJMD**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

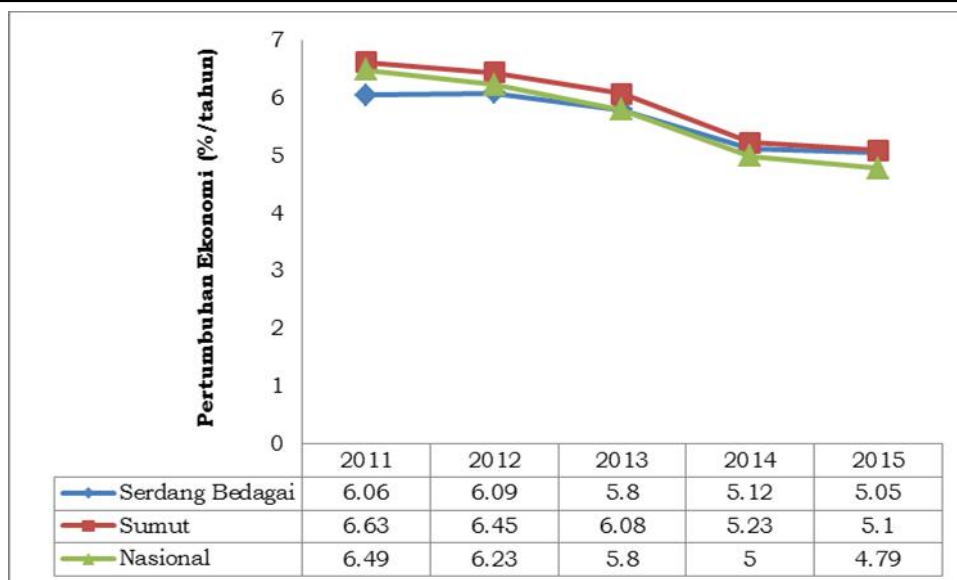
<b>Tahun</b>	<b>Target (Ribu Rp)</b>	<b>Realisasi (Ribu Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
2011	14.629,27	22.804,34	155,88
2012	15.519,69	24.935,36	146,94
2013	16.374,93	27.696,11	152,28
2014	17.197,04	30.404,04	161,05
2015	17.987,91	33.130,11	184,18

### **2.2.1.3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Tingkat keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi ini juga merupakan gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah, khususnya bidang ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat mengalami penurunan. Tren yang sama juga terjadi pada level Provinsi Sumatera dan Nasional. Pada Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 6,06% naik sebesar 0,03 poin menjadi 6,09% di tahun 2012. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai cenderung mengalami penurunan sampai 5,05% pada tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara dan di atas capaian Nasional dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 5,10% dan nasional sebesar 4,79%.



**Gambar 2.8**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai; Sumut Dalam Angka 2012-2016, BPS Prov. Sumut

Jika dibandingkan dengan target laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 maka dapat dilihat pada **Tabel 2.25** bahwa rata-rata realisasi capaian sebesar 85,58% dari target yang telah ditetapkan dengan capaian tertinggi di tahun 2011 sebesar 94,10%.

**Tabel 2.25**

**Realisasi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dari Target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2011	6,44	6,06	94,10
2012	6,51	6,09	93,55
2013	6,58	5,8	88,15
2014	6,65	5,12	76,99
2015	6,72	5,05	75,15

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami penurunan juga diikuti oleh menurunnya kontribusi sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan beberapa sektor jasa lainnya sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2011-2015**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,96	5,02	4,72	4,07	5,46
2	Pertambangan dan Penggalian	7,72	7,16	8,19	7	5,63
3	Industri Pengolahan	3,3	6,62	5,68	4,23	3,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas,	7,06	7,36	4,57	5,77	5,73
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,02	3,72	5,92	6,25	6,04
6	Konstruksi	9,6	9,37	8,26	6,36	6,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6,8	6,4	6,79	7,02	4,81
8	Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,42	7,53	7,47	5,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	6,58	5,36	7,39	4,45
10	Informasi dan Komunikasi	6,4	5,74	8,45	7,76	5,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,79	6,49	9,09	5,36	6,53
12	Real Estate	9,28	6,46	7,13	6,78	5,6
13	Jasa Perusahaan	8,06	6,19	6,89	7,1	5,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,69	5,82	4,82	6,36	5,73
15	Jasa Pendidikan	5,29	5,48	8,81	6,44	6,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,95	8,74	9,08	6,98	6,83
17	Jasa Lainnya	9,74	9,55	9,34	7,41	6,9
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>6,06</b>	<b>6,09</b>	<b>5,8</b>	<b>5,12</b>	<b>5,05</b>

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai

Hal yang perlu diperhatikan pada periode 2016-2021 terkait dengan laju pertumbuhan riil PDRB bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus lebih ditingkatkan sebagai penyumbang terbesar pada PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai disamping sektor lainnya khususnya dalam bidang industri dan jasa seperti pengembangan pariwisata. Di samping itu, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat menjadi peluang dan ancaman dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai terkait investasi, ketenagakerjaan dan perdagangan. Untuk itu perlu diwaspadai dan dipersiapkan dengan baik antara lain dengan meningkatkan daya saing dalam hal sumber daya manusia dan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal serta mewujudkan jiwa wirausaha masyarakat Serdang Bedagai.

#### **2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator MakroEkonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- ☐ GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- ☐  $0.4 < \text{GR} < 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- ☐ GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini ratio Kabupaten Serdang Bedagai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 angka gini ratio Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 0,2650 lalu naik menjadi 0,2843 pada tahun 2012. Di tahun 2013 gini ratio Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan menjadi sebesar 0,2537 dan naik kembali sampai 0,2906 pada tahun 2015. Jika dimasukkan dalam standar penilaian ketimpangan gini rasio maka gini rasio Kabupaten Serdang



Bedagai masih dalam kategori ketimpangan rendah yakni kurang dari 4 (empat) yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Serdang Bedagai rendah.

Jika dibandingkan dengan angka gini ratio pada Provinsi Sumatera Utara, pada periode yang sama angka gini rasio Provinsi Sumatera Utara berada pada kisaran angka 0,3 sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai masih berada pada kisaran angka 0,2. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat Serdang Bedagai lebih rendah dibandingkan masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.27**  
**Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015**

Uraian	Gini Ratio				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SERDANG BEDAGAI</b>	0.2650	0.2843	0.2537	0.2599	0.2906
<b>SUMATERA UTARA</b>	0.3183	0.3418	0.3342	0.3106	0.3360

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara*

#### **2.2.1.5. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)**

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), disparitas pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2004-2010 menunjukkan angka yang berfluktuatif tetapi cenderung menurun. Pada tahun 2004, Indeks ketimpangan Williamson Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 0,0053 menurun menjadi 0,0027 di tahun 2010 dengan rata-rata sebesar 0,0057. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi disparitas pendapatan masyarakat Serdang Bedagai rendah. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 0,7148. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

### 2.2.1.6. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai terus mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2014 baik secara absolut maupun secara persentase. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011 mencapai 60.500 jiwa atau sekitar 10,59% dan mengalami penurunan menjadi 54.480 jiwa atau sekitar 8,98% di tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.28** di bawah ini.

**Tabel 2.28**  
**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

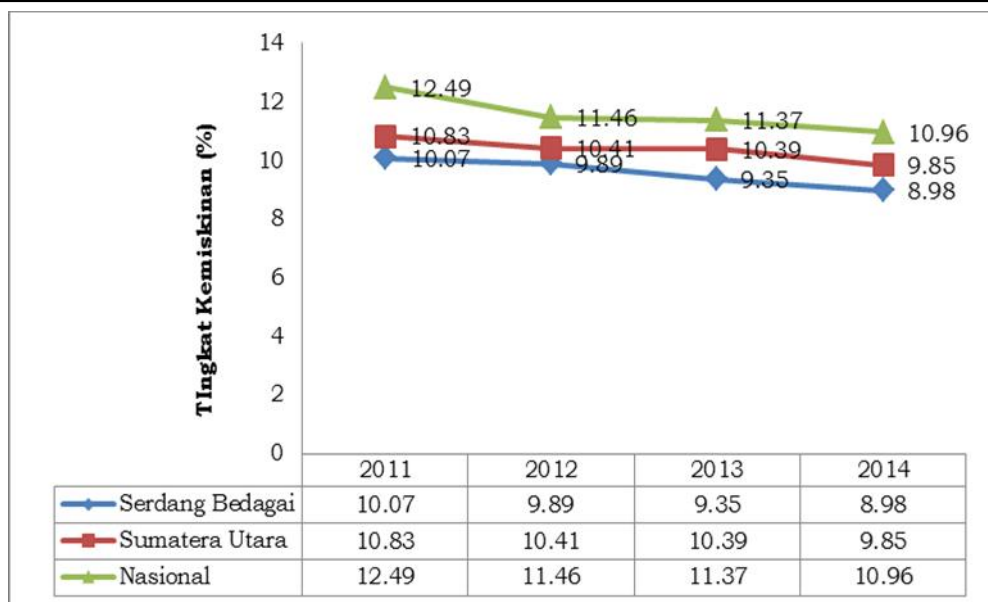
Tahun	Garis Kemiskinan (Pendapatan Kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2011	272.763	60.500	10,07
2012	281.518	59.500	9,89
2013	288.126	56.600	9,35
2014	291.732	54.480	8,98
2015	*)	*)	*)

Sumber: *Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016*, BPS Kab. Serdang Bedagai

Catatan : \*) data tidak tersedia

Jika dilihat dari sebarannya, penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu penduduk prasejahtera dan sejahtera I banyak berdomisili di Kecamatan Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Sei Rampah.

Disamping itu, jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai masih lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil menurunkan jumlah penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Gambar 2.9****Tingkat Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab.Serdang Bedagai; Sumut Dalam Angka 2012-2016, BPS Prov. Sumut

Adapun jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012 sebesar 1,43% menurun menjadi 1,22% di tahun 2013. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai menurun dari sebesar 0,33% di tahun 2012 menjadi 0,25% di tahun 2013.

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai berbagai upaya tetap terus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kapasitas pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan lainnya
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan perekonomian dan menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan/UMKM sesuai dengan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin

3. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumberdaya manusia dan kesempatan bekerja dan berusaha
4. Meningkatkan ketersediaan dan pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin
5. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan
6. Meningkatkan ketersediaan dan transparansi data

Sebagai *best practice* dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dibuat suatu gerakan yang bersifat terpadu dan menyeluruh (holistik dan integratif) yaitu Posyandu Holistik Integratif (PHI) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Posyandu Holistik Integratif sebagai salah satu upaya berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

### **2.2.2. Kesejahteraan Sosial**

#### **2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Perkembangan indikator makro selama kurun waktu tahap kedua RPJPD (2010-2015), merupakan cermin kinerja pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai, yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kabupaten Serdang Bedagai. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pemerintah yang penting dalam issue pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2011-2015 terus mengalami peningkatan walaupun masih berada di bawah angka 70. Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebesar 65,28 dan secara perlahan menjadi 66,14 di tahun 2012. Pada tahun 2013 angka IPM mencapai 67,11 dan naik lagi sebesar 0,69 di tahun 2014 menjadi 67,78. Angka IPM Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 mencapai 68,01 atau naik 0,23 dari tahun 2014. Terus meningkatnya angka IPM ini menunjukkan semakin meningkat kinerja pembangunan yang dicapai Kabupaten Serdang Bedagai.

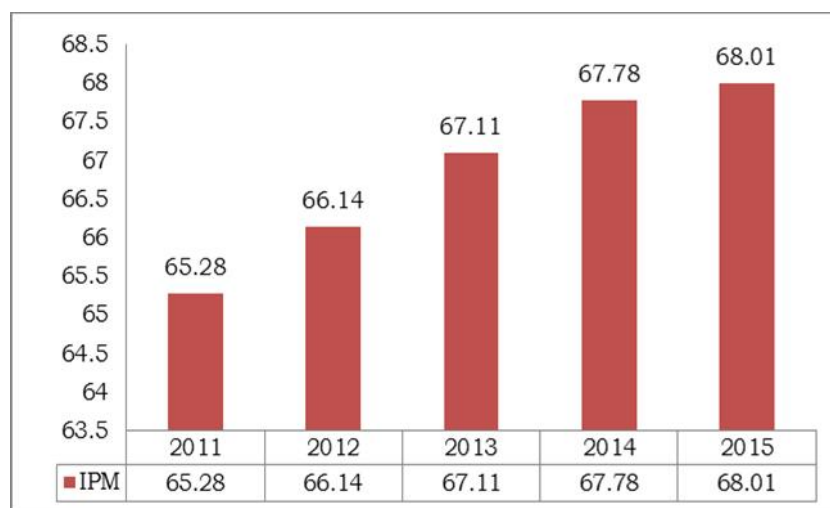
Dengan nilai IPM sebesar 68,01, maka Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih ditingkatkan pada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

Pada **Tabel 2.29** dapat dilihat bahwa, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai terus meningkat dari 66,84 di tahun 2011 menjadi 67,47 di tahun 2015 yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai semakin membaik dengan semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat. Di samping itu, daya beli masyarakat juga terus meningkat dari Rp. 9.771.000 di tahun 2011 menjadi Rp.10.110.000 di tahun 2015.

**Tabel 2.29**  
**IPM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**  
**Berdasarkan Komponen Penyusunnya**

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (tahun)	66,84	67,03	67,17	67,27	67,47
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,19	12,23	12,26	12,29	12,31
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,74	7,78	8,02	8,04	8,08
Pengeluaran Per kapita (Rp.000,-)	9771	9817	9882	10042	10.110
IPM Kabupaten Serdang Bedagai	65,28	66,14	67,11	67,78	68,01

*Sumber: IPM Kab.Serdang Bedagai 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*



**Gambar 2.10**

**Perkembangan IPM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

*Sumber: IPM Kab.Serdang Bedagai 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, pada tahun 2015 IPM Kabupaten Serdang Bedagai berada pada peringkat ke 19 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota, pada tahun 2015 IPM Kabupaten Serdang Bedagai lebih tinggi dari Kabupaten Batubara tetapi masih di bawah IPM Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Simalungun. IPM Kabupaten Serdang Bedagai juga masih lebih rendah dari IPM Provinsi Sumatera Utara dan IPM Nasional sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.30** berikut ini.

**Tabel 2.30**

**Perbandingan IPM Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2011-2015**

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat
	2011	2012	2013	2014	2015	
Medan	77.54	77.78	78	78.26	78.87	1
Pematang Siantar	73.61	74.51	75.05	75.83	76.34	2
Binjai	70.85	71.54	72.02	72.55	73.81	3
Toba Samosir	71.39	71.89	72.36	72.79	73.4	4
Tebing Tinggi	70.84	71.34	71.85	72.13	72.81	5
Padang Sidempuan	71.08	71.38	71.68	71.88	72.8	6
Deli Serdang	70.25	70.88	71.39	71.98	72.79	7
Karo	71.12	71.4	71.62	71.84	72.69	8
Sibolga	69.17	69.71	70.45	71.01	71.64	9
Tapanuli Utara	69.24	69.83	70.5	70.7	71.32	10
Simalungun	69.03	69.79	70.28	70.89	71.24	11
Labuhan Batu	67.88	68.64	69.45	70.06	70.23	12
Labuhan Batu Utara	67.37	67.84	68.28	69.15	69.69	13

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat
	2011	2012	2013	2014	2015	
Labuhan Batu Selatan	65.77	67.06	67.78	68.59	69.67	14
Dairi	66.62	66.95	67.15	67.91	69	15
Langkat	65.77	66.18	67.17	68	68.53	16
Samosir	65.81	66.31	66.8	67.8	68.43	17
Asahan	65.87	66.23	66.58	67.51	68.4	18
Serdang Bedagai	65.28	66.14	67.11	67.78	68.01	19
Tapanuli Selatan	65.14	65.95	66.75	67.22	67.63	20
Padang Lawas Utara	65.22	65.65	66.13	66.5	67.35	21
Tapanuli Tengah	65.16	65.43	65.64	66.16	67.06	22
Tanjung Balai	64.13	64.89	65.4	66.05	66.74	23
Gunung Sitoli	63.71	64.34	65.25	65.91	66.4	24
Humbang Hasundutan	64.06	64.54	64.92	65.59	66.03	25
Batubara	63.95	64.45	65.06	65.5	66.02	26
Padang Lawas	63.28	64.05	64.62	65.5	65.99	27
Pakpak Bharat	63.11	63.88	64.73	65.06	65.53	28
Mandailing Natal	61.6	62.26	62.91	63.42	63.99	29
Nias Utara	57.53	57.87	58.29	59.18	59.88	30
Nias Selatan	55.5	55.97	56.78	57.78	58.74	31
Nias	55.55	56.5	57.43	57.98	58.85	32
Nias Barat	55.43	56.2	56.58	57.54	58.25	33
Sumatera Utara	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	
Nasional	67.09	67.70	68.31	68.90	68.9	

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2012-2016, BPS Provinsi Sumatera Utara

## 2.2.2.2. Pendidikan

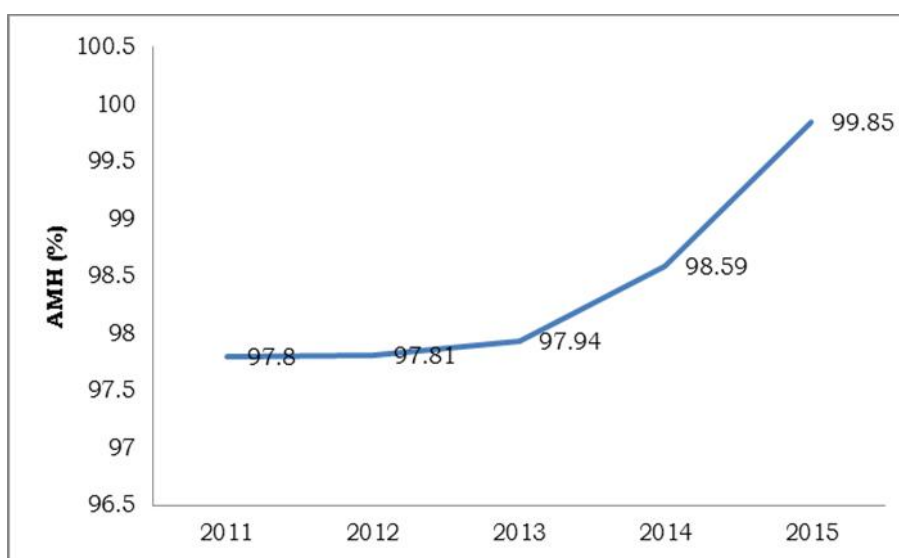
Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Sebagai daerah dengan posisi strategis dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk dapat menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Beberapa indikator kinerja utama dalam bidang pendidikan yang telah dicapai Kabupaten Serdang Bedagai antara lain adalah :

### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2011-2015, capaian angka melek huruf cukup mengalami peningkatan. Angka melek huruf pada tahun 2011 sebesar 97,80%, meningkat menjadi sebesar 99,85% pada tahun 2015.



Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Walaupun demikian, di tahun 2015 masih ada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang buta huruf (0,15%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

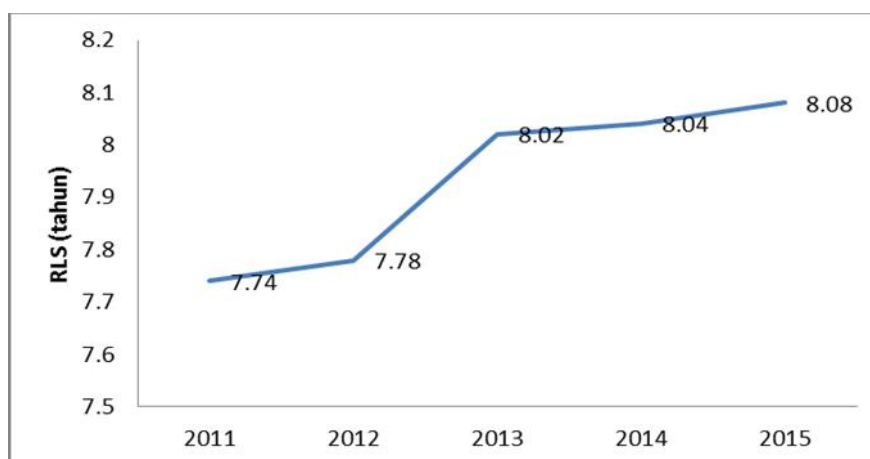


**Gambar 2.11**  
**Perkembangan AMH Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

## **2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2011 sebesar 7,74 tahun meningkat menjadi 8,08 tahun di tahun 2015. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

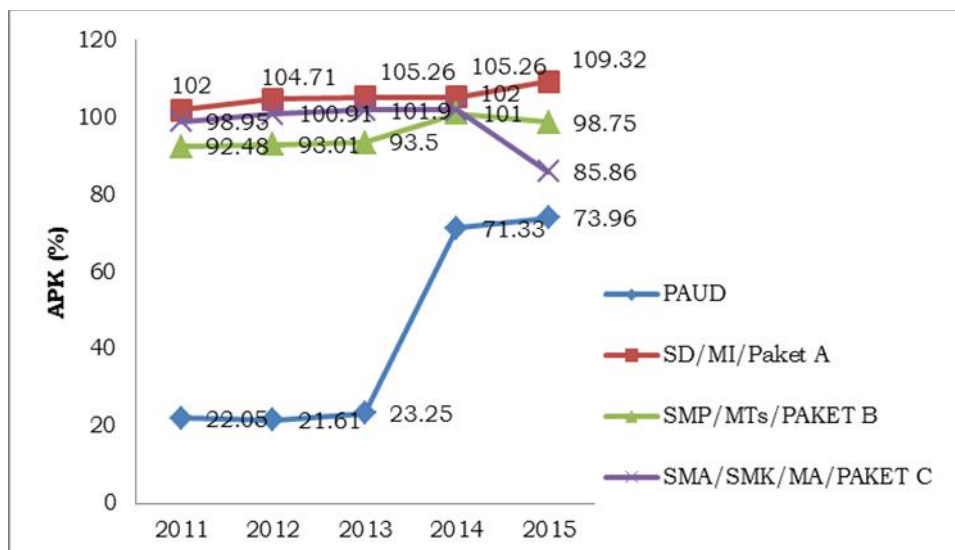


**Gambar 2.12**  
**Perkembangan RLS Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

### 3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat PAUD, SD dan SMP secara umum terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015 bahkan sangat signifikan terjadi pada tingkat PAUD. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA pada awal periode mengalami peningkatan tetapi pada akhir periode yakni tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



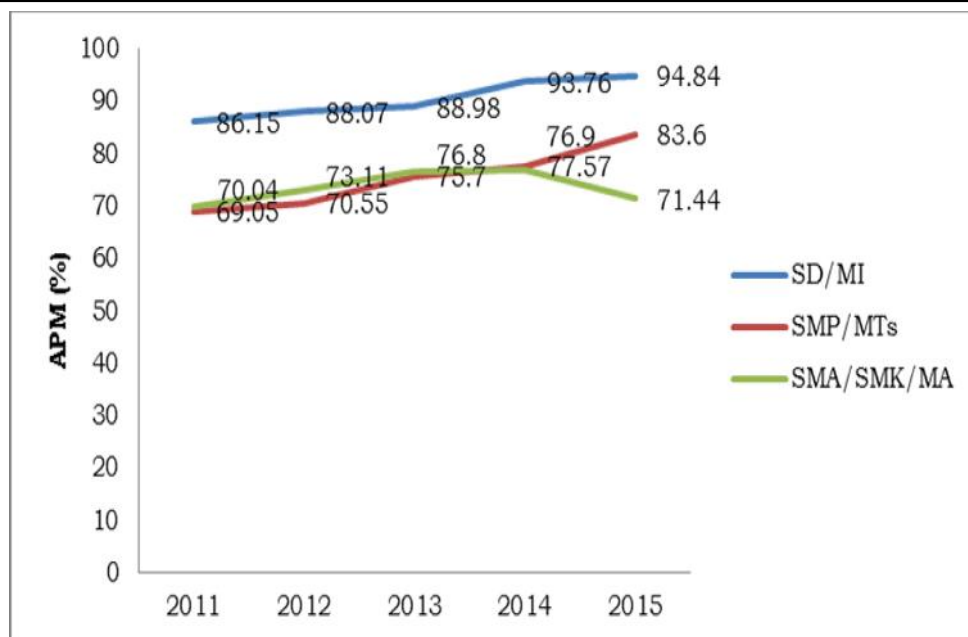
**Gambar 2.13**

**Perkembangan APK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

### 4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS cenderung meningkat, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat dasar ke tingkat menengah.

**Gambar 2.14****Perkembangan APM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015***Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Secara lebih rinci, perkembangan hasil kinerja indikator aspek pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dari Tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.31** di bawah ini.

**Tabel 2.31**  
**Hasil Kinerja Indikator Aspek Pendidikan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf (%)	97,80	97,81	97,94	98,59	99,85
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,74	7,78	8,02	8,04	8,08
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%):					
	- PAUD	22,05	21,61	23,25	71,33	73,96
	- SD/MI/Paket A	102	104,71	105,26	105,26	109,32
	- SMP/MTs/PAKET B	92,48	93,01	93,50	101,00	98,75
	- SMA/SMK/MA/PAKET C	98,95	100,91	101,9	102,00	85,86
4	Angka Partisipasi Murni (APM) (%):					
	- SD/MI	86,15	88,07	88,98	93,76	94,84
	- SMP/MTs	69,05	70,55	75,70	77,57	83,60
	- SMA/SMK/MA	70,04	73,11	76,80	76,9	71,44
5	Angka Kelulusan (AK):					
	- Angka Kelulusan (AK) SD/MI	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	99,85	97,76	99,99	100	100
	- Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA	99,96	99,95	100,00	99,99	100
6	Angka Putus Sekolah (APS (%)):					
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,12	0,10	0,07	0,03
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,44	0,40	0,15	0,12	0,15
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,51	0,47	0,30	0,46	0,30

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

### **2.2.2.3. Kesehatan**

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

#### **1. Angka kelangsungan hidup bayi**

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari jumlah kematian/1000 kelahiran hidup menunjukkan sudah cukup tinggi. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Serdang Bedagai mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011, terjadi sebanyak 5 kematian dari 1000 kelahiran hidup dan terus menurun menjadi 1 kematian dari 1000 kelahiran hidup di tahun 2014. Tetapi pada tahun 2015, meningkat lagi menjadi 6 kematian dari 1000 kelahiran hidup atau dengan kata lain AKHB mencapai 0,994.

## **2. Jumlah Kematian Ibu**

Capaian kinerja indikator jumlah kematian ibu terus berkurang dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011, terjadi sebanyak 15 kematian dari 11.517 kelahiran hidup dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebanyak 15 kematian dari 11.792 kelahiran hidup.

## **3. Jumlah Kematian Bayi Baru Lahir**

Capaian kinerja indikator jumlah kematian bayi baru lahir terus berkurang dari tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011, jumlah kematian bayi baru lahir sebanyak 59 kejadian dari 11.517 kelahiran dan pada tahun 2015 jumlah kematian bayi baru lahir menurun menjadi sebanyak 55 kejadian dari 11.792 kelahiran.

## **4. Angka usia harapan hidup**

Usia harapan hidup penduduk Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari 66,86 tahun pada tahun 2011 menjadi 67,47 tahun pada tahun 2015. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,61 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,91%.

## **5. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan**

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 sudah mencapai angka 100% yang berarti bahwa semua balita gizi buruk di Serdang Bedagai sudah mendapat perawatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Secara lebih rinci, perkembangan hasil kinerja indikator aspek kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dari Tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.32** di bawah ini.

**Tabel 2.32**  
**Hasil Kinerja Aspek Kesehatan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,995	0,996	0,996	0,999	0,994
2	Jumlah Kematian Ibu (KH)	15/ 11.517	13/ 11.806	9/ 12.195	11/ 12.301	15/ 11.792
3	Jumlah Kematian Bayi Baru Lahir (KH)	59/ 11.517	50/ 11.806	38/ 12.195	36/ 12.301	55/ 11.792
4	Jumlah Kematian Bayi (KH)	59/ 11.517	50/ 11.806	54/ 12.195	46/ 12.301	70/ 11.792
5	Jumlah Kematian Anak Balita (KH)	3/ 11.517	0/ 11.806	0/ 12.195	23/ 12.301	0/ 11.792
6	Angka usia harapan hidup	66,84	67,03	67,17	67,27	67,47
7	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai Tahun, 2016*

#### 2.2.2.4. Pertanian

Dari 1.952,38 ha luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, jumlah sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 21.613 sertifikat yang terdiri dari 6.445 sertifikat di tahun 2011, 3.430 sertifikat di tahun 2012, 3.394 sertifikat di tahun 2013, 4.261 sertifikat di tahun 2014 dan 4.083 sertifikat di tahun 2015.

**Tabel 2.33**  
**Hasil Kinerja Aspek Pertanian**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Tanah	1.952,38	1.952,38	1.952,38	1.952,38	1.952,38
2	Jumlah Penduduk	598.619	601.201	603.872	606.367	608.691
3	Jumlah Sertifikat hak Atas Tanah yang Sudah Dikeluarkan	6.445	3.430	3.394	4.261	4.083

*Sumber : Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kab. Serdang Bedagai, 2016*

## 2.2.2.5. Ketenagakerjaan

### 1. Kesempatan Kerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2011, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Serdang Bedagai berada di tingkat 0,951 sedangkan pada tahun 2015 rasio tersebut menurun menjadi sebesar 0,928. Dengan kata lain, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 245.891 orang atau sekitar 92,82% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya yakni sebanyak 19.011 orang atau sebesar 7,18% masih mencari kerja atau pengangguran. Banyak variabel yang mempengaruhi kecenderungan ini, antara lain : pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan usaha baru, jumlah penduduk usia kerja 15-60 tahun, dll.

**Tabel 2.34**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja**  
**Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
		Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
1	2011	286.425	14.740	301.165	0,951
2	2012	259.149	15.605	274.754	0,943
3	2013	279.249	18.235	297.484	0,938
4	2014	253.501	19.491	272.992	0,928
5	2015	245.891	19.011	264.902	0,928

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

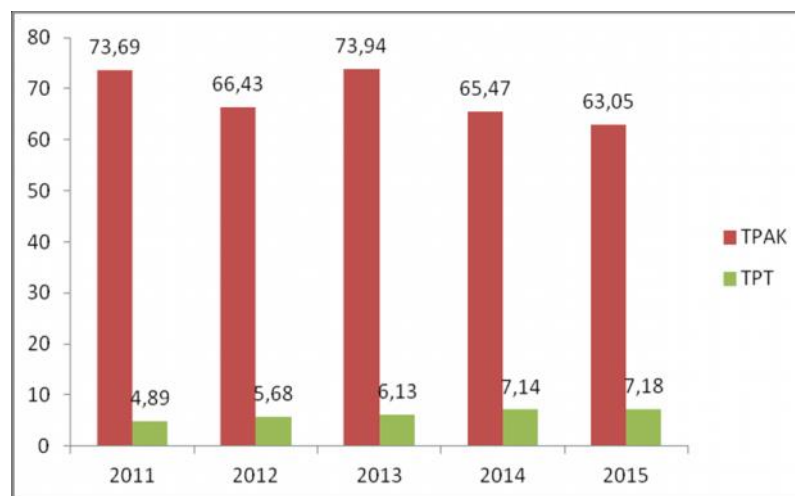
### 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serdang Bedagai memperlihatkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 4,89% menjadi 7,18% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai semakin banyak. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan angka yang fluktuatif dengan tren menurun dari sebesar 73,69% menjadi sebesar 63,05% pada tahun 2015. Meningkatnya angka pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena tingkat persaingan yang tinggi dan cukup terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru.



Jika pemerintah tidak melakukan upaya yang tepat terhadap penanganan jumlah pengangguran di masa yang akan datang maka tingkat pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai diprediksi akan semakin meningkat diantaranya karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Menurunnya harga komoditi kelapa sawit dan karet akan berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan karet di Kabupaten Serdang Bedagai
2. Apabila izin kerambah ikan di Danau Toba dicabut akan berdampak tutupnya perusahaan PT. Aquafarm yang mengakibatkan sebanyak 4.000 tenaga kerja diberhentikan termasuk karyawan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Akses jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang akan segera selesai beberapa tahun kedepan dapat mengakibatkan UKM di sepanjang jalur Trans Sumatera khususnya Kota Perbaungan dan Pasar Bengkel akan tutup dan memberhentikan ribuan tenaganya.



**Gambar 2.15**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015, realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.35** di bawah ini.

**Tabel 2.35**  
**Realisasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dari Target RPJMD**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2011	5,44	4,89	111,25
2012	5,19	5,68	91,37
2013	4,96	6,13	80,91
2014	4,74	7,14	66,39
2015	4,52	7,18	62,95

### 3. Rasio Jenjang Pendidikan dan Angkatan Kerja

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah dan SLTP yang bekerja semakin menurun dan sebaliknya penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas yang bekerja semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Serdang Bedagai sudah semakin tinggi yang berarti dari segi pendidikan kualitas angkatan kerja di Kabupaten Serdang Bedagai semakin baik.

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Berdasarkan**  
**Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011-2015**

Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
SD ke bawah	121.805	110.823	112.300	95.354	96.196
SLTP	79.250	62.144	77.202	66.179	58.066
SLTA ke atas	85.370	86.182	89.747	91.968	91.629

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

### 4. Rasio Lapangan Pekerjaan Utama dan Angkatan Kerja

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian masih lebih banyak daripada pada sektor industri dan jasa-jasa walaupun angkanya berfluktuasi.

**Tabel 2.37**

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	116.114	88.223	112.301	111.967	106.815
Industri	63.280	49.338	48.146	47.504	46.543
Jasa-jasa	107.031	121.588	118.802	94.030	92.533

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

### 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

#### 1. Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan perlu dimunculkan kembali di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dan pemangku kepentingan lainnya. Selama periode 2011-2015, potensi dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Serdang Bedagai belum diupayakan dengan maksimal.

**Tabel 2.38**

**Hasil Kinerja Aspek Seni Budaya  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian (tim)	1	1	1	1	1
2	Jumlah gedung (buah)	1	1	1	1	1
3	Jumlah benda, situs, cagar budaya	8	8	8	8	8

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Serdang Bedagai, 2016*

## 2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sampai dengan tahun 2015, jumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 4 buah dengan klub olahraga yang dibina sebanyak 7 organisasi.

**Tabel 2.39**  
**Hasil Kinerja Aspek Olahraga**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Gedung Olahraga (lapangan)	2	2	3	4	4
2	Klub Olahraga	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Serdang Bedagai, 2016

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar

##### 2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### 1. Pendidikan Anak Usia Dini

##### a. Jumlah PAUD per Kecamatan Tahun 2015

Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah PAUD di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 432 dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan. Jumlah PAUD yang paling banyak berada di Kecamatan Perbaungan sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Kotarih sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.39** di bawah ini.

**Tabel 2.40**  
**Jumlah PAUD per Kecamatan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah PAUD
1	KOTARIH	9
2	SILINDA	13
3	BINTANG BAYU	12
4	DOLOK MASIHUL	29
5	SERBAJADI	10
6	SIPISPIS	23
7	DOLOK MERAWAN	21
8	TEBING TINGGI	23
9	TEBING SYAHBANDAR	17
10	BANDAR KHALIPAH	10
11	TANJUNG BERINGIN	13
12	SEI RAMPAH	42
13	SEI BAMBAN	22
14	TELUK MENGKUDU	24
15	PERBAUNGAN	105
16	PEGAJAHAN	31
17	PANTAI CERMIN	28
<b>JUMLAH</b>		<b>432</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

b. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Tahun 2011-2015

Jumlah PAUD di Kabupaten Serdang Bedagai terus bertambah setiap tahun. PAUD yang tersedia cukup untuk menampung jumlah murid usia <6 tahun di setiap kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Di samping itu, angka partisipasi sekolah (APS) PAUD juga mengalami peningkatan dari 22,05% pada tahun 2011 menjadi 73,96% pada tahun 2015. Kenaikan APS PAUD secara signifikan ini dikarenakan adanya perubahan rumus penghitungan APS PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang awalnya usia peserta didik PAUD dihitung pada kelompok usia 4-6 tahun di tahun 2014 menjadi kelompok usia 0-6 tahun.

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PAUD	315	330	342	364	432
2	Jumlah murid usia < 6 tahun	823	1.138	1.847	7.634	8.458
3	Jumlah penduduk kelompok usia < 6 tahun	3.735	5.267	7.942	10.703	11.436
4	APS PAUD	22,05	21,61	23,25	71,33	73,96

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

## 2. Pendidikan Dasar

Di tingkat pendidikan dasar, secara umum data Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) murid SD/MI dan SMP/MTs terus mengalami peningkatan dari sebesar 94% di tahun 2011 menjadi 100% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi penduduk usia sekolah jenjang SD dan SMP yang tidak bersekolah di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator Kinerja untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS )	94	95	95	96	100
2	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas:					
A	Jumlah Gedung:					
	SD	457	457	457	460	461
	SMP	84	80	82	82	85
B	Jumlah Ruang Kelas:					
	SD	2.945	2.918	2.927	2.928	2.919
	SMP	723	648	679	687	702
C	Rasio Kelas / Sekolah:					
	SD	6	6	6	6	6
	SMP	9	8	8	8	8
3	Rasio Jumlah Guru dan Murid:					
A	SD:					
	Jumlah Guru	4.326	4.395	4.342	4.711	4.752
	Jumlah Murid	79.294	78.603	78.350	78.765	78.437
	Rasio	1/18	1/18	1/18	1/17	1/16



No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
B	SMP:					
	Jumlah Guru	1.805	1.798	1.823	1.451	1.452
	Jumlah Murid	23.166	23.866	24.769	24.474	23.812
	Rasio	1/13	1/13	1/14	1/17	1/17
4	Rasio Jenjang Pendidikan /Rasio Pendidikan:					
A	SD:					
	Murid/Sekolah	174	172	171	171	170
	Murid/Kelas	27	27	27	27	27
	Kelas/Guru	1	1	1	1	1
	Guru/Sekolah	9	10	10	10	10
B	SMP:					
	Murid/Sekolah	276	279	302	298	280
	Murid/Kelas	32	37	36	36	34
	Kelas/Guru	0,40	0,36	0,37	0,47	0,48
	Guru/Sekolah	21	22	22	18	17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Pada **Tabel 2.42** dapat dilihat bahwa untuk rasio ketersediaan sekolah dan ruang kelas, dapat diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan SD rasio ketersediaan sekolah dan ruang kelas tetap dari tahun 2011-2015 yakni 6, sedangkan untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah dan ruang kelas berkurang dari tahun 2011 sebesar 9 menjadi 8 di tahun 2015. Untuk rasio jumlah guru dan murid, pada jenjang SD rasio jumlah guru dan murid menurun dari 18 tahun 2011 menjadi 16 di tahun 2015 sedangkan untuk jenjang SMP meningkat dari 13 di tahun 2011 menjadi 17 di tahun 2015.

Di samping itu, untuk rasio murid per sekolah pada jenjang SD menurun dari 174 di tahun 2011 menjadi 170 di tahun 2015 sedangkan pada jenjang SMP meningkat dari 276 di tahun 2011 menjadi 280 di tahun 2015. Untuk rasio murid per kelas pada jenjang SD rasionya tetap yakni 27 dari tahun 2011-2015 sedangkan pada jenjang SMP meningkat dari 32 di tahun 2011 menjadi 34 di tahun 2015. Untuk rasio kelas per guru pada jenjang SD rasionya tetap yakni 1 selama tahun 2011-2015 sedangkan pada jenjang SMP rasionya meningkat dari 0,4 pada tahun 2011 menjadi 0,48 di tahun 2015. Untuk rasio guru per



sekolah, pada jenjang SD rasionya menurun meningkat dari 10 di tahun 2011 menjadi 9 di tahun 2015 sedangkan pada jenjang SMP rasionya menurun dari 21 di tahun 2011 menjadi 17 di tahun 2015.

Dalam hal pemenuhan guru dari segi kualifikasi pendidikan S1/D-IV bagi pendidik tahun 2015 sudah cukup baik sebesar 88 persen, meningkat 8 persen dari tahun 2014 yang hanya sebesar 80 persen. Disamping kualifikasi pendidikan S1/D-IV, peningkatan mutu guru tentang praktek pembelajaran yang baik seperti *Contextual Teaching and Learning* (CTL), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) terus ditingkatkan.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah guru yang sudah dilatih tentang *Contextual Teaching and Learning* (CTL), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) masih 576 orang untuk guru tingkat SD/MI dan 293 orang untuk guru tingkat SMP/MTs. Jumlah guru yang belum dilatih sebanyak 9.346 orang untuk guru tingkat SD/MI dan 2.553 orang untuk guru tingkat SMP/MTs.

Dari segi jumlah guru pada jenjang SD sederajat hingga SMP/MTs sederajat pada Tahun 2015 secara umum sudah cukup. Hal ini tercukupi karena adanya guru yang berstatus Non PNS atau Guru Honor Sekolah terutama di jenjang SD dan SMP. Namun demikian untuk guru yang berstatus PNS masih kurang.

**Tabel 2.43**  
**Kecukupan Guru SD Negeri**

MAPEL	Rombel	Guru PNS	Guru Non PNS	Kebutuhan	+/- PNS	+/- Guru
Guru Kelas	3007	1978	1869	3007.0	-1029.0	840.0
Guru PAI	3007	239	155	501.2	-262.2	-107.2
Guru PAK	3007	118	12	501.2	-383.2	-371.2
Guru PJOK	3007	178	184	501.2	-323.2	-139.2
<b>Jumlah</b>	<b>12028</b>	<b>2513</b>	<b>2037</b>	<b>4510.5</b>	<b>-1997.5</b>	<b>222.5</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Pada **Tabel 2.43** di atas dapat dilihat bahwa kekurangan guru PNS untuk masing-masing mata pelajaran diisi oleh guru Non PNS sejumlah 2037 orang. Pengangkatan guru Non PNS mengakibatkan terjadinya kelebihan guru sebanyak 222 orang. Walaupun sudah dipenuhi oleh guru Non PNS masih terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Jasmani.

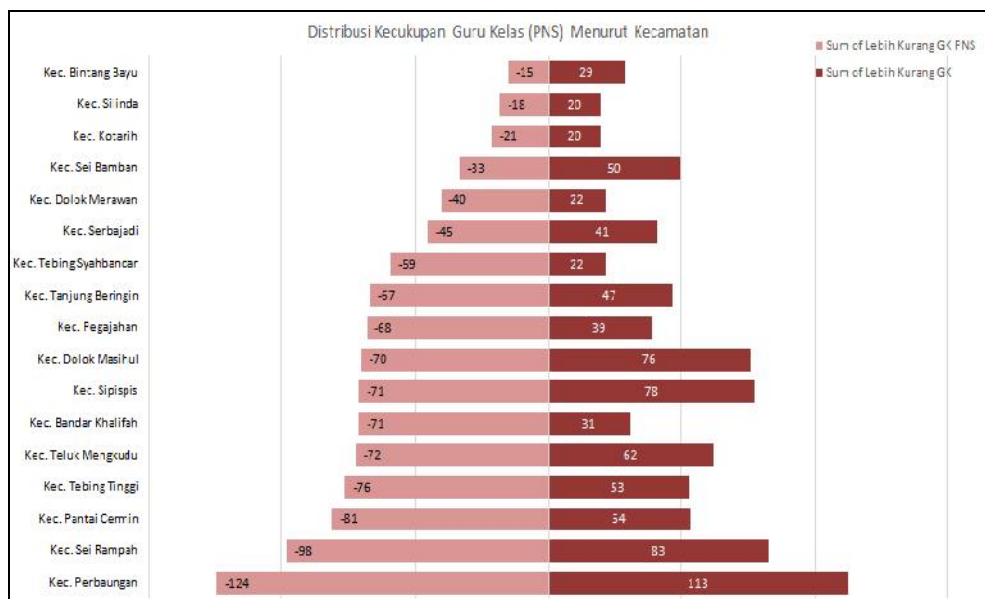
Pada **Tabel 2.44** berikut ini dapat dilihat bahwa terdapat sekolah yang kekurangan guru mapel lebih dari 2 orang (terjadi pada mapel TIK, PJOK, Bahasa Indonesia dan BK). Disisi lain ada sekolah bahkan memiliki kelebihan 2 orang untuk mapel ini.

**Tabel 2.44**  
**Kecukupan Guru Mata Pelajaran PNS SMP Negeri**

<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Kurang &gt; 2</b>	<b>Kurang &gt; 1-2</b>	<b>Kurang &gt; 0,5-1</b>	<b>Kurang &lt; 0,5</b>	<b>Cukup</b>	<b>Lebih &lt; 0,5</b>	<b>Lebih &gt; 0,5-1</b>	<b>Lebih &gt; 1-2</b>	<b>Lebih &gt; 2</b>
Bahasa Indonesia	1	1	8	3	3	3	10	10	
Bahasa Inggris		6	15	2	4	2	7	3	
Bimbingan Konseling	10	15	5	5		4			
IPA		2	12	1	2	2	11	8	1
IPS		1	8	2	6	2	11	7	2
Keterampilan		14	16	5		3		1	
Matematika		1	9		5	5	10	8	1
Pendidikan Agama Islam		2	5	3	4	10	14	1	
Pendidikan Agama Kristen		9	15	7	2	4	2		
Pendidikan Kewarganegaraan			1	8		6	12	12	
Penjaskes	2	14	15	1	4	2	1		
Seni Budaya		2	9	8	3	6	7	4	
TIK	16	17	3	2		1			
<b>Grand Total</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>121</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>54</b>	<b>4</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Selain dalam hal kecukupan jumlah, penyebaran Guru SD dan SMP Negeri tahun 2015 belum merata, terjadi kelebihan guru di sekolah-sekolah kawasan perkotaan, sebaliknya di sekolah-sekolah kawasan pedesaan atau pinggiran masih terdapat kekurangan guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakan penataan dan pemerataan guru dengan memutasikan guru yang berlebih ke sekolah yang membutuhkan.

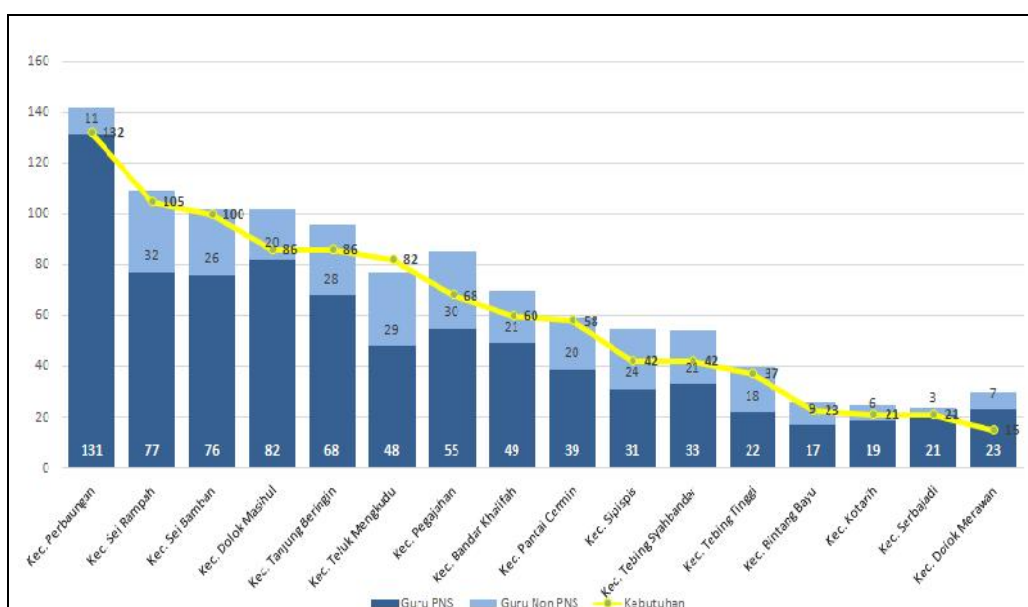


**Gambar 2.16**

**Distribusi Lebih Kurang Guru Kelas SD Negeri menurut kecamatan**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Pada **Gambar 2.16** di atas akibat sebaran yang tidak merata, terjadi kekurangan guru Kelas PNS di semua kecamatan. Daerah tertinggi yang mengalami kekurangan guru Kelas PNS adalah Kecamatan Perbaungan sejumlah 124 orang. Dengan penambahan guru kelas Non PNS di SD Negeri terjadi juga kelebihan guru kelas pada 17 kecamatan.



**Gambar 2.17**

**Distribusi Lebih Kurang Guru Kelas SD Negeri menurut kecamatan**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Pada **Gambar 2.17** di atas jumlah SMP Negeri di kabupaten Serdang Bedagai adalah 39 sekolah tersebar pada 17 Kecamatan. Terlihat bahwa terjadi kekurangan guru PNS pada 13 kecamatan. Hanya pada Kecamatan Dolok Merawan terjadi kelebihan guru PNS. Kekurangan guru PNS ini diisi dengan Non PNS (guru honor sekolah). Namun pengangkatan guru honor ini mengakibatkan terjadinya kelebihan guru.

### **3. Pendidikan Menengah**

Di tingkat pendidikan menengah, angka partisipasi sekolah (APS) terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015 walaupun belum mencapai 100%. Pada tahun 2011, APS SMA/SMK/MA sebesar 54,74% meningkat menjadi 79,46% di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada penduduk usia 16-19 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Serdang Bedagai. Sampai dengan tahun 2015, setiap kecamatan di Serdang Bedagai telah memiliki sekolah SMA negeri minimal satu.

Adapun rasio jumlah kelas terhadap banyaknya sekolah untuk jenjang SMA meningkat dari 6 di tahun 2011 menjadi 8 di tahun 2015 dan SMK meningkat dari 7 di tahun 2011 menjadi 10 di tahun 2015. Rasio jumlah guru terhadap murid SMA meningkat dari 11 di tahun 2011 menjadi 16 di tahun 2015. Untuk jenjang SMK juga terjadi peningkatan rasio jumlah guru terhadap murid dari sebesar 12 di tahun 2011 meningkat menjadi 16 di tahun 2015.

Di samping itu, untuk rasio murid per sekolah pada jenjang SMA meningkat dari 266 di tahun 2011 menjadi 284 di tahun 2015 dan pada jenjang SMK juga mengalami peningkatan dari 245 di tahun 2011 menjadi 268 di tahun 2015. Untuk rasio murid per kelas pada jenjang SMA rasionya menurun dari 41 di tahun 2011 menjadi 35 di tahun 2015 dan pada jenjang SMK juga mengalami penurunan dari 33 di tahun 2011 menjadi 28 di tahun 2015.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Kinerja untuk Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS )	54,74	55,01	55,40	55,40	79,46
2	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas:					
A	Jumlah Gedung:					
	SMA	40	39	39	38	39
	SMK	30	36	35	35	37
B	Jumlah Ruang Kelas:					
	SMA	243	268	288	313	314
	SMK	222	286	320	340	356
C	Rasio Kelas / Sekolah:					
	SMA	6	7	7	8	8
	SMK	7	8	9	10	10
3	Rasio Jumlah Guru dan Murid:					
A	SMA:					
	Jumlah Guru	1.007	943	901	801	753
	Jumlah Murid	10.644	11.005	10.405	10.688	11.066
	Rasio	1/11	1/12	1/12	1/13	1/16
B	SMK:					
	Jumlah Guru	629	696	665	649	636
	Jumlah Murid	7.354	8.599	8.438	9.402	9.916
	Rasio	1/12	1/12	1/13	1/14	1/16
4	Rasio Jenjang Pendidikan /Rasio Pendidikan:					
A	SMA:					
	Murid/Sekolah	266	282	267	281	284
	Murid/Kelas	41	41	36	34	35
	Kelas/Guru	0,24	0,28	0,32	0,39	0,42
	Guru/Sekolah	25	24	23	21	19
B	SMK:					
	Murid/Sekolah	245	239	241	269	268
	Murid/Kelas	33	30	26	28	28
	Kelas/Guru	0,35	0,41	0,48	0,52	0,56
	Guru/Sekolah	21	19	19	19	17

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

#### 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sekolah umumnya sudah memadai namun untuk beberapa sekolah perlu ditingkatkan agar lebih memadai. Pada tahun 2015 kondisi bangunan baik untuk jenjang sekolah pendidikan SD/MI sebanyak 86,34 persen sedangkan untuk sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik hanya 80,76 persen. Aksesibilitas sarana pendidikan terutama pendidikan menengah kejuruan perlu ditambah di kecamatan yang belum memiliki SMK Negeri.

Untuk memberikan pelayanan kepada anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus perlu dikembangkan sekolah inklusi di sekolah reguler. Untuk jenjang SD dan SMP sederajat minimal satu sekolah dalam satu kecamatan. Untuk SMA sederajat minimal satu sekolah dalam satu kabupaten.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Kinerja untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan**  
**Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Fasilitas Pendidikan:					
	- Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan Baik	92	94	96	96	86,34
	- Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	84	88	92	92	80,76

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

#### 5. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2011 APS SD/MI berada di posisi 0,14%, maka pada tahun 2015 menjadi hanya sebesar 0,03% atau dapat dikatakan hampir tidak ada APS di tingkat SD/MI.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami penurunan yang berarti selama periode 2011-2015. Jika pada tahun 2011, tingkat APS SMP/MTs Kabupaten Serdang bedagai berada di

tingkat 0,44%, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan hanya menjadi 0,15%. Selama periode 2011-2015, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kabupaten Serdang bedagai juga mengalami tren penurunan, pada tahun 2011, tingkat APS SMA/SMK/MA Kabupaten Serdang bedagai ada di tingkat 0,51%, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan hanya menjadi 0,30%.

## **6. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan**

Terkait dengan angka kelulusan (AL), diketahui bahwa angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Serdang bedagai dari mulai tahun 2011 hingga 2015 telah mencapai 100%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs diketahui bahwa pada tahun 2011 sudah mencapai 99,85% dan terus mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2014 dan 2015.

Di tingkat sekolah menengah, angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kabupaten Serdang bedagai pada tahun 2011 sudah mencapai 99,96% dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2013 dan 2015. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi murid SMA/SMK/MA saja yang tidak lulus di tahun 2015.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 masih di bawah 100% yakni 98% yang berarti bahwa masih ada sekitar 2% siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Serdang bedagai selama periode 2011-2015 juga masih di bawah 100% juga telah di atas 100% yakni 98% yang berarti bahwa masih ada sekitar 2% siswa SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK/MA.



## 7. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Dalam aspek kualitas pengajar, tingkat guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2011 baru mencapai 59% guru yang memenuhi kualifikasi ini, maka pada tahun 2015 sudah mencapai 88%. Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat mengalami peningkatan lebih dari 100% dari hanya 1.778 orang di tahun 2011 menjadi 3.558 orang di tahun 2015. Hal ini tentu akan berdampak pada semakin berkurangnya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat yakni dari sebanyak 5.728 orang di tahun 2011 menjadi 3.948 orang di tahun 2015.

**Tabel 2.47**  
**Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2011-2015**  
**Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang	Jumlah Guru									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Beserti fikasi	Belum	Beserti fikasi	Belum	Beserti fikasi	Belum	Beserti fikasi	Belum	Beserti fikasi	Belum
1	TK	12	306	14	304	31	287	31	287	39	279
2	SD	945	3,663	1,588	3,020	2,154	2,454	2,182	2,426	2,367	2,241
3	SMP	418	954	474	898	502	870	506	866	546	826
4	SMA	285	405	341	349	367	323	375	315	396	294
5	SMK	118	400	164	354	192	326	193	325	210	308
<b>JUMLAH</b>		<b>1,778</b>	<b>5,728</b>	<b>2,581</b>	<b>4,925</b>	<b>3,246</b>	<b>4,260</b>	<b>3,287</b>	<b>4,219</b>	<b>3,558</b>	<b>3,948</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Jika dibandingkan menurut jenjang pendidikan maka pada tahun 2011, guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SMA lebih banyak memiliki sertifikat daripada guru-guru pada jenjang yang lain. Namun pada tahun 2015, guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD yang telah memiliki sertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan melebihi capaian guru yang mengajar pada jenjang SMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari Diploma III ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2.

**Tabel 2.48**

**Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Lainnya**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah (APS):					
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,12	0,10	0,07	0,03
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,44	0,40	0,15	0,12	0,15
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,51	0,47	0,30	0,46	0,30
2	Angka Kelulusan (AK):					
	- Angka Kelulusan (AK) SD/MI	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	99,85	97,76	99,99	100	100
	- Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA	99,96	99,95	100,00	99,99	100
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98	98	98	98	98
4	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98	98	98	98	98
5	Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	59	60	70	80	88

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

### 2.3.1.2. Kesehatan

Sampai dengan tahun 2015, jumlah posyandu di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 814 unit dengan rasio posyandu persatuan balita yang tetap selama periode 2011-2015 yakni sebesar 1,2% atau 1,2 unit posyandu untuk setiap 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75 – 100 balita.

Adapun Jumlah puskesmas dan pustu sampai tahun 2015 di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 97 unit yang terdiri dari 20 unit puskesmas dan 77 unit pustu untuk melayani 608.691 orang penduduk. Dengan rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk sebesar 55 per 100.000 orang penduduk. Sedangkan jumlah rumah sakit di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 sebanyak 6 unit rumah sakit.

**Tabel 2.49**

**Jumlah Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Kecamatan Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	POSYANDU	PUSKESMAS	PUSTU
1	Kotarih	21	1	1
2	Silinda	33	1	1
3	Bintang Bayu	22	1	5
4	Dolok Masihul	70	1	8
5	Serba Jadi	46	1	3
6	Sipispis	61	1	6
7	Dolok Merawan	33	1	2
8	Tebing Tinggi	65	2	4
9	Tebing Syahbandar	27	1	4
10	Bandar Khalipah	43	1	4
11	Tanjung Beringin	33	1	7
12	Sei Rampah	84	2	5
13	Sei Bamban	61	1	5
14	Teluk Mengkudu	53	1	5
15	Perbaungan	98	2	7
16	Pegajahan	31	1	4
17	Pantai Cermin	33	1	6
	JUMLAH	814	20	77

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Dalam hal ketersediaan SDM kesehatan, sampai dengan tahun 2015, rasio dokter sudah mencapai 34,99 atau 35 per 100.000 penduduk atau 1 dokter melayani 2.857 penduduk dan rasio dokter spesialis sudah mencapai 15,114 atau 15 dokter spesialis per 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.667 penduduk. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk tersebut belum mencapai angka yang ideal yaitu satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Meskipun demikian, selama tahun 2011-2015 rasio tenaga medis kesehatan seperti dokter dan dokter spesialis terus meningkat. Tenaga para medis perawat dan bidan juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 hanya perawat gigi yang mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Serdang Bedagai dengan menyediakan tenaga medis yang cukup sebagai pelaku utama dalam penanganan masalah kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Spesialis) dan Tenaga Paramedis (Perawat, Bidan dan Perawat Gigi) per Kecamatan Tahun 2015**

NO	Kecamatan	Tenaga Medis		Tenaga Paramedis		
		Dokter	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	Perawat Gigi
1	Kotarih	2		2	18	0
2	Silinda	2		7	13	1
3	Bintang Bayu	1		1	18	1
4	Dolok Masihul	2		8	38	0
5	Serba Jadi	4		7	29	1
6	Sipispis	2		4	32	3
7	Dolok Merawan	1		5	25	0
8	Tebing Tinggi	3		3	60	1
9	Tebing Syahbandar	2		5	42	1
10	Bandar Khalipah	1		10	20	2
11	Tanjung Beringin	2		5	19	0
12	Sei Rampah	5	28	12	50	3
13	Sei Bambi	2		11	54	2
14	Teluk Mengkudu	5		10	38	0
15	Perbaungan	7		12	73	2
16	Pegajahan	3		9	29	0
17	Pantai Cermin	3		6	39	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>117</b>	<b>597</b>	<b>18</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak juga menjadi perhatian yang serius Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 sudah mencapai 100%. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sedangkan perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2011 cakupannya baru mencapai 87,59%, maka pada tahun 2015 sudah mencapai 89,8%.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Serdang Bedagaiselama periode 2011-2015 telah mencapai 100%. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Serdang Bedagai juga sudah cukup optimal dilakukan yakni sudah mencapai angka 100% selama periode 2011-2015.

Dalam hal penanganan terhadap masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga tetap memperhatikan kesehatan masyarakat miskin dengan peningkatan yang cukup signifikan pada fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dari sebesar 30,07% di tahun 2011 menjadi 44,65% di tahun 2015 dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat terhadap cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari tahun 2011-2015.

Kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terus meningkat setiap tahun tetapi masih sangat kecil yakni 5,1% di tahun 2015 menjadi 11,4% di tahun 2015. Hal ini terjadi karena masyarakat Serdang Bedagai sudah banyak menggunakan asuransi kesehatan BPJS sehingga tidak memerlukan lagi kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Perkembangan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2015 sudah mencapai angka 100%.

**Tabel 2.51**  
**Hasil Kinerja Urusan Kesehatan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Posyandu persatuan Balita	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk	44/ 100.000	44/ 100.000	44/ 100.000	48/ 100.000	55/ 100.000
3	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	26,17	29,8	30,88	30,18	34,99
4	Rasio Dokter Spesialis	2,67	5,13	5,12	13,85	15,114
5	Rasio Tenaga Para Medis Perawat	32	20,36	26,42	67,95	66,7
6	Rasio Tenaga Para Medis Bidan	50,84	46,85	46,07	188,76	114,67
7	Rasio Tenaga Para Medis Perawat Gigi	6,33	6,29	6,27	3,63	3,61
8	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87,59	89,20	92,14	92,8	89,8
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77,77	80,24	90,95	81,9	80,7
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
13	Fasilitasi Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	30,07	30,07	42,91	48,91	44,65
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	5,1	8,64	11,6	5,2	11,4
15	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	23,08	0	42,31	50	100

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai Tahun, 2016*

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing suatu daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dimaksud.

Panjang jalan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2015 mencapai 1.677,83 km yang terdiri dari 92,59 km jalan nasional, 121,29 km jalan provinsi dan 1.463,95 km jalan kabupaten. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 720,32 km atau sebesar 42,93% yang terdiri dari jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 87,91 km, jalan provinsi dengan kondisi baik dalam sepanjang 109,37 km dan jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 523,04 km. Rincian kondisi jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 5.2** berikut ini.

**Tabel 2.52**  
**Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi per Kecamatan Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	KOTARIH	17,33		9,75	10,17
2	SILINDA	13,89		7,28	4,13
3	BINTANG BAYU	6,7		9,45	21,8
4	DOLOK MASIHUL	34,93	0,29	40,64	66,76
5	SERBAJADI	18,62		14,38	23,3
6	SIPISPIS	21,59		16,08	55,22
7	DOLOK MERAWAN	23,67		12,46	28,54
8	TEBING TINGGI	41,31	8,9	29,89	29,59
9	TEBING SYAHBANDAR	7,83		17,12	43,68
10	BANDAR KHALIPAH	20,31	0,58	15,67	9,37
11	TANJUNG BERINGIN	35,1		23,64	12,54
12	SEI RAMPAH	53,82	0,98	11,84	9,21
13	SEI BAMBAN	44,57		31,37	11,04
14	TELUK MENGKUDU	31,51		76,53	16,36
15	PERBAUNGAN	71,65	5,98	56,46	59,58
16	PEGAJAHAN	31,87	4,49	52,53	17,06
17	PANTAI CERMIN	48,34	7,08	41,73	27,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>523,04</b>	<b>28,3</b>	<b>466,82</b>	<b>445,8</b>

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai, 2016



Kondisi jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2015 yakni jalan dalam kondisi baik 523,04 km atau sebesar 35,73%, kondisi sedang sepanjang 28,3 km, kondisi rusak sepanjang 466,82 km dan kondisi rusak berat sepanjang 445,8 km. Sesuai dengan luasnya yang paling besar, Kecamatan Perbaungan memiliki panjang jalan terpanjang dari kecamatan-kecamatan lain di Serdang Bedagai sedangkan Kecamatan Silinda memiliki panjang jalan terpendek sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel. 2.52** di atas.

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2015, panjang ruas jalan Kabupaten Serdang Bedagai adalah 1463,95 km tersebar di 17 kecamatan secara lengkap dijabarkan dalam **Tabel 2.53** sebagai berikut:

**Tabel 2.53**  
**Daftar Ruas Jalan Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
1	Ruas Jalan	Pantai Cermin Kiri - Besar II Terjun	Kec. Pantai Cermin	4.31
2	Ruas Jalan	Pantai Cermin Kiri - Simpang Desa Sementara	Kec. Pantai Cermin	4.80
3	Ruas Jalan	Sementara - Pematang Sijonam	Kec. Pantai Cermin	2.20
4	Ruas Jalan	Propinsi - Besar II Terjun	Kec. Pantai Cermin	2.00
5	Ruas Jalan	Kuala Lama - Ara Payung	Kec. Pantai Cermin	5.00
6	Ruas Jalan	Kuala Lama - Pematang Kasih	Kec. Pantai Cermin	2.60
7	Ruas Jalan	Lubuk Saban - Pematang Tatal	Kec. Pantai Cermin	1.80
8	Ruas Jalan	Naga Kisar - Pematang Tatal	Kec. Pantai Cermin	3.40
9	Ruas Jalan	Susur Pantai Kec. Pantai Cermin	Kec. Pantai Cermin	13.90
10	Ruas Jalan	Simp. Kota Pari - Pantai Cermin Kanan	Kec. Pantai Cermin	4.60
11	Ruas Jalan	Simp. Kota Pari - Sei Ular	Kec. Pantai Cermin	3.20
12	Ruas Jalan	Simp. Suka Ramai - Bts Ujung Rambung	Kec. Pantai Cermin	6.90
13	Ruas Jalan	Ujung Rambung - Suka Ramai	Kec. Pantai Cermin	2.10
14	Ruas Jalan	Sultan Serdang	Kec. Perbaungan	1.44
15	Ruas Jalan	Anggrek - Lubuk Cemara	Kec. Perbaungan	5.30
16	Ruas Jalan	Simpang Melati - Simpang Karang Anyer	Kec. Perbaungan	4.40
17	Ruas Jalan	Suka Jadi - Terjun Kampung Besar II	Kec. Perbaungan	2.71
18	Ruas Jalan	Kota Galuh - Suka Jadi	Kec. Perbaungan	2.77
19	Ruas Jalan	Simp. Jalan Garuda (Jalan Negara) - Senah (Batas Kecamatan Serbajadi)	Kec. Perbaungan	11.91
20	Ruas Jalan	Simp. Melati - Batas Melati Kebun	Kec. Perbaungan	7.40
21	Ruas Jalan	Tualang - Melati II	Kec. Perbaungan	1.80



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
22	Ruas Jalan	Tualang Reflika - Karang Anyer Kec. Pegajahan	Kec. Perbaungan	3.60
23	Ruas Jalan	Pematang Sijonam (Simp. Fortuna) - Lubuk Cemara Sampai Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	3.30
24	Ruas Jalan	Pematang Sijonam - Cinta Air Sampai Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	3.40
25	Ruas Jalan	Simpang Suka Beras (Jl. Negara) - Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	3.20
26	Ruas Jalan	Suka Beras - Lidah Tanah	Kec. Perbaungan	0.43
27	Ruas Jalan	Lidah Tanah - Lubuk Dendang Sampai Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	1.77
28	Ruas Jalan	Simpang Bengkel - Pematang Tatal Sampai Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	2.20
29	Ruas Jalan	Pematang Tatal - Naga Kisar	Kec. Perbaungan	1.54
30	Ruas Jalan	Lidah Tanah - Pematang Tatal	Kec. Perbaungan	3.00
31	Ruas Jalan	Deli Muda	Kec. Perbaungan	2.10
32	Ruas Jalan	Sei Sijenggi (Simp. Pasar II) - Batas Kecamatan Pegajahan	Kec. Perbaungan	2.52
33	Ruas Jalan	Tanjung Buluh - Kebun Socfindo	Kec. Perbaungan	0.60
34	Ruas Jalan	Simp. Sei Buluh - Nagalawan	Kec. Perbaungan	4.80
35	Ruas Jalan	Batas Desa Naga Kisar Susur Pantai - Batas Kec. T.Mengkudu	Kec. Perbaungan	4.10
36	Ruas Jalan	Karya	Kec. Perbaungan	1.90
37	Ruas Jalan	Kesatuan - Batas Kec. Pantai Cermin	Kec. Perbaungan	3.10
38	Ruas Jalan	Batang Terap - Jalan Propinsi	Kec. Perbaungan	1.30
39	Ruas Jalan	Kamboja	Kec. Perbaungan	0.15
40	Ruas Jalan	Laksana	Kec. Perbaungan	0.15
41	Ruas Jalan	Kemuning	Kec. Perbaungan	0.15
42	Ruas Jalan	Kenanga	Kec. Perbaungan	0.16
43	Ruas Jalan	Melur	Kec. Perbaungan	0.14
44	Ruas Jalan	Cempaka	Kec. Perbaungan	0.15
45	Ruas Jalan	Mawar	Kec. Perbaungan	0.15
46	Ruas Jalan	Rumah Sakit	Kec. Perbaungan	0.14
47	Ruas Jalan	Melinda II	Kec. Perbaungan	0.76
48	Ruas Jalan	Melinda III	Kec. Perbaungan	0.76
49	Ruas Jalan	Coklat	Kec. Perbaungan	0.75
50	Ruas Jalan	Kamboja	Kec. Perbaungan	0.14
51	Ruas Jalan	Laksana	Kec. Perbaungan	0.14
52	Ruas Jalan	Kemuning	Kec. Perbaungan	0.14
53	Ruas Jalan	Melur	Kec. Perbaungan	0.14
54	Ruas Jalan	Cempaka	Kec. Perbaungan	0.14
55	Ruas Jalan	Lidah Tanah (Simpang Tangkis) - Desa Lubuk Bayas	Kec. Perbaungan	6.50
56	Ruas Jalan	Simpang Pantai Kelang - Pantai Kelang	Kec. Perbaungan	1.40
57	Ruas Jalan	Batas Kec. Perbaungan Dengan Kec. Pegajahan - Batas Sena Dengan Pulo Gambar	Kec. Pegajahan	8.10



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
58	Ruas Jalan	Pegajahan - Beng Abing	Kec. Pegajahan	15.00
59	Ruas Jalan	Simp. Kantor Camat Pegajahan - Batas Suka Sari Dengan Perkebunan Rambung Sialang	Kec. Pegajahan	5.10
60	Ruas Jalan	Batas Petuaran Hilir - Perkebunan Tanah Raja s/d Batas Lestari Dadi dan Melati	Kec. Pegajahan	4.70
61	Ruas Jalan	Simp. Dwi Kora - Tanjung Putus	Kec. Pegajahan	7.40
62	Ruas Jalan	Matapao - Sialang Buah	Kec. Teluk Mengkudu	4.60
63	Ruas Jalan	Simpang Pematang Pasir - Batas Perbaungan	Kec. Teluk Mengkudu	4.10
64	Ruas Jalan	Sialang Buah - P. Kuala	Kec. Teluk Mengkudu	12.20
65	Ruas Jalan	Pematang Guntung - Suka Jadi	Kec. Teluk Mengkudu	5.80
66	Ruas Jalan	Makmur - Pasar Rodi	Kec. Teluk Mengkudu	4.30
67	Ruas Jalan	Liberia - Setrak	Kec. Teluk Mengkudu	2.90
68	Ruas Jalan	Tanah Raja	Kec. Teluk Mengkudu	1.40
69	Ruas Jalan	Simpang Sialang Buah - Batas Kecamatan Tanjung Beringin	Kec. Teluk Mengkudu	5.80
70	Ruas Jalan	Bandar Khalipah - Batas Kabupaten	Kec. Bandar Khalipah	4.60
71	Ruas Jalan	Sidikalang Sei Sarimah - Pematang Terang	Kec. Bandar Khalipah	7.70
72	Ruas Jalan	M. Tahir	Kec. Bandar Khalipah	1.80
73	Ruas Jalan	Blok Nol Jangga	Kec. Bandar Khalipah	1.90
74	Ruas Jalan	Penaga	Kec. Bandar Khalipah	2.44
75	Ruas Jalan	Mangga Dua	Kec. Bandar Khalipah	0.95
76	Ruas Jalan	Aeknauli	Kec. Bandar Khalipah	1.70
77	Ruas Jalan	Pasar Balok	Kec. Bandar Khalipah	1.10
78	Ruas Jalan	Pokok Jengkol	Kec. Bandar Khalifah	1.50
79	Ruas Jalan	Kampung Pon - Jalan Bakaran Batu (Kelapa Tinggi)	Kec. Sei Bamban	8.30
80	Ruas Jalan	Sei Bamban - Sei Belutu (Bts Kecamatan)	Kec. Sei Bamban	8.80
81	Ruas Jalan	Taman Sei Bamban - Paya Mabar	Kec. Sei Bamban	9.00
82	Ruas Jalan	Kp. Pon - Kp. Hilir	Kec. Sei Bamban	1.50
83	Ruas Jalan	Sei Buluh - Panglong	Kec. Sei Bamban	3.80
84	Ruas Jalan	Pringgian Kp. Pon - Jalan Sei Buluh	Kec. Sei Bamban	4.10
85	Ruas Jalan	Suka Dame - Paya Lombang	Kec. Sei Bamban	0.45
86	Ruas Jalan	Pintu Air - Jalan Pasar Serong	Kec. Sei Bamban	3.40
87	Ruas Jalan	Pasar Serong - Jalan Bakaran Batu	Kec. Sei Bamban	2.10
88	Ruas Jalan	Obor - Kp. Lalang	Kec. Sei Bamban	1.60
89	Ruas Jalan	Rukun	Kec. Sei Bamban	0.96
90	Ruas Jalan	Merah Putih - Jalan Pasar Serong	Kec. Sei Bamban	0.77



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
91	Ruas Jalan	Simpang Sionggang - Martebing	Kec. Sei Bambi	2.70
92	Ruas Jalan	Sei Bambi - Sei Rampah	Kec. Sei Bambi	6.50
93	Ruas Jalan	Penggalangan - Sei Rampah	Kec. Sei Bambi	1.90
94	Ruas Jalan	Belidahan - Bts. Kecamatan	Kec. Sei Rampah	15.30
95	Ruas Jalan	SMA Negeri - Cempedak Lombang	Kec. Sei Rampah	5.90
96	Ruas Jalan	Simpang Pasar Rodi (Jl. Nasional) - Tanjung Beringin	Kec. Sei Rampah	4.80
97	Ruas Jalan	Pasar Rodi - Jalan Sentosa	Kec. Sei Rampah	2.78
98	Ruas Jalan	Pajak Sei Rampah - Bts. Kecamatan	Kec. Sei Rampah	3.70
99	Ruas Jalan	Masjid Jamik Sei Rampah - Pematang Ganjang	Kec. Sei Rampah	4.90
100	Ruas Jalan	Sinangkong - Jalan Belidahan	Kec. Sei Rampah	1.50
101	Ruas Jalan	STM Firdaus - Jalan SMA Negeri	Kec. Sei Rampah	0.67
102	Ruas Jalan	Tanah Tinggi - Jalan Firdaus	Kec. Sei Rampah	0.63
103	Ruas Jalan	Gardena - Jalan Meteran Firdaus	Kec. Sei Rampah	1.00
104	Ruas Jalan	Meteran - Jalan SMA Negeri Firdaus	Kec. Sei Rampah	1.00
105	Ruas Jalan	Pasar Rodi - Jalan Sei Rejo	Kec. Sei Rampah	4.00
106	Ruas Jalan	Sei Rejo - Jalan Bedagai (Jln. Propinsi)	Kec. Sei Rampah	3.10
107	Ruas Jalan	Kp. Pala - Jalan Bedagai (Jln. Propinsi)	Kec. Sei Rampah	1.80
108	Ruas Jalan	Kp. Ibus - Bts Kebun Lonsum	Kec. Sei Rampah	1.90
109	Ruas Jalan	Penggalangan - Bts. Kecamatan	Kec. Sei Rampah	0.20
110	Ruas Jalan	Pasar Senen - Pematang Ganjang	Kec. Sei Rampah	2.80
111	Ruas Jalan	Rukun - Jalan Sentosa	Kec. Sei Rampah	1.10
112	Ruas Jalan	Pasar Baru - Jalan Gardena	Kec. Sei Rampah	0.68
113	Ruas Jalan	Teratai - Pematang Ganjang	Kec. Sei Rampah	1.40
114	Ruas Jalan	Dalim - Pematang Ganjang	Kec. Sei Rampah	1.10
115	Ruas Jalan	Belidahan - Firdaus Estate	Kec. Sei Rampah	0.99
116	Ruas Jalan	Tanjung Beringin - Pematang Terang	Kec. Tanjung Beringin	7.20
117	Ruas Jalan	Nagur - Bagan Kuala	Kec. Tanjung Beringin	5.60
118	Ruas Jalan	Bts. Kecamatan - Simp. Nagur	Kec. Tanjung Beringin	5.70
119	Ruas Jalan	Nagur - Pekan Tnj. Beringin	Kec. Tanjung Beringin	0.71
120	Ruas Jalan	Tanjung Beringin - Tebing Tinggi	Kec. Tanjung Beringin	8.60
121	Ruas Jalan	Pematang Cermai - Tebing Tinggi	Kec. Tanjung Beringin	3.70
122	Ruas Jalan	Kpt. Wan Rahmad	Kec. Tanjung Beringin	0.74
123	Ruas Jalan	Sena - Jalan Dungun	Kec. Tanjung Beringin	0.52
124	Ruas Jalan	Mangga Dua - Jalan Nagur	Kec. Tanjung Beringin	3.40
125	Ruas Jalan	Ruas Jalan Silinda - Bandar Bayu Kotarih (Jembatan Bane)	Kec. Silinda	5.70
126	Ruas Jalan	Propinsi - Kulasar	Kec. Silinda	1.30



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
127	Ruas Jalan	Propinsi - Batu Masangi	Kec. Silinda	1.80
128	Ruas Jalan	Simp. Silinda - Pamah	Kec. Silinda	4.60
129	Ruas Jalan	Damak Jambu - Pagar Manik	Kec. Silinda	1.30
130	Ruas Jalan	Simp. Bandar Jadi - Tapak Meriah	Kec. Silinda	2.20
131	Ruas Jalan	Tapak Meriah - Damak Glugur	Kec. Silinda	3.30
132	Ruas Jalan	Pagar Manik - Jembatan Gantung Pagar Gunung	Kec. Silinda	0.39
133	Ruas Jalan	Simpang SMA N I Serbajadi - Simpang Desa Pulo Gambar	Kec. Serbajadi	6.02
134	Ruas Jalan	Kuala Bali - Bts Kecamatan Bintang Bayu	Kec. Serbajadi	2.60
135	Ruas Jalan	Bts Jembatan Sei Ular Pulo Gambar - Senah	Kec. Serbajadi	3.52
136	Ruas Jalan	Serba Jadi - Bah Sidua-dua	Kec. Serbajadi	7.07
137	Ruas Jalan	Serba Jadi - Manggis	Kec. Serbajadi	1.48
138	Ruas Jalan	Manggis - Kelapa Bejohom	Kec. Serbajadi	6.25
139	Ruas Jalan	Menuju Pesantren	Kec. Serbajadi	0.70
140	Ruas Jalan	Karang Tengah - Baja Ronggi	Kec. Serbajadi	1.21
141	Ruas Jalan	Kuala Bali - Karang Tengah	Kec. Serbajadi	1.18
142	Ruas Jalan	Pekan Dolok Masihul - Perumnas Bts Sei rampah	Kec. Dolok Masihul	8.85
143	Ruas Jalan	Kerapuh - Batas Simalungun	Kec. Dolok Masihul	7.82
144	Ruas Jalan	Simpang Dolok Manampang - Batas Kec. Bintang Bayu	Kec. Dolok Masihul	1.88
145	Ruas Jalan	Pekan Dolok Masihul	Kec. Dolok Masihul	0.95
146	Ruas Jalan	Pekan Dolok Masihul - Tegal Sari	Kec. Dolok Masihul	2.90
147	Ruas Jalan	Tegal Sari - Dame	Kec. Dolok Masihul	2.72
148	Ruas Jalan	Dame - Pardomuan	Kec. Dolok Masihul	1.46
149	Ruas Jalan	Martebing	Kec. Dolok Masihul	0.49
150	Ruas Jalan	Banten	Kec. Dolok Masihul	1.13
151	Ruas Jalan	Batu 13 - Blok 10	Kec. Dolok Masihul	1.46
152	Ruas Jalan	Blok 10 - Hutanauli	Kec. Dolok Masihul	1.19
153	Ruas Jalan	Blok 10 - Kota Tengah	Kec. Dolok Masihul	4.81
154	Ruas Jalan	Batu XII - Silau Merawan	Kec. Dolok Masihul	1.15
155	Ruas Jalan	Malasori	Kec. Tebing Tinggi - Kec. Dolok Masihul	1.28
156	Ruas Jalan	Kerapuh - Dolok Sagala	Kec. Dolok Masihul	5.10
157	Ruas Jalan	Bukit Cermin	Kec. Sipispis - Kec. Dolok Masihul	3.74
158	Ruas Jalan	Kota Tengah - Baja Ronggi	Kec. Dolok Masihul	6.69
159	Ruas Jalan	Sarang Ginting - Baja Ronggi	Kec. Dolok Masihul	3.68
160	Ruas Jalan	Baja Ronggi - Bah Sidua-dua	Kec. Serbajadi - Kec. Dolok Masihul	3.20
161	Ruas Jalan	Pulo Durian	Kec. Dolok Masihul	0.42
162	Ruas Jalan	Dari Jembatan Paku - Kotarih	Kec. Galang (Kab. Deli Serdang) - Kec. Kotarih	6.20
163	Ruas Jalan	Kotarih - Huta Galuh	Kec. Kotarih	7.30



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
164	Ruas Jalan	Kotarih Baru - Bahisam	Kec. Kotarih	2.40
165	Ruas Jalan	Bahisam - Gunung Gajah	Kec. Kotarih	2.70
166	Ruas Jalan	Bandar Bayu - Sialtong	Kec. Kotarih	2.50
167	Ruas Jalan	Perbahingan	Kec. Kotarih	1.20
168	Ruas Jalan	Kabupaten - Sei Ujan - ujan	Kec. Kotarih	2.80
169	Ruas Jalan	Kotarih - Durian Kondot	Kec. Kotarih	4.00
170	Ruas Jalan	Simp. Bandar Bayu - Batas Kec. Silindak (Jembatan Bane)	Kec. Kotarih	1.00
171	Ruas Jalan	Bandar Negeri - Panambeian	Kec. Bintang Bayu	5.30
172	Ruas Jalan	Bandar Negeri - Bandar Pinang	Kec. Bintang Bayu	2.86
173	Ruas Jalan	Bandar Pinang - Batas Kec. Serba Jadi	Kec. Bintang Bayu	3.38
174	Ruas Jalan	Ujung Negeri Kahan	Kec. Bintang Bayu	2.11
175	Ruas Jalan	Bandar Negeri - Dolok Masango	Kec. Bintang Bayu	2.04
176	Ruas Jalan	Siahap - Mariah Dolok	Kec. Bintang Bayu	2.39
177	Ruas Jalan	Pegajahan Kahan - Gudang Garam	Kec. Bintang Bayu	2.05
178	Ruas Jalan	Ujung Negeri Hulu	Kec. Bintang Bayu	1.20
179	Ruas Jalan	Kampung Kristen	Kec. Bintang Bayu	0.89
180	Ruas Jalan	Kampung Lalang - Jembatan Apros	Kec. Tebing Tinggi	11.06
181	Ruas Jalan	Paya Lombang - Suka Damai	Kec. Tebing Tinggi	3.30
182	Ruas Jalan	Puskesmas Paya Lombang	Kec. Tebing Tinggi	6.50
183	Ruas Jalan	Kuta Baru - Tebing Tinggi	Kec. Tebing Tinggi	5.20
184	Ruas Jalan	Rambutan - Simpang Pondok Batu	Kec. Tebing Tinggi	5.80
185	Ruas Jalan	Pertapaan - Watas Kecamatan Dolok Masihul	Kec. Tebing Tinggi	4.10
186	Ruas Jalan	Watas Kota Tebing Tinggi - Sei Putih	Kec. Tebing Tinggi	4.40
187	Ruas Jalan	Paya Bagas - Batas Kecamatan Sei Bamban	Kec. Tebing Tinggi	1.20
188	Ruas Jalan	Pabatu	Kec. Tebing Tinggi	6.40
189	Ruas Jalan	Naga Kesiangan - Kedai Damar	Kec. Tebing Tinggi	1.00
190	Ruas Jalan	Naga Buntu - Batas Kota Tebing Tinggi	Kec. Tebing Tinggi	9.10
191	Ruas Jalan	Paya Mabur - SD Negeri	Kec. Tebing Tinggi	0.81
192	Ruas Jalan	Bah Sumbu - Pabatu	Kec. Tebing Tinggi	1.50
193	Ruas Jalan	Bah Sumbu - Batas Perkebunan	Kec. Tebing Tinggi	1.10
194	Ruas Jalan	Sei Priok - Batas Kecamatan Sei Bamban	Kec. Tebing Tinggi	2.40
195	Ruas Jalan	Paya Lombang - Batas Kecamatan Bandar Khalifah	Kec. Tebing Tinggi	1.60
196	Ruas Jalan	Kuta Baru - Sungai Pinang	Kec. Tebing Tinggi	1.70
197	Ruas Jalan	Paya Lombang - Sei Padang	Kec. Tebing Tinggi	5.30
198	Ruas Jalan	Penggalangan - Manggis	Kec. T. Syahbandar	4.60
199	Ruas Jalan	Penggalangan - Sei Padang	Kec. T. Syahbandar	1.40
200	Ruas Jalan	Watas Kota Tebing Tinggi - Sibulan	Kec. T. Syahbandar	9.30



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
201	Ruas Jalan	Paya Pinang - Naga Rakyat	Kec. T. Syahbandar	1.20
202	Ruas Jalan	Penggalangan - Batas Perkebunan	Kec. T. Syahbandar	1.20
203	Ruas Jalan	Binjai - Jembatan Perkebunan	Kec. T. Syahbandar	1.60
204	Ruas Jalan	Watas Kecamatan Tebing Syahbandar - Jalan Negara	Kec. Dolok Merawan	11.20
205	Ruas Jalan	Dolok Merawan - SMP Negeri	Kec. Dolok Merawan	4.90
206	Ruas Jalan	Limbong - Batas Kabupaten Simalungun	Kec. Dolok Merawan	1.60
207	Ruas Jalan	Gunung Para - Ancol	Kec. Dolok Merawan	9.70
208	Ruas Jalan	Simpang Sibatu - Batu - Jalan Negara	Kec. Dolok Merawan	2.90
209	Ruas Jalan	Pendidikan	Kec. Dolok Merawan	0.33
210	Ruas Jalan	Korajim - Bah Damar	Kec. Dolok Merawan	2.00
211	Ruas Jalan	Bangun Rejo - Watas Simalungun	Kec. Dolok Merawan	1.60
212	Ruas Jalan	Gerellia (Simpang Pendidikan)	Kec. Dolok Merawan	0.77
213	Ruas Jalan	Gunung Monaco - Pondok Seng	Kec. Sipispis	7.40
214	Ruas Jalan	Bandar Bejambu - Batas Kab. Simalungun	Kec. Sipispis	10.00
215	Ruas Jalan	Gunung Monaco - Batas Kabupaten Simalungun	Kec. Sipispis	7.00
216	Ruas Jalan	Simalas - Batas Kabupaten Simalungun	Kec. Sipispis	5.10
217	Ruas Jalan	Serba Nanti - Tinokkah	Kec. Sipispis	6.30
218	Ruas Jalan	Marubun - Rimbun	Kec. Sipispis	9.60
219	Ruas Jalan	Serbananti - Marubun	Kec. Sipispis	3.90
220	Ruas Jalan	Marubun - Baja Dolok	Kec. Sipispis	8.60
221	Ruas Jalan	Sampang Buah - Marubun	Kec. Sipispis	4.30
222	Ruas Jalan	Simpang Sigiutan - Jembatan Nagori	Kec. Sipispis	1.20
223	Ruas Jalan	Marjanji - Sorbangan Lama	Kec. Sipispis	0.78
224	Ruas Jalan	Rimbun - Kp. Lalang	Kec. Sipispis	4.70
225	Ruas Jalan	Pekan Sipispis - Jalan Kabupaten	Kec. Sipispis	1.20
226	Ruas Jalan	Marubun	Kec. Sipispis	1.20
227	Ruas Jalan	Buluh Duri - Bandar Selamat	Kec. Sipispis	1.70
228	Ruas Jalan	AMD - Batas Perkebunan	Kec. Sipispis	2.20
229	Ruas Jalan	Paya Pinang - Watas Kab. Batu Bara	Kec. T. Syahbandar	10.00
		<b>A. Jumlah Panjang Jalan (Km)</b>		<b>783.64</b>
		<b>B. Persentase Jalan (%)</b>		<b>100%</b>





No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
	<b>RUAS JALAN DESA</b>			
230	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Desa Kota Pari	Pantai Cermin	2
231	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Desa Kota Pari	Pantai Cermin	2.10
232	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V Desa Kota Pari	Pantai Cermin	2.90
233	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun II Desa Naga Kisar	Pantai Cermin	0.77
234	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Desa Celawan	Pantai Cermin	0.78
235	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun XII Desa Celawan	Pantai Cermin	3.10
236	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V Desa Ujung Rambung	Pantai Cermin	0.79
237	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VI Desa Ujung Rambung	Pantai Cermin	1.00
238	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Desa Lubuk Saban	Pantai Cermin	1.91
239	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Desa Lubuk Saban	Pantai Cermin	1.51
240	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V Desa Lubuk Saban	Pantai Cermin	2.10
241	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Desa Pematang Kasih	Pantai Cermin	0.43
242	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Desa Sementara	Pantai Cermin	2.10
243	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun II Ara Payung	Pantai Cermin	1.94
244	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV dan V Ara Payung	Pantai Cermin	2.40
245	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Kuala Lama	Pantai Cermin	0.33
246	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V dan VIII Kuala Lama	Pantai Cermin	2.67
247	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Pantai Cermin Kanan	Pantai Cermin	0.19
248	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun II Pantai Cermin Kanan	Pantai Cermin	0.22
249	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Pantai Cermin Kanan	Pantai Cermin	2.00
250	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	0.84
251	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V dan III Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	1.20
252	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Besar II Terjun	Pantai Cermin	1.00
253	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun II, VII, VIII Besar II Terjun	Pantai Cermin	3.51
254	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Ujung Rambung	Pantai Cermin	1.61



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
255	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VIII Ujung Rambung	Pantai Cermin	0.44
256	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VII Desa Ujung Rambung	Pantai Cermin	0.61
257	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Desa Ujung Rambung	Pantai Cermin	1.10
258	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Ujung Rambung	Pantai Cermin	0.67
259	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun XI Desa Cilawan	Pantai Cermin	0.47
260	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Desa Cilawan	Pantai Cermin	0.81
261	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VI Desa Cilawan	Pantai Cermin	2.79
262	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VII Desa Cilawan	Pantai Cermin	0.50
263	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VIII&IX Desa Cilawan	Pantai Cermin	2.35
264	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun XI Desa Kota Pari	Pantai Cermin	1.30
265	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IX Desa Kota Pari	Pantai Cermin	1.40
266	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VIII Desa Kota Pari	Pantai Cermin	0.90
267	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Desa Kota Pari	Pantai Cermin	0.54
268	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun IV Pantai Cermin Kanan	Pantai Cermin	1.54
269	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun III Naga Kisar	Pantai Cermin	0.71
270	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VI Dan VII Desa Naga Kisar	Pantai Cermin	2.64
271	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Desa Naga Kisar	Pantai Cermin	0.27
272	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun V & VIII Desa Cilawan	Pantai Cermin	1.80
273	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I dan IX Desa Kuala Lama	Pantai Cermin	1.30
274	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun II Desa Besar II Terjun	Pantai Cermin	0.36
275	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Desa Besar II Terjun	Pantai Cermin	1.03
276	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun VI Kebon Ujung Rambung	Pantai Cermin	1.85
277	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II	Dusun I Pantai Matik Desa Lubuk Saban	Pantai Cermin	1.30
278	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan II		Pegajahan	0.90
279	Ruas Jalan Kelurahan Melati Kebon Linkungan III		Pegajahan	0.60
280	Ruas Jalan Desa Bingkat Dusun IX		Pegajahan	1.80



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
281	Ruas Jalan Dusun Desa Bingkat Dusun X	Pegajahan	1.30
282	Ruas Jalan Dusun Desa Bingkat Dusun II	Pegajahan	1.63
283	Ruas Jalan Dusun Desa Bingkat Dusun I	Pegajahan	0.84
284	Ruas Jalan Dusun Batu 50	Pegajahan	1.00
285	Ruas Jalan Dusun Bersama	Pegajahan	1.16
286	Ruas Jalan Dusun Berkah	Pegajahan	0.67
287	Ruas Jalan Dusun Tegal Sari	Pegajahan	0.78
288	Ruas Jalan Dusun Ratu	Pegajahan	1.50
289	Ruas Jalan Desa Pondok Tengah Dusun I	Pegajahan	1.42
290	Ruas Jalan Desa Pondok Tengah Dusun II	Pegajahan	0.51
291	Ruas Jalan Desa Senah Dusun III	Pegajahan	0.48
292	Ruas Jalan Dusun I Desa Tanjung Putus	Pegajahan	1.11
293	Ruas Jalan Dusun II Desa Tanjung Putus	Pegajahan	3.90
294	Ruas Jalan Dusun I Desa Perjuangan	Pegajahan	1.60
295	Ruas Jalan Dusun IV Karang Sari - Ds I Perjuangan	Pegajahan	1.00
296	Ruas Jalan Dusun III Sri Asih	Pegajahan	0.85
297	Ruas Jalan Dusun Pelita	Pegajahan	1.00
298	Ruas Jalan Dusun IA Desa Sukasari	Pegajahan	1.00
299	Ruas Jalan Dusun I B Desa Sukasari	Pegajahan	1.92
300	Ruas Jalan Dusun II Desa Sukasari	Pegajahan	1.53
301	Ruas Jalan Dusun III Desa Sukasari	Pegajahan	1.89
302	Ruas Jalan Dusun IV A Desa Sukasari	Pegajahan	1.82
303	Ruas Jalan Dusun IV B Desa Sukasari	Pegajahan	0.28
304	Ruas Jalan Dusun IV C Desa Sukasari	Pegajahan	0.84
305	Ruas Jalan Dusun V Desa Sukasari	Pegajahan	3.01
306	Ruas Jalan Dusun VI Desa Sukasari	Pegajahan	0.67
307	Ruas Jalan Dusun III Desa Lestarijadi	Pegajahan	0.40
308	Ruas Jalan Dusun I Desa Petuaran Hulu	Pegajahan	1.60
309	Ruas Jalan Dusun II Desa Petuaran Hulu	Pegajahan	0.15
310	Ruas Jalan Dusun III Desa Petuaran Hulu	Pegajahan	0.66
311	Ruas Jalan Dusun III Desa Petuaran Hilir	Pegajahan	3.30
312	Ruas Jalan Dusun IV Desa Petuaran Hilir	Pegajahan	1.48
313	Ruas Jalan Dusun V Desa Petuaran Hilir	Pegajahan	1.20



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
314	Ruas Jalan Dusun VI Desa Petuaran Hilir		Pegajahan	0.63
315	Ruas Jalan Dusun VII, VIII Desa Petuaran Hilir		Pegajahan	0.78
316	Ruas Jalan Dusun IX Desa Petuaran Hilir		Pegajahan	1.80
317	Ruas Jalan Dusun II Desa Beng Abing		Pegajahan	1.10
318	Ruas Jalan Dusun II, III Desa Beng Abing		Pegajahan	1.14
319	Ruas Jalan Dusun I Desa Jati Mulyo		Pegajahan	0.97
320	Ruas Jalan Dusun II, III Desa Jati Mulyo		Pegajahan	1.90
321	Ruas Jalan Dusun IV Desa Jati Mulyo		Pegajahan	2.10
322	Ruas Jalan Dusun V Desa Jati Mulyo		Pegajahan	1.70
323	Ruas Jalan Dusun I Desa Karang Anyer		Pegajahan	1.48
324	Ruas Jalan Dusun II Desa Karang Anyer		Pegajahan	1.19
325	Ruas Jalan Dusun III Desa Karang Anyer		Pegajahan	0.96
326	Ruas Jalan Dusun III Desa Karang Anyer	Dusun V Pegajahan	Pegajahan	0.81
327	Ruas Jalan Dusun III Desa Karang Anyer	Dusun VIII P. Hilir	Pegajahan	0.58
328	Ruas Jalan Dusun III Desa Karang Anyer	Dusun II P. Hilir	Pegajahan	0.24
329	Ruas Jalan Dusun III Desa Karang Anyer	Dusun I Beng Abing	Pegajahan	0.75
330	Ruas Jalan Dusun I Desa Liberia		Teluk Mengkudu	2.24
331	Ruas Jalan Dusun II Desa Liberia		Teluk Mengkudu	2.00
332	Ruas Jalan Dusun III Desa Liberia		Teluk Mengkudu	1.41
333	Ruas Jalan Dusun I, II, III Desa Pematang Setrak		Teluk Mengkudu	7.39
334	Ruas Jalan Dusun VI, VII, VIII Desa Pematang Setrak		Teluk Mengkudu	4.20
335	Ruas Jalan Dusun II, III, V Desa Mata Pao		Teluk Mengkudu	5.29
336	Ruas Jalan Dusun IV Desa Mata Pao		Teluk Mengkudu	1.22
337	Ruas Jalan Dusun III Desa Pasar Baru		Teluk Mengkudu	1.99
338	Ruas Jalan Dusun II Limau Sunde Desa Pekan Sialang Buah		Teluk Mengkudu	2.60
339	Ruas Jalan Dusun IV Kebun Ubi Desa Pekan Sialang Buah		Teluk Mengkudu	0.51
340	Ruas Jalan Dusun II Desa Sialang Buah		Teluk Mengkudu	0.32
341	Ruas Jalan Dusun VI Desa Sialang Buah		Teluk Mengkudu	0.59
342	Ruas Jalan Dusun I, II, III, IV, Desa Pematang Guntung		Teluk Mengkudu	5.13
343	Ruas Jalan Dusun I, II Desa Sentang		Teluk Mengkudu	2.93
344	Ruas Jalan Dusun I, III, V, VI Desa Bogak Besar		Teluk Mengkudu	8.16



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
345	Ruas Jalan Dusun I,III,IV,V Desa Pematang Kuala		Teluk Mengkudu	6.80
346	Ruas Jalan Dusun I,II Desa Makmur		Teluk Mengkudu	2.83
347	Ruas Jalan Dusun IV, VI Desa Makmur		Teluk Mengkudu	1.15
348	Ruas Jalan Dusun Ladang Lama I, II Paya Nibung I, II Darul Aman Desa Sei Buluh		Teluk Mengkudu	15.52
349	Ruas Jalan Dusun Suka Makmur, Pematang Pasir, Ulim Desa Sei Buluh		Teluk Mengkudu	7.31
350	Ruas Jalan Dusun Bakti Desa Sei Buluh		Teluk Mengkudu	0.37
351	Ruas Jalan Dusun Bakti Desa Sei Buluh	Dusun V Pematang Setrak	Teluk Mengkudu	0.67
352	Ruas Jalan Dusun Bakti Desa Sei Buluh	Jalan Kebon Desa Pematang Setrak	Teluk Mengkudu	0.95
353	Ruas Jalan Dusun Rambe Desa Melati II		Perbaungan	1.70
354	Ruas Jalan Dusun Kuini Desa Melati II		Perbaungan	1.60
355	Ruas Jalan Dusun Kemiri Desa Melati II		Perbaungan	1.40
356	Ruas Jalan Dusun Jambu Desa Melati II		Perbaungan	1.60
357	Ruas Jalan Dusun Pala Desa Melati II		Perbaungan	1.20
358	Ruas Jalan Dusun Sukun Desa Melati II		Perbaungan	1.60
359	Ruas Jalan Dusun Delima Sukun Desa Melati II		Perbaungan	1.70
360	Ruas Jalan Dusun Cempedak Sukun Desa Melati II		Perbaungan	1.10
361	Ruas Jalan Dusun Kelapa Desa Melati II		Perbaungan	0.98
362	Ruas Jalan Dusun Jeruk Desa Melati II		Perbaungan	1.70
363	Ruas Jalan Dusun Belimbing Desa Melati II		Perbaungan	1.70
364	Ruas Jalan Dusun Salak Desa Melati II		Perbaungan	1.70
365	Ruas Jalan Dusun Langsung Desa Melati II		Perbaungan	1.70
366	Ruas Jalan Dusun Jering Desa Melati II		Perbaungan	1.20
367	Ruas Jalan Dusun Jering I Desa Melati II		Perbaungan	0.23
368	Ruas Jalan Dusun Randu Pisang Desa Melati II		Perbaungan	3.80
369	Ruas Jalan Dusun Mangga Desa Melati II		Perbaungan	0.66
370	Ruas Jalan Dusun Duku Desa Melati II		Perbaungan	1.10
371	Ruas Jalan Dusun Durian Desa Melati II		Perbaungan	2.00
372	Ruas Jalan Dusun Kenari Desa Melati II		Perbaungan	1.00
373	Ruas Jalan Dusun Nangka Desa Melati II		Perbaungan	0.56



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
374	Ruas Jalan Dusun Manggis Desa Melati II	Perbaungan	0.29
375	Ruas Jalan Dusun I Desa Kota Galuh	Perbaungan	0.43
376	Ruas Jalan Dusun III Desa Kota Galuh	Perbaungan	1.50
377	Ruas Jalan Dusun VII Kelurahan Tualang	Perbaungan	0.80
378	Ruas Jalan Dusun V Kelurahan Tualang	Perbaungan	0.83
379	Ruas Jalan Dusun VI Kelurahan Tualang	Perbaungan	0.46
380	Ruas Jalan Dusun IX Kelurahan Tualang	Perbaungan	1.30
381	Ruas Jalan Dusun I Desa Citaman Jernih	Perbaungan	1.20
382	Ruas Jalan Dusun II Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.88
383	Ruas Jalan Dusun III Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.51
384	Ruas Jalan Dusun IV Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.82
385	Ruas Jalan Dusun V Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.47
386	Ruas Jalan Dusun VI Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.49
387	Ruas Jalan Dusun VII Desa Citaman Jernih	Perbaungan	0.43
388	Ruas Jalan Lingkungan III Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.94
389	Ruas Jalan Lingkungan Tempel/Jl Perdamaian Kelurahan Simp. Tiga Pekan	Perbaungan	0.63
390	Ruas Jalan Mesjid Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.48
391	Ruas Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.41
392	Ruas Jalan Lingkungan Manggis Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	0.33
393	Ruas Jalan Gg. Nangka Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	0.29
394	Ruas Jalan Malinda II Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	0.76
395	Ruas Jalan Malinda III Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	0.76
396	Ruas Jalan Malinda IV Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	0.75
397	Ruas Jalan Coklat Kelurahan Batang Terap	Perbaungan	1.85
398	Ruas Jalan Akasia Dusun I Desa Jambur Pulau	Perbaungan	0.63
399	Ruas Jalan Laksana Dusun II Desa Jambur Pulau	Perbaungan	0.44
400	Ruas Jalan Dusun III Desa Jambur Pulau	Perbaungan	0.38
401	Ruas Jalan Kuburan Desa Jambur Pulau	Perbaungan	0.27
402	Ruas Jalan Rukun Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.36
403	Ruas Jalan Teratai Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.58



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
404	Ruas Jalan Alwasliyah Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.45
405	Ruas Jalan Pekong Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.51
406	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Cemara	Perbaungan	3.37
407	Ruas Jalan Dusun III Desa Lubuk Cemara	Perbaungan	0.84
408	Ruas Jalan Dusun I Desa Suka Jadi	Perbaungan	0.49
409	Ruas Jalan Dusun II Desa Suka Jadi	Perbaungan	0.37
410	Ruas Jalan Dusun I Desa Cinta Air	Perbaungan	1.50
411	Ruas Jalan Dusun IV Desa Cinta Air	Perbaungan	1.50
412	Ruas Jalan Dusun III Desa Pematang Sijonam	Perbaungan	1.80
413	Ruas Jalan Dusun II Desa Lidah Tanah	Perbaungan	0.26
414	Ruas Jalan Dusun III Desa Lidah Tanah	Perbaungan	0.33
415	Ruas Jalan Dusun II Desa Pematang Tatal	Perbaungan	0.70
416	Ruas Jalan Dusun III Desa Pematang Tatal	Perbaungan	0.73
417	Ruas Jalan Dusun II Desa Kesatuan	Perbaungan	0.40
418	Ruas Jalan Dusun A Tanah Merah	Perbaungan	1.50
419	Ruas Jalan Dusun B Tanah Merah	Perbaungan	0.65
420	Ruas Jalan Dusun C Tanah Merah	Perbaungan	1.60
421	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Rotan	Perbaungan	1.30
422	Ruas Jalan Dusun I Lubuk Bayas	Perbaungan	0.67
423	Ruas Jalan Dusun II Lubuk Bayas	Perbaungan	0.78
424	Ruas Jalan Dusun IV Lubuk Bayas	Perbaungan	2.30
425	Ruas Jalan Dusun I Desa Naga Lawan	Perbaungan	0.23
426	Ruas Jalan Dusun II Desa Naga Lawan	Perbaungan	0.81
427	Ruas Jalan Dusun III Desa Naga Lawan	Perbaungan	2.20
428	Ruas Jalan Dusun II Desa Tanjung Buluh	Perbaungan	0.43
429	Ruas Jalan Dusun I Desa Sei Sijenggi	Perbaungan	0.18
430	Ruas Jalan Dusun II Desa Sei Sijenggi	Perbaungan	0.22
431	Ruas Jalan Dusun Sumber Sari Desa Melati II	Perbaungan	0.91
432	Ruas Jalan Sei Tontong Desa Melati II	Perbaungan	3.40
433	Ruas Jalan Gg.Nangka kel. Smpang Tiga Pekan	Perbaungan	0.22
434	Ruas Jalan Dusun IV Desa Lidah Tanah	Perbaungan	0.70





No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
435	Ruas Jalan Dusun V Desa Lidah Tanah		Perbaungan	0.80
436	Ruas Jalan Dusun IV Desa Kota Galuh		Perbaungan	2.10
437	Ruas Jalan Dusun I Desa Pematang Sijonam		Perbaungan	0.83
438	Ruas Jalan Dusun II Desa Pematang Sijonam		Perbaungan	0.67
439	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang		Perbaungan	1.10
440	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I Desa Sei Buluh	Perbaungan	0.21
441	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II & III Desa Sei Buluh	Perbaungan	1.43
442	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun IV Desa Sei Buluh	Perbaungan	0.34
443	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Simp. Psr. IV Sei Sijenggi - Tanah Merah	Perbaungan	2.10
444	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Gg. Supir - Pondok Nol - Dusun IV Sei Sijenggi	Perbaungan	5.10
445	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Simp. Psr. II - Dusun IV Sei Sijenggi	Perbaungan	2.80
446	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun IV Sei Lalang Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	1.70
447	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun III Jalan Mesjid Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	0.32
448	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II Gg. Tape Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	2.00
449	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II Jl. SMP Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	0.59
450	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II Roboh Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	1.00
451	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I Gg. Kantil Desa Suka Jadi	Tanjung Beringin	0.92
452	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II Pasar Roboh Desa Suka Jadi	Tanjung Beringin	1.30
453	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I Pasar Roboh Desa Suka Jadi	Tanjung Beringin	0.81
454	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun VI Nagur - Bogak Besar	Tanjung Beringin	0.30
455	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun V Nagur - Dusun I Desa Mangga Dua	Tanjung Beringin	0.35
456	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun III Desa Bagan Kuala	Tanjung Beringin	0.76



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
457	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun Kelapa Sawit Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0.89
458	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0.65
459	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Remaja II Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0.56
460	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Jati Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	1.10
461	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun III Lubang Gajah Desa Pematang Cermai	Tanjung Beringin	1.40
462	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun IV P. Buluh Desa Pematang Cermai	Tanjung Beringin	2.10
463	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun V Penggatalan Desa Pematang Cermai	Tanjung Beringin	1.90
464	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Jalan AMD Dusun I Desa Pematang Cermai	Tanjung Beringin	4.70
465	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun II Pematang Cermai Dusun IV P. Buluh	Tanjung Beringin	1.40
466	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I Desa Pematang Terang	Tanjung Beringin	0.25
467	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun III Desa Tebing Tinggi	Tanjung Beringin	0.53
468	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Veteran - Jalan Sena	Tanjung Beringin	0.32
469	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun Suka Jadi - Pematang guntung	Tanjung Beringin	0.53
470	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Pemuda Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0.13
471	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	1.03
472	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I - Dusun II Desa Sukajadi	Tanjung Beringin	2.30



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
473	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun I Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0.82
474	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Depan Rumah Dinas Camat Tj . Beringin	Tanjung Beringin	0.13
475	Ruas Jalan Dusun II Desa Lubuk Dendang	Dusun IV Kp. Baru Pematang Cermai	Tanjung Beringin	2.60
476	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Pematang Buluh Desa Kayu Besar	Bandar Khalipah	1.60
477	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Pematang Tengah Desa Kayu Besar	Bandar Khalipah	1.50
478	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Sampuran Nauli Desa Kayu Besar	Bandar Khalipah	0.84
479	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah	Bandar Khalipah	2.00
480	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Silaban Desa Bandar Tengah	Bandar Khalipah	1.70
481	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gotong Royong Dusun Sei Birung Desa Bandar Tengah	Bandar Khalipah	0.66
482	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Puskesmas Dusun Sei Birung Desa Bandar Tengah	Bandar Khalipah	0.20
483	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Lorong I Dusun Penaga Desa Juhar	Bandar Khalipah	0.21
484	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Tomuan Desa Juhar	Bandar Khalipah	5.30
485	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Suka Dame Desa Juhar	Bandar Khalipah	0.66
486	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Lumban Matio Desa Juhar	Bandar Khalipah	0.61
487	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Barisan Panjang Desa Gelam Sei Sarimah	Bandar Khalipah	0.81
488	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun I Sei Sarimah Desa Gelam Sei Sarimah	Bandar Khalipah	0.70



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
489	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun III Sei Sarimah Desa Gelam Sei Ssarimah	Bandar Khalipah	0.39
490	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Siderejo Desa Kayu Besar	Bandar Khalipah	0.69
491	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Sei Bamban Desa Gelam Sei Sarimah	Bandar Khalipah	0.86
492	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun Sei Kering - Dusun sontul Desa	Bandar Khalipah	1.80
493	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VIII Ria-Ria Desa Sei Bamban	Sei Bamban	2.60
494	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun IX Panglong Desa Sei Bamban	Sei Bamban	1.34
495	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun IV - V Desa Pon	Sei Bamban	0.19
496	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	XV Desa Sei Bamban	Sei Bamban	0.29
497	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun V Desa Sei Bamban	Sei Bamban	0.67
498	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VII Desa Gempolan	Sei Bamban	1.30
499	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VIII Potean Desa Suka Damai	Sei Bamban	0.66
500	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VIII Jatian Desa Bakaran Batu	Sei Bamban	2.60
501	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II Kampung Lalang Desa Suka Damai	Sei Bamban	0.79
502	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II Desa Sei Blutu	Sei Bamban	2.80
503	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun I Sei Buluh - Dusun IX Panglong	Sei Bamban	1.50
504	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Kampung Kristen Desa Pon	Sei Bamban	0.23
505	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun XVII Hapolatahan Desa Sei Bamban	Sei Bamban	1.00
506	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Desa Sei Buluh - Dusun IV Sei Bamban	Sei Bamban	1.20
507	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VI - VII Desa Sei Bamban	Sei Bamban	1.60



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
508	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bambi - Desa Bakaran Batu	Sei Bambi	3.20
509	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun V Pringgan Desa Pon - Sei Kuli	Sei Bambi	0.63
510	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II Desa Penggalangan - P.Ganjang	Sei Bambi	0.49
511	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II - I Desa Penggalangan	Sei Bambi	1.32
512	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Semut Desa Sei Bambi	Sei Bambi	0.60
513	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun I Parit Rambe Desa Sei Bambi	Sei Bambi	0.72
514	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun VII Brohol Dsa Sei Bambi	Sei Bambi	0.40
515	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Bakti desa XVII Hapoltahan Desa Sei bamban	Sei Bambi	0.22
516	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun V Pringgan - Dusun VI Kampung Kristen Desa Pon	Sei Bambi	1.70
517	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Merpati Dusun XIII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.24
518	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Manyar Dusun XIII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.24
519	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Cendrawasih Dsn XIII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.24
520	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Perluasan Dsn X Desa Firdaus	Sei Rampah	0.46
521	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Sarah Dusun III Desa Firdaus	Sei Rampah	0.40
522	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Kantil Dusun XIV Desa Firdaus	Sei Rampah	0.40
523	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Swadaya Dusun VII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.34
524	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Murai Dusun XIII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.14



No	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2		3	4
525	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gg. Kutilang Dusun XIII Desa Firdaus	Sei Rampah	0.13
526	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	gg. Melati Dusun XV Desa Firdaus	Sei Rampah	0.14
527	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun V Gg. Pinang Desa Sei Rejo	Sei Rampah	0.21
528	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun IV Parit Mesin Desa Sei Rejo	Sei Rampah	1.50
529	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun III - IV Desa Sei Rejo	Sei Rampah	0.58
530	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II Desa Sei Rejo	Sei Rampah	2.10
531	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Dusun II Sei Rejo - Dusun II Sei Rampah	Sei Rampah	1.40
532	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Kampung Keling Dusun II Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.57
533	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Budiman I Dusun V desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.69
534	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Budiman II Dusun IV Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.31
535	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	gg. Kancil Dusun I Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.44
536	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	gg. Inpres Dusun II Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.16
537	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Gotong Royong Dusun II Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.46
538	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus	Maulana Dusun IV Desa Sei Rampah	Sei Rampah	0.37
539	Ruas Jalan Gg. Famili Dsn III Firdaus		Sei Rampah	0.24
540	Ruas Jalan Belakang Kantor Bupati		Sei Rampah	0.26
541	Ruas Jalan Samping Kantor Bupati Dsn XII Firdaus		Sei Rampah	0.25
542	Ruas Jalan Plamboyan Dsn XIII Firdaus		Sei Rampah	0.22
543	Ruas Jalan Gg. Mawar Dsn XIII Firdaus		Sei Rampah	0.24
544	Ruas Jalan Teratai - Jl. Masjid Jamik Desa Sei Rampah		Sei Rampah	0.17
545	Ruas Jalan Pasar II dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban		Sei Rampah	0.73
546	Ruas Jalan Pasar I dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban		Sei Rampah	0.62



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
547	Ruas Jalan Dusun I Desa si hujan - hujan	Kotarih	0.35
548	Ruas Jalan Dusun III Desa si hujan - hujan	Kotarih	0.48
549	Ruas Jalan Dusun II Desa Banjaran Godang	Kotarih	0.23
550	Ruas Jalan Dusun I Desa Sei Kari	Kotarih	0.33
551	Ruas Jalan Dusun II Desa Sei Kari	Kotarih	1.10
552	Ruas Jalan Dusun I Desa Kotarih Pekan	Kotarih	0.28
553	Ruas Jalan Dusun I Banten Desa Kotarih Baru	Kotarih	0.26
554	Ruas Jalan Dusun II Banten Desa Kotarih Baru	Kotarih	1.10
555	Ruas Jalan Dusun III Bahisam Desa Kotarih Baru	Kotarih	0.4300
556	Ruas Jalan Dusun V Lembah Sari Desa Kotarih Baru	Kotarih	0.33
557	Ruas Jalan Dusun I Desa Sialtong	Kotarih	0.54
558	Ruas Jalan Dusun III Desa Kulasar	Silinda	0.23
559	Ruas Jalan Dusun IV Desa Kulasar	Silinda	0.80
560	Ruas Jalan Dusun I Desa Tarean	Silinda	0.76
561	Ruas Jalan Dusun V Desa Tarean	Silinda	0.85
562	Ruas Jalan Dusun VI Desa Tarean	Silinda	0.34
563	Ruas Jalan Dusun I Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.70
564	Ruas Jalan Dusun II Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.30
565	Ruas Jalan Dusun III Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.10
566	Ruas Jalan Dusun V Desa Pulo Gambar	Serbajadi	2.10
567	Ruas Jalan Dusun VI Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.90
568	Ruas Jalan Dusun VII Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.30
569	Ruas Jalan Dusun VIII Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.48
570	Ruas Jalan Dusun IX Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.52
571	Ruas Jalan Dusun X Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.70
572	Ruas Jalan Dusun XI Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.89
573	Ruas Jalan Dusun XII Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.84
574	Ruas Jalan Dusun XIII Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.30
575	Ruas Jalan Dusun XIV A Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.10
576	Ruas Jalan Dusun XIV B Desa Pulo Gambar	Serbajadi	1.40
577	Ruas Jalan Dusun XV Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.39





No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
578	Ruas Jalan Dusun XVI Desa Pulo Gambar	Serbajadi	0.66
579	Ruas Jalan Dusun II Desa Pulo Tagor	Serbajadi	1.10
580	Ruas Jalan Dusun III Desa Pulo Tagor	Serbajadi	0.80
581	Ruas Jalan Dusun VI Desa Pulo Tagor	Serbajadi	1.50
582	Ruas Jalan Dusun VII Desa Pulo Tagor	Serbajadi	0.78
583	Ruas Jalan Dusun I Desa Pulo Tagor	Serbajadi	2.20
584	Ruas Jalan Dusun II Desa Pulo Tagor	Serbajadi	0.20
585	Ruas Jalan Dusun III Desa Pulo Tagor	Serbajadi	0.61
586	Ruas Jalan Dusun V Desa Pulo Tagor	Serbajadi	0.71
587	Ruas Jalan Dusun I Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	0.75
588	Ruas Jalan Dusun II Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	0.55
589	Ruas Jalan Dusun IV Desa Kampung Tempel	Dolok Masihul	1.60
590	Ruas Jalan Dusun V Desa Padang Baru	Dolok Masihul	2.20
591	Ruas Jalan Dusun VI Kampung Dilem	Dolok Masihul	2.20
592	Ruas Jalan Dusun VII Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	1.20
593	Ruas Jalan Dusun V Desa Hutanauli	Dolok Masihul	1.60
594	Ruas Jalan Dusun II Desa Batu 13	Dolok Masihul	2.70
595	Ruas Jalan Dusun II Desa Bukit Cermin Hilir	Dolok Masihul	5.40
596	Ruas Jalan Dusun III Desa Malasori	Dolok Masihul	1.10
597	Ruas Jalan Dusun I Desa Banten	Dolok Masihul	4.40
598	Ruas Jalan Dusun II Desa Banten	Dolok Masihul	0.96
599	Ruas Jalan Dusun III Desa Banten	Dolok Masihul	1.50
600	Ruas Jalan Dusun IV Desa Banten	Dolok Masihul	0.35
601	Ruas Jalan Dusun V Desa Banten	Dolok Masihul	1.00
602	Ruas Jalan Dusun VI Desa Banten	Dolok Masihul	0.79
603	Ruas Jalan Dusun VIII Desa Banten	Dolok Masihul	0.36
604	Ruas Jalan Dusun III Desa Tegal Sari	Dolok Masihul	0.71
605	Ruas Jalan Dusun I Desa Batu 12	Dolok Masihul	0.35
606	Ruas Jalan Dusun I Desa Pertambatan	Dolok Masihul	0.53
607	Ruas Jalan Dusun II Desa Pertambatan	Dolok Masihul	0.64
608	Ruas Jalan Dusun III Desa Pertambatan	Dolok Masihul	0.55



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
609	Ruas Jalan Dusun IV Desa Pertambatan	Dolok Masihul	2.10
610	Ruas Jalan Dusun VI Desa Pertambatan	Dolok Masihul	6.50
611	Ruas Jalan Dusun I Desa Silau Merawan	Dolok Masihul	0.27
612	Ruas Jalan Dusun II Desa Silau Merawan	Dolok Masihul	0.20
613	Ruas Jalan Dusun III Desa Silau Merawan	Dolok Masihul	0.32
614	Ruas Jalan Dusun III Desa Dame	Dolok Masihul	0.09
615	Ruas Jalan Dusun IV Desa Dame	Dolok Masihul	0.97
616	Ruas Jalan Dusun I Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	0.40
617	Ruas Jalan Dusun II Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	0.50
618	Ruas Jalan Dusun III Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	0.20
619	Ruas Jalan Dusun IV Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	0.35
620	Ruas Jalan Dusun VI Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	1.30
621	Ruas Jalan Dusun VII Desa Bajaronggi	Dolok Masihul	1.90
622	Ruas Jalan Dusun III Desa Martebing	Dolok Masihul	0.34
623	Ruas Jalan Dusun IV Desa Martebing	Dolok Masihul	1.10
624	Ruas Jalan Dusun V Desa Martebing	Dolok Masihul	0.55
625	Ruas Jalan Lingkungan I Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.21
626	Ruas Jalan Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	4.40
627	Ruas Jalan Lingkungan III Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.82
628	Ruas Jalan Lingkungan IV Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.30
629	Ruas Jalan Lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.77
630	Ruas Jalan Lingkungan VI Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.25
631	Ruas Jalan Lingkungan VII Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.26
632	Ruas Jalan Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul	Dolok Masihul	0.90
633	Ruas Jalan Dusun I Desa Dolok Sagala	Dolok Masihul	3.20
634	Ruas Jalan Dusun II Desa Dolok Sagala	Dolok Masihul	0.80
635	Ruas Jalan Dusun III Desa Dolok Sagala	Dolok Masihul	1.40



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
636	Ruas Jalan Dusun IV Desa Dolok Sagala	Dolok Masihul	2.50
637	Ruas Jalan Dusun V Desa Dolok Sagala	Dolok Masihul	8.55
638	Ruas Jalan Desa Tanjung Mariah - Bombongan Dolok Sagala	Dolok Masihul	4.15
639	Ruas Jalan Dusun I Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.25
640	Ruas Jalan Dusun II Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.31
641	Ruas Jalan Dusun III Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.38
642	Ruas Jalan Dusun IV Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.24
643	Ruas Jalan Dusun V Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.62
644	Ruas Jalan Dusun VI Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.25
645	Ruas Jalan Dusun VII Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.32
646	Ruas Jalan Dusun VIII Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.36
647	Ruas Jalan Dusun X Desa Blok 10	Dolok Masihul	0.20
648	Ruas Jalan Dusun I Desa Bintang Bayu	Bintang Bayu	0.55
649	Ruas Jalan Dusun II Desa Bintang Bayu	Bintang Bayu	0.46
650	Ruas Jalan Dusun III Desa Bintang Bayu	Bintang Bayu	0.28
651	Ruas Jalan Dusun IV Desa Bintang Bayu	Bintang Bayu	0.29
652	Ruas Jalan Dusun I Desa Siahap	Bintang Bayu	0.35
653	Ruas Jalan Dusun II Desa Siahap	Bintang Bayu	0.37
654	Ruas Jalan Dusun III Desa Siahap	Bintang Bayu	0.55
655	Ruas Jalan Dusun I Desa Gudang Garam	Bintang Bayu	0.46
656	Ruas Jalan Dusun II Desa Gudang Garam	Bintang Bayu	0.58
657	Ruas Jalan Dusun III Desa Gudang Garam	Bintang Bayu	0.28
658	Ruas Jalan Dusun IV Desa Tulong Buho	Bintang Bayu	0.37
659	Ruas Jalan Dusun I Desa Dolok Masango	Bintang Bayu	0.89
660	Ruas Jalan Dusun II Desa Dolok Masango	Bintang Bayu	0.34
661	Ruas Jalan Dusun III Desa Dolok Masango	Bintang Bayu	0.47
662	Ruas Jalan Dusun I Desa Bandar Magodang	Bintang Bayu	0.38
663	Ruas Jalan Dusun II Desa Bandar Magodang	Bintang Bayu	0.47
664	Ruas Jalan Dusun I Desa Ujung Negeri Kahan	Bintang Bayu	0.14
665	Ruas Jalan Dusun II Desa Ujung Negeri Kahan	Bintang Bayu	0.98
666	Ruas Jalan Dusun III Desa Ujung Negeri Kahan	Bintang Bayu	0.32



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
667	Ruas Jalan Dusun IV Desa Ujung Negeri Kahan	Bintang Bayu	0.42
668	Ruas Jalan Dusun II Desa Huta Durian	Bintang Bayu	0.50
669	Ruas Jalan Dusun II Desa Marihat Dolok	Bintang Bayu	1.84
670	Ruas Jalan Dusun I Desa Pegajahan Hulu	Bintang Bayu	0.12
671	Ruas Jalan Dusun III Desa Sarang Giting Hulu	Bintang Bayu	0.15
672	Ruas Jalan Dusun II Desa Panombean	Bintang Bayu	0.44
673	Ruas Jalan Bandar Negeri - Bts Simalungun	Bintang Bayu	1.80
674	Ruas Jalan Dusun I Ujung Negeri Hulu	Bintang Bayu	0.23
675	Ruas Jalan Dusun I - Dusun IV Desa Marjanji	Sipispis	1.10
676	Ruas Jalan Dusun IV Desa Marjanji	Sipispis	0.65
677	Ruas Jalan Dusun V Desa Marjanji	Sipispis	0.65
678	Ruas Jalan Dusun I Desa Sipispis	Sipispis	0.28
679	Ruas Jalan Dusun V Desa Sipispis	Sipispis	0.20
680	Ruas Jalan Dusun II Desa Silau Padang	Sipispis	0.81
681	Ruas Jalan Dusun IV Desa Silau Padang	Sipispis	1.20
682	Ruas Jalan Dusun II - Dsn III Desa Buluh Duri	Sipispis	2.03
683	Ruas Jalan Dusun III Desa Simalas	Sipispis	0.55
684	Ruas Jalan Dusun IV Desa Simalas	Sipispis	0.83
685	Ruas Jalan Bangun Jawa II Desa Marjanji	Sipispis	1.16
686	Ruas Jalan Bangun Jawa I Desa Marjanji	Sipispis	1.10
687	Ruas Jalan Dusun VII - VIII Desa Marjanji	Sipispis	5.20
688	Ruas Jalan Pajak Tradisional Desa Marjanji	Sipispis	0.22
689	Ruas Jalan Dusun I - Dusun II Desa Paya Pasir	Tebing Syahbandar	0.79
690	Ruas Jalan Dusun II - Dusun III Desa Paya Pasir	Tebing Syahbandar	0.56
691	Ruas Jalan Dusun V - Dusun VI Desa Paya Pasir	Tebing Syahbandar	1.20
692	Ruas Jalan Dusun VI - Dusun VII Desa Paya Pasir	Tebing Syahbandar	0.95
693	Ruas Jalan Dusun I Desa Binjai	Tebing Syahbandar	0.93
694	Ruas Jalan Dusun II Desa Binjai	Tebing Syahbandar	0.55
695	Ruas Jalan Dusun III Desa Binjai	Tebing Syahbandar	1.10
696	Ruas Jalan Dusun III- IV Desa Binjai	Tebing Syahbandar	0.80
697	Ruas Jalan Dusun IV Desa Binjai	Tebing Syahbandar	1.60



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
698	Ruas Jalan Dusun VI Desa Binjai	Tebing Syahbandar	0.40
699	Ruas Jalan Dusun I Desa Penggalangan	Tebing Syahbandar	0.89
700	Ruas Jalan Dusun II Desa Penggalangan	Tebing Syahbandar	0.76
701	Ruas Jalan Dusun III Desa Penggalangan	Tebing Syahbandar	0.50
702	Ruas Jalan Dusun IX Desa Penggalangan	Tebing Syahbandar	1.20
703	Ruas Jalan Dusun III Desa Laut Tador	Tebing Syahbandar	2.20
704	Ruas Jalan Dusun VIII Desa Paya Pinang	Tebing Syahbandar	1.57
705	Ruas Jalan Dusun VIII Simpang Mesjid Desa Paya Pinang	Tebing Syahbandar	0.26
706	Ruas Jalan Dusun X Desa Paya Pinang	Tebing Syahbandar	1.20
707	Ruas Jalan Dusun I - Dusun II Desa Kuta Pinang	Tebing Syahbandar	3.97
708	Ruas Jalan Dusun III KP. Baru Desa Kuta Pinang	Tebing Syahbandar	0.92
709	Ruas Jalan Dusun IV - Dsn V Desa Kuta Pinang	Tebing Syahbandar	9.28
710	Ruas Jalan Dusun VI Desa Kuta Pinang	Tebing Syahbandar	3.70
711	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Penggalian	Tebing Syahbandar	0.80
712	Ruas Jalan Dusun IV Desa Penggalian	Tebing Syahbandar	1.20
713	Ruas Jalan Dusun VII Desa Penggalian	Tebing Syahbandar	0.27
714	Ruas Jalan Dusun III Desa Dolok Merawan	Dolok Merawan	0.84
715	Ruas Jalan Dusun I Gg. Simalungun Desa Dolok Merawan	Dolok Merawan	0.41
716	Ruas Jalan Dusun VI Desa Dolok Merawan	Dolok Merawan	9.70
717	Ruas Jalan Dusun IV Desa Limbong	Dolok Merawan	1.20
718	Ruas Jalan Dusun I Desa Bah Damar	Dolok Merawan	0.63
719	Ruas Jalan Dusun I - Dusun II Desa Bah Damar	Dolok Merawan	2.59
720	Ruas Jalan Dusun I - Dusun II Desa Paritokan	Dolok Merawan	0.47
721	Ruas Jalan Dusun III Desa Mainu Tengah	Dolok Merawan	1.60
722	Ruas Jalan Dusun I Bts Desa Bahdamar Desa Korajim	Dolok Merawan	2.60
723	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Korajim	Dolok Merawan	0.38
724	Ruas Jalan Dusun III Bts Desa Bahdamar Desa Korajim	Dolok Merawan	2.10
725	Ruas Jalan Dusun IV Desa Korajim	Dolok Merawan	0.54
726	Ruas Jalan Dusun V Desa Korajim	Dolok Merawan	2.70
727	Ruas Jalan Dusun III Paritokan	Dolok Merawan	2.10



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
728	Ruas Jalan Dusun I Gg. Al. Karorma Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.38
729	Ruas Jalan Dusun II Gg. Rukun Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.82
730	Ruas Jalan Dusun II Gg. Istimewa Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.80
731	Ruas Jalan Dusun IV Gg. Sempurna Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.59
732	Ruas Jalan Dusun IV Gg. Patriot Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.13
733	Ruas Jalan Dusun IV Gg. Sentosa Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.46
734	Ruas Jalan Dusun V - Dsn VI Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	2.30
735	Ruas Jalan Dusun VI - Dsn XII Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	2.70
736	Ruas Jalan Dusun X - Dsn IX Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	0.81
737	Ruas Jalan Dusun XI - Dsn XII Desa Paya Lombang	Tebing Tinggi	3.00
738	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Naga Kesiangan	Tebing Tinggi	0.73
739	Ruas Jalan Dusun III Desa Naga Kesiangan	Tebing Tinggi	0.27
740	Ruas Jalan Dusun V - Dsn VII Desa Naga Kesiangan	Tebing Tinggi	0.37
741	Ruas Jalan Dusun III - Dsn IV Desa Paya Bagus	Tebing Tinggi	1.20
742	Ruas Jalan Dusun III - Dsn II Desa Paya Bagus	Tebing Tinggi	0.65
743	Ruas Jalan Dusun IX - Dsn X Desa Paya Bagus	Tebing Tinggi	0.72
744	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Bah Sumbu	Tebing Tinggi	1.05
745	Ruas Jalan Dusun III Desa Bah Sumbu	Tebing Tinggi	0.70
746	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Jambu	Tebing Tinggi	0.55
747	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Meriah Padang	Tebing Tinggi	2.70
748	Ruas Jalan Dusun III - Dsn IV Desa Meriah Padang	Tebing Tinggi	2.70
749	Ruas Jalan Dusun V Desa Meriah Padang	Tebing Tinggi	0.68
750	Ruas Jalan Dusun III - Dsn V Desa Pertapaan	Tebing Tinggi	1.90
751	Ruas Jalan Dusun I - Dsn II Desa Sei Priok	Tebing Tinggi	1.60
752	Ruas Jalan Dusun VI Desa Sei Priok	Tebing Tinggi	1.40
753	Ruas Jalan Dusun II Desa Kuta Baru	Tebing Tinggi	0.91
754	Ruas Jalan Dusun III Desa Kuta Baru	Tebing Tinggi	1.10
755	Ruas Jalan Dusun V - Dsn VI Desa Kuta Baru	Tebing Tinggi	0.88
756	Ruas Jalan Dusun IV - Dsn VI Desa Kuta Baru	Tebing Tinggi	1.70
757	Ruas Jalan Dusun V - Dsn IV	Tebing Tinggi	0.31



No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (km)
1	2	3	4
758	Ruas Jalan Dusun VI - Dusun V A Kuta Baru	Tebing Tinggi	1.40
759	Ruas Jalan Dusun Serdang Bedagai	Tersebar di 17 Kecamatan	29.34
	<b>A. Jumlah Panjang Jalan (Km)</b>		<b>680.31</b>
	<b>B. Persentase Jalan (%)</b>		<b>100%</b>
	<b>TOTAL PANJANG JALAN</b>		<b>1463.95</b>

Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Sedangkan panjang jembatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 mencapai 3.023,3 meter yang terdiri dari jembatan dalam kondisi baik 2.144,3 meter, kondisi sedang sepanjang 365 meter, kondisi rusak sepanjang 270 meter dan kondisi rusak berat sepanjang 244 meter. Panjang jembatan terpanjang berada di Kecamatan Sipispis yakni 377 meter sedangkan panjang jembatan terpendek berada di Kecamatan Serbajadi yakni 7 meter sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.54** di bawah ini.

**Tabel 2.54**  
**Panjang Jembatan Berdasarkan Kondisi per Kecamatan Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	Kondisi Jembatan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	KOTARIH	166	15	28	
2	SILINDA	198	34		
3	BINTANG BAYU	5	146		
4	DOLOK MASIHUL	162,3	60	47	48
5	SERBAJADI	7			
6	SIPISPIS	195		68	114
7	DOLOK MERAWAN	50		6	
8	TEBING TINGGI	32		48	10
9	TEBING SYAHBANDAR	59		22	72
10	BANDAR KHALIPAH	183	87		
11	TANJUNG BERINGIN	98			
12	SEI RAMPAH	170			
13	SEI BAMBAN	37			
14	TELUK MENGKUDU	317			
15	PERBAUNGAN	157		21	
16	PEGAJAHAN	98	23		
17	PANTAI CERMIN	210		30	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.144,3</b>	<b>365</b>	<b>270</b>	<b>244</b>

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai, 2016



Kebijakan pembangunan di sektor infrastruktur irigasi diarahkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi serta sumber daya air guna menunjang sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawah, serta pengendalian bantaran sungai akibat dari banjir yang mengganggu lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat, sehingga usaha-usaha yang dilaksanakan dalam bidang irigasi ditempuh dengan berbagai program seperti pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menggunakan berbagai sumber dana yang penggunaannya untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

**Tabel 2.55**  
**Daftar Jaringan Irigasi per Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Panjang Saluran (m)			Jumlah Bangunan	Sumber Air Sungai	Kondisi Jaringan	
			Primer	Sekunder	Tersier			Bangunan	Saluran
1	Perbaungan	5395	-	70457	-	285	Sei Ular	Rusak ringan	Baik
2	Pegajahan	1428	11724	11062	-	90	Sei Ular	Baik	Baik
3	Pantai Cermin	2687	734	24583	-	78	Sei Ular	Rusak ringan	Baik
4	Tanjung Beringin	2200	18000	42598	-	16	Martebing	Rusak berat	Baik
5	Dolok Masihul	4150	10200	55114	-	149	Sei Padang	Rusak berat	Baik
6	Bandar Khalifah	6987	3500	32350	-	12	Sei Padang	Rusak ringan	Rusak ringan
7	Bintang Bayu	400	-	13200	-	1	Belutu	Baik	Baik
8	Serbajadi	990	5000	13788	-	42	Sei Ular	Rusak ringan	Baik
9	Kotarih	120	1000	6000	-	2	Buaya	Rusak berat	Baik
10	Silinda	336	3700	23800	-	6	Buaya	Rusak ringan	Rusak ringan
11	Teluk Mengkudu	1648	-	25514	-	42	Sei Ular	Baik	Rusak berat
12	Tebing Syahbandar	625	7000	22790	-	7	Bahilang	Baik	Rusak ringan
13	Sei Rampah	2733	8500	35160	-	54	Belutu	Rusak ringan	Rusak ringan
14	Tebing Tinggi	2483	15500	25949	-	45	Sei Padang	Baik	Rusak berat
15	Sei Bamban	5421	9000	32279	-	43	Belutu	Baik	Rusak ringan
16	Sipispis	488	2500	4500	-	1	Sibarau	Rusak berat	Rusak ringan
17	Dolok Merawan	60	2000	5000	-	1	Bahilang	Baik	Rusak ringan

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

Pada tahun 2011, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 4.199,55 Ha dan terus bertambah menjadi 6.716,97 Ha di tahun 2015. Di samping itu, jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 4,84 m per 10.000 m<sup>2</sup> luas persawahan juga meningkat menjadi 9,91 m per 10.000 m<sup>2</sup> luas persawahan di tahun 2015. Secara keseluruhan daftar luas baku lahan sawah yang berpengairan menurut kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.56**.

**Tabel 2.56**  
**Daftar Luas Baku Lahan Sawah yang Berpengairan per Kecamatan**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah Berpengairan (Ha)				Jumlah
		Irigasi Teknis	Irigasi Semi Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa Non PU	
1	Kotarih	-	-	120	-	120
2	Silinda	-	336	-	-	336
3	Bintang Bayu	-	-	400	-	400
4	Dolok Masihul	-	3455	695	-	4150
5	Serbajadi	-	990	-	-	990
6	Sipispis	-	488	-	-	488
7	Dolok Merawan	-	-	60	-	60
8	Tebing Tinggi	-	2483	-	-	2483
9	Tebing Syahbandar	-	625	-	-	625
10	Bandar Khalifah	-	2987	4000	-	6987
11	Tanjung Beringin	-	2200	-	-	2200
12	Sei Rampah	1042	1691	-	-	2733
13	Sei Bambi	-	5421	-	-	5421
14	Teluk Mengkudu	1648	-	-	-	1648
15	Perbaungan	5395	-	-	-	5395
16	Pegajahan	1428	-	-	-	1428
17	Pantai Cermin	1807	880	-	-	2687
<b>Jumlah</b>		<b>11320</b>	<b>21556</b>	<b>5275</b>	<b>0</b>	<b>38151</b>

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

Irigasi teknis berada di Daerah Irigasi Perbaungan, Daerah Irigasi Sei Buluh dan Daerah Irigasi Bendang. Irigasi semi teknis berada di Daerah Irigasi Langau, Daerah Irigasi Payalombang, Daerah Irigasi Cinta Kasih, Daerah Irigasi Pekan Dolok, Daerah Irigasi Pekan Kamis, Daerah Irigasi Bah Tonang DS, Daerah Irigasi Sei Belutu, Daerah Irigasi Singosari, Daerah Irigasi Kampung Baru, Daerah Irigasi Pematang Cermai, Daerah Irigasi Pematang Terang, Daerah Irigasi Tebing Tinggi, Daerah Irigasi Sei Paret, Daerah Irigasi Tapian Nauli, Daerah Irigasi

Pematang Ganjang, Daerah Irigasi Juhar, Daerah Irigasi Sei Pinang, Daerah Irigasi Kayu Besar, Daerah Irigasi Bukit Cermin, Daerah Irigasi Pertambatan, Daerah Irigasi Cinta Kasih, Daerah Irigasi Pagar Manik, Daerah Irigasi Pamah, Daerah Irigasi Sei Buaya, Daerah Irigasi Kulasar, Daerah Irigasi Pulau Gambar, Daerah Irigasi Suka Damai, Daerah Irigasi Siria-ria, Daerah Irigasi Martebing, Daerah Irigasi Baron, Daerah Irigasi Payamabar, Daerah Irigasi Apras, Daerah Irigasi Penggalan, Daerah Irigasi Penggalangan, Daerah Irigasi Binjai dan Daerah Irigasi Simalas.

Irigasi sederhana berada di Daerah Irigasi Bajayu, Daerah Irigasi Lubuk Bayas, Daerah Irigasi Silau Rakyat, Daerah Irigasi Malasori, Daerah Irigasi Gelam, Daerah Irigasi Kerapuh, Daerah Irigasi Sumber Rejo, Daerah Irigasi Silau Merawan, Daerah Irigasi Aras Panjang, Daerah Irigasi Durian Kondot, Daerah Irigasi Masango dan Daerah Irigasi Paritokan.

Adapun luas baku lahan sawah yang tidak berpengairan atau luas sawah tadah hujan masih ada sekitar 1.143 Ha lagi yang berlokasi di Kecamatan Dolok masihul, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Bandar Khalipah.

Selain pembangunan saluran irigasi, selama periode 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga telah membangun beberapa jumlah bendungan yaitu bendungan teknis sebanyak 9 unit, bendungan setengah teknis sebanyak 29 unit dan bendungan sederhana sebanyak 16 unit, tanggul sepanjang 36.730 m di tahun 2013 dan 2.295 m di tahun 2014, talud sepanjang 237 m di tahun 2013 dan bronjong sepanjang 512 m serta DAM sebanyak 4 unit.

Selain kegiatan pembangunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan kegiatan pemeliharaan berupa rehabilitasi saluran dan normalisasi sungai sebagai sumber air penyuplai irigasi.

Adapun penetapan daerah irigasi menurut kewenangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.57** di bawah ini.



**Tabel 2.57**  
**Penetapan Daerah Irigasi Menurut Kewenangan**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	Kewenangan Nama D.I	Kecamatan Jumlah D.I	Luas (Ha)	Luas Potensial ( Ha )									Tingkat Jaringan	Ket
				Jumlah	Sumber Air	Sawah			Belum Sawah	Alih Fungsi				
						Irigasi	Belum Irigasi	Jumlah		Sawah	Belum Sawah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PEMERINTAH PUSAT													
1	D.I BAJAYU	B. Khalifah / Pagurawan	4,000	4,000	S. Padang	-	-	-	-	-	-	-	S	Lintas Kab
2	D. I PERBAUNGAN	Perbaungan / P. Cermin	5,920	5,920	S. Ular	5,920	-	5,920	-	-	-	-	T	
3	D.I SEI BELUTU	Sei Rampah / Sei Bamban	5,082	5,082	S. Belutu	5,076	-	5,076	-	-	-	-	ST	
4	D.I SEI BULUH	Perbaungan / T. Mengkudu / Sei Rampah	4,020	4,020	S. Ular	4,020	-	4,020	-	-	-	-	T	
5	D.I SINGOSARI ( D.I SEI ULAR )	Pantai Cermin	880	880	S. Ular	880	-	880	-	-	-	-	ST	
6	D.I PULAU GAMBAR ( D.I SEI ULAR )	Serba jadi	990	990	S. Ular	990	-	990	-	-	-	-	ST	
SUB TOTAL		6 D.I ( 54,60% )	20,892	20,892		16,886	-	16,886	-	-	-	-	-	
II	PEMERINTAH PROVINSI													
1	D.I BENDANG	Perbaungan / P. Cermin	1,380	1,380	S. Ular	1,380	-	1,380	-	-	-	-	T	
2	D.I LANGAU	T. Tinggi / B. Khalifah	2,000	2,000	S. Padang	1,150	850	1,900	-	-	100	100	ST	
3	D.I PEKAN KEMIS	Dolok Masihul	1,100	1,100	S. Kerapuh	920	180	1,100	-	-	-	-	ST	
4	D.I BAH TONANG	Sipis-pis / Kaehan	443	443	S. Keliat	443	-	443	98	10	12	22	ST	Lintas Kab
5	D.I PAYA LOMBANG	Tebing Tinggi	1,350	1,350	S. Padang	1,350	-	1,350	-	-	-	-	ST	
6	D.I PEKAN DOLOK	Dolok Masihul	1,050	1,050	S. Belutu	1,050	-	1,050	-	-	-	-	ST	Data Terakhir hasil Survey 2008 luas areal 926 Ha
SUB TOTAL		6 D.I ( 19,14% )	7,323	7,323		6,293	1,030	7,223	98	10	112	-	-	



NO	Kewenangan Nama D.I	Kecamatan Jumlah D.I	Luas (Ha)	Luas Potensial ( Ha )									Tingkat Jaringan	Ket
				Jumlah	Sumber Air	Sawah			Belum Sawah	Alih Fungsi				
						Irigasi	Belum Irigasi	Jumlah		Sawah	Belum Sawah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	PEMERINTAH KABUPATEN													
1	D.I KAMPUNG BARU	Tanjung Beringin	400	400	S. Martebing	200	-	200	-	-	-	-	ST	
2	D.I PEMATANG CERMAI	Tanjung Beringin	600	600	S. Martebing	600	-	600	-	-	-	-	ST	
3	D.I PEMATANG TERANG	Tanjung Beringin	700	700	S. Martebing	700	-	700	-	-	-	-	ST	
4	D.I TEBING TINGGI	Tanjung Beringin	700	700	S. Martebing	600	-	600	-	-	-	-	ST	
5	D.I SEI PARIT	Sei Rampah	250	250	S. Sawo	250	-	250	-	-	-	-	ST	
6	D.I TAPIAN NAULI	Sei Rampah	150	150	S. Belutu	150	-	150	-	-	-	-	ST	
7	D.I PEMATANG GANJANG	Sei Rampah	630	630	S. Rampah	630	-	630	-	-	-	-	ST	
8	D.I MALASORI	Dolok Masihul	100	100	S. Belutu	100	-	100	-	-	-	-	S	
9	D.I JUHAR	Bandar Khalifah	500	500	S. Lagunda	500	-	500	-	-	-	-	ST	
10	D.I SEI PINANG	Bandar Khalifah	600	600	S. Pinang	600	-	600	-	-	-	-	ST	
11	D.I KAYU BESAR	Bandar Khalifah	300	300	S. Lagunda	300	-	300	-	-	-	-	ST	
12	D.I BUKIT CERMIN	Dolok Masihul	800	800	S. Sibarau	800	24	800	-	-	-	-	ST	
13	D.I PERTAMBATAN	Dolok Masihul	145	145	S. Belutu	145	-	145	-	-	-	-	ST	
14	D.I CINTA KASIH	Dolok Masihul	360	360	S. Hitam	360	89	360	-	-	-	-	ST	
15	D.I KERAPUH	Dolok Masihul	75	75	S. Martebing	75	-	75	-	-	-	-	S	
16	D.I SUMBER REJO	Dolok Masihul	45	45	S. Kerapuh	45	-	45	-	-	-	-	S	
17	D.I SILAU MERAWAN	Dolok Masihul	150	150	S. Belutu	150	-	150	-	-	-	-	S	
18	D.I ARAS PANJANG	Dolok Masihul	325	325	S. Belutu	325	-	325	-	-	-	-	S	
19	D.I PAGAR MANIK	Silinda	40	40	S. Dadepan	125	-	58	-	-	-	-	ST	
20	D.I PAMAH	Silinda	97	97	S. Buaya	81	-	81	-	-	-	-	ST	



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	Kewenangan Nama D.I	Kecamatan Jumlah D.I	Luas (Ha)	Luas Potensial ( Ha )									Tingkat Jaringan	Ket
				Jumlah	Sumber Air	Sawah			Belum Sawah	Alih Fungsi				
						Irigasi	Belum Irigasi	Jumlah		Sawah	Belum Sawah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	D.I SEI BUAYA	Silinda	70	70	S. Lagunda	100	-	100	-	-	-	-	ST	
22	D.I KULASAR	Silinda	60	60	S. Lagunda	70	-	70	-	-	-	-	ST	
23	D.I DURIAN KONDOT	Kotarih	120	120	S. Buaya	120	-	120	-	-	-	-	S	
24	D.I DOLOK MASANGO	Bintang Bayu	400	400	S. Belutu	400	-	100	-	-	-	-	S	
25	D.I SUKA DAMAI	Sei Bamban	300	300	S. Martebing	300	-	300	-	-	-	-	ST	
26	D.I SIRIA-RIA BLOK IV	Sei Bamban	700	700	S. Martebing	700	-	700	-	-	-	-	ST	
27	D.I SEI MARTEBING	Tebing Tinggi	250	250	S. Martebing	250	-	250	-	-	-	-	ST	
28	D.I BARON	Tebing Tinggi	50	50	S. Martebing	70	-	70	-	-	-	-	ST	
29	D.I PAYA MABAR	Tebing Tinggi	300	300	S. Martebing	300	-	300	-	-	-	-	ST	
30	D.I APRAS	Tebing Tinggi	100	100	S. Martebing	100	-	100	-	-	-	-	ST	
31	D.I PENGGALIAN	Tebing Syahbandar	250	250	S. Bahilang	250	-	250	-	-	-	-	ST	
32	D.I PENGKALANGAN	Tebing Syahbandar	250	250	S. Mandaris	250	-	250	-	-	-	-	ST	
33	D.I BINJAI	Tebing Syahbandar	125	125	S. Mandaris	125	-	125	-	-	-	-	ST	
34	D.I SIMALAS	Sipis-pis	45	45	S. Sibarau	45	-	45	-	-	-	-	ST	
35	D.I PARITOKAN	Dolok Marawan	60	60	S. Bahilang	60	-	60	-	-	-	-	S	
SUB TOTAL		35 D.I ( 26,26% )	10,047	10,047		9,876	113	9,509	-	-	-	-	-	-
TOTAL		47 D.I ( 100% )	38,262	38,262		33,055	1,143	33,618	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Dalam hal kelembagaan pengelolaan irigasi berdasarkan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi: 1) Instansi pemerintah yang membidangi irigasi, 2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), 3) Komisi Irigasi. Sampai dengan tahun 2015, jumlah P3A di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 91 kelompok dan GP3A sebanyak 26 kelompok serta IP3A sebanyak 2 kelompok

**Tabel 2.58**  
**Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	40,44%	45,05%	65,48%	41,77%	42,93%
2	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	34,48%	23,64%	56,00%	40,93%	35,73%
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik(>40 km/jam)	34,48%	23,64%	56,00%	40,93%	35,73%
4	Rasio Jaringan Irigasi	4,84/ 10.000	5,72/ 10.000	7,67/ 10.000	8,63/ 10.000	9,91/ 10.000
5	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	4.199,55	4.652,4	5.200	5.850,31	6.716,73

*Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Serdang Bedagai dan Dinas PSDA Kab. Serdang Bedagai, 2016*

Indikator pembangunan daerah pada urusan penataan ruang adalah rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana taman skala kecamatan dan taman skala kota serta tempat pemakaman umum. Untuk indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mengalami sedikit penurunan dari sebesar 37,33% di tahun 2011 menjadi 37,30% di tahun 2015. Namun demikian, luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Serdang Bedagai masih memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga telah mengembangkan kawasan hutan kota di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan.



Kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang khususnya ketersediaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan pemerintah daerah agar dapat mendukung pembangunan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga sarana dan prasarana tersebut yang ada saat ini dapat bertambah dengan adanya pembangunan taman-taman skala kecamatan dan khususnya taman kota. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk rasio bangunan yang sudah memiliki IMB per satuan bangunan di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari 65,30% di tahun 2011 menjadi 68,10% di tahun 2015.

**Tabel 2.59**  
**Hasil Kinerja Urusan Penataan Ruang**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	37,33%	37,32%	37,32%	37,31%	37,30%
2	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	65,30%	65,50%	67,50%	67,80%	68,10%

*Sumber : Distarsihitam Kab. Serdang Bedagai, 2016 dan KP2TPM Kab. Serdang Bedagai, 2016*

#### **2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pelayanan umum pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan lingkungan pemukiman kumuh serta ketersediaan tempat pemakaman. Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Serdang Bedagai terus meningkat dari 80.796 Unit di tahun 2011 menjadi sebanyak 85.796 Unit di tahun 2015. Dengan adanya Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Serdang Bedagai akan semakin bertambah di masa yang akan datang.

Rumah tangga ber-sanitasi juga meningkat dari 52,97% di tahun 2011 menjadi 64,80% di tahun 2015. Sejalan dengan kedua indikator itu, lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Serdang Bedagai juga semakin menurun dari 70,57% di tahun 2011 menjadi 66,40% di tahun 2015 yang banyak terdapat di kawasan pesisir pantai timur Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman mengalami peningkatan dari sebesar 91% di tahun 2011 menjadi 95% di tahun 2015.

**Tabel 2.60**  
**Hasil Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	80.796	82.196	83.492	84.696	85.796
2	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	52,97%	59,98%	62,00%	63,50%	72,40%
3	Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	70,57	69,01	68,81	67,93	60,03
4	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	91%	92%	93%	93%	95%

*Sumber : Distarsitkam Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Kebijakan pembangunan di sektor infrastruktur permukiman diarahkan untuk sektor rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan lingkungan permukiman kumuh dengan harapan agar dapat bersinergi didalam pelaksanaan pembangunan khususnya di daerah kawasan permukiman padat penduduk. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam bidang infrastruktur permukiman dapat ditempuh melalui berbagai program diantaranya Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi seperti MCK, IPAL, Pengelolaan Sampah 3R dan lain sebagainya dan yang terakhir yaitu Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh seperti Pembangunan jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan lain sebagainya yang dimana dalam pembangunannya dapat menggunakan berbagai sumber dana. Untuk sarana dan prasarana tempat pemakaman dapat juga dilakukan dengan adanya pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yang ada.

Ketersediaan sarana tempat beribadah merupakan aspek yang penting dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Keberagaman pemeluk agama di Kabupaten Serdang Bedagai tentu mempersyaratkan ketersediaan tempat beribadah untuk para pemeluknya. Data tentang tempat ibadah dan rasio tempat ibadah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.61** di bawah ini.

**Tabel 2.61**  
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Bangunan Tempat Ibadah	2011			2015		
		Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	Masjid	1.090	558.467	512	1.162	533.403	459,04
2	Gereja	377	106.889	207	404	94.534	233,99
3	Pura	1	277	277	2	196	98
4	Vihara	18	10.683	594	25	8.796	351,84

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai dan Disdukcapil Kab. Serdang Bedagai, 2016*

#### **2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Antusias masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai untuk berpolitik di era demokratisasi ini cukup baik, dimana dalam setiap pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada selalu diikuti oleh partisipasi masyarakat dengan antusias. Keterbukaan dan keterakomodasian hak-hak rakyat dalam berpolitik yang semakin membaik ini juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai yang secara umum juga berlangsung secara aman dan tertib. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat dengan beberapa kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan setiap tahun yang diikuti oleh kader dari partai politik dan pemilih pemula kecuali di tahun 2014.

**Tabel 2.62**

**Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	100 orang	100 orang	100 orang	-	200 orang
2	Jumlah Laporan Analisis Situasi Politik Daerah	12	12	12	12	12
3	Jumlah Partai Politik yang telah diversifikasi	14	14	14	14	10
4	Kegiatan rapat antar anggota Komunitas Inteligen Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
5	Kegiatan Bantuan terhadap komunitas Inteligen Daerah	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang
6	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec	17 Kec
7	Pelaksanaan Kegiatan temu ramah dengan pejuang/veteran	206 pejuang	196 pejuang	196 pejuang	186 pejuang	183 pejuang
8	Pelaksanaan kegiatan Napak Tilas bagi Ormas dan OKP	300 orang	-	-	-	-
9	Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Masyarakat dalam membina kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara	100 orang	850 orang	850 orang	850 orang	200 orang
10	Kegiatan Pendataan Ormas, OKP dan LSM	60 Organisasi	70 Organisasi	80 Organisasi	90 Organisasi	100 Organisasi
11	Pelatihan Relawan Penyuluh Narkoba untuk Pelajar	50 orang	-	-	-	-
12	Penyuluhan Penanggulangan Bahaya Narkoba	100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	-

*Sumber: Kantor Kesbang Linmas Kab. Serdang Bedagai, 2016*

Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi. Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi.

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 5 tahun terakhir cukup kondusif salah satu indikatornya adalah konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme dan lain-lain tidak pernah terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Penanggulangan terhadap adanya gangguan yang dapat melemahkan kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **2.3.1.6. Sosial**

Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan untuk menjamin akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap pelayanan dasar sosial antara lain melalui program pemberian bantuan sosial bagi PMKS. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang termasuk kedalam 26 (dua puluh enam) penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012 Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dengan memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka upaya pencapaian pelayanan dasar bidang sosial guna membantu penanganan PMKS telah dilakukan program dan kegiatan yang bersifat multi sektoral secara bersinergi dan bertahap. Gambaran indikator kinerja urusan sosial dapat dilihat pada **Tabel 2.63** dibawah ini. Adapun potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.64**.

**Tabel 2.63****Hasil Kinerja Urusan Sosial****Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMKS	40355	32048	32026	21384	7723
2	Jumlah PMKS yang ditangani	4466	3271	3232	9168	7723
3	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	4375	3251	3217	9033	7723
4	Sarana sosial yang dimiliki	7	7	7	8	8
5	Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak cacat	0,34%	2%	3,07%	0,76%	2,50%
6	Akses pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin	0,34%	2,80%	3,84%	8,29%	9,603%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang Bedagai, 2016

**Tabel 2.64**

**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	KECAMATAN	JENIS POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL												JUMLAH
		PSP	PSM	WPKS	PS	TAGANA	KT	WSBM	LKS	LK3	KP	DU	TKSK	
1	PANTAI CERMIN	-	21	-	-	5	300	-	1	-	-	1	1	329
2	PERBAUNGAN	-	34	-	-	1	700	-	2	-	-	2	1	740
3	PEGAJAHAN	-	18	-	-	0	325	-	-	-	-	2	1	346
4	TELUK MENGKUDU	-	30	-	-	2	300	-	2	-	-	2	1	337
5	SEI RAMPAH	-	20	-	-	3	425	-	3	1	-	6	1	459
6	SEI BAMBAN	-	15	-	-	0	250	1	1	-	-	1	1	269
7	TANJUNG BERINGIN	-	9	-	-	12	200	-	2	-	-	-	1	224
8	BANDAR KHALIFAH	-	5	-	-	2	125	-	-	-	-	-	1	133
9	T. SYAHBANDAR	-	10	-	-	1	250	2	-	-	-	6	1	270
10	TEBING TINGGI	-	14	-	-	8	350	2	-	-	-	3	1	378
11	DOLOK MERAWAN	-	17	-	-	0	425	-	-	-	-	2	1	445
12	SIPISPIS	-	6	-	-	0	500	-	-	-	-	3	1	510
13	KOTARI	-	20	-	-	0	275	-	-	-	-	2	1	298
14	BINTANG BAYU	-	11	-	-	0	475	-	-	-	-	-	1	487
15	SILINDA	-	19	-	-	0	225	-	1	-	-	1	1	247
16	SERBAJADI	-	14	-	-	0	250	-	-	-	-	-	1	265
17	DOLOK MASIHUL	-	29	-	-	1	700	-	-	-	-	4	1	735
<b>JUMLAH</b>		-	<b>292</b>	-	-	<b>35</b>	<b>6075</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	-	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>6472</b>

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang Bedagai, 2016

**Keterangan:**

PSP : Pekerja Sosial Professional

WSBM : Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

PSM : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial

WPKS : Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

LK3 : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PSF : Pekerja Sosial Fungsional

KP : Keluarga Pioneer

TAGANA : Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

DU : Dunia Usaha Yang Melakukan UKS

KT : Karang Taruna (KT)

TKKS : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

### **2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1. Tenaga Kerja**

Urusan tenaga kerja memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi (Dinsosnakerkop) Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan produksi tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pasar kedepan. Peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan melalui pelatihan kerja, pelayanan penempatan kerja, memfasilitasi perusahaan dengan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, dalam menghadapi MEA, dimana beberapa jenis pekerjaan diharuskan memiliki kompetensi sertifikasi, untuk ke depan Dinsosnakerkop akan berupaya memfasilitasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Untuk penyerapan tenaga kerja baru, Dinsosnakerkop berusaha menginventarisir barang dan jasa serta kebutuhan masyarakat luas dengan upaya untuk memproduksi barang-barang tersebut di Kabupaten Serdang Bedagai misalnya asesoris, handycraft, boneka, dll. Selain itu, penumbuhan kesempatan kerja juga diharapkan dari sektor pariwisata.

Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Serdang Bedagai terus menurun dari 302.400 orang di tahun 2011 menjadi 264.902 orang di tahun 2015 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 63,05%. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya bagian dari penduduk usia kerja Kabupaten Serdang Bedagai yang terlibat dalam kegiatan produktif.

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Serdang Bedagai selama lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2011 sebanyak 1.435 orang pencari kerja yang ditempatkan, di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi hanya 598



orang. Dengan menurunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan tentu berdampak pada semakin tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari sebesar 4,89% di tahun 2011 menjadi 7,18% di tahun 2015. Kondisi ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi di masa yang akan datang. Upaya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreatifitas bagi para pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinyu dan konsisten harus dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sesuai

Pada tahun 2011, perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menerapkan norma Keselamatan dan Perlindungan Kerja sebanyak 260 perusahaan dan semakin meningkat menjadi 310 perusahaan di tahun 2015. Penerapan norma ini harus terus didorong lebih lanjut hingga seluruh perusahaan menerapkannya, sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja. Di samping itu, angka sengketa perusahaan dengan pekerja semakin berkurang dari sebanyak 31 kasus di tahun 2011 menjadi hanya 25 kasus sengketa di tahun 2015.

**Tabel 2.65**

**Hasil Kinerja Urusan Tenaga Kerja  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja (orang)	302.400	274.754	297.484	272.992	264.902
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,69%	66,43%	73,94%	65,47%	63,05%
3	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	1.435	1.093	1.725	1.568	598
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,89%	5,68%	6,14%	7,14%	7,18%
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	31	33	20	28	25
6	Keselamatan dan perlindungan (Perusahaan)	260	273	290	302	310

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang bedagai, 2016*

Uraian terperinci mengenai kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.66**.

**Tabel 2.66**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	174.596	90.306	264.902
	Bekerja	166.396	75.495	245.891
	Pengangguran	8.200	10.811	19.011
2	Bukan Angkatan Kerja (Mengurus rumah tangga, dan lainnya)	34.410	120.821	155.231
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	209.006	211.127	420.133
3	TPAK	83,54	42,77	63,05
4	TPT	4,70	11,97	7,18

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

Adapun sebaran tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.67**.

**Tabel 2.67**  
**Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Pengangguran	Persentase
1	KOTARIH	8.133	252	0,10
2	SILINDA	8.472	263	0,11
3	BINTANG BAYU	10.768	335	0,13
4	DOLOK MASIHL	49.284	1.556	0,60
5	SERBAJADI	19.898	617	0,24
6	SIPISPIS	32.182	998	0,40
7	DOLOK MERAWAN	17.306	536	0,20
8	TEBING TINGGI	41.191	1.277	0,50
9	TEBING SYAHBANDAR	32.805	1.023	0,40
10	BANDAR KHALIPAH	25.238	782	0,30
11	TANJUNG BERINGIN	37.617	1.128	0,44
12	SEI RAMPAH	64.864	2.034	0,80
13	SEI BAMBAN	43.759	1.362	0,54
14	TELUK MENGKUDU	42.029	1.303	0,50
15	PERBAUNGAN	103.296	3.312	1,25
16	PEGAJAHAN	27.395	850	0,30
17	PANTAI CERMIN	44.454	1.383	0,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>608.691</b>	<b>19.011</b>	<b>7,18</b>

*Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang bedagai, 2016*

Lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Serdang Bedagai adalah pertanian, industri dan jasa-jasa. Hal ini sejalan dengan sektor penyusun struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya. Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama tahun 2011-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.68** di bawah ini.

**Tabel 2.68**  
**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2015**

NO	TAHUN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	116.114	88.223	112.301	119.967	106.815
2	Industri	63.280	49.338	48.146	47.504	46.543
3	Jasa-jasa	107.031	121.588	118.802	94.030	92.533
	<b>JUMLAH</b>	<b>286.425</b>	<b>259.149</b>	<b>279.249</b>	<b>253.501</b>	<b>245.891</b>

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

#### **2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Serdang Bedagai ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Walaupun sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai namun kenyataannya menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Kesenjangan gender tentu merugikan perempuan karenanya upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status kedudukan perempuan di berbagai bidang Pembangunan.

Dari **Tabel 2.69** dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah meningkat dari 4.325 orang di tahun 2014 menjadi 4.515 orang di tahun 2015 dan jumlah anggota legislatif perempuan meningkat dari sebanyak 6 orang di tahun 2011 menjadi sebanyak 8 orang di tahun 2015. Walaupun demikian, partisipasi angkatan kerja perempuan terus menurun dari sebanyak 121.234 orang di tahun 2011 menjadi 75.495 orang di tahun 2015.

Terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, dapat dijelaskan bahwa ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai masih merasa malu untuk menyampaikan kasus kekerasan

yang dialaminya di dalam rumah tangga. Selama periode 2011-2015 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan semakin meningkat yakni sebanyak 23 kasus di tahun 2015 dari 10 kasus di tahun 2011.

Di samping itu, jumlah anak perempuan >15 tahun yang melek huruf di tahun 2015 sudah mencapai 98,13%. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 1,87% lagi anak perempuan >15 tahun yang buta huruf dan persentase ini didominasi oleh para wanita usia lanjut.

**Tabel 2.69**

**Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	*	*	*	4.325	4.515
2	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan	6	7	7	6	8
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	121.234	85.283	113.111	85.681	75.495
4	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	10 Kasus	2 Kasus	11 Kasus	21 Kasus	23 Kasus
5	Jumlah Anak Perempuan >15 Tahun yang Melek Huruf	*	*	*	*	98,13
6	Jumlah KDRT (kasus)	2	2	11	60	72

*Sumber : BPPAKB Kaupaten Serdang Bedagai, 2016 dan Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

Keterangan : \*) data tidak tersedia

### **2.3.2.3. Pangan**

Perwujudan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Serdang Bedagai mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Dalam hal ini erat kaitannya dengan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dengan pangan, lembaga dan para pemangku kepentingan pangan (stakeholders). Koordinasi yang mantap dan sebagai pendukungnya yaitu adanya informasi yang akurat, program yang terencana dan tepat sasaran, tujuan dan arah kebijakan yang jelas serta pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

Kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, pengadaan prasarana infrastruktur daerah sentra pangan antara lain 48 lantai jemur dan 55 gedung lumbung. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 210 gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan 1.526 kelompok tani (Poktan) yang terbagi menjadi 900 kelas kelompok pemula, 485 kelas lanjut, 141 kelas madya dan kelas utama 0.

Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan juga telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan sesuai Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010, yang terdiri atas empat jenis pelayanan, yaitu :

❖ Ketersediaan dan Cadangan pangan

Capaian Ketersediaan energi per kapita Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011 sebesar 6.660 Kkal (dan ketersediaan protein per kapita sebesar 148 gr, tahun 2012 ketersediaan energi per kapita sebesar 5.939 Kkal dan ketersediaan protein per kapita 144 gr, tahun 2013 ketersediaan energi per kapita 6.649 Kkal dan ketersediaan protein per kapita sebesar 138 gr, tahun 2014 ketersediaan energi per kapita 3.060 Kkal dan ketersediaan protein per kapita sebesar 77,59 gr dan tahun 2015 ketersediaan energi per kapita 3.060 Kkal dan ketersediaan protein per kapita sebesar 77,59 gr

❖ Distribusi dan akses pangan

❖ Penganekaragaman dan keamanan pangan

❖ Penanganan kerawanan pangan

Sampai saat ini Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki daerah yang rawan pangan.

**Tabel 2.70**  
**Hasil Kinerja Urusan Pangan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan Pangan Utama	E: 6.660	E: 5.939	E: 6.649	E: 3.060	E: 3.060
		P: 148	P: 144	P: 138	P: 77,59	P: 77,59
2	Ketersediaan Cadangan Pangan			39.136 kg	39.136 kg	58.584 kg

Sumber: BP2KP Kab. Serdang Bedagai, 2016



Adapun uraian ketersediaan pangan utama dari beberapa komoditas dapat dilihat pada **Tabel 2.71** di bawah ini.

**Tabel 2.71**

**Ketersediaan Pangan Utama  
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Beras						
	Kebutuhan Konsumsi / Kapita / Tahun (kg)	-	-	93.9	93.8	57.1	81.6
	Kebutuhan Konsumsi / Tahun (ton)	-	-	56,718	56,803.6	33,939.2	49,154
	Ketersediaan Beras untuk Dikonsumsi (ton)	-	-	229,653	216,846	243,124	220,490
2	Jagung						
	Kebutuhan Konsumsi / Kapita / Tahun (kg)	-	-	0.2	0.2	0.1	0.2
	Kebutuhan (Konsumsi+ Industri) / Tahun (ton)	-	-	120.8	121.1	59.4	100.4
	Produksi Jagung (ton)	-	-	14,740	10,622	15,872	15,795
3	Kedelai						
	Kebutuhan Konsumsi / Kapita / Tahun (kg)	-	-	4.4	4.4	7.7	5.5
	Kebutuhan (Konsumsi+ Industri) / Tahun (ton)	-	-	2,657.7	2,664.5	4,576.7	3,299.6
	Produksi Kedelai (ton)	-	-	553	316	845	1,817
4	Daging						
	Kebutuhan Konsumsi / Kapita / Tahun (kg)	-	-	1.9	1.9	0.2	1.3
	Kebutuhan Konsumsi / Tahun (ton)	-	-	1,147.6	1,150.6	118.8	805.7
	Produksi Daging yang Diharapkan (ton)	-	-	*)	*)	*)	*)

*Sumber: BP2KP Kab. Serdang Bedagai, 2016*

*Catatan : \*) data tidak tersedia*

### 2.3.2.4. Pertanian

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani. Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 dapat dilihat dalam **Tabel 2.72** di bawah ini.

**Tabel 2.72**

**Jumlah Tanah Bersertifikat di Kabupaten Serdang Bedagai per Jenis Hak  
Tahun 2011-2015**

No	Tanah Bersertifikat	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tanah yang Bersertifikat	Bidang	6.445	3.430	3.394	4.261	4.083
2	Hak Milik	Bidang	6.416	3.410	3.394	4.228	4.009
3	Hak Guna Bangunan	Bidang	8	8		2	16
4	Hak Guna Usaha	Bidang				1	
5	Hak Pakai	Bidang	17			9	19
6	Hak Wakaf	Bidang	4	12		21	39

*Sumber : Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kab. Serdang Bedagai, 2016*

### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup ditujukan untuk perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Hasil yang telah dicapai antara lain dengan menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk memelihara lingkungannya, meningkatnya kawasan penghijauan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan kegiatannya atau membangun perusahaannya di wilayah Serdang Bedagai untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL dimana dari 546 usaha dan/atau kegiatan yang terdata pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015, perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 2.73**  
**Kepemilikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015**

Jenis Dokumen	Jumlah Usaha/Kegiatan
Amdal	10
UKL- UPL	64
SPPL	442
<b>Total</b>	<b>516</b>

*Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2015 sudah mencapai 100% yaitu perusahaan yang memiliki AMDAL berjumlah 11 perusahaan yaitu:

1. PT. Socfindo Bangun Bandar
2. PT. Socfindo Matapao
3. PTPN. IV Adolina
4. PTPN. IV Pabatu
5. PTPN. III Kebun Rambutan (PKS)
6. PTPN. III Gunung Para
7. PT. Aquafarm Nusantara
8. PT. Socfindo Perkebunan Seleksi Bangun Bandar





9. PTPN. III Kebun Gunung Pamela
10. PTPN. III Kebun Silau Dunia
11. PTPP. Lonsum Rambung Sialang

Sementara itu, terdapat 30 usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air akibat ketidakpatuhan terhadap persyaratan teknis dan administrasi yaitu:

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Deli Sari Murni	16	Hotel Buluh Pagar
2	UD. Nasional	17	Hotel Super Indah
3	UD. Jasa Ecco Wood	18	Hotel Suka Damai Indah
4	PT. Alitoa Firdaus Industri	19	Hotel Top Inn
5	RS Melati Kp. Pon	20	PT. Kawasan Pantai Cermin
6	RSUD Sultan Sulaiman	21	PT. Hexa Putri Bahari
7	Puskesmas Plus Perbaungan	22	PT. Budi
8	Poliklinik Kebun PTPN IV Adolina	23	PT. Karya Havea Indonesia
9	SPBU 14205165	24	PT. Deli Indah Plastik
10	SPBU 142051130	25	TPA Perbaungan
11	SPBU 142051106	26	TPA Belidaan
12	SPBU 142051139	27	RS. Mahlisyam
13	SPBU 142061107	28	PT. Tunas Harapan Sawit
14	SPBU 14206197	29	CV. Tanindo Sejati
15	SPBU 14206198	30	SPBU 14205156

Untuk kegiatan penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dari hasil pengawasan tahun 2015 terdapat 17 kegiatan penambangan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.74** berikut.

**Tabel 2.74**  
**Daftar Kegiatan Penambangan Ilegal**

NO	NAMA PENGUSAHA/ PERUSAHAAN	LOKASI PERTAMBANGAN	KECAMATAN	BAHAN GALIAN	DOKUMEN LINGKUNGAN
1	JUNAIDI	DUSUN IV DESA BAH SUMBU	TEBING TINGGI	PASIR	TIDAK ADA
2	SARMAN	DUSUN IV DESA BAH SUMBU	TEBING TINGGI	PASIR	TIDAK ADA
3	SUDIAMRI	DUSUN IV DESA BAH SUMBU	TEBING TINGGI	PASIR	TIDAK ADA
4	EDY SUYATNO	DUSUN IV DESA BAH SUMBU DESA SUNGAI BUAYA DESA PERBAHINGAN DESA PERBAHINGAN	TEBING TINGGI	PASIR	TIDAK ADA
5	SUGIARTO	DUSUN I DESA CITAMAN JERNIH	PERBAUNGAN	PASIR	TIDAK ADA
6	SISWANDI	DUSUN KELURAHAN TUALANG	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
7	LEGIRUN	DUSUN DESA KOTAGALUH	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
8	LEGIRUN	DUSUN DESA PEMATANG SIJONAM	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
9	SUTARMAN	DUSUN DESA SEI JENGGI DESA SERBANANTI	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
10	SARWONO	DUSUN VI DESA RIMBUN DESA SUNGAI BUAYA	SIPISPIS	SIRTU AIR	TIDAK ADA
11	EFENDI HASIBUAN	DUSUN I DESA SIMPANG AMPAT	SEI RAMPAH	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
12	EFENDI HASIBUAN	DESA SINAH KASIH	SEI RAMPAH	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
13	MALWEN	DESA SIMPANG AMPAT	SEI RAMPAH	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
14	MALWEN	DESA CEMPEDAK LOBANG	SEI RAMPAH	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
15	ADE	DESA LUBUK	PERBAUNGAN	TANAH	TIDAK ADA



NO	NAMA PENGUSAHA/ PERUSAHAAN	LOKASI PERTAMBANGAN	KECAMATAN	BAHAN GALIAN	DOKUMEN LINGKUNGAN
		ROTAN		TIMBUN	
16	IYOL	DESA NAGA LAWAN	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA
17	SURYA	DESA PEMATANG SIJONAM	PERBAUNGAN	TANAH TIMBUN	TIDAK ADA

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Di samping itu, penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan juga telah mencapai 100% di tahun 2015.

Pada **Tabel 2.75** dapat dilihat bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Serdang Bedagai semakin meningkat dari 20% di tahun 2011 menjadi 31% di tahun 2015 dengan tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 14,75% persatuan penduduk di tahun 2011 menjadi 28,70% di tahun 2015. Persentase pencemaran status mutu air juga menurun dari 18% di tahun 2011 menjadi 0% di tahun 2015.

**Tabel 2.75**  
**Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	20 %	21 %	24 %	27 %	31 %
2	Pencemaran status mutu air	18%	16%	14%	12%	0%
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	14,75%	25,07%	24,35%	26,60%	28,70%
5	Penegakan hukum lingkungan	70%	60%	100%	83,30%	100%

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

### **2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang memberikan pemenuhan hak-hak administratif untuk pelayanan publik dan perlindungan yang terkait dengan dokumen kependudukan. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai, diarahkan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Akte Nikah.

Dari tahun 2011-2015, semua keluarga di Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki kartu keluarga sedangkan rasio penduduk berKTP persatuan penduduk masih 56,03% di tahun 2015 walaupun demikian capaian ini sudah meningkat cukup besar dari 35% di tahun 2011. Penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 383.946 orang di tahun 2015 dengan rasio kepemilikan KTP per satuan penduduk wajib KTP sebesar 85,26% dan ini merupakan KTP nasional berbasis NIK.

Adapun indikator bayi berakte kelahiran pada tahun 2015 sudah sebanyak 59% sedangkan anak yang berakte kelahiran sudah mencapai 72% dan pasangan yang telah memiliki akte nikah sebanyak 80%. Dalam pengelolaan data kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki data base kependudukan skala kabupaten sejak tahun 2011.

**Tabel 2.76**  
**Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ratio Keluarga yang memiliki KK per satuan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	35%	47%	43%	56%	56,03%
3	Rasio bayi berakte kelahiran	54%	57%	59%	60%	59%
4	Rasio pasangan berakte nikah	77%	75%	64%	67%	80%
5	Rasio Anak memiliki Akta Kelahiran	56%	60%	65%	68%	72%
6	Kepemilikan KTP	330.111	339.558	356.683	377.554	383.946
7	Ratio Kepemilikan KTP per satuan penduduk wajib KTP	49%	67%	65%	80,21%	85,26%
8	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	46%	46%	49%	53%	56%
9	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	49%	67%	65%	80,21%	85,26%

*Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2016*

Jika dilihat pada **Tabel 2.76**, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 yang tersebar di 17 kecamatan maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Pantai Cermin yakni 2,16% sedangkan pertumbuhan penduduk yang paling kecil berada di Kecamatan Dolok Merawan. Sedangkan pertumbuhan penduduk total Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 adalah sebesar 1,458%.

Sementara itu, selama periode 2011-2015 juga dapat dilihat **Tabel 2.77** bahwa berdasarkan golongan umur, untuk penduduk pada kelompok usia produktif, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cenderungimbang. Sementara itu, penduduk usia muda didominasi oleh penduduk laki-laki dan penduduk usia lanjut didominasi oleh penduduk perempuan.

**Tabel 2.77**  
**Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Sebaran Geografis Tahun 2011-2015**

No	Kecamatan	Tahun		Pertumbuhan Penduduk
		2011	2015	
1	Kotarihi	8035	8133	1.220
2	Silinda	8384	8472	1.050
3	Bintang Bayu	10651	10768	1.098
4	Dolok Masihul	48642	49284	1.320
5	Serba Jadi	19686	19898	1.077
6	Sipispis	31829	32182	1.109
7	Dolok Merawan	17131	17306	1.022
8	Tebing Tinggi	40616	41191	1.416
9	Tebing Syahbandar	32423	32805	1.178
10	Bandar Khalifah	24949	25238	1.158
11	Tanjung Beringin	37151	37617	1.254
12	Sei Rampah	63955	64864	1.421
13	Sei Bamban	43165	43759	1.376
14	Teluk Mengkudu	41469	42029	1.350
15	Perbaungan	101278	103296	1.993
16	Pegajahan	27063	27395	1.227
17	Pantai Cermin	43514	44454	2.160
<b>Total</b>		<b>599.941</b>	<b>608.691</b>	<b>1.458</b>

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2011-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

**Tabel 2.78**  
**Perbandingan Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Golongan Umur Tahun 2011-2015**

Golongan Umur	2011		2012		2013		2014		2015	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0-4	33075	30888	34173	32172	35096	33259	34809	33037	34237	32546
5-9	33391	31698	31523	30359	32226	30933	32400	31071	32594	31350
10-14	31925	29951	31808	29831	30124	28629	29916	28425	29958	28413
15-19	28053	26173	29323	27070	28384	26295	28203	25971	28088	25819
20-24	24506	23642	24343	23217	25191	23585	24967	23424	25012	23403
25-29	24450	24447	23937	24280	24227	24068	23982	23725	23762	23510
30-34	22918	22853	22805	22948	22362	22752	22174	22559	22085	22430
35-39	20796	21261	20885	21370	20907	21314	20850	21273	20861	21363
40-44	20072	19979	20281	20245	20288	20186	20339	20209	20430	20275
45-49	17634	18721	17903	18972	17966	19069	18109	19229	18283	19413
50-54	15449	15263	11753	15825	15813	16044	16069	16371	16319	16680
55-59	11167	11134	15737	12014	12129	12384	12554	12913	12935	13384
60+	17950	22545	18568	22684	19210	23102	20031	23757	20949	24592
Total	301386	298555	303039	300987	303923	301620	304403	301964	305513	303178

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2011-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten/kota yang strategis dan potensial di Sumatera Utara baik skala regional, nasional maupun internasional, terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan dan 237 desa dengan luas wilayah 1.952,38 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 608.691 jiwa di tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui program pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat, terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat baik masyarakat di perdesaan maupun masyarakat di kabupaten dapat terwujud kebersamaan dan terpeliharanya tradisi gotong royong yang terdapat dalam program peningkatan swadaya masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan prinsip kekeluargaan antar warga yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada **Tabel 2.79** berikut ini.

**Tabel 2.79**  
**Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok PKK aktif	261	261	261	261	261
2	Jumlah Posyandu aktif	983	983	983	983	983
3	Persentase peningkatan Jumlah desa yang memiliki data Profil Desa	10%	25%	50%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha lembaga ekonomi perdesaan melalui SPP PNPM-MP, UED SP, (UP2K), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengelolaan Pasar Desa	80%	85%	85%	97%	97%
5	Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Peningkatan Jumlah Dana Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa	15,51%	38%	60,00%	81,00%	98%
7	Persentase Peningkatan keaktifan Gotong Royong Masyarakat	30%	45%	62%	78%	85%
8	Persentase Peningkatan Keaktifan BPD	50%	55%	67%	85%	90%





9	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Lembaga Kemasyarakatan LKMD	25%	35%	50%	74%	95%
10	Persentase Peningkatan keaktifan Lembaga Adat dalam partisipasi pembangunan masyarakat	30%	45%	57%	76%	90%
11	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan	45%	55%	70%	85%	90%
12	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lurah, Sekretaris Lurah, Bendahara Lurah, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Lingkungan	45%	55%	70%	85%	90%
13	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	55%	65%	75%	88%	92%
14	Persentase Peningkatan Jumlah Peraturan Desa di 237 Desa	35%	40%	55%	87%	100%
15	Persentase Jumlah Pembangunan Fisik dan Kegiatan Non SPP/ Pelatihan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Penurunan jumlah Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa	10%	25%	45%	65%	85%
17	Persentase Peningkatan Kebersihan Desa dan Kelurahan	60%	75%	85%	90%	94%
18	Persentase jumlah desa yang memiliki batas-batas desa	10%	10%	10%	10%	10%
19	Persentase jumlah desa yang memiliki peraturan desa tentang penataan kawasan perdesaan	10%	10%	10%	10%	10%
20	Persentase Peningkatan Jumlah alat-alat TTG yang ditemukan	30%	34%	60%	80%	90%
21	Persentase Peningkatan Jumlah masyarakat yang menggunakan Alat-alat TTG	2%	3%	12%	20%	35%
22	Persentase Peningkatan jumlah Desa berstatus Swasembada terhadap total desa	10%	11%	12%	13%	15%

Sumber: BPMPD Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

### **2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju.

Rincian kondisi umum dari penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

a. *Pasangan Usia Subur (PUS)*

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun terus meningkat. Dapat dilihat pada Tahun 2011 jumlah PUS sebanyak 114.572 pasangan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 117.044 pasangan.

b. *Tingkat Kesertaan ber KB*

Tingkat kesertaan ber KB diukur dari angka persentase PUS yang menjadi peserta KB. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah peserta KB diperkirakan sebanyak 83.570 peserta, dan jumlah PUS sebanyak 117.044 pasangan, sehingga tingkat kesertaan ber KB dari seluruh pasangan usia subur (PUS) sebesar 74%. Akseptor KB terbesar berada di Kecamatan Perbaungan sedangkan akseptor KB terkecil berada di Kecamatan Silinda.

c. *Rata-rata jumlah anak per keluarga*

Rata-rata keluarga di Kabupaten Serdang Bedagai sudah memiliki anak 1 sampai 3 orang atau sudah mendekati jumlah anggota keluarga kecil.

d. *Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I*

Selama periode 2011-2015, keluarga prasejahtera di Kabupaten Serdang Bedagai menurun dari 15.358 keluarga di tahun 2011 menjadi 13.345 keluarga di tahun 2015 sedangkan keluarga sejahtera I meningkat dari 24.761 keluarga menjadi 28.327 keluarga.

**Tabel 2.80**

**Hasil Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasangan Usia Subur	114.572	115.211	114.860	116.389	117.044
2	Cakupan Peserta KB Aktif (75% dari jumlah PUS)	*)	*)	*)	*)	83.570 Akseptor (73,64% dr jlh PUS)
3	Target PPM PB	*)	*)	*)	*)	9,095 Akseptor (54% dr jlh PUS)
4	Jumlah PPKBD	243 Orang	243 Orang	243 Orang	243 Orang	243 Orang
5	Sub PPKBD	1268 Orang	1268 Orang	1268 Orang	1268 Orang	1268 Orang
6	Kelompok UPPKS	46	46	46	34	34
7	Kelompok BKB	243	243	243	120	120
8	Kelompok BKR	243	243	243	85	85
9	Kelompok BKL	243	243	243	82	82
10	Kelompok BLK	243	243	243	243	243
11	Keluarga Pra Sejahtera	15.358	13.042	14.463	13.345	*)
12	Keluarga Sejahtera I	24.761	29.826	13.042	28.327	*)
13	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148

*Sumber : BPPAKB Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

*Catatan : \*) data tidak tersedia*

**Tabel 2.81**

**Jumlah akseptor KB berdasarkan Kecamatan di Tahun 2015**

No	Kecamatan	Akseptor KB
1	Kotarih	1203
2	Silinda	1136
3	Bintang Bayu	1704
4	Dolok Masihul	6807
5	Serba Jadi	3435
6	Sipispis	3685
7	Dolok Merawan	2333
8	Tebing Tinggi	6499
9	Tebing Syahbandar	5107
10	Bandar Khalifah	2300
11	Tanjung Beringin	5391
12	Sei Rampah	9227
13	Sei Bambi	6058
14	Teluk Mengkudu	5663
15	Perbaungan	14606
16	Pegajahan	3523
17	Pantai Cermin	7238

*Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2016, BPS Kab. Serdang Bedagai*

### 2.3.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain adalah jumlah pengujian KIR untuk angkutan umum dan jumlah angkutan darat. Persentase realisasi angkutan umum yang melakukan uji KIR setiap tahun berfluktuatif dengan tren menurun. Angkutan umum yang paling banyak melakukan uji KIR adalah angkutan umum barang sebanyak 3.229 unit di tahun 2013 menurun menjadi 3.205 di tahun 2015. Sedangkan angkutan umum yang paling sedikit melakukan uji KIR adalah bus dengan jumlah 124 di tahun 2013 menjadi 106 di tahun 2015.

Jumlah angkutan darat di Kabupaten Serdang Bedagai juga menurun dari sebanyak 4.359 armada di tahun 2013 menjadi 3.991 armada di tahun 2015. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2015, belum ada terminal bis yang dibangun di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun demikian, Selama periode 2011-2015, di Kabupaten Serdang Bedagai juga sudah dilakukan fasilitas perlengkapan jalan diantaranya pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

**Tabel 2.82**

**Hasil Kinerja Urusan Perhubungan  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah uji kir angkutan umum (unit):					
	Barang	*)	*)	3229	2848	3205
	Penumpang	*)	*)	302	198	178
	Bus	*)	*)	124	76	106
	Betor	*)	*)	704	847	502
2	Angkutan Darat (armada)	*)	*)	4359	3967	3991
3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)	25	25	25	25	25

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

Catatan : \*) data tidak tersedia

### **2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dapat memberikan nilai tambah dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di lingkungan pemerintahan, secara umum penerapan informasi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, serta manajemen pemerintahan yang lebih efisien.

Sistem informasi melalui penerapan teknologi informasi di Kabupaten Serdang Bedagai sudah banyak digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, antara lain seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Pegawaian Daerah, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMPDA), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Website Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Stasiun Penyiaran Radio, Sistem Informasi Desa (SID) dll.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah penyiaran radio hanya satu buah dan Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki alamat website yaitu [www.serdangbedagaikab.go.id](http://www.serdangbedagaikab.go.id). Di samping itu, jumlah surat kabar nasional/lokal yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2015 berjumlah 83 surat kabar dan jumlah pameran/expo yang pernah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun rata-rata sebanyak satu kali.

**Tabel 2.83**  
**Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	1	1	1	1	1
2	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	78	80	82	83	83
4	Jumlah pameran/expo	1	1	1	1	1

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

#### **2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi dan UKM sudah terbukti ketahanannya terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir, secara nasional, kondisi koperasi sangat memprihatinkan dimana kontribusi koperasi terhadap PDRB hanya 1,7% semenjak Indonesia merdeka. Untuk itu perlu upaya untuk menumbuhkan koperasi baru dan menyehatkan koperasi yang kurang aktif.

Di Kabupaten Serdang Bedagai adalah jumlah koperasi aktif sebanyak 87 unit atau sekitar 24,51 % di tahun 2015. Selama rentang waktu 2011-2015 terjadi fluktuasi jumlah koperasi aktif di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dari 212 unit tahun 2011, 227 unit di tahun 2012, 237 unit di tahun 2013, 241 unit di tahun 2014 dan menurun signifikan menjadi 87 unit pada tahun 2015. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM juga meningkat dari 900 UKM di tahun 2011 menjadi hampir dua kali lipat di tahun 2015 yakni sebanyak 1.084 UKM. Usaha Mikro dan Kecil juga menunjukkan tren peningkatan yang sama.

Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “*easy entrance*” UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai *stakeholders*, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan.

**Tabel 2.84**

**Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif (koperasi)	212	227	237	241	87
2	Jumlah koperasi	326	341	344	348	355
3	Persentase koperasi aktif	65,03	66,57	68,89	69,25	24,51
4	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (UKM)	900	1.050	1.060	1.073	1.084
5	Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)	41.393	43.081	43.812	43.825	43.835

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang bedagai, 2016

**Tabel 2.85**

**Persentase Koperasi dan Koperasi Aktif per Kecamatan Tahun 2011-2015**

No	Kecamatan	2011		2012		2013		2014		2015	
		Kope rasi	Aktif	Kope rasi	Aktif	Kope rasi	Aktif	Kope rasi	Aktif	Kope rasi	Aktif
1	Kotarih	12	6	12	8	12	8	11	8	12	4
2	Silinda	11	5	11	7	11	7	11	7	12	4
3	Bintang Bayu	5	3	8	5	5	5	7	5	7	1
4	Dolok Masihul	20	10	20	14	20	14	24	14	25	5
5	Serba Jadi	7	5	7	5	7	5	10	5	10	2
6	Sipispis	15	8	15	9	4	9	15	9	16	5
7	Dolok Merawan	5	3	5	3	5	3	7	3	7	2
8	Tebing Tinggi	21	12	21	12	21	12	21	12	21	5
9	Tebing Syahbandar	7	3	7	3	7	3	8	3	8	3
10	Bandar Khalifah	6	3	6	3	6	3	6	3	6	1
11	Tanjung Beringin	25	18	26	18	25	18	21	18	22	7
12	Sei Rampah	47	32	54	32	57	32	53	36	54	22
13	Sei Bambi	25	15	25	15	25	15	28	15	31	6
14	Teluk Mengkudu	22	15	22	15	22	15	19	15	19	4
15	Perbaungan	66	50	73	50	79	55	74	55	68	8
16	Pegajahan	16	12	16	12	22	17	19	17	19	5
17	Pantai Cermin	16	12	13	12	16	12	14	12	18	3
Total		326	212	341	227	344	237	348	241	355	87

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Serdang bedagai, 2016; Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai



### 2.3.2.12. Penanaman Modal

Kondisi Investasi di Kabupaten Serdang Bedagai bertumpu pada 3 pilar pembangunan yaitu : peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat diharapkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Langkah strategis dalam rangka meningkatkan investasi menjadi semakin perlu dan mendesak seperti iklim usaha yang sehat, kemudahan dan kejelasan prosedur serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Berikut disajikan perkembangan realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2011-2015 baik PMDN dan PMA pada **Tabel 2.86** berikut ini.

**Tabel 2.86**  
**Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA (perusahaan)	19	19	19	19	19
2	Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN (perusahaan)	38	40	41	40	40
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (dalam juta rupiah)	30.882,118 .425	31.332,118 .425	31.332,118 .425	31.332,118 .425	31.332,118 .425
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN (dalam juta rupiah)	1.322.599, 514.042	1.401.908, 758.409	1.550.421, 980.502	1.708.564, 980.502	1.698.935, 202.595

*Sumber: KP2TPM Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Posisi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar memberikan harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Perkembangan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan peningkatan walaupun tidak begitu signifikan.

### 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan pemuda dan olah raga di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menggalakkan kegiatan olah raga melalui beberapa even lomba di bidang olahraga. Hal ini ditandai oleh tingginya animo masyarakat dalam menggunakan fasilitas olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dari tahun 2011-2015 telah banyak prestasi yang diraih oleh para atlet yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai baik di tingkat regional dan nasional.

**Tabel 2.87**

**Hasil Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga  
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	60	60	60	60	60
2	Jumlah organisasi olahraga	7	7	7	7	7
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	6	3	3
4	Jumlah kegiatan olahraga	0	1	1	3	0
5	Pengiriman BPAP (Bakti Pemuda Antar Provinsi)		1 kegiatan	1 kegiatan		
6	Pengiriman pemuda pelopor			1 kegiatan		
7	Ramah tamah pemuda pada kegiatan Sumpah Pemuda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
8	Pelatihan ketrampilan pemuda PASKIBRAKA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
9	Pengembangan olahraga unggulan			1 kegiatan		1 kegiatan
10	Peningkatan kesegaran jasmani		24 kegiatan		7 kegiatan	
11	Penyelenggaraan olahraga tradisional			1 kegiatan		
12	Seleksi dan pengiriman atlet ke PORDASU		22 cabor	22 cabor		
13	Pengiriman atlet ke POSPEDASU			1 kegiatan		
14	Olahraga HUT RI		1 kegiatan			
15	Olahraga HAORNAS	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
16	Pengiriman atlet ke POPDASU		1 kegiatan		1 kegiatan	
17	Penyelenggaraan olahraga arung jeram	1 kegiatan		1 kegiatan		
18	Olahraga Bahari			1 kegiatan		
19	Pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan



20	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)					
21	Lapangan bola kaki	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
22	Prestasi Olahraga dalam event-event Nasional/International	1 cabor	2 cabor	3 cabor	3 cabor	4 cabor
23	Angkat besi/angkat berat/binaraga	2 prestasi	7 prestasi	3 prestasi	3 prestasi	1 prestasi
24	Karate					2 prestasi
25	Tinju			3 prestasi	3 prestasi	2 prestasi
26	Taekwondo			1 prestasi		

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Serdang Bedagai, 2016

#### 2.3.2.14. Statistik

Dalam penyediaan data statistik daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya dalam penggandaan buku “Kabupaten Dalam Angka” atau dalam hal ini “Serdang Bedagai Dalam Angka” dan buku PDRB Kabupaten serta beberapa buku statistik lainnya. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melakukan pengumpulan dan penginputan data pembangunan daerah pada website [www.sipd.bangda.kemendagri.go.id](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.id) setiap tahun.

**Tabel 2.88**

#### **Hasil Kinerja Urusan Statistik**

#### **Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016

#### 2.3.2.15. Kebudayaan

Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS adalah 608.691 jiwa yang terdiri atas suku Melayu, Jawa, Karo, Simalungun, Tapanuli, Toba, Banjar, Minang dan lain-lain. Masyarakat asli yang semula tinggal di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah etnis melayu, sehingga warisan budaya yang masih kental adalah etnis melayu.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Serdang Bedagai diarahkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan acara seremonial sehingga dapat memperkenalkan kebudayaan lokal dan identitas masyarakat setempat sebagai warisan budaya leluhur. Festival seni budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain festival berbalas pantun dan festival tari persembahan.

Jumlah peninggalan benda, situs dan cagar budaya di Kabupaten Serdang Bedagai tidak begitu banyak hanya 8 buah yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Pura Bali Desa Pegajahan, di Kampung Bali Desa Pegajahan Kec. Pegajahan
2. Mesjid Raya Sulaimaniyah Kesultanan Serdang Desa Galuh Kec. Pegajahan
3. Mesjid Raya Sulaimaniyah Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin
4. Mesjid Isma'iliyah Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin
5. Puing-puing Kerajaan Serdang di Kota Galuh Kec. Perbaungan
6. Keramat Kuda di Matapao Kec. Teluk Mengkudu
7. Keramat Kendi Desa Pematang Pulau Kec. Perbaungan
8. Keramat Sumur Tua Pantai Klang Desa Nagalawan Kec. Perbaungan

**Tabel 2.89**  
**Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah benda, situs, cagar budaya	8	8	8	8	8
2	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	0	0	0	0	0
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (keg)	1	1	1	1	1
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Serdang Bedagai, 2016*

### **2.3.2.16. Perpustakaan**

Usaha Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencerdaskan masyarakat terus dilakukan, salah satu upaya melakukan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu dengan adanya perpustakaan daerah. Sejalan dengan waktu untuk lebih meningkatkan kinerja, keberadaan perpustakaan keliling diharapkan dapat menumbuhkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan se- Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahun 2015 jumlah perpustakaan di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 62 unit perpustakaan umum yang terdiri Perpustakaan Kabupaten (Perpustakaan Daerah), Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan desa/kelurahan. Selain itu, terdapat Perpustakaan Khusus antara lain Perpustakaan Rumah Ibadah sebanyak 8 unit, Perpustakaan Sekolah sebanyak 432 unit dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 13 unit. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan secara keseluruhan sebanyak 71.525 orang.

Koleksi perpustakaan merupakan modal dasar perpustakaan yang akan menentukan dan menunjang terhadap kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan. Pada tahun 2015, Koleksi Perpustakaan Daerah berjumlah 25.794 eksemplar. Penyediaan koleksi perpustakaan harus lebih ditingkatkan terhadap segala aspek dan keanekaragaman kebutuhan informasi masyarakat sehingga minat masyarakat semakin besar untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di Kabupaten Serdang Bedagai terutama perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.

**Tabel 2.90**  
**Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan umum	14	8	8	8	62
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5250	4995	5280	3958	71525
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.750 judul, 8.250 eks	2.850 judul, 5.700 eks	3.450 judul, 3.482 eks	750 judul, 1.500 eks	*) 25794 eks

*Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi Kabupaten Serdang Bedagai, 2015*

### 2.3.2.17. Kearsipan

Pelayanan urusan kearsipan masih perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi. Kendala utama pembangunan di bidang kearsipan antara lain adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan kurang memadainya sarana dan prasarana kearsipan yang akhirnya sangat mempengaruhi proses kegiatan penyelenggaraan kearsipan. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah seperti sistem penataan dan penyimpanan yang kurang tepat serta waktu penemuan arsip kembali yang relatif cukup lama.

Indikator pada urusan kearsipan diantaranya adalah pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja indikator pengelolaan arsip secara baku hanya untuk di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sampai tahun 2015 hanya mencapai sekitar 50 berkas. Hal ini disebabkan karena ditiadakannya dana untuk seksi kearsipan secara baku sedangkan SDM pengelola kearsipan tidak mengalami peningkatan.

**Tabel 2.91**  
**Hasil Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku (berkas)	50	50	50	50	50
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	3	3	3	3

*Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

### **2.3.2.18. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:**

#### **1. Pemerintahan Umum**

Unsur penunjang urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh beberapa SKPD diantaranya adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan 17 kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Perda di Kabupaten Serdang Bedagai selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Selama periode 2011-2015 penegakan Perda mencapai 65%. Besarnya wilayah dan objek yang perlu diawasi, menyebabkan terjadinya pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal penanganan unjuk rasa, karena jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat semakin berkurang setiap tahunnya sehingga penanganan unjuk rasa semakin berkurang.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga berusaha menyediakan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, selama periode 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki kantor kecamatan, desa dan kelurahan di seluruh kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yakni 17 kantor kecamatan, 237 kantor desa dan 6 kantor kelurahan.

#### **2. Aparatur dan Kepegawaian**

Urusan Pemerintahan unsur aparatur dan kepegawaian dilaksanakan oleh beberapa SKPD diantaranya adalah BKD dan Sekretariat Korpri. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya meningkatkan kualitas dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara melalui berbagai pendidikan dan pelatihan serta pemberian sanksi terhadap para pelanggar disiplin.



### **3. Keuangan Daerah**

Urusan Pemerintahan dari unsur keuangan daerah dilaksanakan oleh Dinas PPKA. Tata kelola keuangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih menyisakan kendala. Hal ini diindikasikan oleh opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang masih pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2015. Walaupun pernah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2014. Salah satu kendala laporan keuangan pemerintah daerah ialah terkait pengelolaan aset. Untuk itu ke depan diperlukan upaya yang tepat yang dapat mengelola aset secara optimal.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Namun dari struktur APBD tersebut alokasi belanja pegawai masih cukup tinggi dibandingkan dengan belanja modal.

Sampai dengan tahun 2015, jenis pajak dan retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 11 jenis pajak dan 18 jenis retribusi dengan besaran PAD terhadap seluruh pendapatan sebesar 6,88% di tahun 2014. Rasio silpa terhadap total pendapatan semakin meningkat setiap tahun dan di tahun 2014 rasio tersebut mencapai 7,75%. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerapkan aplikasi SIMDA yang terus diupgrade setiap tahun dan di tahun 2015 aplikasi SIMDA yang digunakan adalah versi 2.7 (2.7.05).

### **4. Penanggulangan Bencana Daerah**

Urusan Pemerintahan dari unsur penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Khususnya dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga mengupayakan beberapa cara, baik upaya preventif maupun penanganan segera apabila terjadi kebakaran. Penanganan terhadap kejadian kebakaran di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 cukup baik dengan angka yang



berflutuasi. Dari 141 kebakaran di tahun 2008 menjadi hanya 101 kebakaran di tahun 2010. Adapun tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) juga menunjukkan peningkatan yang semakin baik yaitu dari 300% di tahun 2011 menjadi 56% di tahun 2015.

**Tabel 2.92**  
**Hasil Kinerja Urusan Pemerintahan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	50	50	55	60	65
2	Jumlah unjuk rasa yang ditangani	-	21	17	13	3
3	Pengadaan kantor kecamatan, desa dan kelurahan (jumlah kantor	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
5	Jumlah dan Jenis Pajak	10	10	11	11	11
6	Jumlah dan Jenis Retribusi Daerah	20	20	19	18	18
7	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan	4,60%	4,48%	5,10%	6,88%	**
8	SJMDA21	Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1(2.1.0.150RI)	Version 2.7(2.7.05)
9	Rasio SiLPA terhadap total Pendapatan	1,52%	2,59%	1,74%	7,75%	**
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,0005%	0,00061%	0,00066%	0,00082%	0,0005%
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	*)	*)	*)	*)	56%

*Sumber: Beberapa SKPD Kab. Serdang Bedagai, 2016*

## 5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Pemerintahan dari unsur perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Di bawah koordinasi Bappeda, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Dokumen RPJPD ini dijabarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun setiap lima tahun. Sampai saat ini, dokumen RPJMD yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) yaitu RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun



2005-2010 dan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 yang masing-masing telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada tahun 2016 ini, setelah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sedang menyusun RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Tahun 2016.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun oleh pemerintah sebagai rencana lima tahunan kemudian dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun dan ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adapun persentase capaian penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Serdang Bedagai menurun dari tahun 2011 sebesar 96% menjadi 84% di tahun 2015.

**Tabel 2.93**  
**Hasil Kinerja Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD 2010-2015 yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	96%	87%	89%	88%	84%

*Sumber : Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

### **2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor-sektor ekonomi, yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun. Tercapai tidaknya kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber-sumber alam dan manusia yang tersedia di daerah.

Keadaan ekonomi daerah yang berbeda-beda terutama karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan pola pemanfaatannya serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai di daerah, menyebabkan pembangunan ekonomi daerah menjadi tidak sama (khas) dan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Pemecahan yang dapat dilakukan selama ini adalah dengan usaha memperbesar peran sektor-sektor ekonomi di daerah dengan mengutamakan sektor-sektor unggulan daerah untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terutama adalah sektor pertanian baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Sektor lain yang mempunyai potensi untuk dikembangkan yaitu sektor industri yang dalam hal ini adalah industri kecil/rumah tangga atau usaha kecil menengah (UKM), kemudian pertambangan dan energi, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor pelayanan yang termasuk dalam lingkup urusan pilihan bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

### 2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan laut di Kabupaten Serdang Bedagai ada di 5 Kecamatan yang berhubungan dengan laut yaitu Kecamatan Tanjung Beringin, Pantai Cermin, Bandar Khalifah, Teluk Mengkudu dan Perbaungan. Produksi sektor perikanan terbesar berasal dari produksi perikanan tangkap (Perikanan Laut dan Perairan Umum) dan perikanan budidaya (Budidaya Air Payau dan Budidaya Air Tawar). Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada **Tabel 2.94** di bawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Perikanan					
	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	7.232	13.000	16.465	21.760	27.258
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	22.892	23.445	24.035	24.106	25.363
	Produksi Perikanan Perairan Umum (Ton)	58	60	61	63	65
2	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	31	32	33	36	38
3	Pengelolaan Produksi Perikanan (Ton)	3.888	3.977	4.060	4.000	4.221
4	Tingkat Penggunaan Teknologi Tepat Guna(%)	70	72	73	74	75
5	Tingkat Perkembangan Perikanan Budidaya	1,89%	79,76%	26,65%	32,16%	15,35%
6	Tingkat Perkembangan Perikanan Tangkap (%)	3,24%	2,42%	2,52%	0,30%	5,25%
7	Nilai Tambah Hasil Perikanan (%)	6,5	7	7,5	7,5	7,5
8	Kualitas SDM Perikanan dan di Pesisir (%)	73	74	75	75	75

*Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*

### 2.3.3.2. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai masih perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah, namun dengan tetap didasari oleh prinsip pengelolaan obyek wisata yang keberlanjutan sumber daya yang tersedia. Saat ini di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 14 obyek wisata potensial yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaitu:

1. Pantai Mutiara 88 Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin
2. Pantai Gudang Garam/Wong Rame Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin
3. Pantai Pondok Permai Desa Kotapari Kec. Pantai Cermin
4. Pantai Bali Lestari Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin
5. Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin
6. Pantai Kuala Putri Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin
7. Pantai Mangrove Desa Nagalawan Kec. Perbaungan
8. Pantai Nipah Indah Desa Nagalawan Kec. Perbaungan
9. Pantai Romantis Desa Nagalawan Kec. Perbaungan
10. Pantai Klang Indah Desa Nagalawan Kec. Perbaungan
11. Pantai Sialang Buah Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu
12. Pantai ThemePark Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin
13. Pemandian Alam Batu Nongol Desa Buluh Duri Kec. Sipispis
14. Pemandian Alam Ancol Desa Buluh Duri Kec. Sipispis

Selain itu, potensi wisata sejarah/budaya terdapat 7 objek wisata. Obyek wisata yang memiliki potensi terdiri dari : wisata alam, pemandian alam, panorama, air panas, cagar alam, dan wisata pantai. Beberapa peluang investasi pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain adalah membangun fasilitas penginapan, restoran, kios-kios souvenir, pemasaran barang-barang souvenir, perbaikan jalan menuju obyek wisata, fasilitas komunikasi, sarana permainan anak-anak, kolam renang dan sebagainya.

Obyek wisata Kabupaten Serdang Bedagai yang berpotensi dan dikembangkan antara lain:

- ❖ Obyek wisata pegunungan : Air Terjun Sampuran di Kecamatan Dolok Merawan
- ❖ Obyek wisata sungai : Arung Jeram di Kecamatan Sipispis
- ❖ Objek Wisata Laut : Pantai dan Pulau di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Tanjung Beringin

**Tabel 2.95**  
**Hasil Kinerja Urusan Pariwisata**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Potensi Objek Wisata Bahari/Alam	14	14	14	14	14
2	Potensi wisata sejarah/Budaya	8	8	8	8	8
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya				1	1
5	Pembinaan Paduan Suara	14	18	18	18	18
6	Pembinaan dan Pelatihan Musik Fanfare	14	18	18	18	18
7	Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar Kabupaten Serdang Bedagai	3	2	3	6	2
8	Sosialisasi Sapta Pesona				1	1
9	Jumlah kunjungan wisata	152.653	177.307	142.681	155.262	266.666
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,010	0,0101	0,0102	0,0103	0,0104

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Serdang Bedagai, 2016*

### **2.3.3.3. Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada umumnya indikator urusan pilihan pertanian mengalami peningkatan setiap tahun.

#### **a. Beras**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas tanam padi di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan dari seluas 71.037 Ha di tahun 2011 menjadi 69.509 ha di tahun 2015. Luas panen meningkat dari 63.584 ha di tahun 2011 menjadi 75.427 ha di tahun 2015. Meningkatnya luas panen juga akan meningkatkan produksi padi atau beras yakni dari 328.344 ton di tahun 2011 menjadi 408.381 ton di tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 5,65 ton/ha.



**Tabel 2.96**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Beras**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas tanam (ha)	71.037	74.440	73.309	70.436	69.509
2	Luas panen (ha)	63.584	68.355	71.748	66.054	75.427
3	Produktivitas (ton/ha)	5,164	5,401	5,502	5,611	5,611
4	Produksi (ton)	328.344	369.190	394.793	370.604	408.381

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

**b. Jagung**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas tanam jagung di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan yang signifikan dari seluas 12.391 Ha di tahun 2011 menjadi 3.322 ha di tahun 2015. Luas panen menurun cukup signifikan dari 11.584 ha di tahun 2011 menjadi hanya 3.476 ha di tahun 2015. Menurunnya luas panen juga akan menurunkan produksi jagung yakni dari 46.577 ton di tahun 2011 menjadi 15.872 ton di tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 4,5 ton/ha.

**Tabel 2.97**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas tanam (ha)	12.391	7.478	1.913	3.784	3.322
2	Luas panen (ha)	11.584	5.398	3.418	2.419	3.442
3	Produktivitas (ton/ha)	4,021	4,203	4,313	4,391	4,611
4	Produksi (ton)	46.577	22.690	14.740	10.622	15.872

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

**c. Kedelai**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas tanam kedelai di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan yang signifikan dari seluas 10.343 Ha di tahun 2011 menjadi 780 ha di tahun 2015. Luas panen menurun cukup signifikan dari 9.377 ha di tahun 2011 menjadi hanya 583 ha di tahun 2015. Menurunnya luas panen juga akan menurunkan produksi kedelai yakni dari 13.412 ton di tahun 2011 menjadi 845 ton di tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 1,499 ton/ha.

**Tabel 2.98**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas tanam (ha)	10.343	463	356	180	780
2	Luas panen (ha)	9.377	378	371	211	583
3	Produktivitas (ton/ha)	1,430	1,480	1,491	1,492	1,499
4	Produksi (ton)	13.412	559	553	316	845

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Dalam hal kelembagaan kelompok pertanian, dapat diinformasikan bahwa dari 4 (empat) kelas kelompok petani, peternak, perikanan dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki 3 (tiga) kelas kelompok petani, peternak, perikanan dan perkebunan. Selama periode tahun 2011-2015, kelompok kelas pemula semakin berkurang sementara kelas lanjut dan kelas madya semakin bertambah. Jumlah Gapoktan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat dari sebanyak 116 kelompok di tahun 2011 menjadi 185 kelompok di tahun 2015.

Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Komoditi perkebunan rakyat yang dibudidayakan petani antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Produksi karet pada tahun 2011 mencapai 36.563 ton. Namun demikian, pada tahun 2015 hasil panen karet menurun menjadi 5.153,22 ton. Produksi kakao juga mengalami penurunan dalam rentang waktu yang sama. Hanya produksi kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun 2011 sampai 2015.

Sementara itu, populasi beberapa jenis hewan ternak di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2011-2015, populasi sapi meningkat dari sebanyak 42.538 ekor di tahun 2011 menjadi 42.847 ekor di tahun 2015. Populasi kambing juga meningkat signifikan dari sebanyak 65.488 ekor di tahun 2011 menjadi sebanyak 74.895 ekor di tahun 2015. Namun demikian, produksi daging terus mengalami penurunan dari 2.166 ton di tahun 2011 menjadi 1.231 ton di tahun 2015.

**Tabel 2.99**  
**Hasil Kinerja Urusan Pertanian**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011–2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelembagaan (Kelas Kelompok) petani, peternak, perikanan dan perkebunan :					
	1. Kelas Pemula	1031	1227	1280	1116	900
	2. Kelas Lanjut	350	153	210	350	485
	3. Kelas Madya	100	15	36	60	141
	4. Kelas Utama	0	0	0	0	0
	5. Gapoktan	116	161	177	185	185
2	Produktivitas padi (Ton/Ha)	5,157	5,396	5,502	5,611	5,65
3	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	4,021	4,203	4,313	4,393	4,5
4	Produktivitas ubi kayu (Ton/Ha)	29,263	34,205	34,444	35,605	39,747
5	Swasembada produksi pertanian	123.543	148.531	164.819	148.970	172.672
6	Luas lahan sawah (Ha)	41.057	40.598	40.598	39.827	-
7	Produksi Kakao (Ton)	1342,00	1053,90	942,16	1038,61	971,51
8	Produksi Karet (Ton)	36563,00	34934,70	38804,89	28803,73	37762,90
9	Produksi Kelapa Sawit (Ton)	885345,00	991760,99	1095201,38	1158333,13	1131014,07
10	Luas areal perkebunan kakao	1.692,20	1.428,80	1.316,80	1.271,70	1.248,15
11	Luas areal perkebunan karet	23.863,69	24.029,49	35.128,06	34.810,68	38.668,43
12	Luas areal perkebunan kelapa sawit	40.013,11	40.793,50	59.268,58	59.740,92	64.006,90
13	Populasi ternak sapi (Ekor)	42.538	47.409	44.733	43.470	43.615
14	Populasi ternak kambing (Ekor)	65.488	72.233	76.980	77.161	77.306
15	Produksi daging (Ton)	2.166	1.633	1.595	1.705	1.715

*Sumber : BP2AKP, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

#### 2.3.3.4. Kehutanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan revisi Surat Keputusan Nomor: SK44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, perubahan luas kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai dari ± 30.612,54 Ha menjadi ± 9.685 Ha. Adapun rincian perubahan luas kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan fungsi kawasan hutan tertera pada **Tabel 2.100** di bawah ini.

**Tabel 2.100**  
**Perubahan Luas Kawasan Hutan Sesuai Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Serdang Bedagai Sebelum dan Sesudah Revisi**

No	Fungsi	SK No.44/Menhut-II/2005 Luas (Ha)	SK No.579/Menhut-II/2014 Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	± 3.100,74	± 5.534
2	Hutan Produksi Terbatas	±7.429,60	±65
3	Hutan Produksi	±20.082,20	±4.086
<b>Jumlah</b>		<b>±30.612,54</b>	<b>±9.685</b>

*Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai, 2016*

Permasalahan yang dihadapi terkait kondisi kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini adalah terdapat fasilitas umum, fasilitas sosial, pemukiman, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya dan beberapa masyarakat sudah menguasai tanah dalam kawasan hutan. Hal ini disebabkan belum adanya tata batas kawasan hutan (Pengukuhan) sehingga terdapat tumpang tindih hak masyarakat dengan kawasan hutan.

Terkait dengan pentingnya peran dan fungsi hutan maka keberadaan hutan haruslah dipertahankan dengan upaya pengaturan terhadap perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan. Sesuai dengan amanat UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 14 bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Tahapan kegiatan ini dimulai dengan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi sektor kehutanan adalah masih tingginya luas hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2011 luas hutan dan lahan kritis di Kabupaten Serdang Bedagai ±23.502,66 Ha. Melalui program dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tahun 2015 luas hutan dan lahan kritis menurun menjadi ±18.379,86 Ha.

Selanjutnya berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan pengawasan pada Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Kabupaten Serdang Bedagai, nilai tambah hasil hutan kayu cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 untuk

kayu bulat, kayu gergajian dan moulding. Dimana hasil hutan kayu yang digunakan sebagai bahan produksi oleh IUIPHHK berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai dan juga luar Kabupaten Serdang Bedagai (Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Tapanuli Utara).

Adapun hasil kinerja urusan kehutanan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.101**.

**Tabel 2.101**  
**Hasil Kinerja Urusan Kehutanan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas hutan dan lahan kritis (Ha)	23.502,66	20.904,66	20.010,66	18.116,10	17.906,10
2	Luas Hutan dan Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	155,16	2.598,00	894,00	1.894,56	210
3	Luas Kawasan Hutan (Ha)	30.612,54	30.612,54	30.612,5	9.685	9.685
4	Nilai tambah hasil Hutan Kayu :					
	Kayu Bulat (M <sup>3</sup> )	28.963,44	133.606,03	130.624,41	173.831,05	196.162,29
	Kayu Gergajian (M <sup>3</sup> )	49.164,39	58.307,68	68.528,97	54.233,48	96.344,72
	Moulding (M <sup>3</sup> )	34.439,71	36.826,27	45.893,65	31.354,90	41.104,61

*Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*

### 2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi pengembangan sumber daya mineral di Kabupaten Serdang Bedagai didominasi oleh tambang bahan mineral bukan logam dan batuan. Sektor pertambangan dan penggalan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,9% terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015.

Sedangkan untuk indikator pembangkit energi listrik terbarukan yang dibangun (PLTMH, PLTB dan Pembangkit Listrik tenaga sekam padi), sampai dengan tahun 2015 belum ada pembangkit listrik terbarukan yang dibangun di Kabupaten Serdang Bedagai.

Sedangkan untuk pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal pada tahun 2015 sebanyak 17 kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.74** urusan lingkungan hidup pada II~134.

### 2.3.3.6. Perdagangan

Kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai telah berkembang dan menyebar di setiap wilayah kecamatan. Pusat-pusat jasa perdagangan (termasuk dalam bentuk pasar) di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terdapat hampir di setiap kecamatan yang ada. Perkembangan sektor jasa dan perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai terlihat cukup signifikan terutama pada pusat-pusat pertumbuhan di jalur jalan negara dan jalur jalan propinsi. Pada sepanjang jalur ini muncul banyak usaha perdagangan barang konsumsi seperti rumah makan, warung minum, kedai sampah, galon kecil, kios Pulsa HP. Selain itu, pada jalur tersebut juga tumbuh kegiatan jasa seperti bengkel, doorsmeer, jahit, salon, dan bahkan jasa keuangan seperti bank atau BPR.

Perdagangan mencakup seluruh kegiatan pengumpulan dan pendistribusian barang baru maupun lama, bekas/afkiran oleh produsen atau importer kepada konsumen, tanpa merubah bentuk dan sifat barang-barang tersebut. Kegiatan pendistribusian/penyaluran dapat melalui pedagang besar (pedagang yang pada umumnya melayani pedagang eceran atau konsumen lain yang bukan konsumen rumah tangga). Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari sebesar 15,15% di tahun 2011 menjadi sebesar 15,32% di tahun 2015. Sedangkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal berkurang dari 10 kelompok di tahun 2011 menjadi 8 kelompok di tahun 2015. Jumlah usaha terdaftar (TDP) menurut bentuk usaha juga meningkat dari 701 kelompok usaha di tahun 2011 menjadi 810 kelompok usaha di tahun 2015.

**Tabel 2.102**  
**Hasil Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,96%	13,81%	13,84%	14,38%	15,32%
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	10 klpk	10 klpk	8 klpk	8 klpk	8 klpk
3	Jumlah usaha terdaftar (TDP) menurut bentuk usaha	701 klpk	515 klpk	707 klpk	722 klpk	810 klpk

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*

### 2.3.3.7. Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah sehingga keberadaan dan tingkat pertumbuhan sektor industri umumnya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Untuk mengembangkan sektor industri umumnya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Untuk mengembangkan sektor industri di Kabupaten Serdang Bedagai sebenarnya sangat potensial sekali baik untuk industri manufaktur maupun industri pengolahan sumber daya alam. Banyaknya bahan tambang/galian, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan merupakan bahan dasar atau bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan sektor industri.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sektor industri yang terdiri dari industri migas dan non-migas memberi kontribusi sebesar 19,53% pada PDRB Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 turun dari sebesar 19,91% di tahun 2011. Sedangkan pertumbuhan industri meningkat menjadi 2% di tahun 2015 dari hanya sebesar 1% di tahun 2011. Cakupan bina kelompok pengrajin juga meningkat dari sebanyak 25 kelompok di tahun 2011 menjadi 32 kelompok di tahun 2015.

**Tabel 2.103**  
**Hasil Kinerja Urusan Perindustrian**  
**Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,91%	19,66%	19,00%	19,47%	19,53%
2	Pertumbuhan Industri (%)	1	1,5	1,5	2	2
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	25	28	30	32	32

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*



## 2.4. ASPEK DAYA SAING

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai. Konsumsi atau pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai selama rentang tahun 2011-2015 terus meningkat yaitu dari Rp. 597.894 pada tahun 2011 dengan rincian 58,15% makanan dan 41,85% bukan makanan menjadi Rp.726.261,- pada tahun 2015 dengan rincian 56,98% makanan dan 43,02% bukan makanan. Jenis konsumsi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai masih didominasi oleh konsumsi makanan. Adapun nilai tukar petani Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2015 adalah sebesar 99,54%.

Selain itu, dalam lingkup internal wilayah Kabupaten Serdang Bedagai juga masih ditemui adanya disparitas antar bagian wilayah. Bagian wilayah yang terletak pada sepanjang koridor utama Perbaungan-Sei Rampah umumnya lebih berkembang secara ekonomi dibanding bagian wilayah pegunungan dan pesisir.

**Tabel 2.104**  
**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Tahun 2011-2015**

No	Jenis Konsumsi	Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Makanan	347.666	58,15	384.943	58,47	396.683	61,96	400.835	59,56	413.796	56,98
2	Bukan Makanan	250.228	41,85	273.399	41,53	243.549	39,04	272.196	40,44	312.465	43,02
Total		597.894	100	658.342	100	640.232	100	673.031	100	726.261	100

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

### 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur sangat mempengaruhi daya saing perekonomian daerah. Ditinjau dari aspek ketersediaan fasilitas perhubungan, jaringan jalan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi jalan nasional sepanjang ± 92,59 km dengan rencana pengembangan jalan tol ruas jalan Medan-Tebing Tinggi sepanjang 55 km, jalan provinsi sepanjang 154 km dengan rencana pengembangan jalan provinsi sepanjang 110 km dan jalan kabupaten sepanjang 1463,95 km. Adapun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun dari 72,4799 km/unit pada tahun 2011 menjadi 1,1654 km/unit pada tahun 2015.

**Tabel 2.105**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (km/unit)	72,4799	57,0563	40,4406	34,3316	1,1654

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*

Sampai saat ini Kabupaten Serdang Bedagai belum memiliki terminal dan rencana pengembangan terminal meliputi rencana pembangunan terminal type C serta pengembangan sub terminal angkutan umum di setiap ibukota kecamatan.

Adapun transportasi kereta api di Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini dalam kondisi baik dan melayani hingga ke Kota Pematang Siantar dan Kota Rantau Prapat ke arah timur dan Kota Binjai ke arah barat. Stasiun kereta api yang akan ditingkatkan pengembangannya antara lain stasiun Perbaungan, Sei Rampah, Teluk Mengkudu dan Sei Baman.

Untuk transportasi laut, Kabupaten Serdang Bedagai akan mengembangkan pelabuhan pengumpan regional di Tanjung Beringin dan Pantai Cermin dan pelabuhan pengumpan lokal di Sialang Buah. Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai mendukung program pengembangan Coastal Marine di Sumatera Utara yang salah satunya melakukan pengembangan angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur dengan water bus.

Ditinjau dari aspek penataan ruang, wilayah Kabupaten Serdang Bedagai secara garis besar digunakan untuk wilayah produktif (pertanian dan perkebunan) dan wilayah perkotaan dengan luas masing-masing sebesar pertanian 39.191 ha, perkebunan 106.441,93 ha, perkotaan 31.478,99 ha. Di samping itu, terdapat juga luas wilayah terkena bencana banjir yakni seluas 134,332 ha dan luas lahan sawah kekeringan yakni seluas 1.205 ha.

Dalam hal ketersediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan air bersih dalam bentuk jaringan masih melayani kawasan perkotaan di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Dolok Merawan. Jaringan air bersih tersebut dilayani oleh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli yang merupakan BUMD Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan daerah-daerah lainnya masih menggunakan air tanah (sumur dangkal), air tanah dalam (sumur artesis) dan air permukaan seperti sungai. Rumah tangga pengguna air bersih hasil pendataan oleh Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.60** sebelumnya. Pada tabel tersebut rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari 80.796 KK di tahun 2011 menjadi 85.796 KK di tahun 2015 dengan persentase rumah tangga yang telah memiliki instalasi air bersih (sambungan rumah) sebanyak 1,1%.

Fasilitas keuangan yang tersedia di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya adalah bank dan non bank seperti perusahaan asuransi dan pegadaian. Adapun kedua jenis perusahaan di bidang jasa keuangan ini banyak ditemukan di ibukota kecamatan. Perusahaan bank beserta dengan cabangnya yang banyak di Serdang Bedagai adalah bank-bank milik pemerintah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah. Selain itu, terdapat juga beberapa bank swasta seperti BCA, Bank BTN, Bank Mandiri Syariah, Bank Mestika, Bank Danamon dan beberapa bank swasta serta BPR lainnya. Sampai tahun 2015, jumlah perusahaan bank yang berkantor di Serdang Bedagai sebanyak 72 cabang.

**Tabel 2.106**  
**Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Cabang/Capem/Unit/Kas Tahun 2015**  
**Di Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Uraian	Jumlah Kantor Cabang/Capem/Unit/Kas
1	BRI	8
2	BNI	12
3	Bank Mandiri	9
4	Bank Sumut	21
5	Bank Sumut Syariah	1
6	BCA	5
7	BTN	7
8	Bank Mestika	4
9	Bank Mandiri Syariah	4
10	Bank Danamon	1

Sumber : [www.daftarperusahaan.com/bank/area/serdang-bedagai](http://www.daftarperusahaan.com/bank/area/serdang-bedagai)

Selain itu, sebagai daerah yang sedang berkembang ketersediaan rumah makan atau restoran dan penginapan sudah menjadi kebutuhan di Kabupaten Serdang Bedagai. Selama periode 2011-2015 di wilayah

Kabupaten Serdang Bedagai sudah mulai dibangun beberapa restoran dan penginapan seperti tergambar pada **Tabel 2.107** di bawah ini.

**Tabel 2.107**  
**Perkembangan Jumlah Restoran dan Penginapan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah restoran	8	17	19	25	31
2	Kelas restoran	Kecil	Kecil	Kecil	Kecil	Kecil
3	Jumlah penginapan	4	4	4	4	5
4	Kelas penginapan	Melati	Melati	Melati	Melati	Melati

*Sumber : KP2TPM Kab. Serdang Bedagai, Tahun 2016*

#### **2.4.3. Iklim Berinvestasi**

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Tindak kejahatan sebagaimana data Kepolisian Kabupaten Serdang Bedagai secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Serdang Bedagai baik secara kualitas maupun kuantitas kecenderungannya mengalami penurunan. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi. Peristiwa kejahatan/pelanggaran terbanyak adalah kasus kecelakaan lalu lintas.

Di samping itu, dalam mendukung iklim berinvestasi di Serdang Bedagai, pemerintah telah berupaya menurunkan jumlah demo yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai dari sebanyak 21 kejadian di tahun 2012 menjadi 3 kejadian di tahun 2015.

Selain iklim investasi yang aman, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga memberikan kemudahan kepada calon investor dengan mempersingkat lama proses perijinan dari 15 hari kerja menjadi hanya 3 hari kerja. Sampai dengan tahun 2015 telah diundangkan satu peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha atau investasi di Serdang Bedagai. Adapun jumlah dan macam pajak dan retribusi yang

mendukung iklim investasi sampai tahun 2015 masing-masing sebanyak 11 jenis pajak dan 16 jenis retribusi.

**Tabel 2.108**  
**Data Pendukung Iklim Berinvestasi**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah unjuk rasa yang ditangani	-	21	17	13	3
2	Lama proses perijinan (hari)	15	15	7	7	3
3	Perda Mendukung Iklim Usaha	-	-	-	-	1
4	Jenis pajak	11	11	11	11	11
5	Jenis retribusi	16	16	16	16	16

Sumber : Kantor Satpol PP Kab. Serdang Bedagai, 2016; KP2TPM Kab. Serdang Bedagai, 2016 dan DPPKA Kab. Serdang Bedagai, 2016

#### 2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah ditampilkan pada **Tabel 2.15** sebelumnya bahwa penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memiliki ijazah diploma D-IV sarjana S-I mengalami peningkatan dari sebanyak 1,86% di tahun 2011 menjadi sekitar 2,22% pada tahun 2015. Agar menjadi daerah yang semakin berdaya saing maka proporsi penduduk kelompok umur tersebut yang memiliki ijazah diploma D-IV sarjana S-I harus semakin ditingkatkan.

Di samping itu, angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Serdang Bedagai semakin menurun selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011, angka ketergantungan penduduk Serdang Bedagai sebesar 62,81 menurun menjadi 51,24 di tahun 2015. Rasio ketergantungan sebesar 51,24 berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51-52 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Beban ketergantungan penduduk dapat menjadi modal yang baik dalam memacu peningkatan tenaga kerja yang memiliki daya saing dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada.

**Tabel 2.109**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk < 15 tahun	190.480	188.958	189.797	189.672	189.059
2	Jumlah Penduduk > 60 tahun	40.467	41.062	42.211	43.780	17.165
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	230.947	230.020	232.008	233.452	206.224
4	Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun	367.672	371.121	371.864	372.915	402.467
5	Rasio Ketergantungan	62,81	61,97	62,39	62,60	51,24

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2012-2016, BPS Kab. Serdang Bedagai

## 2.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi pencapaian target indikator kinerja terhadap 15 (lima belas) standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.110** berikut ini.

**Tabel 2.110**  
**Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja SPM Tahun 2010-2015**  
**Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>									
I.1	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100%	2015	*)	*)	*)	32%	32%
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100%	2015	*)	*)	*)	70%	70%
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%





No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		12	Di setiap ka/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
I.2	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidik	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100%	2015	*)	*)	*)	70%	70%
		18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100%	2015	*)	*)	*)	80%	80%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
			a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;			*)	*)	*)		
			b) Kelas III : 24 jam per minggu;			*)	*)	*)		
			c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau			*)	*)	*)		
			d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu			*)	*)	*)		
		21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		26	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>					*)	*)	*)		
II.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	*)	*)	*)	30,6%	30,6%
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		6	Cakupan kunjungan bayi	90%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		8	Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	2010	*)	*)	*)	0%	0%
		10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		12	Cakupan peserta KB Aktif	70%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
II.2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
II.3	Penyelidikan	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
II.4	Promosi	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	*)	*)	*)	100%	100%
<b>III</b>	<b>Pemerintahan Dalam Negeri</b>					*)	*)	*)		
III.1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	*)	*)	*)	93,13%	93,13%
		2	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100%	2011	*)	*)	*)	97,42%	97,42%
III.2	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	50%	2015	*)	*)	*)	50%	50%
		4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	70%	2010	*)	*)	*)	100%	100%
III.3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%	2015	*)	*)	*)	25%	25%
		6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015	*)	*)	*)	53,33%	53,33%
<b>IV</b>	<b>Sosial</b>					*)	*)	*)		
IV.1	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2015	*)	*)	*)	75%	75%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator			Target		2011	2012	2013	2014	2015
IV.2	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2015	*)	*)	*)	80%	80%
IV.3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3		Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2015	*)	*)	*)	80%	80%
IV.4	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	4		Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2015	*)	*)	*)	80%	80%
IV.5	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80%	2015	*)	*)	*)	75%	75%
IV.6	Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2015	*)	*)	*)	75%	75%
IV.7	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2015	*)	*)	*)	75%	75%
V	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
V.1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5 %	2014	*)	*)	*)	2%	2%
		2		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014	*)	*)	*)	74,50%	74,50%
		3		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5%	2014	*)	*)	*)	15,20%	15,20%
		4		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014	*)	*)	*)	75,26%	75,26%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	2014	*)	*)	*)	88,27%	88,27%
		6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1 Petugas di setiap 2 Desa/Kel	2014	*)	*)	*)	0,11	0,11
		7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1 Petugas di setiap 2 Desa/Kel	2014	*)	*)	*)	1 Petugas di setiap 10 Desa/Kel	1 Petugas di setiap 10 Desa/Kel
V.2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 % setiap tahun	2014	*)	*)	*)	5%	5%
V.3	Penyediaan Informasi Data Mikro	9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100 % setiap tahun	2014	*)	*)	*)	62,57%	62,57%
<b>VI</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>									
VI.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	*)	*)	*)	100%	100%
		2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	*)	*)	*)	100%	100%
		3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	*)	*)	*)	100%	100%
VI.2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	*)	*)	*)	50%	50%
VI.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	*)	*)	*)	65%	65%
VI.4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	*)	*)	*)	80%	80%
VI.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	*)	*)	*)	75%	75%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
VII.1	Penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat	1		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	*)	*)	*)	100%
		2		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	2014	*)	*)	*)	70%
VII.2	Jalan	3		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100%	2014	*)	*)	*)	46,64%
		4		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.	100%	2014	*)	*)	*)	100%
		5		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2014	*)	*)	*)	18,46%
		6		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014	*)	*)	*)	9,04%
		7		Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	*)	*)	*)	25,28%
VII.3	Air Minum	8		Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	70%	2014	*)	*)	*)	67%
VII.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	9		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	2014	*)	*)	*)	0%
		10		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2014	*)	*)	*)	0%
		11		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	2014	*)	*)	*)	20%
		12		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	*)	*)	*)	70%





No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target					
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015	
		13		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	*)	*)	*)	50%	50%
VII.5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	14		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2014	*)	*)	*)	8,4%	8,4%
VII.6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	15		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/ kota.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
		16		Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
VII.7	Jasa Konstruksi	17		Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
		18		Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
VII.8	Penataan Ruang	19		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
		20		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi ublic yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
		21		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		22		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014	*)	*)	*)	100%
		23		Tersedianya luasan RTH ublic sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	*)	*)	*)	100%
<b>VIII</b>	<b>Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</b>									
VIII.1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	2014	*)	*)	*)	94%
VIII.2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	*)	*)	*)	94%
VIII.3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3		Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	*)	*)	*)	94%
		4		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dala unit pelayanan terpadu	75%	2014	*)	*)	*)	94%
VIII.4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	2014	*)	*)	*)	100%
		6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	2014	*)	*)	*)	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target					
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015	
IX	Perhubungan										
IX.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	*)	*)	*)	57%	57%
		2		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3		Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		4		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	5		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota	60%	2014	*)	*)	*)	51%	51%
IX.4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2015	*)	*)	*)	37%	37%
IX.5	Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Jalan	7		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		8		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
		9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.6	Keselamatan Angkutan Jalan	11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.7	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		13	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.8	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.9	Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau	15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
IX.10	Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau	16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014	*)	*)	*)	0%	0%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015
IX.11	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.12	Keselamatan Penyeberangan	19	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.13	Sumber Daya Manusia (SDM) Penyeberangan	20	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.14	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	21	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
		22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target					
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015	
XI.15	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	23		Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.16	Keselamatan Angkutan Laut	24		Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.17	Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Laut	25		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%
X	Perumahan Rakyat						*)	*)	*)		
X.1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	*)	*)	*)	30%	30%
		2		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	*)	*)	*)	10%	10%
X.2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2025	*)	*)	*)	10%	10%
XI	Permodalan										
XI.1	Kebijakan Penanaman Modal	1		Tersedianya peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 sektor per tahun	2014	*)	*)	*)	0%	0%
XI.2	Kerjasama Penanaman Modal	2		Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 kerja sama per tahun	2015	*)	*)	*)	0%	0%
XI.3	Promosi Penanaman Modal	3		Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	1 kali setiap tahun	2014	*)	*)	*)	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target									
		Indikator		Target		2011	2012	2013	2014	2015					
XI.4	Pelayanan Penanaman Modal	4		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal, meliputi :	100%	2014	*)	*)	*)	60%	60%				
			a. Pendaftaran penanaman modal												
			b. Izin prinsip penanaman modal												
			c. Izin usaha												
			d. Tanda Daftar Perusahaan												
			e. Surat Izin Usaha Perdagangan												
XI.5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan di bidang penanaman modal	1 kali setiap tahun	2014	*)	*)	*)	100%	100%				
XI.6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6		Terimplementasikannya SPIPISE tingkat kab/kota	100%	2014	*)	*)	*)	0%	0%				
XI.7	Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	7		Terselenggaranya penyebarluasan diklat	1 kali setiap tahun	2014	*)	*)	*)	0%	0%				
<b>XII</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>														
XII.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%	2015	*)	*)	*)	67,72%	67,72%				
		2		Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	*)	*)	*)	40,60%	40,60%				
XII.2	Distribusi dan Akses Pangan	3		Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	2015	*)	*)	*)	60%	60%				
		4		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	2015	*)	*)	*)	0%	0%				
XII.3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	*)	*)	*)	80,50%	80,50%				
		6		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	*)	*)	*)	50%	50%				
XII.4	Penanganan Kerawanan Pangan	7		Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	*)	*)	*)	36%	36%				
<b>XIII</b>	<b>Kesenian</b>														
XIII.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1		Cakupan Kajian Seni	50%	2014	*)	*)	*)	67%	67%				
		2		Cakupan Fasilitasi Seni	30%	2014	*)	*)	*)	15%	15%				
		3		Cakupan Gelar Seni	75%	2014	*)	*)	*)	75%	75%				
		4		Misi Kesenian	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%				





No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator			Target		2011	2012	2013	2014	2015
XIII.2	Sarana dan Prasarana	5		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	2014	*)	*)	*)	25%	25%
		6		Cakupan Tempat	100%	2014	*)	*)	*)	100%	100%
		7		Cakupan Organisasi	34%	2014	*)	*)	*)	98,03%	98,03%
<b>XIV</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
XIV.1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	1		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	100%	2013	*)	*)	*)	100%	100%
XIV.2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	*)	*)	*)	100%	100%
XIV.3	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	3		Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	*)	*)	*)	17,46%	17,46%
XIV.4	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4		Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	90%	2013	*)	*)	*)	100%	100%
<b>XV</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>										
XV.1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional			Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:							
		1		Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali/tahun	2014	*)	*)	*)	12 kali/tahun	12 kali/tahun
		2		Media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i> )	Setiap hari	2014	*)	*)	*)	12 kali/tahun	12 kali/tahun
		3		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali/tahun	2014	*)	*)	*)	12 kali/tahun	12 kali/tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu (Tahun)	Realisasi Pencapaian Target				
		Indikator			Target		2011	2012	2013	2014	2015
		4		Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 kali/tahun setiap kec.	2014	*)	*)	*)	12 kali/tahun setiap kec.	12 kali/tahun setiap kec.
		5		Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun	2014	*)	*)	*)	12 kali/tahun	12 kali/tahun
XV.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	6		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	*)	*)	*)	50%	50%

Catatan : \*) data belum valid dan perlu dikroscek



## 2.6. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.111.

**Data Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2011-2015**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2010		CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		Besaran	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1.	Pertumbuhan ekonomi	6,31	%	6,06	6,09	5,8	5,12	5,05	6,72	<
2.	PDRB per kapita	13.701,458	Ribu Rupiah	21.349,24	22.552,93	23.756,29	24.871,01	26.025,92	17.987,914	>
3.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan		%	89,93	90,11	90,65	91,02	*		
4.	Angka Kemiskinan		%	10,07	9,89	9,35	8,98	*		
5.	Gini Ratio			0,2650	0,2843	0,2537	0,2599	0,2906		
6.	Nilai Investasi skala nasional (PMA dan PMDN)	1.353.481,63 2.467	juta rupiah	1.322.599,51 4.042	1.433.240, 876.834	1.581.754, 098.927	1.739.897, 098.927	1.730.267, 321.020		
B. Kesejahteraan Sosial										
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			65,28	66,14	67,11	67,78	68,10		
2.	Pendidikan									
2.1.	Angka melek huruf	99,17	%	97,8	97,81	97,94	98,59	99,85	100	<
2.2.	Angka rata-rata lama sekolah	12	tahun	7,74	7,78	8,02	8,04	8,08	12	<
2.3.	Angka Harapan Lama Sekolah		tahun	12,19	12,23	12,26	12,29	12,31		
2.4.	Angka partisipasi kasar									
2.4.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	102,21	%	102	104,71	105,26	105,26	109,32	107,42	>



2.4.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	66,35	%	92,48	93,01	93,5	101	98,75	69,73	>
2.4.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	98,88	%	98,95	100,91	101,9	102	85,86	103,92	<
2.5.	Angka kelulusan:									
2.5.1.	SD/MI/Paket A		%	100	100	100	100	100		
2.5.2.	SMP/MTs/Paket B		%	99,85	97,76	99,99	100	100		
2.5.3.	SMA/SMK/MA/Paket C		%	99,96	99,95	100	99,99	100		
2.6.	Angka Partisipasi Murni									
2.6.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	86,06	%	86,15	88,07	88,98	93,76	94,84	90,44	>
2.6.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,92	%	69,05	70,55	75,70	77,57	83,60	69,73	>
2.6.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	68,48	%	70,04	73,11	76,80	76,9	71,44	70,91	>
3.	Kesehatan									
3.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	69	%	0,995	0,996	0,996	0,999	0,994	71,6	
3.2.	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,6	tahun	66,84	67,03	67,17	67,27	67,47	72	<
3.3.	Angka Kematian Ibu (AKI)		KH	15/11.517	13/11.806	9/12.195	11/12.301	15/11.792		
3.4.	Angka Kematian Bayi (AKB)		KH	59/11.517	50/11.806	54/12.195	46/12.301	70/11.792		
3.5.	Angka Kematian Balita		KH	3/11.517	0/11.806	0/12.195	23/12.301	0/11.792		
3.6.	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan		%	100	100	100	100	100		
4.	Pertanahan									
4.1.	Jumlah Sertifikat hak Atas Tanah yang Sudah Dikeluarkan	-	sertifikat	6.445	3.430	3.394	4.261	4.083	-	
5	Ketenagakerjaan									
5.1	Rasio penduduk yang bekerja			0,951	0,943	0,938	0,928	0,928		
<b>C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>										
1.	Kebudayaan									
1.1.	Jumlah grup kesenian		tim	1	1	1	1	1		
1.2.	Jumlah gedung		buah	1	1	1	1	1		



2.	Pemuda dan Olahraga									
2.1.	Jumlah klub olahraga		tim	7	7	7	7	7		
2.2.	Jumlah gedung olahraga		lapangan	2	2	3	4	4		
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>A. Urusan Pemerintahan Wajib</b>										
<b>A.1. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar</b>										
1.	Pendidikan									
1.1.	Pendidikan dasar:									
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	100	%	94	95	95	96	100	100	=
1.1.2.	Rasio guru/murid									
	SD/MI	0,060		1/18	1/18	1/18	1/17	1/16	0,077	<
	SMP/MTs	0,09		1/13	1/13	1/14	1/17	1/17	0,12	<
1.2.	Pendidikan menengah:									
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA	89	%	54,74	55,01	55,40	55,40	79,46	100	<
1.2.2.	Rasio guru per murid SMA/SMK/MA	0,12		1/11	1/12	1/12	1/13	1/16	0,18	<
1.3.	Fasilitas Pendidikan:									
1.3.1.	Persentase Bangunan Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik			92	94	96	96	86,34		
1.3.2.	Persentase Bangunan Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik			84	88	92	92	80,76		
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):									
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10358		315	330	342	364	432	10994	<
1.4.2.	Jumlah Guru TK/RA bersertifikat			12	14	31	31	39		
1.5.	Angka Putus Sekolah:									
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,15	%	0,14	0,12	0,10	0,07	0,03	0,10	>
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,47	%	0,44	0,40	0,15	0,12	0,15	0,36	>



1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,54	%	0,51	0,47	0,30	0,46	0,30	0,41	>
1.6.	Angka Kelulusan:									
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,90	%	100	100	100	100	100	100	=
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,80	%	99,85	97,76	99,99	100	100	100	=
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,75	%	99,96	99,95	100	99,99	100	100	=
1.7.	Angka Melanjutkan (AM)									
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	%	98	98	98	98	98	100	<
1.7.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	85	%	98	98	98	98	98	89,33	>
1.8.	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	49	%	59	60	70	80	88	100	<
1.9.	Persentase guru yang telah bersertifikat:									
	SD/MI			945	1.588	2.154	2.182	2.367		
	SMP/MTs			418	474	502	506	546		
	SMA/MA/SMK			403	505	559	568	606		
2.	Kesehatan									
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	1/80		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	1/70	<
2.2.	Rasio prasarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, pustu, poliklinik) persatuan penduduk			44/100.000	44/100.000	44/100.000	48/100.000	55/100.000		
2.3.	Rasio tenaga medis dan paramedis per 100.000 penduduk:									
	- Dokter	8,05		26,17	29,8	30,88	30,18	34,99	9	<
	- Dokter spesialis	8,24		2,67	5,13	5,12	13,85	15,114	9	>
	- Perawat Kesehatan	86,6		32	20,36	26,42	67,95	66,7	158	<
	- Perawat Gigi			6,33	6,29	6,27	3,63	3,61		
	- Bidan	68,64		50,84	46,85	46,07	188,76	114,67	75	>
2.4	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	75	%	100	100	100	100	100	95	>



2.5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	%	87,59	89,20	92,14	92,8	89,8	95	<
2.6.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	83	%	77,77	80,24	90,95	81,9	80,7	100	<
2.7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70	%	100	100	100	100	100	80	>
2.8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100	100	100	100	100	=
2.9.	Fasilitasi Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin			30,07	30,07	42,91	48,91	44,65		
2.10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin			5,1	8,64	11,6	5,2	11,4		
2.11.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)			23,08	0	42,31	50	100		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik	34,48	%	40,44	45,05	65,48	41,77	42,93	69,10	<
3.2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	31,40	%	34,48	23,64	56,00	40,93	35,37	66,30	<
3.3.	Panjang jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke pemukiman penduduk dalam kondisi baik	31,40	%	34,48	23,64	56,00	40,93	35,37	58,40	<
3.4.	Rasio Jaringan Irigasi = Panjang Saluran Irigasi dalam keadaan baik (m)/Luas Persawahan (m2)	60	%	4,84/10.000	5,72/10.000	7,67/10.000	8,63/10.000	9,91/10.000	70	
3.5.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	7.048	Ha	4.199,55	4.652,4	5.200	5.850,31	6.716,73	8.222	<





4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	82.022	unit	80.796	82.196	83.492	84.696	85.796	90.202	<
4.2.	Persentase RT bersanitasi	64,99	%	52,97	59,98	62,00	63,50	72,40	85	<
4.3.	Luas permukiman kumuh	101,99	Ha	70,57	69,01	68,81	67,93	60,03	76,49	>
4.4.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman		%	91	92	93	93	95		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
5.1.	Kegiatan Pendataan Ormas, OKP dan LSM	-	organisasi	60	70	80	90	100	-	>
5.2.	Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	-	orang	100	100	100	-	200	-	>
5.3.	Jumlah partai politik yang telah diversifikasi		partai politik	14	14	14	14	10		
5.4.	Penyuluh penanggulangan bahaya narkoba		orang	100	100	200	200	-		
5.5.	Kegiatan rapat antar anggota komunitas inteligen daerah		kali	12	12	12	12	12		
5.6.	Pelaksanaan kegiatan temu ramah dengan pejuang/veteran		pejuang	206	196	196	186	183		
5.7.	Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat		kecamatan	17	17	17	17	17		
5.8.	Kegiatan bantuan terhadap komunitas inteligen daerah		orang	22	22	22	22	22	310	
5.9	Kegiatan peningkatan kerjasama antar masyarakat dalam membina kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara		orang	100	850	850	850	200		
6.	Sosial									
6.1.	Sarana sosial yang dimiliki		unit	7	7	7	8	8		
6.2.	Jumlah PMKS			40.355	32.048	32.026	21.384	7.723		
6.3.	Jumlah PMKS yang ditangani			4.466	3.271	3.232	9.168	7.723		
6.4.	Jumlah PMKS yang diberi bantuan			4.375	3.251	3.217	9.033	7.723		



6.5.	Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak cacat		%	0,34	2	3,07	0,76	2,5		
6.6.	Akses pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin		%	0,34	2,80	3,84	8,29	9,603		
<b>A.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
1.	Tenaga Kerja									
1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	335.677	orang	302.400	274.754	297.484	272.992	264.902	387.316	<
1.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	42	kasus	31	33	20	28	25	20	<
1.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,97	%	73,69	66,43	73,94	65,47	65,47	75	<
1.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	2.425	orang	1.435	1.093	1.725	1.568	598	3.931	<
1.5.	Tingkat pengangguran terbuka	5,7	%	4,89	5,68	6,14	7,14	7,18	4,52	<
1.6.	Keselamatan dan perlindungan kerja	250	perusahaan	260	273	290	302	310	325	<
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	83.972	orang	121.234	85.283	113.111	85.681	75.495	92.710	<
2.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	5.693	orang	*	*	*	4.325	4.515	6.283	<
2.3.	Jumlah anggota legislatif perempuan		orang	6	7	7	6	8		
2.4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		kasus	10	2	11	21	23		
2.5.	Jumlah anak perempuan > 15 tahun yang melek huruf			*	*	*	4.325	4.515		
2.6.	Jumlah KDRT		kasus	2	2	11	60	72		
3.	Pangan									
3.1.	Ketersediaan pangan utama									
	- Energi			6.660	5.939	6.649	3.060	3.060		
	- Protein			148	144	138	77,59	77,59		
3.2.	Jumlah cadangan pangan Pemerintah dan Masyarakat		kg			39.136	39.136	58.584		



4.	Pertanahan									
4.1.	Jumlah tanah yang bersertifikat		bidang	6.445	3.430	3.394	4.261	4.083		
4.2.	Hak milik		bidang	6.416	3.410	3.394	4.228	4.009		
4.3.	Hak guna bangunan		bidang	8	8		2	16		
4.4.	Hak guna usaha		bidang				1			
4.5.	Hak pakai		bidang	17			9	19		
4.6.	Hak wakaf		bidang	4	12		21	39		
5.	Lingkungan Hidup									
5.1.	Persentase penanganan sampah	53,84	%	20	21	24	27	31	80	<
5.2.	Pencemaran status mutu air		%	18	16	14	12	0		
5.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.	100	%	100	100	100	100	100	100	=
5.4.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		%	14,75	25,07	24,35	26,60	28,70		
5.5.	Penegakan hukum lingkungan	100	%	70	60	100	83,30	100	100	=
5.16.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	40	%	14,75	25,07	24,35	26,60	28,70	50	<
6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
6.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	31,50	%	35	47	43	56	56,03	67	<
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	78	%	54	57	59	60	59	100	<
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	60,39	%	77	75	64	67	80	95	<
6.4.	Kepemilikan KTP		orang	330.111	339.558	356.683	377.554	383.946		
6.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	37,21	%	46	46	49	53	56	95	<
6.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	98,46	%	100	100	100	100	100	100	=
6.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	0	%	49	67	65	80,21	85,26	100	<
6.8.	Rasio keluarga yang memiliki KK per satuan keluarga		%	100	100	100	100	100		



6.9.	Rasio kepemilikan KTP per satuan penduduk wajib KTP		%	49	67	65	80,21	85,26		
6.10	Rasio anak memiliki akta kelahiran		%	56	60	65	68	72		
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1.	PKK aktif	261	kelompok	261	261	261	261	261	261	=
7.2.	Posyandu aktif	983	posyandu	983	983	983	983	983	983	=
7.3.	Persentase peningkatan Jumlah desa yang memiliki data Profil Desa		%	10%	25%	50%	100%	100%		
7.4.	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha lembaga ekonomi perdesaan melalui SPP PNPM-MP, UED SP, (UP2K), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengelolaan Pasar Desa		%	80%	85%	85%	97%	97%		
7.5.	Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa		%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.6.	Persentase Peningkatan Jumlah Dana Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa		%	15,51%	38%	60,00%	81,00%	98%		
7.7.	Persentase Peningkatan keaktifan Gotong Royong Masyarakat		%	30%	45%	62%	78%	85%		
7.8.	Persentase Peningkatan Keaktifan BPD		%	50%	55%	67%	85%	90%		
7.9.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Lembaga Kemasyarakatan LKMD		%	25%	35%	50%	74%	95%		
7.10.	Persentase Peningkatan keaktifan Lembaga Adat dalam partisipasi pembangunan masyarakat		%	30%	45%	57%	76%	90%		
7.11.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan		%	45%	55%	70%	85%	90%		



7.12.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lurah, Sekretaris Lurah, Bendahara Lurah, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Lingkungan		%	45%	55%	70%	85%	90%		
7.13.	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa		%	55%	65%	75%	88%	92%		
7.14.	Persentase Peningkatan Jumlah Peraturan Desa di 237 Desa		%	35%	40%	55%	87%	100%		
7.15.	Persentase Jumlah Pembangunan Fisik dan Kegiatan Non SPP/ Pelatihan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan		%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.16.	Persentase Penurunan jumlah Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa		%	10	25	45	65	85		
7.17	Persentase Peningkatan Kebersihan Desa dan Kelurahan		%	60	75	85	90	94		
7.18	Persentase jumlah desa yang memiliki batas-batas desa		%	10	10	10	10	10		
7.19	Persentase jumlah desa yang memiliki peraturan desa tentang penataan kawasan perdesaan		%	10	10	10	10	10		
7.20	Persentase Peningkatan Jumlah alat-alat TTG yang ditemukan		%	30	34	60	80	90		
7.21	Persentase Peningkatan Jumlah masyarakat yang menggunakan Alat-alat TTG		%	2	3	12	20	35		
7.22	Persentase Peningkatan jumlah Desa berstatus Swasembada terhadap total desa		%	10	11	12	13	15		
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		anak	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148		



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

8.2.	Cakupan peserta KB aktif	83.681	akseptor	-	-	-	-	83.570 (73,64% dari jumlah PUS)	75% dari jumlah PUS	<
8.3.	Pasangan usia subur			114.572	115.211	114.860	116.389	117.044		
8.4.	Target PPM PB			-	-	-	-	9,095 Akseptor (54% dr jlh PUS)		
8.5.	Jumlah PPKBD		orang	243	243	243	243	243		
8.6.	Sub PPKBD		orang	1268	1268	1268	1268	1268		
8.7.	Kelompok UPPKS			46	46	46	34	34		
8.8.	Kelompok BKB			243	243	243	120	120		
8.9.	Kelompok BKR			243	243	243	85	85		
8.10.	Kelompok BKL			243	243	243	82	82		
8.11.	Kelompok BLK			243	243	243	243	243		
8.12.	Keluarga Pra Sejahtera			15.358	13.042	14.463	13.345	*)		
8.13.	Keluarga Sejahtera I			24.761	29.826	13.042	28.327	*)		
9.	Perhubungan									
9.1.	Angkutan darat	169	armada	-	-	4359	3967	3991	200	>
9.2.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25	menit	25	25	25	25	25	25	=
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum:									
	Barang		unit	-	-	3229	2848	3205		
	Penumpang		unit	-	-	302	198	178		
	Bus		unit	-	-	124	76	106		
	Betor		unit	-	-	704	847	502		
10.	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	1	1	1	1	1	1	4	<
10.2	Web site milik pemerintah daerah	ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
10.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal			78	80	82	83	83		
10.4	Jumlah pameran/expo			1	1	1	1	1		



11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
11.1.	Persentase koperasi aktif		%	65,03	66,57	68,89	69,25	24,51		
11.2.	Jumlah UKM	800	UKM	900	1050	1060	1073	1084	1650	<
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)		UMKM	41393	43081	43812	43825	43835		
11.4.	Jumlah koperasi		unit	326	341	344	348	355		
11.5.	Jumlah koperasi aktif		unit	212	227	237	241	87		
12.	Penanaman Modal									
12.1.	Jumlah investor skala nasional PMA		perusahaan	19	19	19	19	19		
12.2.	Jumlah investor skala nasional PMDN		perusahaan	38	40	41	40	40		
12.3.	Nilai investasi berskala nasional PMA		juta Rp	30.882, 118.425	31.332, 118.425	31.332, 118.425	31.332, 118.425	31.332, 118.425		
12.4.	Nilai investasi berskala nasional PMDN		juta Rp	1.322.599, 514.042	1.401.908, 758.409	1.550.421, 980.502	1.708.564, 980.502	1.698.935, 202.595		
12.16	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)						0%	0%		
13.	Kepemudaan dan Olahraga									
13.1.	Jumlah organisasi pemuda	60	organisasi	60	60	60	60	60	60	=
13.2.	Jumlah organisasi olahraga	17	organisasi	7	7	7	7	7	19	<
13.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	Kegiatan	3	3	6	3	3	5	<
13.4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	kegiatan	0	1	1	3	0	11	<
13.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)									
13.6.	Lapangan olahraga	6	lapangan	2	2	2	2	2	11	<
13.8.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional yang diraih	3	cabor	1	2	3	3	4	0	>
13.9.	Pengiriman BPAP (Bakti Pemuda Antar Provinsi)		kegiatan		1	1				
13.10.	Pengiriman pemuda pelopor		kegiatan			1				
13.11.	Ramah tamah pemuda pada kegiatan Sumpah Pemuda		kegiatan	1	1	1	1	1		





13.12.	Pelatihan ketrampilan pemuda PASKIBRAKA		kegiatan	1	1	1	1	1		
13.13.	Pengembangan olahraga unggulan		kegiatan			1		1		
13.14.	Peningkatan kesegaran jasmani		kegiatan		24		7			
13.15.	Penyelenggaraan olahraga tradisional		Kegiatan			1				
13.16.	Seleksi dan pengiriman atlet ke PORDASU		Cabor		22	22				
13.17.	Pengiriman atlet ke POSPEDASU		Kegiatan			1				
13.18.	Olahraga HUT RI		Kegiatan		1					
13.19.	Olahraga HAORNAS		Kegiatan	1	1	1	1	1		
13.20.	Pengiriman atlet ke POPDASU		Kegiatan		1		1			
13.21.	Penyelenggaraan olahraga arung jeram		Kegiatan	1		1				
13.22.	Olahraga Bahari		Kegiatan			1				
13.23.	Pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih		kegiatan	1		1	1	1		
13.24.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)									
13.25.	Angkat besi/angkat berat/binaraga		prestasi	2	7	3	3	1		
13.26.	Karate		prestasi					2		
13.27.	Tinju		prestasi			3	3	2		
13.28.	Tekuwondow		prestasi			1				
14.	Statistik									
14.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
14.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
15.	Kebudayaan									
15.1.	Cakupan pagelaran dan festival seni budaya	1	kegiatan	1	1	1	1	1	2	<
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	unit	1	1	1	1	1	-	>



15.3.	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	0		0	0	0	0	0	0	=
15.4.	Jumlah benda, situs, cagar budaya			8	8	8	8	8		
16.	Perpustakaan									
16.1.	Jumlah perpustakaan		unit	14	8	8	8	62		
16.2.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6.500	pengunjung	5.250	4.995	5.280	3.958	71.525	3.515	>
16.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.213 eks	judul dan eks	2.750 dan 8.250	2.850 dan 5.7000	3.450 dan 3.482	750 dan 1.500	25.794 eks	18.500 eks	>
17.	Kearsipan									
17.1.	Pengelolaan arsip secara baku			38	38	38	38	0,5		
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan			-	3	3	3	3		
<b>B. <i>Urusan Pemerintahan Pilihan</i></b>										
1.	Kelautan dan Perikanan									
1.1.	Produksi perikanan budidaya	-	ton	7.232	13.000	16.465	21.760	27.258	50.469,03	<
1.2.	Produksi perikanan tangkap	-	ton	22.892	23.445	24.035	24.106	25.363	25.304,02	>
1.3.	Produksi perikanan umum		ton	58	60	61	63	65	67,41	<
1.4.	Jumlah konsumsi ikan	30,00	kg/kapita/tahun	31	32	33	36	38	33,50	>
1.5.	Pengolahan produksi perikanan	-	ton	3.888	3.977	4.060	4.000	4.221	4.221,36	<
1.6.	Tingkat Penggunaan Teknologi Tepat Guna	60	%	70	72	73	74	75	85	<
1.7.	Tingkat Perkembangan Perikanan Budidaya	-	%	1,89	79,76	26,65	32,16	15,35	24	<
1.8.	Tingkat Perkembangan Perikanan Tangkap	2	%	3,24	2,42	2,52	0,30	5,25	2,50	>
1.9.	Nilai Tambah Hasil Perikanan	6,5	%	6,5	7	7,5	7,5	7,5	10	<
1.10.	Kualitas SDM Perikanan dan di Pesisir	70	%	73	74	75	75	75	85	<



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2.	Pariwisata									
2.1.	Jumlah kunjungan wisata		orang	152.653	177.307	142.681	155.262	266.666		
2.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			0,010	0,0101	0,0102	0,0103	0,0104		
2.3.	Potensi Objek Wisata Bahari/Alam			14	14	14	14	14		
2.4.	Potensi wisata sejarah/Budaya			8	8	8	8	8		
2.5.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		kegiatan	4	4	4	4	4		
2.6.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya						1	1		
2.7.	Pembinaan Paduan Suara			14	18	18	18	18		
2.8.	Pembinaan dan Pelatihan Musik Fanfare			14	18	18	18	18		
2.9.	Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar Kabupaten Serdang Bedagai			3	2	3	6	2		
2.10.	Sosialisasi Sapta Pesona						1	1		
3.	Pertanian									
3.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:									
	- Padi	4,9	ton/ha	5,164	5,401	5,502	5,611	5,611	5,6	>
	- Ubi Kayu	22,8	ton/ha	29,263	34,205	34,444	35,605	39,747	25	>
	- Jagung	3,8	ton/ha	4,021	4,203	4,313	4,391	4,611	4,5	>
3.2.	Populasi ternak :									
3.3.	- Sapi	37.338	ekor	42.538	47.409	44.733	43.470	43.615	58.782	<
	- Kambing	57.804	ekor	65.488	72.233	76.980	77.161	77.306	84.785	<
	Produksi daging	2.016	ton	2.166	1.633	1.595	1.705	1.715	3.247	<
3.4.	Cakupan bina kelompok petani									
3.5.	Jumlah produksi kelapa sawit	889.248,05	ton	885.345	991.760,99	1.095.201,38	1.158.333,13	1.131.014,07	1.046.027,57	>
3.6.	Jumlah produksi karet	36.458,31	ton	36.563	34.934,70	38.804,89	28.803,73	37.762,90	40.369,43	<
3.7.	Jumlah produksi kakao	1.311,27	ton	1.342	1.053,90	942,16	1.038,61	971,51	1.799,04	<



3.8.	Kelembagaan (Kelas Kelompok) petani, peternak, perikanan dan perkebunan :									
	1. Kelas Pemula	1136		1031	1227	1280	1116	900	671	>
	2. Kelas Lanjut	270		350	153	210	350	485	435	<
	3. Kelas Madya	95		100	15	36	60	141	153	<
	4. Kelas Utama	0		0	0	0	0	0	0	=
	5. Gapoktan			116	161	177	185	185		
4.	Kahutanan									
4.1.	Luas hutan dan lahan kritis		ha	23.502,66	20.904,66	20.010,66	18.116,10	17.906,10		
4.2.	luas lahan kritis yang direhabilitasi	155,16	ha	155,16	2.598	894	1.894,56	210	50	>
4.3.	Nilai tambah hasil Hutan Kayu									
	Kayu Bulat (M³)	9.141,80	m³	28.963,44	133.606,03	130.624,41	173.831,05	196.162,29	7.054,15	>
	Kayu Gergajian (M³)	44.212,42	m³	49.164,39	58.307,68	68.528,97	54.233,48	96.344,72	34.210,73	>
	Moulding (M³)	24.789,76	m³	34.439,71	36.826,27	45.893,65	31.354,90	41.104,61	19.181,84	>
4.4.	Luas kawasan hutan		ha	30.612,54	30.612,54	30.612,5	9.685	9.685		
5.	Perdagangan									
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,21	%	13,96	13,81	13,84	14,38	15,32	21	<
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	5	kelompok	10	10	8	8	8	20	<
6.	Perindustrian									
6.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,31	%	19,91	19,66	19	19,47	19,53	26,47	<
6.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri									
6.3.	Pertumbuhan Industri		%	1	1,5	1,5	2	2		
6.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	26	kelompok	25	28	30	32	32	36	<
<b>C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:</b>										
1.	<b>Pemerintahan Umum</b>									
1.1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda			50	50	55	60	65		
1.2	Jumlah unjuk rasa yang ditangani			-	21	17	13	3		



1.3	Pengadaan kantor kecamatan, desa dan kelurahan (jumlah kantor)			17 243	17 243	17 243	17 243	17 243		
1.4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP		WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	<
1.5	Jumlah dan Jenis Pajak			10	10	11	11	11		
1.6	Jumlah dan Jenis Retribusi Daerah			20	20	19	18	18		
1.7	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan		%	4,60	4,48	5,10	6,88	**		
1.8	SJMADA21			Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1(2.1.0.14)	Version 2.1 (2.1.0.150RI)	Version 2.7(2.7.05)		
1.9	Rasio SiLPA terhadap total Pendapatan		%	1,52	2,59	1,74	7,75	**		
1.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		%	0,0005	0,00061	0,00066	0,00082	0,0005		
1.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebaran (WMK)		%	300	167	94	94	56		
<b>2.</b>	<b>Aparatur dan Kepegawaian</b>									
2.1	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi									
<b>3.</b>	<b>Keuangan Daerah</b>									
3.1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		%	4,6	4,48	5,1	6,88	**		
<b>4.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
4.4.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan kabupaten terhadap dokumen perencanaan SKPD									
	- RPJMD dengan RKPd		%	96	87	89	88	84		



<b>5.</b>	<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>									
5.1.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran		%	0,0005	0,00061	0,00066	0,00082	0,0005		
5.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		%	300	167	94	94	56		
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
<b>A. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>										
1.	Penataan Ruang									
1.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		%	37,33	37,32	37,32	37,31	37,30		
1.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		%	65,30	65,50	67,50	67,80	68,10		
<b>B. Iklim Berinvestasi</b>										
1.	Jumlah unjuk rasa yang ditangani		kejadian	-	21	17	13	3		

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA KEUANGAN**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah.



### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung sedangkan pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 1) Pendapatan Asli Daerah mencakup: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

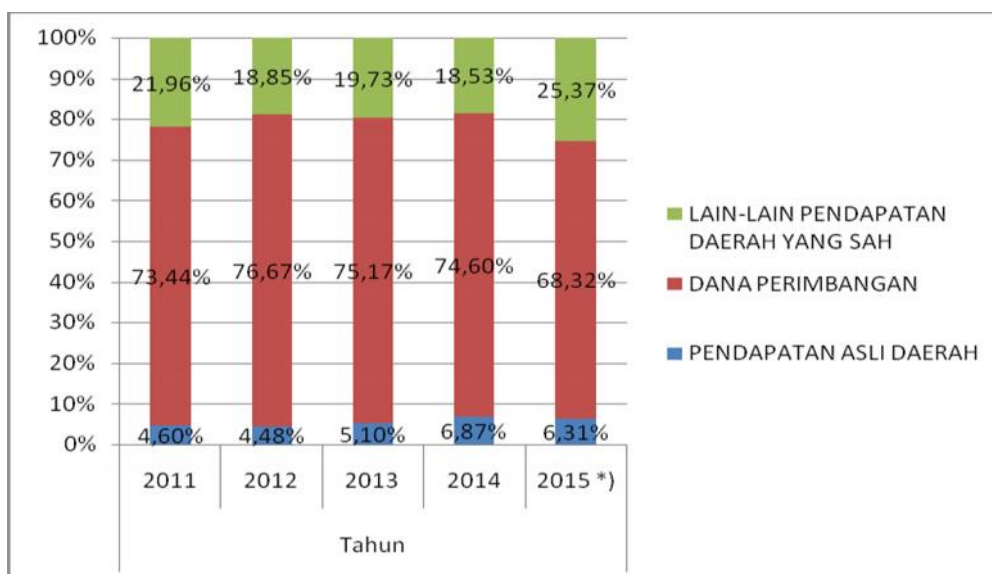
Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap**  
**Total Pendapatan Daerah 2011-2015**

No	Uraian	Total Pendapatan Daerah (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	4,60	4,48	5,10	6,87	6,31
2	Dana Perimbangan	73,44	76,67	75,17	74,60	68,32
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21,96	18,85	19,73	18,53	25,37
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada kurun waktu 2011–2015 sebesar 4,60%-6,87%. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi. Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan tahun 2011-2015.

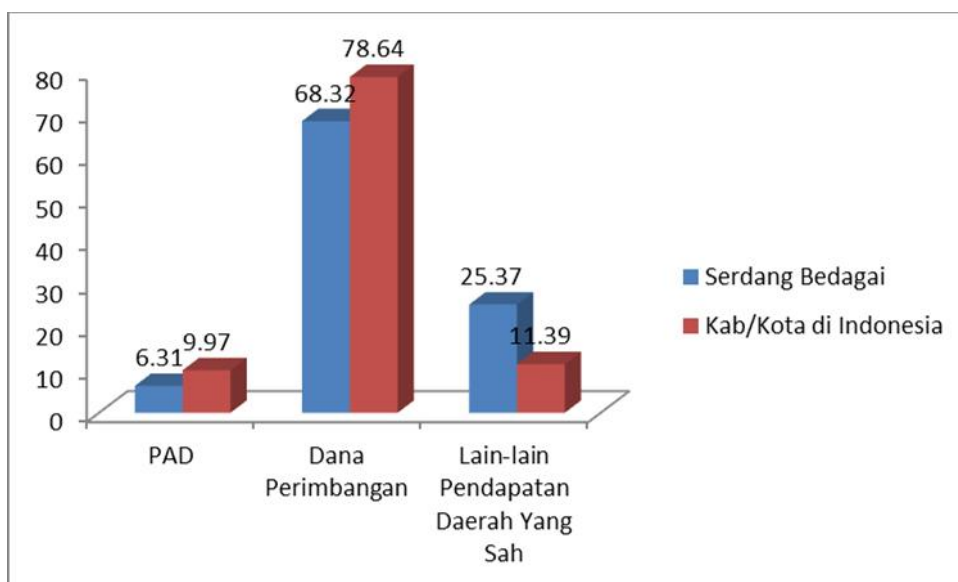


**Gambar 3.1**  
**Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**terhadap Total Pendapatan (%)**

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Berdasarkan **Gambar 3.1** dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2015 proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan peningkatan, namun terjadi penurunan pada dana perimbangan sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, berfluktuasi. Pada tahun 2015 dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 68,32%, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi pada sebesar 6,31%, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi sebesar 25,37%.

Jika dibandingkan dengan komposisi pendapatan kabupaten/kota di Indonesia, struktur pendapatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak lebih baik dari pada kebanyakan kabupaten dan kota di Indonesia. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia rata-rata sebesar 9,97 persen dari tahun 2011-2015 sedangkan kontribusi PAD Kabupaten Serdang Bedagai masih di bawah angka tersebut. Sumber pendapatan lain-lain yang sah juga masih lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yang hanya sebesar 11,39%. Namun demikian, dana perimbangan sudah lebih rendah dari bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia.



**Gambar 3.2.**

**Komposisi Pendapatan Kab/Kota di Indonesia dan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015**

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 dan Kemenkeu (diolah)*

Adapun komponen penyusun pendapatan asli daerah di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada **Tabel 3.2** di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, hasil retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 16,98% terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 40,92% dan 42,10%.

**Tabel 3.2**  
**Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah**

No	Komponen	Tahun					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pendapatan Pajak Daerah	55,33	45,80	52,05	38,77	40,92	46,58
2	Hasil Retribusi Daerah	34,36	43,98	37,12	44,87	16,98	35,46
3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,50	10,22	10,83	16,36	42,10	17,00
<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Pada kurun waktu tahun 2011-2015 secara umum pendapatan pajak daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dominan dengan kontribusi rata-rata 46,57%, selanjutnya hasil retribusi daerah sebesar 35,46%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi sebesar 17,00%, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 4,81%.



**Tabel 3.3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>743.737.747.096,00</b>	<b>875.700.482.094,20</b>	<b>988.058.956.317,91</b>	<b>1.087.160.371.106,00</b>	<b>1.269.303.511.031,51</b>	<b>12,98</b>
1.1.	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	-	39.274.569.799,20	50.371.732.819,91	74.762.406.401,00	80.146.429.202,51	23,32
1.1.1.	Pajak Daerah	19,856,358,451.00	17.985.351.399,00	26.216.776.304,00	28.984.030.525,00	32.793.328.345,00	15,01
1.1.2.	Retribusi Daerah	12,334,846,508.00	17.273.636.051,00	18.698.686.074,00	33.547.554.101,00	13.607.578.927,00	17,07
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	1,728,118,848.16	-	-	-	-	(100,00)
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	1,975,075,676.00	4.015.582.349,20	5.456.270.441,91	12.230.821.775,00	33.745.521.930,51	109,81
1.2.	<u>Dana Perimbangan</u>	572.521.057.587,00	671.314.178.876,00	742.699.761.770,00	810.995.567.520,00	867.189.090.713,00	11,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.610.349.587,00	52.173.934.040,00	45.267.322.786,00	42.829.920.654,00	38.251.543.713,00	(5,50)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	458.160.308.000,00	554.245.457.000,00	628.900.240.000,00	698.412.747.000,00	720.551.907.000,00	12,17
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	65.750.400.000,00	64.704.900.000,00	68.230.650.000,00	69.564.970.000,00	108.385.640.000,00	15,40
1.2.4.	Dana Alokasi Cukai Tembakau	-	189.887.836,00	301.548.984,00	187.929.866,00	-	(26,29)
1.3.	<u>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</u>	171.216.689.509,00	165.111.733.419,00	194.987.461.728,00	201.402.397.185,00	321.967.991.116,00	19,42
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	20.533.340.966,00	13.808.901.419,00	7.861.042.780,00	61.857.184.885,00	66.941.309.316,00	154,82
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ****)	-	75.324.124.000,00	113.773.826.000,00	131.498.553.000,00	243.708.195.000,00	50,65
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.148.369.901,00	75.978.708.000,00	72.384.684.000,00	6.863.051.600,00	10.033.047.000,00	35,38
1.3.6.	Dana Alokasi Cukai Tembakau	124.534.978.642,00	150.000.000,00	11.011.819,00	-	-	(100,00)
1.3.7.	Dana Loan WISMP	-	-	967.908.948,00	1.183.607.700,00	1.285.439.800,00	15,44

*Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011-2015 sebesar 12,98 persen. Dana Perimbangan, walaupun kontribusinya besar, namun rata-rata pertumbuhan per tahun adalah yang paling kecil, yaitu 11 persen. PAD Kabupaten Serdang Bedagai mulai tahun 2011 sampai 2015 terus meningkat. Penyebabnya adalah tingginya penerimaan pajak daerah yang hampir dua kali lipat, maka rata-rata optimistis yang diperoleh dari pertumbuhan PAD tahun 2011-2015 sangat tinggi, yaitu 23,32 persen per tahun.

PAD Kabupaten Serdang Bedagai, kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah, yaitu rata-rata 46,57 persen di tahun 2011-2015. Sumber PAD lainnya adalah dari Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi sekitar 35,46 persen dan lain-lain PAD yang sah yang memberikan kontribusi sekitar 17 persen. Adapun hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 0,96 persen dan hanya ada di tahun 2011.

Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari Pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kabupaten Serdang Bedagai masih belum mandiri. Namun demikian, berdasarkan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia masih banyak sekali daerah lain yang jauh tidak mandiri dari sisi sumber pendapatan. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran Dana Perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Laporan neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.4** berikut ini.





**Tabel 3.4**  
**Neraca Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	11,887,890,529.98	22,715,751,756.38	17,131,935,544.56	84,266,650,130.18	120,657,357,577.69	125.39%
	Kas Di Bendahara Penerimaan	53,902,323.00		2,828,009,676.00	175,000.00	0	-100.00%
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	50,087,584.00	4,558,000.00	13,650,000.00	4,800,000.00	2,964,079.00	-14.07%
	Kas Lainnya di bendahara pengeluaran			2,983,782.00	2,964,079.00	2,341,433,405.00	39446.48%
1.1.2	Piutang Pajak	97,086,500.00	21,546,742,784.00	25,056,769,076.00	28,268,316,680.00	31,914,490,618.00	5533.84%
1.1.3	Piutang Retribusi			1,180,119,346.00	636,320,180.00	2,070,014,856.23	89.62%
	Piutang Dana Bagi Hasil		37,871,332,939.00	64,974,172,878.90	70,435,787,681.01	28,628,317,860.01	6.87%
	Piutang Lain-lain	3,638,220,000.00	3,638,220,000.00	3,962,614,358.99	3,638,220,000.00	3,638,220,000.00	0.18%
1.1.4	Persediaan	6,658,851,514.00	4,177,962,743.00	4,617,435,984.00	3,935,593,011.00	4,410,623,932.00	-7.36%
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>22,386,038,450.98</b>	<b>89,954,568,222.38</b>	<b>119,767,690,646.45</b>	<b>191,188,826,761.19</b>	<b>193.663.422.327,93</b>	<b>73.65%</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
1.2.1	Investasi Non Permanen						
1.2.2	Inventasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,274,730,645.00	5,274,730,645.00	6,274,730,645.00	7,274,730,645.00	8,274,730,645.00	18.01%
	Jumlah Investasi Permanen	4,274,730,645.00	5,274,730,645.00	6,274,730,645.00	7,274,730,645.00	8,274,730,645.00	18.01%
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>4,274,730,645.00</b>	<b>5,274,730,645.00</b>	<b>6,274,730,645.00</b>	<b>7,274,730,645.00</b>	<b>8,274,730,645.00</b>	<b>18.01%</b>



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>						
1.3.1	Tanah	122,111,010,854.00	15,536,747,485.00	15,042,547,485.00	44,528,009,982.00	44,528,009,982.00	26.39%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	144,282,933,948.00	184,909,697,406.00	224,067,002,755.24	262,171,980,626.83	241,406,755,659.83	14.60%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	218,419,526,908.00	232,743,057,447.00	306,903,070,488.55	351,044,224,197.55	389,514,112,475.55	15.94%
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	568,558,302,799.00	430,853,862,272.50	568,993,293,234.72	680,222,715,383.72	803,099,662,025.72	11.36%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	16,020,783,529.00	26,557,052,654.00	29,486,848,208.00	38,894,716,233.00	56,878,289,942.00	38.74%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,400,449,000.00	2,636,791,921.39	122,400,000.00	164,089,500.00	0	-37.86%
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,071,793,007,038</b>	<b>893,237,209,185.89</b>	<b>1,144,615,162,171.51</b>	<b>1,377,025,735,923.10</b>	<b>1.535.426.830.085,10</b>	<b>-17.05%</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	929,538,148.00	909,538,148.00	844,415,719.00	843,415,719.00	839,665,719.00	-2.47%
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	
1.5.5	Aset Lain-lain			14,727,981,919.76	60,401,051,763.76	57,930,279,192.76	153.01%
1.5.6	Restricted Cash			3,493,481,162.00			-100.00%
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>929,538,148.00</b>	<b>909,536,148.00</b>	<b>19,065,878,800.76</b>	<b>61,224,467,482.76</b>	<b>58,769,944,911.76</b>	<b>552.79%</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,099,383,314,281.98</b>	<b>989,376,046,201.27</b>	<b>1,289,723,462,263.72</b>	<b>1,636,733,760,812.05</b>	<b>1,223,700,739,949.45</b>	<b>5.51%</b>



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>10,069,373,239.39</b>	<b>8,971,010,732.04</b>	<b>2,876,517,693.00</b>	<b>7,081,382,659.00</b>	<b>22.45%</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)					850,673,330.00	
2.1.2	Utang Bunga					0	
2.1.3	Utang Pajak						
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
2.1.5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga						
	Utang Beban					4,119,014,363.00	
2.1.6	Pendapatan Diterima Dimuka					480,683,966.00	
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya		104,650,000.00			1,631,011,000.00	-100.00%
2.1.8	Utang Kepada pihak ketiga	30,857,399,261.00	9,964,723,239.39	8,971,010,732.04	2,876,517,693.00		-61.40%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>30,857,399,261.00</b>	<b>10,069,373,239.39</b>	<b>8,971,010,732.04</b>	<b>2,876,517,693.00</b>	<b>7,081,382,659.00</b>	<b>-0.01%</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya					365,172,550.00	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365,172,550.00</b>	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>30,857,399,261.00</b>	<b>10,069,373,239.39</b>	<b>8,971,010,732.04</b>	<b>2,876,517,693.00</b>	<b>7,446,555,209.00</b>	<b>3.17%</b>



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	11,937,978,113.98	22,720,309,756.38	17,145,585,544.56	84,271,450,130.18	-	89.32%
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	3,735,306,500.00	63,056,295,723.00	95,173,675,659.89	102,978,644,541.01	-	386.81%
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	6,658,851,514.00	4,177,962,743.00	4,617,435,984.00	3,935,593,011.00	-	-35.38%
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek	-30,857,399,261.00	-10,069,373,239.39	-8,971,010,732.04	-2,876,517,693.00	-	-61.55%
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	53,902,323.00		2,830,993,458.00	3,139,079.00	-	-99.96%
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>-8,471,360,812.02</b>	<b>79,885,194,982.99</b>	<b>110,796,679,914.41</b>	<b>188,312,309,068.19</b>	<b>-</b>	<b>-258.59%</b>
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	4,274,730,645.00	5,274,730,645.00	6,274,730,645.00	7,274,730,645.00	-	-10.43%
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,071,793,007,038.00	893,237,209,185.89	1,144,615,162,171.51	1,377,025,735,923.10	-	-17.05%
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	929,538,148.00	909,538,148.00	19,065,878,800.76	61,244,467,482.76	-	528.82%
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1,076,997,275,831.00</b>	<b>899,421,477,978.89</b>	<b>1,169,955,771,617.27</b>	<b>1,445,544,934,050.86</b>	<b>-</b>	<b>-15.71%</b>



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
<b>3.3</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1,068,525,915,020.98</b>	<b>979,306,672,961.88</b>	<b>1,280,752,451,531.68</b>	<b>1,633,857,243,119.05</b>	<b>1,216,254,184,740.45</b>	6.11%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,099,383,314,281.98</b>	<b>989,376,046,201.27</b>	<b>1,289,723,462,263.72</b>	<b>1,636,733,760,812.05</b>	<b>1,223,700,739,949.45</b>	5.51%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2015, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki aset senilai Rp. 1.796.134.927.969,79, dengan tingkat pertumbuhan 14,25 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.535.426.830.085,1 dan rata-rata tumbuh 10,82 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 85,48 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.446.555.209,00. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2014 dan tertinggi tahun 2011. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 mencapai Rp. 1.216.254.184.740,45, dan mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 dengan rata-rata 5,50%.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu selama periode tahun 2011-2015 diarahkan kepada:

**a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2011-2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Selama Periode Tahun Anggaran 2011-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

**✓ Pendapatan Asli Daerah**

1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

**✓ Dana Perimbangan**

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah

**b. Kebijakan Belanja Daerah**

1. Meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

**c. Kebijakan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana disebutkan dalam RPJMD 2010-2015 ditujukan untuk menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja terutama guna menutupi defisit akibat belanja yang lebih besar dibanding pendapatan. Apabila terjadi surplus anggaran maka



alokasi penggunaannya dilaksanakan melalui pos-pos yang ada dalam pembiayaan, demikian pula apabila terjadi defisit yang tidak bisa lagi ditutup dengan menaikkan pos-pos yang ada dalam struktur pendapatan, maka diupayakan ditutup melalui pos yang terdapat dalam bagian pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Perkembangan proporsi belanja pegawai pada belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar 55,88% dan menurun menjadi sebesar 37,98% pada tahun 2015. Pada belanja langsung terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 4,25% pada tahun 2011 menjadi sebesar 17,58% realisasi tahun 2015. Perkembangan proporsi belanja pada belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Proporsi Belanja Terhadap Belanja Daerah**  
**Menurut Jenis Belanja, 2011 – 2015**

No.	Belanja	Proporsi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>A</b>	<b>Tidak Langsung</b>	<b>63,91</b>	<b>52,56</b>	<b>45,46</b>	<b>46,68</b>	<b>51,05</b>
1	Belanja Pegawai	55,88	46,18	41,30	42,41	37,98
2	Belanja Subsidi	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	1,34	1,27	0,00	0,00	3,73
4	Belanja Bantuan Sosial	1,46	0,14	0,02	0,69	0,12
5	Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kot dan PemDes	0,00	0,39	0,33	0,32	0,48
6	Bantuan Keu. kepada Prov/Kab/Kot PemDes	4,81	4,37	3,74	3,25	8,73
7	Tidak Terduga	0,00	0,20	0,08	0,02	0,02
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>36,09</b>	<b>47,44</b>	<b>54,54</b>	<b>53,32</b>	<b>48,95</b>
1	Belanja Pegawai	4,25	13,18	14,99	18,52	17,58
2	Belanja Barang dan Jasa	14,88	16,31	14,05	16,64	15,08
3	Belanja Modal	16,96	17,96	25,49	18,15	16,28

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Rasio belanja langsung menunjukkan peningkatan, dari 36,09% pada tahun 2011 dan direalisasikan menjadi 48,95% pada tahun 2015, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya belanja untuk pembangunan meskipun struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dari sebesar 16,96% pada tahun 2011 dan direalisasikan menjadi 16,28% pada tahun 2015. Demikian juga dengan proporsi belanja barang dan Jasa, pada tahun 2011 sebesar 14,88% menjadi 15,08% pada Tahun 2015.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2011, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 53,25 persen turun menjadi 38,03 persen di tahun 2015. Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Serdang Bedagai sudah memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena hanya hampir sepertiga dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2011	408.913.373.285,00	767.971.779.239,00	53,25
2	2012	384.960.285.956,00	864.918.150.451,80	44,51
3	2013	405.965.408.894,00	993.742.180.529,73	40,85
4	2014	461.759.890.630,53	1.020.034.506.520,38	45,27
5	2015	465.081.656.891,00	1.222.917.603.584,00	38,03

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2011-2015 khususnya terkait kebutuhan belanja pegawai (pada komponen belanja tidak langsung) mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp408.913.373.285,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp461.759.890.630,53 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar Rp465.081.656.891,00, dengan rasio rata-rata terhadap Total Pengeluaran APBD berkisar antara 44% hingga 45%, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH, serta Belanja Pemungutan Pajak Daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Struktur belanja di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011 masih didominasi belanja tidak langsung yang sebesar 63,91% namun pada tahun 2015 diproyeksikan sebagaimana **Tabel 3.7** berikut:

**Tabel 3.7**  
**Proporsi Belanja Langsung dan Tidak langsung Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Proporsi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	63,91	52,56	45,46	46,68	51,05
B	Belanja Langsung	36,09	47,44	54,54	53,32	48,95
1	Belanja Pegawai	4,25	13,18	14,99	18,52	17,58
2	Belanja Barang dan Jasa	14,88	16,31	14,05	16,64	15,08
3	Belanja Modal	16,96	17,96	25,49	18,15	16,28

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*



Total belanja Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Total belanja tahun 2011 sebesar Rp731.773.294.426,00 dan direalisasikan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp1.221.917.603.584,00. Proporsi belanja tidak langsung cenderung mengalami penurunan meskipun masih mendominasi struktur belanja daerah, dari sebesar 63,91% pada tahun 2011 direalisasikan menjadi 51,05% pada tahun 2015, sedangkan belanja langsung meningkat dari sebesar 36,09% pada tahun 2011 menjadi sebesar 48,95% pada tahun 2015.



**Tabel 3.8**  
**Struktur Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015 (Rp)**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>731.773.294.426,00</b>	<b>833.559.067.726,80</b>	<b>983.070.575.740,34</b>	<b>1.010.452.029.829,06</b>	<b>1.221.917.603.584,00</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>467.666.079.435,00</b>	<b>438.111.737.244,00</b>	<b>446.947.418.031,00</b>	<b>471.694.064.326,00</b>	<b>623.826.336.250,00</b>
1	Belanja Pegawai	408.913.373.285,00	384.960.285.956,00	405.965.408.894,00	428.523.536.586,00	464.087.776.009,00
2	Belanja Subsidi	3.053.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	9.803.777.250,00	10.549.000.000,00	0,00	0,00	45.600.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.712.368.900,00	1.202.000.000,00	216.500.000,00	7.007.839.100,00	1.452.922.100,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	0,00	3.241.333.643,00	3.170.140.237,00	3.169.828.895,00	5.739.504.775,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	35.183.280.000,00	36.467.700.800,00	36.785.508.900,00	32.823.808.395,00	106.685.798.366,00
7	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.691.416.845,00	809.860.000,00	169.051.350,00	260.335.000,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>264.107.214.991,00</b>	<b>395.447.330.482,80</b>	<b>536.123.157.709,34</b>	<b>538.757.965.503,06</b>	<b>598.091.267.334,00</b>
1	Belanja Pegawai	31.083.647.272,00	109.827.571.761,00	147.372.231.490,00	187.139.996.060,47	214.796.442.792,00
2	Belanja Barang dan Jasa	108.891.882.723,00	135.926.475.748,80	138.129.178.336,50	168.179.384.421,00	184.316.987.893,00
3	Belanja Modal	124.131.684.996,00	149.693.282.973,00	250.621.747.882,84	183.438.585.021,59	198.977.836.649,00

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan mencakup : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; 2) Transfer dari dana cadangan; dan 3) Penerimaan pinjaman dan obligasi. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2011-2015 fluktuatif. Total penerimaan pada tahun 2011 sebesar Rp321.660.773,82 ditargetkan meningkat menjadi Rp84.274.414.209,18 pada tahun 2015.

Pengeluaran pembiayaan mencakup : 1) Pembentukan dana cadangan; 2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp36.198.484.813,00 dan diperkirakan menurun menjadi Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2015.

Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.9** berikut ini:



**Tabel 3.9**  
**Perincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015 (Rp)**

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>321.660.773,82</b>	<b>11.937.978.113,98</b>	<b>22.720.309.756,38</b>	<b>17.145.585.544,56</b>	<b>84.274.414.209,18</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	321.660.773,82	11.937.978.113,98	22.720.309.756,38	17.145.585.544,56	84.274.414.209,18
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>321.660.773,82</b>	<b>11.937.978.113,98</b>	<b>22.720.309.756,38</b>	<b>17.145.585.544,56</b>	<b>84.274.414.209,18</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>36.198.484.813,00</b>	<b>31.359.082.725,00</b>	<b>10.671.604.789,39</b>	<b>9.582.476.691,32</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.028.416.640,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000
	Pembayaran Pokok Hutang	35.170.068.173,00	30.359.082.725,00	9.671.604.789,39	8.582.476.691,32	0,00
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)					
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(35.876.824.039,18)</b>	<b>(19.421.104.611,02)</b>	<b>12.048.704.966,99</b>	<b>7.563.108.853,24</b>	<b>83.274.414.209,18</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>11.982.028.113,98</b>	<b>22.720.309.756,38</b>	<b>17.037.085.544,56</b>	<b>84.271.450.130,18</b>	<b>130.660.321.656,69</b>

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*



**Tabel 3.10**  
**Defisit Riil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015 (Rp)**

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	779.632.146.579,16	875.700.482.094,20	988.058.956.317,91	1.087.160.371.106,00	1.269.303.511.031,51
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	731.773.294.426,00	833.559.067.726,80	983.070.575.740,34	1.010.452.029.829,06	1.221.917.603.584,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36.198.484.813,00	31.359.082.725,00	10.671.604.789,39	9.582.476.691,32	1.000.000.000,00
<b>A.</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>11.660.367.340,16</b>	<b>10.782.331.642,40</b>	<b>(5.683.224.211,82)</b>	<b>67.125.864.585,62</b>	<b>46.385.907.447,51</b>
	<b>Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan</b>					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	321.660.773,82	11.937.978.113,98	22.720.309.756,38	17.145.585.544,56	84.260.654.330,18
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>321.660.773,82</b>	<b>11.937.978.113,98</b>	<b>22.720.309.756,38</b>	<b>17.145.585.544,56</b>	<b>84.260.654.330,18</b>
<b>A+B</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>11.982.028.113,98</b>	<b>22.720.309.756,38</b>	<b>17.037.085.544,56</b>	<b>84.271.450.130,18</b>	<b>130.646.561.777,69</b>

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*



Berdasarkan **Tabel 3.10** ini selama kurun waktu 2011-2015, APBD Kabupaten Serdang Bedagai mengalami fluktuasi. Dari tahun 2011 sampai 2015, APBD Kabupaten Serdang Bedagai mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah kecuali di tahun 2014 mengalami defisit. Pada tahun 2011, pendapatan daerah sebesar Rp. 779.632.146.579,16 sedangkan belanja daerah sebesar Rp. 731.773.294.426,00. Pada tahun 2015, pendapatan daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 1.269.303.511.031,51 dan belanja daerah juga meningkat menjadi sebesar 1.221.917.603.584,00 tetapi masih lebih kecil dari pendapatan daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Pada tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan lebih kecil dan cenderung menurun setiap tahunnya, sehingga pada periode tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp. 11.982.028.113,98; Rp. 22.720.309.756,38; Rp. 17.037.085.544,56; Rp. 84.271.450.130,18 dan Rp. 130.646.561.777,69. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif.



Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kabupaten Serdang Bedagai dapat diperkecil



**Tabel 3.11**  
**Komposisi Penutup Defisit Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2015 (Rp)**

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	321.660.773,82	11.937.978.113,98	22.720.309.756,38	17.145.585.544,56	84.274.414.209,18
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bias menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah, dan mengindikasikan terhambatnya proses pembangunan yang telah direncanakan. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### **3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat beserta pertumbuhannya tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada **Tabel 3.12** sebagai berikut:



**Tabel 3.12**  
**Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

NO	Uraian	Data Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>286.293.659.608,95</b>	<b>358.813.440.173,98</b>	<b>383.598.226.923,83</b>	<b>429.220.395.030,53</b>	<b>528.182.894.022,63</b>	<b>16.80%</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	285,993,659,608.95	350,816,690,173.98	375,380,226,923.83	420,542,395,030.53	477,674,294,022.63	13.82%
2	Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	300,000,000.00	2,568,000,000.00	2,668,000,000.00	2,668,000,000.00	2,668,000,000.00	189.97%
3	Insentif pemungutan pajak daerah	-	1,928,750,000.00	2,050,000,000.00	2,510,000,000.00	2,240,600,000.00	6.00%
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Bagi Hasil	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	45,600,000,000.00	319.46%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>15.378.064.425,00</b>	<b>103.700.535.600,00</b>	<b>134.159.776.590,00</b>	<b>156.997.210.137,00</b>	<b>42.707.958.656,00</b>	<b>136.98%</b>
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga medis	-	79,841,055,000.00	117,035,431,400.00	136,600,697,157.00	10,720,221,651.00	-9.62%
2	Belanja Bea siswa pendidikan PNS	327,000,000.00	90,800,000.00	-	-	-	-86.12%
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan sprit listrik, air, telepon dan sejenisnya)	15,051,064,425.00	23,768,680,600.00	17,124,345,190.00	20,396,512,980.00	31,987,737,005.00	26.48%
4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjang nya)	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>35,755,406,104.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok hutang	35,755,406,104.00	-	-	-	-	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>782,632,024,173.82</b>	<b>904,423,561,334.98</b>	<b>1,062,867,424,408.37</b>	<b>1,107,314,521,505.08</b>	<b>1,368,034,041,867.18</b>	

*Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai, 2016 (data diolah)*

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kabupaten Serdang Bedagai paling besar berasal dari belanja bagi hasil sebesar 319,46 persen dan Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH sebesar 189,97 persen, sedangkan belanja gaji dan tunjangan hanya sebesar 13,82 persen dan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 6 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung pertumbuhannya hanya berasal dari Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan sprit listrik, air, telepon dan sejenisnya) sebesar 26,48 persen.

### **3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu**

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan**

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2011-2015).

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 1.440.262.749.000 dan meningkat menjadi Rp. 1.656.302.150.000 pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp. 2.369.198.305.000. Komponen pendapatan berasal dari PAD, Dana Bagi Hasil dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan komponen pendapatan yang paling besar berkontribusi adalah dari



Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Adapun proyeksi pendapatan daerah selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.13** berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2016 – 2021 (Ribu Rp)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.440.262.749</b>	<b>1.656.302.150</b>	<b>1.810.412.373</b>	<b>1.979.578.553</b>	<b>2.165.293.380</b>	<b>2.404.198.305</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>89.259.943</b>	<b>102.648.934</b>	<b>108.173.099</b>	<b>114.107.457</b>	<b>120.488.765</b>	<b>127.357.319</b>
Pajak Daerah	42.340.000	48.691.000	50.151.730	51.656.281	53.205.970	54.802.149
Retribusi Daerah	16.551.041	19.033.697	19.604.708	20.192.849	20.798.635	21.422.594
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.368.902	34.924.237	38.416.661	42.258.327	46.484.160	51.132.576
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>965.615.546</b>	<b>1.110.457.876</b>	<b>1.218.850.753</b>	<b>1.337.950.272</b>	<b>1.468.820.465</b>	<b>1.612.631.436</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.137.579	53.058.215	55.711.126	58.496.682	61.421.516	64.492.592
Dana Alokasi Umum	774.457.677	890.626.328	979.688.961	1.077.657.857	1.185.423.643	1.303.966.007
Dana Alokasi Khusus	145.020.290	166.773.333	183.450.666	201.795.733	221.975.306	244.172.837
<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>385.387.260</b>	<b>443.195.336</b>	<b>483.388.518</b>	<b>527.520.820</b>	<b>575.984.146</b>	<b>629.209.547</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.193.851	42.772.932	43.842.254	44.938.312	46.061.769	47.213.313
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.207.478	391.238.588	430.362.447	473.398.692	520.738.561	572.812.417
Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.100.000	5.865.000	5.865.000	5.865.000	5.865.000	5.890.000
Dana LOAN WISMP	2.885.931	3.318.820	3.318.820	3.318.820	3.318.820	3.318.820

*Sumber : Dinas PPKA Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)*



### 3.3.2.2. Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat dengan rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 8,56% dan belanja langsung sebesar 25,20%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.14** berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016–2021 (Ribu Rp)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>459.986.320</b>	<b>495.068.435</b>	<b>535.463.285</b>	<b>582.139.799</b>	<b>634.527.292</b>	<b>693.562.887</b>
Belanja gaji dan tunjangan	448.004.216	481.604.532	520.132.895	564.344.191	613.442.135	668.038.485
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	3.852.400	4.599.928	5.780.911	7.226.139	9.177.197	11.838.584
Insentif pemungutan pajak daerah	2.240.600	2.733.532	3.362.244	4.202.805	5.337.563	6.885.456
Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja bagi hasil	5.889.104	6.030.442	6.187.234	6.366.664	6.570.397	6.800.361
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>29.546.317</b>	<b>36.046.507</b>	<b>44.337.203</b>	<b>55.421.504</b>	<b>70.385.310</b>	<b>90.797.050</b>
Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan sprit listrik, air, telepon dan sejenisnya)	29.546.317	36.046.507	44.337.203	55.421.504	70.385.310	90.797.050
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-

*Sumber : Dinas PPKA Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)*



### 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Adapun Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran atau SILPA diskenariokan sebesar nol persen setiap tahunnya.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapanya secara indikatif tersaji dalam **Tabel 3.15** berikut ini.

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 (Ribu Rp)**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.440.262.749	1.656.302.150	1.810.412.373	1.979.578.553	2.165.293.380	2.369.198.305
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>1.440.262.749</b>	<b>1.656.302.150</b>	<b>1.810.412.373</b>	<b>1.979.578.553</b>	<b>2.165.293.380</b>	<b>2.369.198.305</b>

*Sumber : Dinas PPKA Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)*

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

**Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

**Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

**Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi Kerangka Pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam **Tabel 3.16** dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 selama periode 5 (lima) tahun kedepan, secara rinci disajikan dengan **Tabel 3.17** sebagai berikut:



Tabel 3.16

## Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Ribu rupiah)

No	Jenis dana	Alokasi											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah
1	Prioritas I	34,06	490.532.637	32,13	532.114.941	32,08	580.800.488	32,27	638.561.303	32,26	705.912.603	33,16	785.359.937
	Belanja Tidak Langsung	31,94	459.986.320	29,89	495.068.435	29,58	535.463.285	29,42	582.139.799	29,32	634.527.292	29,29	693.562.887
	Belanja Langsung	2,05	29.546.317	2,18	36.046.507	2,45	44.337.203	2,80	55.421.504	3,25	70.385.310	3,83	90.797.050
	Pengeluaran pembiayaan	0,07	1.000.000	0,06	1.000.000	0,06	1.000.000	0,05	1.000.000	0,05	1.000.000	0,04	1.000.000
II	Prioritas II (visi)	48,05	692.046.251	48,50	803.306.543	48,51	878.231.042	48,52	960.063.314	48,53	1.050.331.577	48,54	1.149.523.457
III	Prioritas III	17,89	257.683.861	19,37	320.880.666	19,41	351.380.843	19,21	380.010.936	18,85	408.049.200	18,30	433.314.911
	Belanja tambahan penghasilkan	3,58	51.621.264	3,15	52.117.579	3,04	55.117.579	3,04	60.117.579	2,92	63.117.579	2,75	65.117.579
	Belanja subsidi												
	Belanja hibah	0,14	2.000.000	0,13	2.200.000	0,14	2.500.000	0,15	3.000.000	0,15	3.300.000	0,15	3.500.000
	Belanja bansos	0,14	2.068.170	0,14	2.243.170	0,14	2.543.172	0,15	3.043.172	0,15	3.343.172	0,15	3.543.172
	Belanja bantuan keuangan	13,82	198.994.427	15,78	261.319.917	15,89	287.720.092	15,71	310.864.985	15,46	334.588.449	15,09	357.454.160
	Belanja tidak terduga	0,21	3.000.000	0,18	3.000.000	0,19	3.500.000	0,18	3.500.000	0,17	3.700.000	0,16	3.700.000

Sumber : Dinas PPKA Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)



Tabel 3.17

## Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 (Ribu Rp)

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA</b>	<b>1.440.262.749</b>	<b>1.656.302.150</b>	<b>1.810.412.373</b>	<b>1.979.578.553</b>	<b>2.165.293.380</b>	<b>2.369.198.305</b>
	PENDAPATAN	1.440.262.749	1.656.302.150	1.810.412.373	1.979.578.553	2.165.293.380	2.369.198.305
	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.439.262.749</b>	<b>1.655.302.151</b>	<b>1.809.412.373</b>	<b>1.977.635.553</b>	<b>2.163.293.379</b>	<b>2.367.198.305</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>717.670.181</b>	<b>815.949.101</b>	<b>886.844.128</b>	<b>962.150.735</b>	<b>1.042.576.492</b>	<b>1.126.877.798</b>
	<b>PRIORITAS I</b>	<b>459.986.320</b>	<b>495.068.435</b>	<b>535.463.285</b>	<b>582.139.799</b>	<b>634.527.292</b>	<b>693.562.887</b>
	Belanja gaji dan tunjangan	448.004.216	481.604.532	520.132.895	564.344.191	613.442.135	668.038.485
	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	3.852.400	4.599.928	5.780.911	7.226.139	9.177.197	11.838.584
	Insentif pemungutan pajak daerah	2.240.600	2.733.532	3.362.244	4.202.805	5.337.563	6.885.456
	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja bagi hasil	5.889.104	6.030.442	6.187.234	6.366.664	6.570.397	6.800.361
	<b>PRIORITAS III</b>	<b>257.683.861</b>	<b>320.880.666</b>	<b>351.380.843</b>	<b>380.010.936</b>	<b>408.049.200</b>	<b>433.314.911</b>
	Belanja tambahan penghasilan	51.621.264	52.117.579	55.117.579	60.117.579	63.117.579	65.117.579
	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja hibah	2.000.000	2.200.000	2.500.0000	3.000.000	3.300.000	3.500.000
	Belanja bansos	2.068.170	2.243.170	2.543.172	3.043.172	3.343.172	3.543.172
	Belanja bantuan keuangan	198.994.427	261.319.917	287.720.092	310.864.985	334.588.449	357.454.160
	Belanja tidak terduga	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000



	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>721.592.568</b>	<b>839.353.050</b>	<b>922.568.245</b>	<b>1.015.484.818</b>	<b>1.120.716.887</b>	<b>1.240.320.507</b>
	<b>PRIORITAS I</b>	<b>29.546.317</b>	<b>36.046.507</b>	<b>44.337.203</b>	<b>55.421.504</b>	<b>70.385.310</b>	<b>90.797.050</b>
	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan sprit listrik, air, telepon dan sejenisnya)	29.546.317	36.046.507	44.337.203	55.421.504	70.385.310	90.797.050
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
	<b>PRIORITAS II</b>	<b>692.046.251</b>	<b>803.306.543</b>	<b>878.231.042</b>	<b>960.063.314</b>	<b>1.050.331.577</b>	<b>1.149.523.457</b>
	PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAINNYA						
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>PRIORITAS I</b>						
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
	Dana Cadangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT) = A-(B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas PPKA Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian “*gap expectation*” antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, kemunculan permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yang diperoleh melalui serangkaian proses identifikasi lewat *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahun 2015. Forum ini dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dibedakan berdasarkan wilayah yaitu wilayah pesisir, wilayah dataran tinggi dan wilayah dataran rendah. Selain itu, *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilaksanakan di tingkat SKPD yang dikelompokkan berdasarkan bidang pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sosial budaya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Hasil identifikasi permasalahan pembangunan ini menjadi salah satu bahan kajian pada Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2016-2021 yang juga telah disusun di tahun 2015.

Untuk melengkapi perkembangan permasalahan yang timbul, telah dilaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan di 17 kecamatan. Selain itu juga telah diterima masukan beberapa tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Setelah melalui berbagai proses indentifikasi, permasalahan pembangunan yang menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di masa yang akan datang dan menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2016–2021 adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **4.1.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

###### **1. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah**

Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,8% turun sebanyak 0,29 poin dari 6,09% di tahun 2012. Bahkan pada tahun 2014 turun cukup signifikan menjadi sebesar 5,12% dan pada akhirnya di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai menjadi hanya sebesar 5,05%. Angka capaian ini masih lebih rendah dari capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% di tahun 2015 (**Gambar 2.8**).

Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya realisasi investasi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembangunan menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sangat tergantung terhadap pemerintah pusat

maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Penyebab lain adalah struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai masih sangat mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan maupun berbasis sektor jasa. Sedangkan *multiplier effect* sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian dalam mendongkrak perekonomian. Hal ini karena sektor industri memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya, baik *backward* maupun *forward* yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

Pertumbuhan rata-rata sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai kontributor terbesar pertama dalam struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai selama periode 2011-2015 sebesar -0,03% untuk PDRB ADHB dan -0,07% untuk PDRB ADHK yang berarti mengalami perlambatan masing-masing sebesar 0,03% dan 0,07%. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar kedua juga mengalami perlambatan sebesar 0,02% baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK (**Tabel 2.22**).

Di samping itu, terdapat juga permasalahan utama pada sektor pertanian yaitu adanya konversi penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian seperti jaringan irigasi, jalan, perumahan, pertokoan dan penggunaan lainnya yang terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak boleh hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian, namun diperlukan upaya untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh.



## 2. Angka Kemiskinan

Permasalahan besar bagi rata-rata daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Serdang Bedagai adalah menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan tren penurunan dari sebesar 10,07% di tahun 2011 menjadi 8,98 persen di tahun 2014. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai juga lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 9,85 persen di tahun 2014. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai masih cukup besar yaitu mencapai 54.480 jiwa pada tahun 2014 (**Gambar 2.9**).

Saat ini terdapat indikator baru dalam mengukur kemiskinan yaitu IKRaR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) yang memandang kemiskinan/kesejahteraan atas 3 dimensi yakni : keadilan sosial, keadilan ekonomi serta dimensi demokrasi dan governance. Pada tahun 2014 nilai IKRaR Provinsi Sumatera Utara adalah 40,41 dan nilai IKRaR Kabupaten Serdang Bedagai masih berada di atas rata-rata yaitu sebesar 41,08.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai juga tergambarkan dari masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Berdasarkan pendapatan perkapita, pada tahun 2015 pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 26.025,924 ribu relatif lebih rendah dari Kabupaten Deli Serdang yang mencapai Rp. 28.937,186 ribu dan dari pencapaian Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp. 31.637,413 ribu. Namun, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai masih lebih besar dari Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 20.259,69 dan dari pencapaian nasional yakni sebesar Rp. 10.687,68 ribu (**Gambar 2.7**).

Belum optimalnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya dikarenakan kurang dipedomannya dokumen Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Serdang Bedagai oleh segenap pemangku kepentingan, sehingga belum sepenuhnya terbangun sinergitas program dan kegiatan penaggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021, di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa masalah utama kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

1. Pada bidang Pelayanan hak atas pendidikan,
2. Pada bidang pelayanan hak atas kesehatan,
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha,
4. Terbatasnya akses dan kapasitas pelayanan sanitasi lingkungan, air bersih dan pemukiman untuk kaum miskin,
5. Terbatasnya ruang partisipasi keluarga miskin dan perempuan dalam pembangunan,
6. Terbatasnya akses dan kapasitas pelayanan hak atas pangan untuk kaum miskin.

Dari permasalahan di atas dihasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesabilitas, kualitas dan kapasitas pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan lainnya,
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan perekonomian dan menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan/UMKM sesuai dengan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin,
3. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia dalam kesempatan bekerja dan berusaha,
4. Meningkatkan ketersediaan dan pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin,

5. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan,

6. Meningkatkan ketersediaan dan transparansi data.

Sebagai *best practice* dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dibuat suatu gerakan yang bersifat terpadu dan menyeluruh (holistik dan integratif) yaitu Posyandu Holistik Integratif (PHI) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Posyandu Holistik Integratif sebagai salah satu upaya berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

#### **4.1.1.2. Kesejahteraan Sosial**

##### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Perkembangan pencapaian IPM dan komponen pembentuk IPM di Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 2011-2015 terus meningkat walaupun belum begitu signifikan. Pada tahun 2011, IPM kabupaten Serdang Bedagai sebesar 65,28 meningkat menjadi sebesar 68,01 di tahun 2015. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Sumatera Utara sebesar 69,51 masih terpaut 1,50 poin dan dengan IPM Nasional sebesar 68,90 masih terpaut 0,89 (**Tabel 2.29**).

Pencapaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai juga masih lebih rendah dari Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 72,79, Kabupaten Simalungun 71,24 tetapi lebih unggul dari Kabupaten Batu Bara yang hanya mencapai 66,01. Secara regional di Provinsi Sumatera Utara, pencapaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai berada pada peringkat 21 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (**Tabel 2.29**).

Tantangan peningkatan IPM pada masa datang diperlukan adanya upaya akselerasi pencapaian IPM dengan lebih terfokus pada permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian setiap komponen IPM terutama pada upaya peningkatan Indeks Kesehatan dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI), peningkatan Indeks

Pendidikan terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pada pencapaian Indeks Pendidikan, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu masih rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah hanya 8,08 tahun pada tahun 2015, masih terpaut 0,95 tahun dari capaian Sumatera Utara yaitu 9,03 tahun, yang secara makro menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Serdang Bedagai baru berpendidikan selevel dengan kelas dua SMP. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan menengah yang masih relatif rendah.

Pada pencapaian Indeks Kesehatan, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yakni 6 kasus per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 yang sangat berpengaruh pada rendahnya Angka Harapan Hidup 67,27 tahun (capaian Sumatera Utara 68,29 tahun). Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi dari pertumbuhan AHH banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita masih rendah.

Pada pencapaian Indeks Daya Beli, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu tingginya pengaruh kondisi eksternal Kabupaten Serdang Bedagai, seperti kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM terhadap dinamika kekuatan daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi faktor pendapatan masyarakat dan inflasi harga barang dan jasa.

## **2. Pendidikan**

Permasalahan utama kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah masih rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) yakni 8,08 tahun pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Serdang Bedagai baru berpendidikan selevel dengan kelas dua SMP. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya.

Di samping itu, APK untuk tingkat SMP dan SMA serta APM untuk tingkat SD, SMP dan SMA masih kurang dari 100%. Data diduga bahwa masih rendahnya APK dan APM di Serdang Bedagai disebabkan oleh masih banyak usia sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai yang bersekolah di luar Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurang memadai dan belum meratanya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Sarana dan prasarana pendidikan serta guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih kurang memadai dan belum merata sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kecamatan.

## **3. Kesehatan**

Permasalahan utama kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah masih rendahnya capaian angka harapan hidup (AHH) yakni 67,27 tahun pada tahun 2015. Angka capaian ini masih lebih dari capaian Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai 68,29 tahun.

Rendahnya capaian angka harapan hidup masyarakat Serdang bedagai disebabkan oleh masih masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kematian bayi baru lahir walaupun terus mengalami penurunan selama periode 2011-2015 tetapi masih sebanyak 55 kejadian dari 11.792 kelahiran pada tahun 2015. Jumlah kematian bayi sebanyak 70 kejadian dari 11.792 kelahiran dengan angka kematian bayi pada tahun 2015 juga masih 0,006 atau 6 kejadian kematian dari 1000 kelahiran (AKHB 0,994).

#### **4. Luas Lahan Bersertifikat**

Dari 1.952,38 ha luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, jumlah sertifikat ha katas tanah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 46.889 sertifikat yang terdiri dari 6.445 sertifikat di tahun 2011, 3.430 sertifikat di tahun 2012, 3.394 sertifikat di tahun 2013, 4.261 sertifikat di tahun 2014 dan 4.083 sertifikat di tahun 2015.

#### **5. Ketenagakerjaan**

Dalam bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2015 jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan menjadi sebanyak 7,18% lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah serta keterbatasan modal usaha. Jenjang pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Serdang Bedagai masih didominasi oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan

pendidikan yang ditamatkan SD ke bawah walaupun angkanya terus menurun dari tahun 2011-2015.

Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu akses permodalan untuk menunjang tumbuhkembangnya UMKM harus diperluas antara lain dengan meningkatkan jumlah koperasi yang aktif.

Ditinjau dari sektor lapangan usaha, penduduk bekerja didominasi sektor pertanian, sehingga kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian secara makro diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM penduduk bekerja khususnya yang bekerja pada sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sektor tersebut.

#### **4.1.1.3. Seni Budaya dan Olahraga**

Kabupaten Serdang Bedagai dikenal sebagai kabupaten yang memiliki moto “tanah bertuah negeri beradat” yang memiliki makna bahwa daerah ini memiliki keberuntungan karena rakyatnya menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan. Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari berbagai etnis antara lain Melayu, Jawa, Karo, Simalungun, Tapanuli, Toba, Banjar, Minang dan lain-lain hal ini menyebabkan terdapatnya beraneka ragam kebudayaan yang harus dikembangkan.

Etnis melayu sebagai suku asli dan terbesar memberikan corak yang dominan terhadap karakteristik kebudayaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang semakin terpengaruh oleh budaya modern, budaya lokal harus tetap dipelihara dan dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan

termasuk dalam pembangunan karakteristik kewilayahan. Selama periode 2011-2015, penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun dan sarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai baru 1 unit. Oleh karena itu, penyelenggaraan festival seni dan budaya harus selalu diselenggarakan.

Dalam hal pemeliharaan benda, situs, cagar budaya, selama periode 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum melakukan pemeliharaan benda, situs, cagar budaya tersebut secara optimal. Sampai saat ini, tercatat terdapat 8 benda, situs, cagar budaya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam bidang olahraga, selama periode tahun 2011-2015 Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai telah membangun sebanyak 4 gedung olahraga dengan 7 klub olahraga yang dibina. Prestasi di bidang olahraga selama periode 5 tersebut belum menunjukkan keberhasilan yang membanggakan. Prestasi yang diraih hanya pada beberapa cabang olahraga seperti tinju, angkat besi dan karate.

#### **4.1.2. Aspek Pelayanan Umum**

##### **4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib**

##### **A. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan utama urusan pendidikan adalah :

- a. Pencapaian rata-rata lama sekolah perlu terus ditingkatkan,
- b. Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas perlu terus ditingkatkan,
- c. Peningkatan aksesibilitas sarana pendidikan,
- d. Peningkatan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang TK/PAUD/Sederajat,
- e. Pemerataan persebaran dan distribusi guru,
- f. Prasarana dan sarana pendidikan di beberapa tempat perlu ditingkatkan agar lebih memadai,





- g. Adanya penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang bersekolah ke luar Kabupaten Serdang Bedagai,
- h. Besarnya kebutuhan dana dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,
- i. Meningkatkan angka melanjutan ke jenjang perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri,
- j. Menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,
- k. Meningkatkan minat masyarakat untuk pendidikan vokasi/kecakapan hidup

## **2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan utama urusan Kesehatan adalah :

- a. Angka harapan hidup sebagai salah satu variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia perlu terus ditingkatkan,
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
- c. Pemerataan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan,
- d. Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan di beberapa daerah,
- e. Menyediakan tenaga medis yang mempunyai keahlian khusus,
- f. Angka kematian bayi dan kematian ibu perlu terus ditekan,
- g. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit menular dan tidak menular,
- h. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan,
- i. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kesehatan,
- j. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
- k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS),
- l. Pemberian imunisasi secara lengkap kepada balita,
- m. Pemutasian paramedis (perawat dan bidan) yang lebih ketat,
- n. Penerimaan tenaga paramedis (perawat, perawat gigi) dirasa masih kurang.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. Tingkat kerusakan infrastruktur jalan kabupaten maupun jalan lingkungan harus diturunkan,
- b. Pemanfaatan jalan yang tidak sesuai kelas jalan (tonase yang berlebih),
- c. Pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan perencanaan kota untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah,
- d. Kualitas infrastruktur perdesaan harus ditingkatkan,
- e. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga & merawat infrastruktur yang telah dibangun,
- f. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum,
- g. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara sempadan sungai/tanggul,
- h. Tingkat kerusakan jaringan irigasi harus terus ditekan,
- i. Mengendalikan erosi yang terjadi di hulu sungai,
- j. Perlunya disediakan Areal Penampungan Air (*Catchman Area*),
- k. Alih fungsi lahan perlu dikendalikan,
- l. Penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal dan kegiatan lainnya harus ditata,
- m. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang memerlukan areal pengembangan lahan,
- n. Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau perlu ditingkatkan

### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh dan kawasan kumuh,
- b. Akses sanitasi dan air bersih harus ditingkatkan,
- c. Pengelolaan sistem air limbah dan drainase perlu dioptimalkan,
- d. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan utama urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. Perlunya meminimalisir gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akibat kriminalisme dan penyakit sosial,
- b. Perlunya menumbuhkembangkan budaya/kesadaran taat hukum di masyarakat,
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan utama urusan Sosial adalah :

- a. Peningkatan kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
- b. Perlunya meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,
- c. Partisipasi dan kepedulian stakeholder dalam penanganan PMKS perlu ditingkatkan,
- d. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana potensi kesejahteraan sosial,
- e. Kapasitas SDM kelembagaan potensi kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan,
- f. Pengendalian penyakit sosial agar tidak mengalami perkembangan yang signifikan,
- g. Angka kemiskinan daerah harus terus ditekan,
- h. Indeks Daya Beli Masyarakat perlu ditingkatkan,
- i. Pengendalian bencana sosial yang dikarenakan kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat,

## **B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan utama urusan Tenaga Kerja adalah :

- a. Tingkat pengangguran terbuka (7,18%) harus terus ditekan,
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja (63,05%) masih perlu ditingkatkan,
- c. Pentingnya meningkatkan kualitas SDM yang dianggap masih rendah bahwa lebih dari 50% pendidikan SD dan SMP,
- d. Perlunya meningkatkan produktivitas tenaga kerja,
- e. Perlunya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan,
- f. Upah Minimum Kabupaten (UKM) perlu disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),
- g. Laju pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja harus diseimbangkan.
- h. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perlu dioptimalkan,

### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- a. Minimnya SDM perempuan dan partisipasi perempuan di dalam politik/lembaga pemerintah,
- b. Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan perempuan dan anak,
- c. KDRT dan kekerasan pada anak harus terus ditekan,
- d. Lemahnya posisi perempuan di berbagai aspek bidang pembangunan,
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini.

### **3. Urusan Pangan**

Permasalahan utama urusan Pangan adalah :

- a. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat perlu terus ditingkatkan,
- b. Pengoptimalan pemanfaatan lumbung pangan di daerah,
- c. Perlu dikembangkannya hasil olahan pangan berbasis sumber daya lokal,
- d. Perlunya meningkatkan konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat,
- e. Pentingnya menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan,
- f. Perlunya menambah ketersediaan tenaga penyuluh,
- g. Tingkat konsumsi beras harus ditekan dan konsumsi protein hewani harus ditingkatkan

### **4. Urusan Pertanahan**

Permasalahan utama urusan Pertanahan adalah :

- a. Masih banyak tanah di Serdang Bedagai yang belum memiliki sertifikat kepemilikan

### **5. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama urusan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Fasilitas sarana dan prasarana persampahan harus ditingkatkan,
- b. Pemanfaatan TPA masih berupa *open dumping*,
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3 R (*reduce, reuse dan recycling*),
- d. Perlunya meningkatkan jangkauan pelayanan sampah yang masih menangani 7 (tujuh) kecamatan,
- e. Pengelolaan sistem air limbah dan drainase harus dioptimalkan,
- f. Penataan pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan masih perlu ditingkatkan,
- g. Pencemaran badan air oleh limbah industri dan limbah domestik harus ditekan,

- h. Pencemaran udara oleh emisi sumber tidak bergerak (cerobong asap industri) harus menjadi perhatian,
- i. Perlunya meningkatkan akses dan informasi tentang lingkungan hidup kepada masyarakat,
- j. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan harus diminimalisir.

#### **6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan,
- b. Pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain sehingga menghambat dalam pelayanan publik yang lain,
- c. Masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian

#### **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Perlunya mengoptimalkan fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan desa untuk menggerakkan partisipasi dan keswadayaan gotong royong dalam proses pembangunan,
- b. Pentingnya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- c. Perlunya mengoptimalkan pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa sehingga kualitas aparatur dapat berdaya saing dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan lembaga usaha di desa untuk peningkatan produk ekonomis petani, nelayan dan keluarga,

- e. Perlunya terus dikembangkan sistem informasi data yang baik menunjang percepatan pembangunan desa,
- f. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana di pedesaan,
- g. Fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa perlu terus ditingkatkan,
- h. Perlunya mempertegas dan memperjelas kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peraturan daerah atau peraturan bupati.

#### **8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Kurangnya pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap 8 fungsi keluarga,
- b. Pengendalian pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran yang tinggi dan pernikahan usia dini,
- c. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi perlu diperluas,
- d. Meningkatkan partisipasi pria dalam program KB,
- e. Kapasitas dan kompetensi kader dalam melaksanakan penyuluhan perlu terus ditingkatkan.

#### **9. Urusan Perhubungan**

Permasalahan utama urusan Perhubungan adalah:

- a. Transportasi antar wilayah dalam kabupaten masih perlu ditingkatkan (angkutan umum penghubung kecamatan dan desa belum memadai),
- b. Tingkat laka lantas harus ditekan,
- c. Perlunya mengoptimalkan pengelolaan ruang parkir,
- d. Mengurangi tingkat kemacetan di sepanjang jalan nasional

## **10. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan website Serdang Bedagai sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai kepada masyarakat belum optimal,
- b. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum secara optimal memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemberian informasi mengenai potensi dan produk unggulan daerah Serdang Bedagai kepada masyarakat luas

## **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan utama urusan Koperasi dan UKM adalah:

- a. Perlunya meningkatkan jumlah koperasi aktif dan kualitas kesehatan koperasi,
- b. Perlunya meningkatkan SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis,
- c. Perlu ditingkatkannya peranan koperasi dalam pengembangan potensi usaha masyarakat,
- d. Pentingnya membuka akses informasi dan penggunaan alat teknologi bagi koperasi,
- e. Pentingnya membuka akses permodalan bagi koperasi, pelaku UKM dan UMKM,
- f. Daya saing produk UKM sangat perlu untuk ditingkatkan,
- g. Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih perlu terus ditingkatkan,
- h. Menjamin ketersediaan pasar bagi produk-produk UKM,
- i. Perlunya menyediakan kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,
- j. Pentingnya ketersediaan data jumlah UMKM, dan informasi perkembangan usaha dari UKM yang valid,
- k. Perlunya meningkatkan daya saing untuk kemasan produk,
- l. Perlunya meningkatkan promosi untuk produk UMKM.



## **12. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan utama urusan Penanaman Modal adalah :

- a. Realisasi investasi PMA dan PMDN perlu terus ditingkatkan,
- b. Mengutamakan ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perijinan yang terintegrasi antar SKPD berbasis teknologi informasi,
- c. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah perlu ditingkatkan,
- d. Perlunya membuat regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA

## **13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah :

- a. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peran serta pemuda dalam pembangunan daerah,
- b. Pembinaan kelompok pemuda perlu terus ditingkatkan,
- c. Perlu dibentuknya *roadmap* arah pembangunan pemuda,
- d. Gedung olahraga yang tersedia perlu ditingkatkan standarnya sesuai standar nasional,
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga harus ditingkatkan,
- f. Peningkatan pembinaan atlet setiap cabang olahraga,
- g. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan dan olahraga.

## **14. Urusan Statistik**

Permasalahan utama urusan Statistik adalah :

- a. Perlunya penyusunan kesatuan data daerah sehingga informasi dan data yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan,
- b. Perlunya memperkaya elemen data pembangunan lain sehingga tidak hanya menjadikan BPS sebagai sumber data di daerah

**15. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan utama urusan Kebudayaan adalah :

- a. Perlunya mengoptimalkan kreativitas masyarakat terhadap kekayaan seni dan budaya,
- b. Perlunya menambah sarana dan prasarana dalam rangka pelestarian budaya,
- c. Pembinaan kelompok kesenian masyarakat harus ditingkatkan.

**16. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan utama urusan Perpustakaan adalah

- a. Manajemen dan pelayanan perpustakaan daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai harus dioptimalkan,
- b. Jumlah koleksi buku di perpustakaan baik Perpustakaan Umum, Khusus Sekolah dan perpustakaan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat harus lebih bervariasi, sesuai lokasi perpustakaan tersebut.
- c. Gedung Kantor Perpustakaan Kabupaten yang kecil dan sempit (belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan) membuat minimnya ruang baca untuk kenyamanan pengguna perpustakaan.
- d. Masih diperlukannya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), sehingga dapat melayani titik lokasi layanan yang diminta oleh masyarakat,
- e. Perpustakaan yang tersebar di seluruh kecamatan, desa/kelurahan se Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak sekali yang perlu dibina, sehingga untuk menjangkau ke lokasi yang dimaksud dibutuhkan adanya mobil operasional perpustakaan sebagai penunjang kelancaran pembinaan perpustakaan ke sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Rumah Ibadah, dan Taman Bacaan Masyarakat.

- f. Perlu peningkatan media informasi dan sosialisasi tentang perpustakaan, agar masyarakat lebih mengenal akan keberadaan perpustakaan,
- g. Masih memerlukan tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat lainnya,

### **17. Urusan Kearsipan**

Permasalahan utama urusan Kearsipan adalah :

- a. Perlu diadakannya Diklat untuk menunjang kualitas pustakawan, Arsiparis dan juga tenaga teknis perpustakaan/ Arsip agar menjadi lebih baik,
- b. Sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan harus ditingkatkan, khususnya gudang arsip yang belum ada.
- c. Pengelolaan kearsipan perlu lebih ditingkatkan,
- d. Sumber daya pengelola kearsipan perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Lokasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi jauh dari Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, mengakibatkan dibutuhkannya 1 (satu) unit Mobil Operasional Arsip ( Mobil Sadar Arsip) untuk menjemput Arsip-arsip SKPD (Arsip Daerah) yang akan diolah secara baku dan disimpan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- f. Pendataan Perpustakaan dan Arsip baku belum optimal, dikarenakan kekurangan SDM dan Anggaran.

### **4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil (<5GT) dan menggunakan alat penangkap ikan (API) yang sederhana,



- b. Perlunya mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan perikanan kelas D, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/TPI) dan meningkatkan sarana dan prasarana,
- c. Pentingnya meningkatkan kapasitas SDM nelayan dan kemiskinan di wilayah pesisir,
- d. Perlunya menekan biaya produksi yang disebabkan tingginya harga pakan ikan dan harga ikan yang fluktuatif,
- e. Tingkat pemanfaatan lahan harus terus ditingkatkan baik tambak maupun kolam air tawar,
- f. Perlunya meningkatkan ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul,
- g. Peningkatan SDM aparatur, sarana prasarana dan kesiapan dalam menanggulangi serangan hama dan penyakit ikan/udang,
- h. Perlunya peningkatan kapasitas SDM dan sebagian besar pelaku usaha perikanan budidaya berskala kecil/tradisional dan unbankable,
- i. Jumlah konsumsi ikan per kapita perlu terus ditingkatkan,
- j. Perlunya membuka akses permodalan bagi Usaha pengolahan berskala mikro dan kecil,
- k. Penanganan pemasaran hasil olahan perikanan,
- l. Perlunya mengoptimalkan pengawasan usaha perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran,
- m. Pengawasan penangkapan ikan secara illegal di perairan umum daerah (PUD) harus lebih diperketat.

## **2. Urusan Pariwisata**

Permasalahan utama urusan Pariwisata adalah:

- a. Perlunya meningkatkan kebersihan pantai pada objek wisata,
- b. Masih terdapat kawasan wisata merupakan kawasan hutan,
- c. Sadar wisata masyarakat harus ditingkatkan,
- d. Perlunya mengatasi abrasi pantai pada objek wisata,
- e. Perlunya membuat taman-taman pada objek wisata untuk meningkatkan keindahan,
- f. Meningkatkan transportasi massal ke daerah wisata,

- g. Sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata harus ditingkatkan.

### **3. Urusan Pertanian**

Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

- a. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil padi dan tanaman pangan lainnya,
- b. Fluktuasi harga dan Nilai Tukar Petani yang rendah,
- c. Harga jual yang belum seimbang dengan biaya produksi,
- d. Perlunya meningkatkan nilai tambah produk,
- e. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,
- f. Perlunya meningkatkan dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani ke sentra produksi,
- g. Belum terbangunnya infrastruktur pada daerah irigasi tadah hujan sehingga IP 2,0 tidak tercapai,
- h. Dampak fenomena iklim berakibat pada perkembangan OPT dan mempengaruhi motivasi petani untuk memilih komoditas yang akan dibudidayakan,
- i. Ketergantungan terhadap bantuan benih harus diminimalisir,
- j. Sebagian petani mengalami permasalahan biaya untuk budidaya tanaman akibat tingginya biaya produksi (harga benih, pupuk dan pestisida),
- k. Perlunya meningkatkan pengetahuan petani terhadap pemanfaatan teknologi pertanian,
- l. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.

### **4. Urusan Kehutanan**

Permasalahan utama urusan Kehutanan adalah:

- a. Terdapatnya penguasaan lahan di dalam kawasan hutan oleh masyarakat,
- b. Perlunya mengantisipasi abrasi pantai dengan mengadakan pemecah ombak ataupun pohon penahan,
- c. Belum adanya tata batas kawasan hutan,
- d. Menekan terjadinya okupasi dan perambahan hutan,

- e. Alih kewenangan pengelolaan kawasan hutan dari kabupaten ke pemerintah provinsi.

## **5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan utama urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

- a. Tata kelola perizinan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan perlu dikoordinasikan dengan baik,
- b. Perlunya meningkatkan ketersediaan energi listrik.

## **6. Urusan Perdagangan**

Permasalahan utama urusan Perdagangan adalah:

- a. Upaya mengatasi fluktuasi harga dari berbagai komoditas,
- b. Pengelolaan pasar harus profesional,
- c. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional,
- d. Perlunya peningkatan perlindungan terhadap konsumen yang ditandai dengan tidak adanya produk yang tidak aman di pasaran,
- e. Standarisasi produk barang dan jasa dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan peningkatan daya saing,
- f. Pentingnya mewujudkan pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan,
- g. Pengendalian pertumbuhan pasar modern (minimarket) yang dapat mengancam pasar tradisional.

## **7. Urusan Perindustrian**

Permasalahan utama urusan Perindustrian adalah:

- a. Produktivitas dan kualitas produk industri pengolahan perlu terus ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi karena harus memenuhi standar mutu, kemasan dan ramah lingkungan dalam menghadapi MEA,
- b. Perlunya mengembangkan industri pangan berbahan pangan lokal,
- c. Perlunya membentuk kluster industri,

- d. Pemanfaatan bahan baku lokal masih perlu ditingkatkan,
- e. Pentingnya meningkatkan kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif,
- f. Penguasaan teknologi pada IKM perlu dioptimalkan,
- g. Perlunya mengoptimalkan pertumbuhan jumlah usaha,
- h. Ketergantungan bahan baku impor harus dikendalikan.

#### **4.1.2.3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:**

- 1. Permasalahan utama unsur Pemerintahan Umum adalah:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu terus diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,
  - b. Mengupayakan terpenuhinya standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik,
  - c. Indeks Kepuasan Masyarakat harus terus ditingkatkan,
  - d. Postur birokrasi pemerintah daerah perlu diperbaiki sehingga mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif
  - e. Penerapan prinsip *good governance* oleh lembaga pemerintah harus dioptimalkan,
  - f. Perlunya menyediakan regulasi terkait sistem inovasi daerah,
  - g. Menyegerakan tersedianya regulasi terkait pelimpahan kewenangan antara pemerintah daerah terhadap pemerintahan kecamatan,
  - h. Perlu mengadakan *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah,
  - i. Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan perlu dimanfaatkan secara optimal.
  - j. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPD menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data

dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

- k. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.
  - l. Kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan daya saing harus lebih dioptimalkan,
  - m. Kerjasama antara SKPD masih perlu dioptimalkan.
  - n. Kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat lebih akuntabel.
2. Permasalahan utama unsur Aparatur dan Kepegawaian adalah:
    - a. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN),
    - b. Mengidealkan komposisi ASN,
    - c. Perlunya meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam memahami tugas dan fungsinya,
    - d. Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi,
    - e. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara),
  3. Permasalahan utama unsur Keuangan Daerah adalah:
    - a. Pendataan data dasar (*based data*) obyek dan subyek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dioptimalkan, termasuk penertiban daftar pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
    - b. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat,





- c. Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan daerah,
- d. Publikasi informasi perencanaan dan keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. harus dilakukan oleh semua SKPD sebagai bentuk akuntabilitas sosial (psl 394, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
- e. Ketertiban administrasi asset daerah perlu ditingkatkan

3. Permasalahan utama unsur Keuangan Daerah adalah:

- f. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan
4. Permasalahan utama unsur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah perlu terus dioptimalkan,
  - b. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran masih rendah karena berada pada SKPD yang berbeda,
  - c. Kualitas dan kuantitas data masih harus terus ditingkatkan agar dapat memproyeksikan arah pembangunan dengan lebih baik,
  - d. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya menjadi bahan kebijakan dan sebagai bahan tindaklanjut,
  - e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih perlu ditingkatkan,
  - f. Koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan harus terus ditingkatkan
5. Permasalahan utama unsur Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
- a. Perlu adanya upaya pencegahan terjadinya bencana dalam penanggulangan bencana daerah
  - b. Perlunya peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana daerah

#### **4.1.3. Aspek Daya Saing**

Permasalahan yang dihadapi terkait aspek daya saing daerah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. Pengeluaran masyarakat masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi
- b. Masih ditemui adanya disparitas antar bagian wilayah
- c. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur masih perlu ditingkatkan
- d. Aksesibilitas antar kecamatan dan antar desa serta menuju pusat-pusat pertumbuhan masih perlu ditingkatkan
- e. Ketersediaan air bersih dan air minum perlu menjadi perhatian pemerintah

#### **4.1.4. Iklim Berinvestasi**

Permasalahan yang dihadapi terkait iklim berinvestasi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. Perlunya pengoptimalan kemudahan dalam proses perijinan diantaranya dengan menerapkan perijinan online
- b. Perlunya menjaga terus kestabilan dan ketentraman masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan iklim berinvestasi di suatu daerah

#### **4.1.5. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan yang dihadapi terkait sumberdaya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. Perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Serdang Bedagai melalui penambahan jumlah penduduk yang memiliki pendidikan minimal SI atau sederajat
- b. Walaupun rasio ketergantungan penduduk Serdang Bedagai semakin hari semakin menurun, perlu menjaga kondisi yang seimbang

#### **4.2. Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025, isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang yang dimuat dalam beberapa dokumen daerah seperti RTRW, KLHS, Kabupaten Dalam Angka, dll, sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya dan permasalahan pembangunan yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.

Selain itu, isu-isu strategis juga memperhatikan isu strategis dari dinamika dunia internasional dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan regional serta daerah lainnya di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai yang mempengaruhi Kabupaten Serdang Bedagai. Analisis isu-isu strategis ini dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

##### **4.2.1. Telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional, Regional dan Agenda Pembangunan Internasional**

##### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah: (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (2) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (4) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel; (5) alih kewenangan

dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi kewenangan urusan pendidikan bidang pendidikan menengah/kejuruan, urusan kehutanan dan urusan kelautan.

## **2. Peraturan Presiden/Menteri**

Tantangan ke depan dalam pembangunan adalah untuk mengakomodir beberapa peraturan Pemerintah Pusat, diantaranya adalah:

- a. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan keluarga, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara.
- b. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.
- c. Permen PU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan sistem irigasi partisipatif.

## **3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019**

Buku Pertama RPJMN 2015-2019 memuat agenda prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Sembilan Agenda Prioritas atau disebut juga dengan NAWA CITA, yaitu:

1. *Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara*

Dengan 10 sub agenda sebagai berikut: (i) Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif; (ii) Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional; (iii) Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim; (iv) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; (v) Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; (vi) Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama

Global dan Regional; (vii) Meminimalisasi Dampak Globalisasi; (viii) Membangun Industri Pertahanan Nasional; (ix) Membangun Polri yang Professional; dan (x) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.

2. *Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*

Dengan 5 sub agenda sebagai berikut: (i) Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 75, tingkat partisipasi politik sebesar 77,5 persen dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019; (ii) Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan sebesar 30 persen; (iii) Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; (iv) Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan (v) Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

3. *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*

Membangun dari pinggiran merupakan afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah yaitu kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Sedangkan penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah ditunjukkan dengan capaian rata-rata kinerja maksimal daerah otonomi baru sebesar 70 persen dan rata-rata kinerja minimal sebesar 48 persen di tahun 2019. Capaian penerapan SPM di daerah sebesar 90 persen, tingkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kondisi mantap mencapai 55 persen dan tingkat pendidikan

aparatur pemda S1, S2 dan S3 menjadi 50 persen di tahun 2019. Dengan rata-rata belanja pegawai kab/kota turun menjadi hanya sebesar 35 persen, rata-rata belanja modal kab/kota naik menjadi sebesar 30 persen dan rata-rata pajak retribusi kab/kota terhadap total pendapatan meningkat menjadi 11 persen di tahun 2019. Selain itu, peningkatan keterkaitan kota-desa diwujudkan dengan 39 pusat pertumbuhan baru diantaranya 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

4. *Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*

Dengan 6 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (ii) Mencegah dan Memberantas Korupsi; (iii) Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (iv) Memberantas Narkoba dan Psikotropika; (v) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan (vi) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

5. *Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia*

Dengan 5 sub agenda prioritas: (i) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator angka kelahiran sebesar 2,3 persen dan angka prevalensi kontrasepsi semua cara sebesar 66 persen perempuan usia 15-49 tahun di tahun 2019; (ii) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun dengan Angka Partisipasi PAUD sebesar 77,2 persen, APM dan APK SD/MI masing-masing sebesar 94,8 persen dan 114,1 persen, APM dan APK SMP/MTs masing-masing sebesar 82 persen dan 106,9 persen dan APM dan APK SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 67,5 persen dan 91,6 persen serta APK PT sebesar 36,7 persen di tahun

2019; (iii) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat diantaranya dengan target capaian indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 306, indikator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 24 dan indikator prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 17 di tahun 2019; (iv) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja; dan (v) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan dengan memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah kedalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera.

6. *Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya*

Dengan 11 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan diantaranya dengan meningkatkan kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen dan jalan kab/kota menjadi 65 persen sampai tahun 2019. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; (ii) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; (iii) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah; (iv) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (v) Memperkuat Peran Investasi;

(vi) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (vii) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi diantaranya dengan terbangunnya 100 *Techno Park* di kab/kota dan *Science Park* di setiap provinsi; (viii) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; akselerasi pertumbuhan pariwisata; akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; (ix) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (x) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (xi) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.

7. *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik*

Dengan 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan diantaranya dengan tersedianya sarana dan prasarana irigasi berupa terbangunnya jaringan irigasi 1 juta hektar, rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi dan beroperasinya serta terpeliharanya 7,3 juta ha jaringan irigasi; (ii) Peningkatan Ketahanan Air diantaranya dengan meningkatnya kapasitas air baku nasional menjadi sebesar 118,60 m<sup>3</sup>/dtk, peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan baku mutu rata-rata air sungai kelas II dan pengamanan pantai berwawasan lingkungan sepanjang 942,8 km sampai tahun 2019; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diantaranya dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan diantaranya dengan peningkatan produksi kelautan dan perikanan menjadi sebesar 40-50 juta ton pada tahun 2019; (vi) Penguatan



Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

8. *Melakukan revolusi karakter bangsa*

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan yakni pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

9. *Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*

Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman.

#### **4. Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sampai tahun 2015 telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam



bidang bersangkutan, dengan rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan.
2. Bidang Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.
4. Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bidang Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
8. Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

- 
- 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar.
9. Bidang Pekerjaan Umum, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum.
  10. Bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.
  11. Bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/T.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  12. Bidang Komunikasi dan Informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi.
  13. Bidang Kesenian, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.
  14. Bidang Penanaman modal, berdasarkan Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011.
  15. Bidang Perhubungan khusus angkutan masal berbasis jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012.

## **5. Peluang Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara**

*Trickle Down Effect* dari pembangunan jalan bebas hambatan Medan - Tebing Tinggi - Dumai, pembangunan Kaldera Toba Geo Park, Peningkatan Jalur Ganda rel Kereta Api Medan-Kota Pinang, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun yang ditetapkan sebagai industri pengolahan Kelapa Sawit, industri pengolahan

karet, pupuk dan aneka industri, logistik, dan Pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035, ditetapkannya wilayah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dengan industri prioritas nasional Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri Hulu Agro, Industri Pangan, dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Industri. Implikasi tantangannya: (1) harus mengembangkan industri kreatif, sektor jasa dan perdagangan; (2) harus menciptakan iklim yang kondusif dan ramah investasi; (3) mengembangkan kecakapan daerah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melingkupi aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan Iptek; aspek infrastruktur; budaya inovasi; dan pengembangan kluster industri secara komprehensif dan kolaboratif; Dalam rencana struktur ruang RTRW nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal.

Kebijakan pengurangan subsidi dan mengikuti perkembangan pasar dunia terhadap harga energi BBM dan tarif Dasar listrik dari pemerintah pusat berdampak pada resiko inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin, penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Efisiensi belanja rutin dan penentuan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2016-2021.

Kebijakan moratorium PNS menantang pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah Kabupaten untuk menciptakan dan mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

RPJMN 2015-2019 menantang: (1) menjalankan reformasi birokrasi publik; (2) membuka partisipasi publik; (3) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup. RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, secara umum menantang pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membuat perencanaan pembangunan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **6. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Peluang dan Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2016 adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempersiapkan mental dan ketrampilan hidup penduduk Kabupaten Serdang Bedagai menghadapi MEA; yaitu: (a) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (b) meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing produk barang/jasa; (c) Memperkuat sektor UKM/IKM; dan (d) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia/usia produktif masyarakat Serdang Bedagai

## **7. Agenda Post 2015**

Kesepakatan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* menantang pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyusun perencanaan daerah tahun 2016-2021 memprioritaskan: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, masalah gender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi; (iii) pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada

pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*)

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. Sehubungan dengan itu, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah perlu menjadikan target penurunan emisi dan adaptasi GRK sebagai indikator kinerja.

#### **4.2.2. Telaahan Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya**

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

**1. Kabupaten Deli Serdang**

- a. Harmonisasi program pada RPJMD antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai perlu dilakukan diantaranya terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Kehutanan, Urusan Pertanian, Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan dan Urusan ESDM
- b. Kebijakan pembangunan di wilayah DAS Ular yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa pembangunan DAM, PLTMH, dll perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai karena DAS tersebut merupakan batas antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Sungai Ular

**2. Kabupaten Batubara**

- a. Isu permasalahan antara Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai adalah penentuan tapal batas perbatasan yang belum selesai
- b. Harmonisasi program pada RPJMD antara Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan
- c. Pemerintah Kabupaten Serdang perlu juga memperhatikan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara dalam dokumen Kajian Kemiskinan Kabupaten Batubara

**3. Kabupaten Simalungun**

- a. Harmonisasi program pada RPJMD antara Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Kehutanan, Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan dan Urusan ESDM
- b. Menurut RTRW Kabupaten Simalungun, pemanfaatan hulu DAS Bedagai yang berada di Kabupaten Simalungun

adalah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tentu akan berdampak terhadap debit air yang akan mengalir sampai ke hilir di Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu, di bagian tengah dan hilir DAS Bedagai yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi

- c. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu memperhatikan dampak pengembangan kawasan industri Sei Mangke yang berada di Kabupaten Simalungun.

#### **4. Kota Tebing Tinggi**

- a. Harmonisasi program pada RPJMD antara Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya terkait dengan Urusan Perdagangan, Pekerjaan Umum, Urusan Kesehatan, dan Urusan Pendidikan
- b. Kebijakan pembangunan di wilayah DAS Padang yang telah dirancang oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu wilayah yang dilintasi oleh DAS Padang perlu juga diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya dalam upaya penanggulangan masalah banjir dan pemanfaatan potensi DAS tersebut

#### **4.2.3. Lingkungan Strategis Kabupaten Serdang Bedagai**

##### **1. Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota**

Menurut RTRW Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033 Kawasan Kabupaten Serdang Bedagai yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah kawasan Pulau Berhala yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan keamanan negara. Pengembangan kawasan Pulau Berhala diarahkan sebagai kawasan lindung yang berperan untuk konservasi penyu, terumbu karang, dan jenis burung migran. Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi pusat Kota Sei Rampah dan Kota Perbaungan, Kawasan pelabuhan Tanjung Beringin yang merupakan kawasan ekspor-impor dan



pelayaran, kawasan industri terpadu yang mengoptimalkan prioritas pengembangan kawasan guna mendukung Kegiatan di sektor industri, perdagangan, dan jasa secara terpadu di Kecamatan Tanjung Beringin.

Kawasan minapolitan Serdang Bedagai, yang mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang berbasis pada pemanfaatan potensi wilayah pesisir, perikanan dan kelautan di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar, dan kawasan cepat tumbuh akses pintu Tol Medan-Tebing-Dumai, yang memanfaatkan peluang posisi strategis akses pintu Tol Medan-Tebing-Dumai sebagai potensi kawasan cepat tumbuh, di Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Sei Bamban dan Tebing Syahbandar.

Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya, yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi : kawasan Pendidikan bertaraf Internasional yaitu Kawasan Pendidikan Serdang Bedagai, yang merupakan Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, pada lahan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan, kawasan Pusat Pemerintahan Serdang Bedagai, yang merupakan Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya dengan memanfaatkan lahan untuk kawasan Pusat Pemerintahan dan pusat perkantoran dan menjadi peluang dalam optimalisasi fungsi kota Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi lahan perkebunan swasta PT. PP. London Sumatera Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah seluas 35 Ha dan PTPN-III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu seluas 100 Ha.

Kawasan Strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi : kawasan wisata pantai, yang mengoptimalkan potensi sumberdaya alam di kawasan pantai untuk pengembangan wisata alam, di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, dan Teluk Mengkudu. Sekolah perikanan, merupakan prioritas pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi, di Kecamatan Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu. Pembangkit listrik tenaga sekam padi diarahkan pada Kecamatan Sei Bamban, Serba jadi dan Tebing Tinggi. Pembangkit

listrik Tenaga Air/Mikrohidro diarahkan di Kecamatan Silinda, Kotarih, Sipispis dan Bintang Bayu.

Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi : konservasi penyu dan terumbu karang, yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan Sumber daya alam yang melindungi ekosistem laut, di Pulau Berhala Kecamatan Tanjung Beringin. Kawasan pesisir, yang merupakan kawasan yang terkena abrasi laut, meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah. Tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional, yang merupakan perwujudan kebersihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada lahan PTPN III Kebun Sarang Giting di Kecamatan Serbajadi seluas 20 hektar. Kerjasama Regional antara Kabupaten Serdang Bedagai – Tebing Tinggi tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

## **2. Kondisi Demografi**

Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kabupaten dengan laju pertumbuhan yang rendah di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 606.367 jiwa dengan pertumbuhan 0,41% dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, 311 jiwa/km<sup>2</sup>. Tantangan bagi Kabupaten Serdang Bedagai adalah bagaimana memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dan bagaimana memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif yang besar dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif masih rendah (65,47%) dan besarnya jumlah angkatan kerja (272.992 jiwa) guna meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi MEA.

#### **4.2.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan potensi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memerlukan areal pengembangan lahan disertai kebijakan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah untuk pusat pertumbuhan, pusat pemerintahan, pusat-pusat pemukiman, sarana dan prasarana umum,
- b. Keberadaan Bandara Kuala Namu dan Program Tol Laut mendorong percepatan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi seperti jalan akses bandara, jalan tol, dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan,
- c. Dalam menjamin pemerataan pembangunan diupayakan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang nyaman, berkualitas dan merata,
- d. Posisi strategis wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan pantai mempunyai nilai strategis lahan untuk pemanfaatan perkebunan, peternakan dan perikanan diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung produktivitas sektor pertanian,
- e. Potensi andalan wilayah pesisir dikembangkan untuk daerah wisata pantai yang maju,
- f. Potensi sumber daya alam, air, dan tanah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi listrik dan pengusahaan bahan mineral batuan dan non batuan,
- g. Potensi sumber daya alam diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan hasil bumi dan hasil laut, dan juga dalam rangka mendorong percepatan terciptanya kawasan ekonomi khusus. Disamping itu untuk mengembangkan sektor perindustrian diiringi dengan perkuatan struktur

- industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industry intermediate (pertengahan), dan industri hilir,
- h. Adanya penetapan kawasan lindung dan budidaya yang terbaru berdasarkan SK Menhut No. 579 tahun 2014 menggantikan SK Menhut 44 memberikan peluang terbaru untuk pengembangan kawasan budidaya dan pengelolaan kawasan lindung,
  - i. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dengan strategi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan,
  - j. Potensi sumber daya air terutama DAS Sungai Ular menjadi andalan sebagai sumber air utama untuk perikanan dan irigasi menjadikan Kabupaten Sergai Serdang Bedagai sebagai lumbung padi nasional,
  - k. Peningkatan jumlah penduduk akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan air bersih yang berkualitas dan terjamin konstitutasinya,
  - l. Peningkatan jumlah penduduk juga akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan pangan sehingga diperulkan sumber air yang berkualitas dan kontinu untuk menjamin peningkatan produksi pangan,
  - m. Pertumbuhan penduduk dan persaingan di dunia usaha menuntut ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas.

#### **4.2.5. Penetapan Isu Strategis**

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai *error*

tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi 13 (tiga belas) isu strategis Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Pertanian dan Ketahanan pangan
2. Infrastruktur
3. Pariwisata, seni dan budaya
4. Pelayanan Dasar
5. Daya Saing Daerah
6. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Reformasi Birokrasi
7. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan masalah sosial
8. Energi terbarukan
9. Lingkungan Hidup
10. Penataan Ruang dan pengembangan wilayah
11. Generasi muda dan olahraga
12. Agromarinepolitan-Minapolitan
13. Pembangunan dari desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

## BAB V

### PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016-2021 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 adalah :

***“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI  
KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”***

Penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Menjadikan</b>	yaitu upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan
<b>Kabupaten Serdang Bedagai</b>	yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
<b>Unggul</b>	yaitu kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien, bekerja keras, rajin, mampu, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya saing daerah sehingga menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya.
<b>Inovatif</b>	yaitu memanfaatkan setiap peluang guna mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hal-hal terbaru dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dapat meningkatkan daya

saing produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Berkelanjutan** yaitu mendorong produktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat marginal.

## 5.2. Misi

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

**Misi Pertama**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

**Misi Kedua**, meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.

**Misi Ketiga**, mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

**Misi Keempat**, memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.

**Misi Kelima**, mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan



rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dalam mencapai visi adalah sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.1** berikut ini.



**Tabel 5.1****Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran****VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target Kinerja						Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat												
1	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat			IPM	68,01	68,23	68,69	69,14	69,59	70,05	70,5	70,5
		1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	99,85	99,87	99,89	99,91	99,93	100	100	100
				Persentase siswa yang lulus di PTN (%)	2,86	3	4,5	6	7,5	9	10	10
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,08	9	9,5	10	10,5	11	12	12
				Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,31	12,4	12,5	12,6	12,7	12,9	13	13
		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	127/100.000	105 /100.000	100/100.000	95/100.000	90/100.000	85/100.000	80/100.000	80/100.000
				Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000	6/1.000	5,5/1.000	5/1.000	4,5/1.000	4/1.000	3,5/1.000	3,5/1.000
				Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,47	71,1	71,9	72	72,1	72,2	72,3	72,3
	2	Penyelenggaraan Good Governance dan Clean Government			Indeks Reformasi Birokrasi	56	58	60	62	65	68	70
		2.1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target Kinerja						Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai	C	CC	B	B	B	BB	BB	BB
		2.2	Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai LPPD	2,5018	2,570	2,623	2,793	2,953	3,050	3,210	3,210
				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	NA	2	2	3	3	3	3	3
		2.3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	75	77	79	81	83	85	85
3	Meningkatkan daya saing masyarakat yang didukung oleh kondisi perekonomian, sosial dan budaya yang kondusif			Pengeluaran per-Kapita	945.227	1.004.740	1.079.450	1.134.620	1.177.670	1.225.500	1.265.000	1.265.000
		3.1	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Pengeluaran per-Kapita	945.227	1.004.740	1.079.450	1.134.620	1.177.670	1.225.500	1.265.000	1.265.000
		3.2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3	Mewujudkan kawasan yang masih menjalankan tradisi lokal	Jumlah Kampung Budaya	NA	0	0	1	1	1	2	5
MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan												
1	Meningkatkan investasi			Nilai investasi skala nasional dan provinsi PMA/PMDN (Rupiah)	1,91 Triliun	0,04 Triliun	0,10 Triliun	0,50 Triliun	0,15 Triliun	0,15 Triliun	0,10 Triliun	3 Triliun
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan jumlah investor	Persentase pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)	NA	1 %	1,51%	1,53 %	1,56%	1,58 %	1,6%	1,6%
		1.2	Mempermudah proses perizinan	Rata-rata lama proses perizinan (hari)	7	5	5	3	3	3	2	2



No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan merata dari sisi produksi			Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,25	5,4	5,65	5,8	6	6,15	6,15
		2.1	PDRB sektor Pertanian	PDRB sektor Pertanian (%)	41,42	42,85	44,28	45,71	47,14	48,57	50	50
		2.2	PDRB sektor Industri	PDRB sektor Industri (%)	19,53	19,975	20,48	20,98	21,49	21,95	22,50	22,50
		2.3	PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan (%)	15,32	15,43	15,54	15,65	15,76	15,87	15,98	15,98
		2.4	PDRB sektor Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata (%)	0,0104	0,1120	0,3169	0,5109	0,7051	0,8449	1,0177	1,0177
MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan												
1	Mewujudkan masyarakat berjiwa wirausaha			Jumlah wirausaha baru (Orang)	250	250	250	250	500	500	1000	3000
		1.1	Meningkatnya minat masyarakat menjadi wirausaha	Jumlah wirausaha baru (Orang)	250	250	250	250	500	500	1000	3000
		1.2	Meningkatnya kesempatan kerja	Bertambahnya lapangan pekerjaan (Orang)	NA	500	500	1000	1000	1000	2000	6000
2	Mempercepat penanggulangan kemiskinan			Angka Kemiskinan (%)	8,98	8,9	8,7	8,0	7,0	6,0	5	5
		2.1	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase PMKS (%)	95,54	91.19	88	85.36	83.23	81.56	81.56	81.56
		2.2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga sejahtera dan KS I (%)	17,27	17,71	18,52	19,49	20,49	21,44	22,32	22,32



No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target Kinerja						Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing												
1	Mewujudkan sarana prasarana yang mantap (nyaman dan umur pakai panjang) dan merata											
		1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	Persentase panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik (%)	71,41	79,33	82,27	87,36	91,68	96,21	100	100
				Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	70	72	77	82	88	94	100	100
		1.2	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah) (%)	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,5
				Persentase rumah layak huni (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun) (%)	87	90,13	90,15 (25 Unit)	90,32 (250 Unit)	90,49 (250 Unit)	90,74 (350 Unit)	90,99 (350 Unit)	90,99 (1225 Unit)
2	Meningkatkan cakupan penyediaan energi listrik			Rasio Elektrifikasi (%)	99	99	99	99,5	99,5	99,7	100	100
		2.1	Meningkatnya penggunaan energi terbarukan	Jumlah kawasan/unit usaha yang menggunakan energi terbarukan	NA	0	0	1	1	1	1	4
		2.2	Menurunnya lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	Jumlah lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	5	5	5	4	3	2	1	1
MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan												



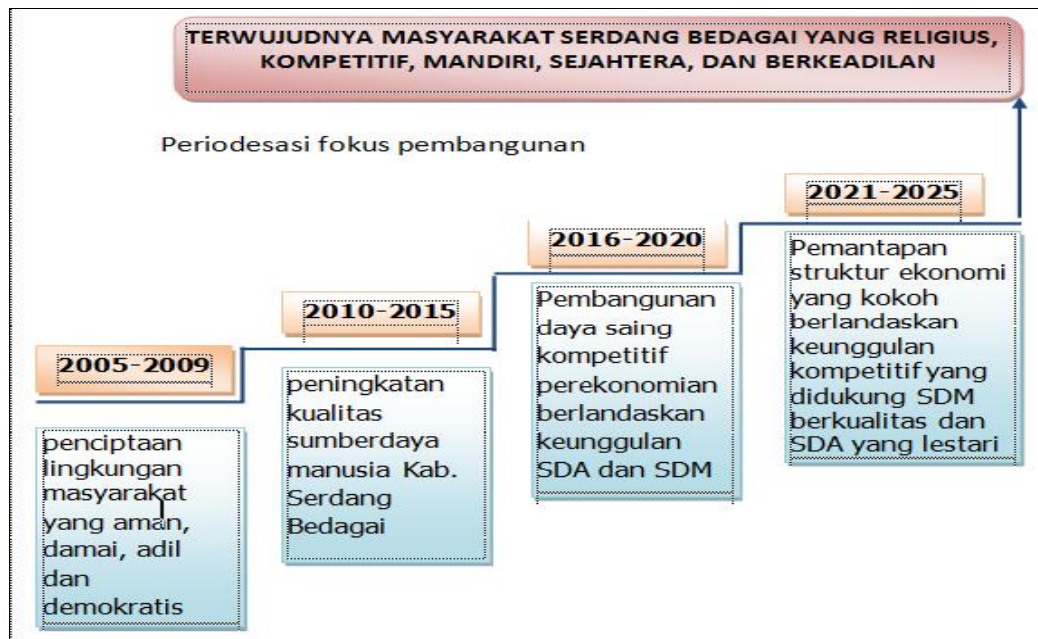
No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan			Persentase Desa Mandiri (%)	2	3	4	5	7	10	15	15
		1.1	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat	Persentase Desa Mandiri (%)	2	3	4	5	7	10	15	15
		1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat membayar pajak (%)	57,48	62,08	67,04	72,4	78,20	84,46	91,21	91,21
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40,35	42	45	55	58	64	70	70
		2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40,35	42	45	55	58	64	70	70
		2.2	Meningkatnya luasan RTH	Persentase kecamatan yang memiliki RTH (Jumlah RTH yang dibangun) (%)	0	0	30 (5 Kec.)	50 (4 Kec.)	70 (4 Kec.)	90 (4 Kec.)	100	100 (17 Kec.)

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 6.1. Arah Pembangunan RPJM Daerah 2016-2021

Dalam RPJP Daerah (2005-2025) tahapan periodisasi dibagi menjadi 4 (empat) tahapan RPJMD, periodisasi RPJP Kabupaten Serdang Bedagai digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 6.1**  
**Periodisasi Fokus Pembangunan sesuai RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025**

*Sumber: RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025, Bappeda Kab. Serdang Bedagai (data diolah)*

Dari **Gambar 6.1** di atas dapat dilihat bahwa saat ini Kabupaten Serdang Bedagai sedang berada pada tahapan RPJM-D ke-3 (2016-2020) yaitu Pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM. Tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Kabupaten Serdang Bedagai yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

- b. Menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- c. Perbaikan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
- d. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang memadai (baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga, tersedia pasokan air, baik air bersih maupun air irigasi
- e. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik.
- f. Kelangkaan energi diharapkan sudah dapat teratasi secara baik, sumber-sumber energi yang tersedia di daerah Kabupaten Serdang Bedagai baik tenaga air termasuk *microhydro plant*, tenaga angin, maupun tenaga surya perlu dimanfaatkan secara maksimal.

## **6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik,



transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun periode RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dapat digambarkan dalam

**Tabel 6.1 berikut :**





**Tabel 6.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat							
1	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan	1	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	1	Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar)
						2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
						3	Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional
						4	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2	Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
						2	Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran
						3	Peningkatan kepekaan terhadap warisan budaya daerah
						4	Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional
				3	Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	1	Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah dan daerah	1	Fasilitasi sarana prasarana perpustakaan
				1	Mewujudkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata, dan terjangkau	1	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Primer
						2	Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
						3	Meningkatkan Kualitas Akses Pelayanan Rumah Sakit
				2	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih	1	Meningkatkan cakupan masyarakat pengguna air bersih
				3	Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat	1	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
				4	Mengendalikan jumlah penduduk	1	Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Penyelenggaraan Good Governance dan Clean Government	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Mewujudkan opini BPK WTP
				2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah daerah
		2	Birokrasi yang efektif dan efisien	1	Menerapkan Sistem pengawasan Internal	1	Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
						2	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur
						3	Penerapan SPIP di SKPD
		3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik
				2	Desentralisasi urusan pemerintahan daerah	1	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan terkait pelayanan publik
						2	Membangun kerjasama antar pemerintah daerah terkait pelayanan publik
						3	Penerapan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan pelayanan publik	1	Peningkatan penggunaan aplikasi IT dalam penyelenggaraan e-government
3	Meningkatkan daya saing masyarakat yang didukung oleh kondisi perekonomian, sosial dan budaya yang kondusif	1	Meningkatnya konsumsi masyarakat	1	Menjaga kestabilan harga	1	Optimalisasi peran TPID
			2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1	Pembinaan keagamaan	1
		3	Mewujudkan kawasan yang masih menjalankan tradisi lokal	1	Mendorong pembentukan kampung budaya	1	Fasilitasi pembentukan kampung budaya lokal
				2	Melindungi budaya lokal	1	Pelestarian seni dan budaya serta benda-benda bersejarah
MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan							
1	Meningkatkan investasi	1	Meningkatnya pertumbuhan jumlah investor	1	Memperluas akses permodalan	1	Fasilitasi Modal bagi UMKM



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2	Mengikuti berbagai event promosi yang potensial menadatkan investasi	1	Penetapan target investasi pada setiap event promosi yang diikuti
		2	Mempermudah proses perizinan	1	Pelayanan perizinan satu atap	1	Memperpendek proses perizinan
2	Meningkatkan perumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan merata dari sisi produksi	1	PDRB sektor Pertanian	1	Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha tani	1	Meningkatkan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
						2	Meningkatkan pengetahuan SDM pertanian tentang teknologi budidaya sektor pertanian
						3	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
						4	Penguatan dan fasilitasi akses permodalan petani
						5	Mengendalikan alih fungsi lahan dan menggalakkan Gerakan Sawah Mandiri



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
				2	Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor perikanan	1	Meningkatkan pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan konsep minapolitan
						2	Meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan
	2	PDRB sektor Industri		1	Meningkatkan jumlah industri pengolahan kecil dan menengah serta industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal	1	Fasilitasi dunia usaha dalam pemanfaatan dan pemasaran komoditi lokal
				2	Mengembangkan sentra industri kreatif	1	Membangun sentra industri kreatif berbasis produk unggulan lokal
	3	PDRB sektor perdagangan		1	Memberikan akses teknologi, pemasaran dan permodalan	1	Fasilitasi dan intermediasi akses teknologi, pemasaran dan permodalan bagi para pelaku usaha



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2	Meningkatkan kualitas pasar	1	Pembangunan/rehabilitasi pasar menjadi pasar sehat
		4	PDRB sektor Pariwisata	1	Pemasaran pariwisata dan peningkatan kemitraan pariwisata	1	Meningkatkan penyelenggaraan event kreatif
				2	Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata	1	Pengembangan Destinasi Pariwisata

***MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan***

1	Mewujudkan masyarakat berjiwa wirausaha	1	Meningkatnya minat masyarakat menjadi wirausaha	1	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap pengembangan produk-produk unggulan daerah	1	Membangun kemampuan SDM yang berjiwa wirausaha
		2	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja
						2	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja





**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Mempercepat penanggulangan kemiskinan	1	Meningkatnya penanggulangan PMKS	1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PMKS	1	Memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin
						2	Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
		2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	1	Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	1	Pemberdayaan keluarga

***MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing***

1	Mewujudkan sarana prasarana yang mantap (nyaman dan umur pakai panjang) dan merata	1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	1	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	1	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
				2	Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	1	Peningkatan konservasi sumber daya air
						2	Peningkatan pengendalian daya rusak air
						3	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi



**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	1	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih
						2	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik
						3	Peningkatan cakupan layanan persampahan
						4	Pengembangan lingkungan permukiman sehat
2	Meningkatkan cakupan penyediaan energi listrik	1	Menurunnya lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	1	Fasilitasi penyediaan sarana pendukung	1	Kerjasama dengan berbagai pihak
		2	Meningkatnya penggunaan energi terbarukan	1	Mengembangkan sumber energi baru terbarukan	1	Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya air
				2	Mendorong masyarakat menemukan penggunaan energi terbarukan melalui Teknologi Tepat Guna	1	Pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna yang diarahkan pada pengembangan dan penggunaan energi terbarukan



VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan							
1	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	1	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat	1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui lembaga masyarakat desa
				2	Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan desa	1	Mendorong pemberdayaan aparatur pemerintahan desa
				3	Meningkatkan kemandirian masyarakat	1	Menumbuhkan semangat gotongroyong
		2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	1	Mempermudah prosedur pembayaran pajak	1	Penerapan aplikasi IT dan kerjasama dengan lembaga keuangan
						2	Sosialisasi kepada masyarakat
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				2	Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten	1	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang



---

---

**VISI : MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF  
DAN BERKELANJUTAN**

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
		2	Meningkatnya luasan RTH	1	Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	1	Peningkatan RTH

### **6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2016-2021**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka arah kebijakan harus berjalan secara berkesinambungan dimulai dari tahun perencanaan (tahun 2016) dengan memperhatikan capaian sampai periode pembangunan 5 (lima) tahun. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun perencanaan (tahun 2016)**

Arah kebijakan pembangunan pada tahun perencanaan difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: jalan, jembatan, drainase, irigasi dan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Kapasitas desa perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan juga tetap dilakukan guna menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **2. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun pertama (tahun 2017)**

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mengimplementasikan RPJMD

Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021, sehingga perlu dicermati sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun program prioritas tahun 2017 adalah 1) Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas insfrastruktur yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya, 2) Penguatan Pemerintahan Kecamatan dalam rangka menopang pembangunan pedesaan, 3) Peningkatan pendapatan daerah berbasis industri mikro, kecil menengah dan pariwisata, 4) Peningkatan ketahanan pangan dan energi yang berkeadilan dalam rangka mendukung pemanfaatan sumberdaya alam dan penanggulangan bencana, 5) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, 6) Peningkatan kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, 7) Peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang dalam rangka mendukung peningkatan investasi daerah.

### **3. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun kedua (tahun 2018)**

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat Serdang Bedagai dengan mengupayakan peningkatan investasi daerah melalui kemudahan proses perizinan. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan memberikan kemudahan akses permodalan dan teknologi guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam mendukung peningkatan perekonomian ini, kapasitas dan kualitas sumber daya masyarakat perlu ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Seiring dengan itu pengoptimalan pemanfaatan dana CSR dapat juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, guna mendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah, GERBANGSWARA masih dapat diandalkan.

#### **4. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun ketiga (tahun 2019)**

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, pembangunan tahun ketiga juga memiliki arah kebijakan yang difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerah baik dalam hal inovasi dan promosi. Peningkatan potensi sumber daya alam diantaranya potensi pariwisata. Pengoptimalan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan guna menunjang kontinuitas dan stabilitas perekonomian di Serdang Bedagai.

#### **5. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun keempat (tahun 2020)**

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang berdaya saing.

Di samping itu, pembangunan tahun keempat juga memiliki arah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan prestasi di berbagai bidang diantaranya pada bidang olahraga, seni dan budaya melalui fasilitasi pengembangan potensi diri. Penyediaan fasilitas pengembangan kreatifitas masyarakat khususnya pemuda. Pengembangan budaya lokal masyarakat melalui penyelenggaraan event-event kebudayaan.

## 6. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun kelima (tahun 2021)

Tahun kelima merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima merupakan penuntasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

**Tabel 6.2.**

### **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Selama Periode 2016-2021**

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	<i>MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat</i>						
1	Pembinaan keagamaan						
2	Pengembangan pendidikan agama di sekolah						
3	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan						
4	Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan						
5	Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja						
6	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah dan daerah						
7	Mewujudkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata, dan terjangkau						
8	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih						





No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat						
10	Mengendalikan jumlah penduduk						
11	Mengembangkan ketahanan dan perlindungan keluarga serta pengarusutamaan gender						
12	Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan						
13	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PMKS						
14	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah						
15	Menerapkan Sistem pengawasan Internal						
16	Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi						
17	Menerapkan reformasi birokrasi						
18	Meningkatkan kualitas pelayanan publik						
19	Desentralisasi urusan pemerintahan daerah						
20	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan						
21	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan pelayanan publik						
22	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel						
23	Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan						
24	Meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta						
25	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya						
26	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan						
27	Meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas kepemudaan						
28	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik						
29	Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum						
<b>B.</b>	<i>MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan</i>						
1	Pelayanan perizinan satu atap						
2	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal						
3	Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha tani						



No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor perikanan						
5	Meningkatkan jumlah industri pengolahan kecil dan menengah serta industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal						
6	Mengembangkan sentra industri kreatif						
7	Pemasaran pariwisata dan peningkatan kemitraan pariwisata						
8	Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata						
9	Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan sumber daya listrik dari energi terbarukan						
<b>C.</b>	<i>MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan</i>						
1	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap pengembangan produk-produk unggulan daerah						
2	Memberikan akses teknologi, pemasaran dan permodalan						
3	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja						
4	Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja serta mengarahkan lembaga latihan kerja memenuhi standar akreditasi						
<b>D.</b>	<i>MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing</i>						
1	Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan menuju pusat-pusat perekonomian						
2	Membangun Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten						
3	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang memadai						
4	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan						
5	Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat						
6	Mewujudkan konservasi sumberdaya hutan dan kelestarian alam						
7	Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten						
8	Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir						
9	Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana						
<b>E.</b>	<i>MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan</i>						



No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat						
2	Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan desa						
3	Meningkatkan kemandirian masyarakat						
4	Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan						
5	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan						



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah dipandang sangat penting untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2016 – 2021 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum akan diperoleh berbagai strategi melalui Program-Program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Sesuai dengan aturan yang digariskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan Program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan Program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai Program-Program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan Program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.



2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

### **7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan, yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka kebijakan umum pelaksanaan dan program pembangunan akan dilaksanakan melalui :

#### **7.1.1. Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan**

Kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**7.1.2. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah;
2. Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat;
3. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai;
4. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, kebudayaan dan perpustakaan;
6. Penyediaan dan pemeliharaan akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu dan berkeadilan;
7. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kesejahteraan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, permukiman, sanitasi, bantuan dan lainnya);
8. Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak ;
9. Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas;
10. Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

11. Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah;
12. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
13. Menerapkan aplikasi e-government dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi kesatu berdasarkan urusan adalah :

**A. Urusan Pemerintahan :**

**A.1. Unsur Penunjang Pemerintahan Umum :**

1. Program Hari-Hari Besar Keagamaan
2. Program Peningkatan Hubungan Silaturahmi
3. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
6. Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
7. Program Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah
8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
9. Program Perlombaan Lembaga Pemerintahan
10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
11. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum
12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13. Program Inovasi Pelayanan Publik Daerah
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas
15. Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
17. Program Hari-hari besar nasional
18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi



**A.2. Unsur Penunjang Aparatur dan Kepegawaian :**

19. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
21. Program Aktifitas PORKAB KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai
22. Program Pengayoman dan Perlindungan Hukum

**A.3. Unsur Penunjang Keuangan Daerah :**

23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Program Peningkatan pengelolaan barang daerah
25. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
26. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
27. Program Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
28. Program Peningkatan PAD

**A.4. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah :**

29. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
30. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
31. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
32. Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
33. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
34. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

**B. Urusan Pertanahan :**

35. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan





**C. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :**

36. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
37. Program Pendidikan Politik Masyarakat
38. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
39. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
40. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
41. Program Peningkatan peran serta supra dan infrastruktur politik
42. Peningkatan kelembagaan masyarakat
43. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
44. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

**D. Urusan Komunikasi dan Informatika :**

45. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
46. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
47. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
48. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
49. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

**E. Urusan Statistik :**

50. Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi
51. Program Pengembangan Data/ Informasi

**F. Urusan Kearsipan :**

52. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
53. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
54. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan



**G. Urusan Perpustakaan :**

55. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**H. Urusan Pendidikan :**

56. Program Peningkatan akses Pendidikan AnakUsia Dini
57. Program Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
58. Program Peningkatan akses Pendidikan SD
59. Program Peningkatan kualitas Pendidikan SD
60. Program Peningkatan akses Pendidikan SMP
61. Program Peningkatan kualitas Pendidikan SMP
62. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal disdik
63. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya
64. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
65. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
66. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

**I. Urusan Kesehatan :**

67. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
68. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
69. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
70. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
71. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
72. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
73. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
74. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
75. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya



76. Program Pengawasan Obat dan Makanan
77. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Dampak Asap Rokok
78. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
79. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
80. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
81. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
82. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
83. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

**J. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**

84. Program Pengembangan Perumahan
85. Program Lingkungan Sehat Perumahan

**K. Urusan Lingkungan Hidup**

86. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

**L. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

87. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
88. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
89. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

**M. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**

90. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**N. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

91. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
92. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
93. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
94. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
95. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA

**O. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**

96. Program Keluarga Berencana
97. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
98. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
99. Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU
100. Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
101. Program Pelayanan Kontrasepsi
102. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

**P. Urusan Sosial :**

103. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
104. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
105. Program Pembinaan Anak Terlantar
106. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
107. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

- 108. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 109. Program Pendataan PMKS
- 110. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

**Q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga :**

- 111. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 112. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 113. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 114. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

**R. Urusan Kebudayaan :**

- 115. Program Pengembangan Nilai Budaya
- 116. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 117. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

**7.1.3. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 2 : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi ke-2 adalah :

1. Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif;
2. Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya;
3. Meningkatkan potensi PAD yang belum tergali dari sektor-sektor yang dimungkinkan;
4. Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis;
5. Memperkuat fungsi kelembagaan pelaku pertanian baik kelembagaan ditingkat on-farm, pasca panen, pengolahan hasil, off-farm maupun penyuluh pertanian.



6. Memenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa;
7. Memperkuat kelembagaan petani ;
8. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ;
9. Mewujudkan Pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani;
10. Memanfaatkan swasembada beras, jagung dan kedelai melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
11. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan baik penangkapan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran;
12. Memberikan sarana dan prasarana dalam hal mengoptimalkan kinerja nelayan serta memberikan perlindungan bagi nelayan berupa asuransi;
13. Menumbuh kembangkan potensi wisata Serdang Bedagai untuk peningkatan pendapatan daerah ;
14. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan fokus pada penggunaan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan dunia usaha;
15. Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Sedangkan program-program untuk mewujudkan Misi kedua berdasarkan urusan adalah :

**S. Urusan Penanaman Modal :**

118. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
119. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
120. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
121. Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Pelayanan Perizinan
122. Program Pameran promosi luar daerah/expo
123. Program Investasi dan Promosi Daerah

**T. Urusan Pangan :**

- 124. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- 125. Program Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan pertanian
- 126. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
- 127. Program peningkatan SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan pertanian
- 128. Program Sistem Informasi dan Akses Pangan

**U. Urusan Pertanian :**

- 129. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 130. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- 131. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- 132. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 133. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 134. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 135. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- 136. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- 137. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- 138. Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
- 139. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holtikultura
- 140. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air
- 141. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan/Jalan
- 142. Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan
- 143. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

**V. Urusan Kelautan dan Perikanan :**

- 144. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 145. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 146. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 147. Program pengawasan sumber daya perikanan
- 148. Program Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

**W. Urusan Pariwisata :**

- 149. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 150. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

**X. Urusan Perindustrian :**

- 151. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
- 152. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- 153. Program Pengembangan industri kecil dan menengah
- 154. Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
- 155. Program Peningkatan Kapasitas IKM

**Y. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 156. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya (Pembuatan Lenning/Rehab Lenning)
- 157. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Bronjong
- 158. Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
- 159. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jaringan Irigasi
- 160. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

**Z. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :**

- 161. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan





---

**7.1.4. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi -3 : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi ke- 3 adalah :

1. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja serta penguasaan teknologi;
3. Mengembangkan *link and match* dengan dunia usaha;
4. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;
6. Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar;
7. Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan;
8. Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian ilmu dan penerapan teknologi;
9. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri;
10. Mengembangkan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;

Sedangkan program-program untuk mewujudkan Misi ketiga berdasarkan urusan adalah :

**AA. Urusan Tenaga Kerja:**

162. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Tenaga Kerja



- 163. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
- 164. Program Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
- 165. Program Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

**BB. Urusan Koperasi dan UKM :**

- 166. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- 167. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- 168. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 169. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

**CC. Urusan Perindustrian :**

- 170. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

**EE. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 171. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan

**FF. Urusan Perdagangan :**

- 172. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 173. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 174. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- 175. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- 176. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

**GG. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 177. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

**HH. Urusan Penanaman Modal :**

- 178. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 179. Program Pameran promosi luar daerah/expo



180. Program Investasi dan Promosi Daerah

**7.1.5. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi- 4 : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi ke- 4 adalah :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan perhubungan serta komunikasi dan informasi;
2. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah kabupaten antar kecamatan dan antar desa;
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (*sustainable development*);
4. Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi pengembangan wilayah;
5. Memperkuat sistem dan efektivitas penanggulangan bencana;
6. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

Sedangkan program-program untuk mewujudkan Misi ketiga berdasarkan urusan adalah :

**II. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

181. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
182. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
183. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
184. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
185. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong
186. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong



- 187. Program Pengembangan Sistem Informasi Database Jaringan Ruas Jalan dan Jembatan
- 188. Program Penelitian Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
- 189. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 190. Program Penataan Ruang
- 191. Program pengendalian banjir
- 192. Program Pengembangan, Pengelohan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
- 193. Program Penyediaan dan Pengolahan Daerah Rawa Sebagai Tangkapan Air
- 194. Program Penerangan Jalan Umum

**JJ. Urusan Perhubungan :**

- 195. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 196. Program Peningkatan pelayanan angkutan
- 197. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 198. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

**KK. Urusan Lingkungan Hidup**

- 199. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 200. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 201. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 202. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 203. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 204. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

**LL. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :**

- 205. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan



**MM. Urusan Pemerintahan**

**NN.1. Unsur Penunjang Penanggulangan Bencana Daerah :**

- 206. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 207. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
- 208. Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/Sosial
- 209. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

**NN.2. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah :**

- 210. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

**7.1.6. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi- 5 : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi ke- 5 adalah :

- 1. Mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa
- 2. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan

Sedangkan program-program untuk mewujudkan Misi kelima berdasarkan urusan adalah :

**NN. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 211. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 212. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 213. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 214. Program Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna
- 215. Program Peningkatan swadaya masyarakat
- 216. Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
- 217. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan
- 218. Program Penataan Desa
- 219. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa



## **OO. Urusan Pemerintahan**

### **PP.1. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah :**

#### **220. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan Program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan Program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk Program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan Program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Dengan demikian melalui berbagai penelaahan serta berbagai perkembangan kondisi daerah dan permasalahan pembangunan, Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan beberapa Program pembangunan daerah yang sesuai dengan janji kepala daerah sebagaimana pada **Tabel 7.1.** berikut.



**Tabel 7.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat										
Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas SDM masyarakat										
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar)	Persentase siswa SD/MI miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa  Persentase siswa SMP/MTs miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa  Persentase sekolah SD yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya lokal  Persentase sekolah SMP yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya lokal  Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	25,64%  27,51%  10%  20%  109,32%  94,84%  98,75%	100%  100%  15%  30%  116,19%  97,61%  100%	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	83,60%	89%				
			Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional	Persentase sekolah terakreditasi A untuk SD/MI	0,80%	3,3%				
				Persentase sekolah terakreditasi A untuk SMP/MTs	1%	8,7%				
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/RA	73,96 %	95 %	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Persentase PAUD/TK/RA terakreditasi	3,80%	6,5%				
		Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	88%	92,5%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Persentase guru yang telah mengikuti Pelatihan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	35,50 %	45,50 %				
		Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yg mencakup semua program kejuruan yg diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK,program-program PNF	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	3,61 %	20 %	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan	





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
			kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan)							
				Persentase pengunjung perpustakaan pertahun untuk Perpustakaan umum	11,96%	13,63%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata, dan terjangkau	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	20%	75%	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	62,50%	100%	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	52,30%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	RS Sultan Sulaiman	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	127/100.000 KH	80/100.000 KH	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000 KH	3,5/1.000 KH				
				Angka Kematian Balita	8/1.000	5,5/1.000	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Persentase puskesmas yang terakreditasi	0%	100%	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Angka Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	29.50%	100%			Rumah Sakit Umum	
				Angka Long of Stay (LOS) Rumah Sakit	4 hari	6 hari			Rumah Sakit Umum	
				Akreditasi Rumah Sakit	NA	Pratama			Rumah Sakit Umum	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,70%	95%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	
				Angka keberhasilan pengobatan TB BTA + atau Success Rate	80,70%	≥ 95%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Annual Paracyte Index (malaria)	< 1/1.000 penduduk	< 1/1.000 penduduk				
				Insidennce Rate DBD	< 40/100.000 penduduk	< 40/100.000 penduduk				
				Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0%	50%	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Persentase rumah tangga berperilaku keluarga sehat	28%	70%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Desa Siaga Aktif	23%	100%				



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	34%	40%		Kesehatan	Rumah Sakit Umum	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	85				
				Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Prevelansi gizi kurang pada Balita	5,6	2,6				
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	100%	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	62%	69%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	42%	100%	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Persentase kawasan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	11,11%	35%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Dampak Asap Rokok	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	60%	100%	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RS Sultan Sulaiman	
							Program Pemeliharaan			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
							sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			
		Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih	Meningkatkan cakupan masyarakat pengguna air bersih	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah)  Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	1,1%  NA	3,5%  63,30%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan
		Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	32%	40%	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	5,92%	8%	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase RT bersanitasi	72,4%	80,32%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Luas permukiman kumuh (ha)	60,03	0	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		Mengendalikan jumlah penduduk	Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3 R	2%	4%	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
				Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	28,7%	42%				
				Tingkat Penurunan TFR	2,47%	2,17%	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	
				Jumlah Lembaga/ Organisasi yang mendukung program KB	10	22	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	
				Cakupan peserta KB aktif	73,64%	74,84%	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	
				Persentase Pasangan yang menikah dengan umur ideal (%)	35,21 %	44,64 %	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	
				Persentase Bina keluarga Remaja (BKR) yang aktif	7%	72,86%				
				Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif	8%	74,36%	Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	
				Persentase keluarga sejahtera dan KS I	17,71%	22,32%	Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab		
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping	
Tujuan 1.2 Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan good governance											
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Mewujudkan opini BPK WTP	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
				Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah	42%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Pemerintahan	Inspektorat		
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindaklanjuti dan mendapat status selesai	65%	100%					
				Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersertifikat	45,67%	100%	Program Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Pemerintah	Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		Semua OPD
				Persentase kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	100%	100%	Program Peningkatan pengelolaan barang daerah	Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
		Menerapkan Sistem pengawasan Internal	Penerapan SPIP di OPD	Persentase OPD yang menerapkan SPIP level 3 (terdefenisi)	NA	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pemerintahan	Inspektorat		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP kabupaten	C	BB	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemerintahan	Inspektorat, Bappeda dan Setdakab	Semua OPD
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	Menerapkan Sistem pengawasan Internal	Pembenahan manajemen pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	56	70	Program Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah	Pemerintahan	Setdakab	Semua OPD
			Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	2,5018	3,21	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemerintahan	Setdakab	
			Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial	NA	21 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemerintahan	BKD	Semua OPD
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Teknis	NA	76 %				
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	85	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pemerintahan	Setdakab	Semua OPD
		Desentralisasi urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan terkait pelayanan publik	Persentase realisasi PBB	100%	100%	Program Peningkatan PAD	Pemerintahan	Kecamatan	Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan
				Persentase realisasi retribusi IMB	100%	100%				



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
										P2TSP
			Penerapan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase OPD yang menerapkan SOP dan SPP	70 %	100 %	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pemerintahan	Setdakab	Semua OPD
			Membangun kerjasama antar pemerintah daerah terkait pelayanan publik	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi MoU setiap tahun	50%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan	Setdakab	
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan pelayanan publik	Peningkatan penggunaan aplikasi IT dalam penyelenggaraan e-government	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	NA	100%	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua OPD

*Tujuan 1.3 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat sebagai wujud cinta terhadap daerah*

1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Pembinaan keagamaan	Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat	Persentase fasilitasi aktifitas keagamaan di masyarakat umum	NA	80%	Program Hari-Hari Besar Keagamaan	Pemerintahan	Setdakab dan Kecamatan	
				Jumlah konflik SARA	0	0	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
Tujuan 1.4 Meningkatkan daya beli masyarakat sebagai wujud masyarakat yang berdaya saing										
1	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Menjaga kestabilan harga	Optimalisasi peran TPID	Persentase capaian inflasi daerah	100 %	100 %	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Pemerintahan	Setdakab	Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Perindag; Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 1.5. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai upaya menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat										
1	Mewujudkan kawasan yang masih menjalankan tradisi lokal	Mendorong pembentukan kampung budaya	Fasilitasi pembentukan kampung budaya lokal	Jumlah Kampung Budaya Lokal	0	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disporapar bud	
		Melindungi budaya lokal	Pelestarian seni dan budaya serta benda-benda bersejarah	Persentase tradisi yang masih dijalankan di masyarakat	NA	82%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Disporapar bud	
			Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	0	7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disporapar bud		
MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan										
Tujuan 2.1 Meningkatkan investasi										
1	Meningkatnya realisasi investasi	Pelayanan perizinan satu atap	Memperpendek proses perizinan	Rata-rata lama proses perizinan (hari)	7	2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Pelayanan Perizinan	Penanaman Modal	Dinas PMPPTSP	Kecamatan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		Memperluas akses permodalan	Fasilitasi Modal bagi UMKM	Jumlah wirausaha baru yang mendapat akses modal	NA	375	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Dinas Perindag; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan
		Mengikuti berbagai event promosi yang potensial mendatangkan investasi	Penetapan target investasi pada setiap event promosi yang diikuti	Persentase pertumbuhan jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	NA	8,9 %	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Dinas PMPPTSP	Dinas Perindag; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan
Tujuan 2.2 Meningkatkan kinerja perekonomian daerah										
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha tani	Meningkatkan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Produktifitas :			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan pangan
				Padi	5,621 ton/ha	6,2 ton/ha				
				Ubi Kayu	39,74 ton/ha	41,30 ton/ha	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holtikultura			
				Jagung	4,611 ton/ha	5,290 ton/ha				
				kelapa sawit	14.651,92 kg/ha	15.133,35 kg/ha	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air			
				Karet	978,42 kg/ha	1.050,18 kg/ha	Program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan			
				Kakao	826,04 kg/ha	1.102,56 kg/ha				
				Kelapa	1.144,38 kg/ha	1.299,1 kg/ha				



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Polpulasi Ternak (ekor)			Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal			
				- Sapi	43.615	45.840				
				- Kerbau	621	711				
				- Domba	47.700	50.133				
				- Kambing	77.306	81.347				
				- Itik	275.341	289.386				
				Produksi daging (ton)	1715	1785				
		Meningkatkan pengetahuan SDM pertanian tentang teknologi budidaya sektor pertanian	Meningkatkan pengetahuan SDM pertanian tentang teknologi budidaya sektor pertanian	Persentase kelompok tani dengan kualitas baik	30 %	100 %	Program peningkatan SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian
				Persentase kompetensi penyuluh	NA	100%	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	Persentase jaringan tersier dalam kondisi baik (%)	NA	70 %	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air	Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan pangan
				Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (km)	19	34	Program pengembangan prasarana dan sarana lahan/jalan			
			Penguatan dan fasilitasi akses permodalan petani	Jumlah kelompok usaha tani (ternak) yang mendapat kredit KKP-E, KUPS, KUR	26	38	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan pangan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Luas usaha tani sawah yang terlindungi oleh asuransi usaha tani tanaman padi (AUTP) (ha)	535	12.535	Program Peningkatan produksi pertanian			
			Mengendalikan alih fungsi lahan dan menggalakkan Gerakan Sawah Mandiri	Optimasi lahan yang kurang subur (ha)	4.900	5.150	Program pengembangan prasarana dan sarana lahan/jalan	Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan pangan
				Penambahan luas baku lahan sawah (ha)	0	1000				
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif	Persentase Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif di setiap Daerah Irigasi	6,25 %	65,25 %	Program Peningkatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan pangan; Dinas PUPR
		Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor perikanan	Meningkatkan pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan konsep minapolitan	Produksi perikanan budidaya (ton)			Program Pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				- air tawar	21.106	35.558				
				- air payau	6.152	14.907				
				Produksi perikanan tangkap (ton)	25.363	27.232	Program Pengembangan perikanan tangkap			
			Meningkatkan daya saing dan	Volume produksi pengolahan hasil perikanan	3.349	4.430	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
			diversifikasi produk kelautan dan perikanan	Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	38	50	produksi perikanan		Perikanan	
		Meningkatkan jumlah industri pengolahan kecil dan menengah serta industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal	Fasilitasi dunia usaha dalam pemanfaatan dan pemasaran komoditi lokal	Jumlah IKM dan Industri RT berbasis komoditi lokal (unit usaha):			Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindag	Dinas PMPPTSP; Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
				- IKM	1.400	2.000				
				- Industri RT	200	500				
		Mengembangkan sentra industri kreatif	Membangun sentra industri kreatif berbasis produk unggulan lokal	Jumlah sentra cluster industri kreatif	2	5	Program Peningkatan Kapasitas IKM	Perindustrian	Dinas Perindag	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
				Jumlah industri kreatif yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan usaha bisnis di luar daerah (unit usaha)	25	100				
		Pemasaran pariwisata dan peningkatan kemitraan pariwisata	Meningkatkan penyelenggaraan event kreatif	Jumlah kunjungan wisata (orang)	266.666	1.000.000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas PORA, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Baru	14	17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas PORA, Pariwisata dan Kebudayaan	

Tujuan 2.2 Menggalakkan penggunaan energi terbarukan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
1	Meningkatnya penggunaan energi terbarukan	Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan sumber daya listrik dari energi terbarukan	Memfasilitasi investor dalam pengembangan pembangkit listrik dari sumber tenaga air	Jumlah kawasan/unit usaha yang menggunakan energi terbarukan	NA	4	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR; Bappeda
		Mendorong masyarakat menemukan penggunaan energi terbarukan melalui Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna yang diarahkan pada pengembangan dan penggunaan energi terbarukan	Jumlah TTG yang dapat dimanfaatkan masyarakat	12	25	Program Pengembangan dan pemyarakatan teknologi tepat guna	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas PMD	Bappeda; Dinas LH; Dinas PUPR

**MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan**

*Tujuan 3.1 Mewujudkan masyarakat berjiwa wirausaha*

1	Meningkatnya minat masyarakat menjadi wirausaha	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap pengembangan produk-produk unggulan daerah	Membangun kemampuan SDM yang berjiwa wirausaha	Jumlah wirausaha baru yang mendapat akses modal	NA	375	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindag; Dinas PM dan PPTSP; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pertanian.
				Jumlah wirausaha baru	250	3.000				



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
				Jumlah UMKM yang sudah memiliki Izin	NA	3.000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas PM dan PPTSP;
				Persentase koperasi aktif	27,94%	42,65%	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro	
				Persentase BUMDes yang memiliki laba	0%	50%	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Memberikan akses teknologi, pemasaran dan permodalan bagi para pelaku usaha	Fasilitasi dan intermediasi akses teknologi, pemasaran dan permodalan bagi para pelaku usaha	Jumlah dan jenis produk IKM dan industri RT yang dipasarkan di luar daerah (jenis)	22	65	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Disperindag	
				Jumlah Pasar Tradisional	25	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disperindag	
				Persentase pasar sehat	4%	24%				
				Persentase jumlah pedagang kaki lima yang difasilitasi	5%	25%	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Disperindag	
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Bertambahnya lapangan kerja baru	NA	6.000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM	Tenaga Kerja	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	tenaga kerja	Bertambahnya tenaga kerja yang bersertifikasi	0	2.500	Tenaga Kerja			
			Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100%	100%	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro	
			Jumlah kejadian kecelakaan kerja			Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnaker, Koperasi dan Usaha Mikro		
Tujuan 3.2 Menurunkan angka kemiskinan										
1	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PMKS	Memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin	Persentase penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK)	35.673	29.253	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	Semua OPD





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
			Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	Persentase Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	7.000 orang		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosial	
<b>MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing</b>										
<i>Tujuan 4.1 Mewujudkan sarana prasarana yang mantap (nyaman dan umur pakai panjang) dan merata</i>										
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,68 %	100 %	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	64,01 %	87,05%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
		Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Peningkatan konservasi sumber daya air	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	10 ltr/detik	50 ltr/detik	Program Pengembangan, Pengolahan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan pengendalian daya rusak air	Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	0 %	58,46 %	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	
			Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	67,60 %	100 %	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah)	1,1 %	3,50 %	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perwankim	Dinas Kesehatan
			Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik	Persentase RT bersanitasi	72,40 %	80,32 %	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perwankim	Dinas Kesehatan
			Peningkatan cakupan layanan persampahan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	28,7 %	42 %	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			Pengembangan lingkungan permukiman sehat	Luas permukiman kumuh (ha)	60,03	0	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perwankim	Dinas LH; Dinas Kesehatan, Dinas PMD
				Persentase rumah layak huni (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun)	87 %	90,99 %	Program Pengembangan perumahan			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab		
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping	
Tujuan 4.2 Meningkatkan cakupan jangkauan energi listrik											
1	Mengurangi daerah terisolir dan tidak teraliri listrik	Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan	Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Jumlah daerah terisolir yang tidak teraliri listrik	NA	1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perwankim	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR	
				Persentase kecamatan yang memiliki RTH (Jumlah RTH yang dibangun)	0 %	100 %					
MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan											
Tujuan 5.1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan											
1	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui lembaga masyarakat desa	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang aktif	75%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec	
				Persentase permasalahan pemerintahan desa yang diselesaikan	90%	97%	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec	
				Jumlah TTG yang dapat dimanfaatkan masyarakat	12	25	Program Pengembangan dan pemyarakatan Teknologi Tepat Guna	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
		Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan desa	Mendorong pemberdayaan aparatur pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu	55%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec
				Persentase Desa yang sudah tertata	65%	94%	Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec
		Meningkatkan kemandirian masyarakat	Menumbuhkan semangat gotongroyong	Jumlah kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui kegiatan gotong-royong	237	711	Program Peningkatan Swadaya Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec
				Persentase BUMDes yang memiliki laba	0%	50%	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	Mempermudah prosedur pembayaran pajak	Penerapan aplikasi IT dan kerjasama dengan lembaga keuangan	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat membayar pajak	57,48 %	91,21 %	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak	Pemerintahan	Badan Pendapatan	Kec
			Sosialisasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	85	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			Utama	Pendamping
Tujuan 5.2 Meningkatkan jaminan keberlanjutan pembangunan										
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	40,35%	55%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	NA	85 %	Program Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	



## 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN) 2015-2019

**Tabel 7.2**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN) 2015-2019**

No	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021	Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015-2019
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya; <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</li> <li>Program Pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi</li> </ol> </li> <li>Meningkatkan potensi PAD yang belum tergali dari sektor-sektor yang dimungkinkan; <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan PAD</li> </ol> </li> </ol>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis; <ol style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan produksi hasil peternakan</li> <li>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</li> <li>Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan</li> <li>Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan</li> <li>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> </ol> </li> <li>Menumbuhkembangkan potensi wisata Serdang Bedagai untuk peningkatan pendapatan daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> </ol> </li> </ol>	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan
III	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan perhubungan serta komunikasi dan informasi <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</li> <li>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong</li> <li>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</li> <li>Program Pengembangan, Pengelohan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya</li> <li>Program Penyediaan dan Pengolahan Daerah Rawa Sebagai Tangkapan Air</li> <li>Program Penerangan Jalan Umum</li> <li>Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</li> </ol> </li> <li>Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah kabupaten antar kecamatan dan antar desa <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan pelayanan angkutan</li> </ol> </li> </ol>	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan



No	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021	Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015-2019
IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</li> </ol> </li> <li>2. Memperkuat sistem dan efektivitas penanggulangan bencana               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah</li> <li>c. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana</li> </ol> </li> </ol>	<p>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim</p>
V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kesejahteraan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, permukiman, sanitasi, bantuan dan lainnya)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan akses Pendidikan AnakUsia Dini</li> <li>b. Program Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>c. Program Peningkatan akses Pendidikan SD</li> <li>d. Program Peningkatan kualitas Pendidikan SD</li> <li>e. Program Peningkatan akses Pendidikan SMP</li> <li>f. Program Peningkatan kualitas Pendidikan SMP</li> <li>g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>b. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</li> <li>c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan</p>

### 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara)

**Tabel 7.3**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara) 2013-2018**

No	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021	Kebijakan Umum Provinsi (RPJMD Sumut) 2013-2018
I	1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah
II	1. Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat a. Program Hari-Hari Besar Keagamaan b. Program Peningkatan Hubungan Silaturahmi c. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan	Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat
III	1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, kebudayaan dan perpustakaan a. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan d. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan dan perpustakaan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota
IV	1. Penyediaan dan pemeliharaan akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu dan berkeadilan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular f. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak g. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya h. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita i. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia j. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata k. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Penyediaan dan pemeliharaan akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu dan berkeadilan hingga ke pelosok kabupaten/kota;





No	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021	Kebijakan Umum Provinsi (RPJMD Sumut) 2013-2018
V	<p>1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan perhubungan serta komunikasi dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</li> <li>c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong</li> <li>f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</li> <li>g. Program Pengembangan, Pengelohan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya</li> <li>h. Program Penyediaan dan Pengolahan Daerah Rawa Sebagai Tangkapan Air</li> <li>i. Program Penerangan Jalan Umum</li> <li>j. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</li> </ul>	<p>Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, Sumber Daya Air, perhubungan</p>
VI	<p>1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja serta penguasaan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Tenaga Kerja</li> <li>b. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</li> </ul>	<p>Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja melalui Penguasaan Teknologi</p>
VII	<p>1. Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</li> <li>b. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</li> <li>c. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>d. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri</li> </ul>	<p>Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar</p>
VIII	<p>1. Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</li> <li>b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>c. Program peningkatan produksi hasil peternakan</li> <li>d. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</li> <li>e. Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan</li> <li>f. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan</li> <li>g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> </ul>	<p>Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis</p>



#### **7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Lintas Bidang**

Kebijakan pembangunan lintas bidang diarahkan untuk peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan lintas bidang secara terpadu :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif
2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu
3. Rencana aksi pangan dan gizi
4. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
5. Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD SDGs)
7. Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender
9. Strategi Penanggulanagn Kemiskinan Daerah
10. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

#### **8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi**

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya yang akan dijabarkan pada dokumen rencana tahunan, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain tidak dilaksanakan.

## **8.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan**

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum.

Pada bagian ini disajikan semua program dan kegiatan baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program dan kegiatan pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing OPD. Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai dan disertai pagu indikatif pendanaan.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara lengkap program dan kegiatan tersebut disajikan pada **Tabel 8.1** berikut.



Tabel 8.1

## Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
	dan Program Prioritas Pembangunan				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1		PENDIDIKAN														
1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	3.084.796	100%	3.382.520	100%	3.378.520	100%	3.378.520	100%	3.378.520	100%	3.378.520
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	928.000	100%	976.000	100%	1.400.000	100%	1.464.200	100%	1.466.620	100%	1.469.282
1	1	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	15.000	100%	67.000	100%	30.000	100%	35.000	100%	40.000	100%	45.000
1	1	4	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	47,05%	47,05%	125.000	48%	0	48%	180.000	49%	180.000	49%	180.000	50%	180.000



1	1	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang terakreditasi	3,8%	3,8%	9.467.323	4%	9.137.450	5%	17.140.355	5,7%	19.062.389	6%	20.350.068	6,5%	21.766.515
				APK PAUD	73,96%	74,96%		80%		86%		89%		93%		95%	
1	1	6	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Persentase siswa SD/MI miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	25,64%	30,00%	142635718,32	50%	14.021.776	70%	399.459.680	80%	421.083.915	90%	428.351.797	100%	436.411.467
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,32 %	109,50 %		114,69 %		115,19 %		115,69 %		116,19 %		116,19 %	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,84%	95,11%		95,61%		96,11%		96,61%		97,11%		97,61%	
				Persentase sekolah SD yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya lokal	10,00%	10,00%		11%		12%		13%		14%		15%	
				Persentase sekolah terakreditasi A untuk SD	0,80%	0,80%		1,3%		1,8%		2,3%		2,8%		3,3%	
				Persentase siswa SMP/MTs miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	27,51%	35,00%		50%		70%		80%		90%		100%	



				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,75%	99,00%		100,51%		100,01%		101,51%		102,01%		102,51%	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	83,60%	84,00%		84,84%		85,31%		85,84%		86,34%		86,84%	
				Persentase sekolah SMP yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya lokal	20%	20%		22%		24%		26%		28%		30%	
				Persentase sekolah terakreditasi A untuk SMP	1%	1%		6,7%		7,2%		7,7%		8,2%		8,7%	
1	1	7	Program Pendidikan non-formal	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	3,61%	3,61%	2.551.613	10%	366.048	12%	4.726.395	14%	4.902.065	16%	5.071.465	20%	5.257.805
1	1	8	Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	88%	90%	229144230,47	90,05%	133.964.347	91%	156.778.879	91,5%	157.354.919	92%	157.988.563	92,5%	158.685.571
1	1	9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase guru yang telah mengikuti Pelatihan Keprofesional Berkelanjutan (PKB):	35,50%	35,50%		37,50%		39,50%		41,50%		43,50%		45,50%	
			<b>TOTAL PENDIDIKAN</b>				<b>387.951.681</b>		<b>161.915.141</b>		<b>583.093.828</b>		<b>607.461.007</b>		<b>616.827.032</b>		<b>627.194.160</b>



1	2	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	601.155	100%	820.750	100%	1.009.860	100%	1.053.812	100%	1.047.908	100%	1.094.662
1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99%	99,1%	702.260	99,2%	1.748.760	99,3%	3.590.500	99,4%	1.187.500	99,5%	795.000	99,6%	806.000
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	35.000	100%	30.000	100%	32.500	100%	35.000	100%	37.500	100%	52.500
1	2	4	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	0	NA	0	16,66%	87.000	0,33	99.500	0,5	112.000	66,66%	124.500
1	2	5	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Persentase OPD yang menyimpan arsip di Depo Arsip Daerah	NA	NA	0	5,88%	40.000	5,88%	350.000	8,82%	517.000	8,82%	272.000	11,76%	277.000
1	2	6	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun untuk Perpustakaan umum	11,96%	12,12%	718.500	12,31%	2.097.700	12,61%	3.206.400	12,93%	3.520.750	13,27%	3.668.350	13,63%	4.012.035
1	2	7	Program Perbaikan Sisitem Administrasi Kearsipan	Persentase jumlah OPD yang arsipnya dikelola secara baku	2,94%	2,94%	0	5,88%	0	8,82%	107.000	8,82%	241.000	11,76%	305.000	11,76%	344.000





1	2	8	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	NA	65	0	67	250.000	69	290.000	70	375.500	71	421.000	72	471.500
			<b>TOTAL PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				<b>2.056.915</b>		<b>4.987.210</b>		<b>8.673.260</b>		<b>7.030.062</b>		<b>6.658.758</b>		<b>7.182.197</b>
1	3		<b>KESEHATAN</b>														
1	3	1	Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.868.290	100%	2.210.655	100%	2.451.525	100%	2.469.578	100%	2.488.436	100%	2.508.179
1	3	2	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	78%	3.023.688	83%	3.900.000	88%	5.600.000	93%	5.280.000	98%	4.510.000	100%	4.530.000
1	3	3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	253.500	100%	604.350	100%	1.885.000	100%	1.940.000	100%	1.992.000	100%	1.515.000
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	70%	70%	506.210	75%	652.585	80%	6.116.502	85%	6.251.502	90%	6.346.502	100%	6.331.502



1	3	5	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	20%	25%	25.751.884	35%	41.290.000	45%	156.940.000	55%	159.900.000	65%	118.450.000	75%	97.370.000
1	3	6	Program Upaya kesehatan masyarakat	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	52.30%	82%	39.100.253	90%	56.339.735	95%	69.800.438	100%	73.569.694	100%	78.949.588	100%	231.753.491
1	3	7	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	62.50 %	62.50 %	0	100 %	0	100%	530.400	100%	636.480	100%	274.752	100%	330.624
1	3	8	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga Berperilaku keluarga sehat	28%	45%	820.000	50%	1.480.000	55%	4.790.000	60%	4.212.000	65%	4.225.000	70%	3.095.000
				Cakupa Desa Siaga Aktif	23%	70%		75%		80%		85%		90%		100%	
				Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	34%	35%		36%		37%		38%		39%		40%	
1	3	9	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	127/100.000	105/100.000	1.329.500	100/100.000	2.060.000	95/100.000	8.642.000	90/100.000	8.692.200	85/100.000	9.013.920	80/100.000	9.455.812
				Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000	6/1.000		5,5/1.000		5/1.000		4,5/1.000		4/1.000		3,5/1.000	



1	3	10	Program Perbaikan gizi masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	905.000	100%	750.000	100%	3.368.000	100%	2.843.000	100%	3.324.000	100%	3.379.000
				Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	5,6	2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6	
1	3	11	Program Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	91%	7.400.470	92%	7.821.350	93%	8.153.985	94%	8.390.684	95%	8.529.751	100%	11.455.104
1	3	12	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	42%	50%	19.500	55%	327.800	65%	355.000	75%	394.900	85%	432.525	100%	469.818
1	3	13	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Bahaya Dampak Asap Rokok	Persentase kawasan yang melaksanakana n kebijakan kawasan tanpa rokok	11,11%	11,11%	100.000	11,11%	0	20%	700.000	25%	600.000	30%	590.000	35%	630.000
1	3	14	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + atau Success Rate	80.70%	≥ 95 %	1.449.987	≥ 95 %	846.174	≥ 95 %	6.198.190	≥ 95 %	4.091.190	≥ 95 %	4.085.190	≥ 95 %	3.920.235
				Annual Paracyte Index (malaria)		< 1/1.000 penduduk		< 1/1.000 penduduk		< 1/1.000 penduduk		< 1/1.000 penduduk		< 1/1.000 penduduk		< 1/1.000 penduduk	
				Insidenncce Rate DBD		< 40/100.000 penduduk		< 40/100.000 penduduk		< 40/100.000 penduduk		< 40/100.000 penduduk		< 40/100.000 penduduk		< 40/100.000 penduduk	
				Persentase desa yang mencapai UCI	80,7%	86%		88%		90%		92%		94%		95%	



1	3	1	5	Program Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Rumah Tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	62%	64%	265.550	66%	245.000	68%	728.000	68%	786.650	69%	849.255	69%	754.293
					Persentase penduduk yang stop buang air besar sembarangan	NA	58%		68%		75%		85%		95%		100%	
1	3	1	6	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita (/1000 KH)	8/1.000	8/1.000	236.000	7.5/1.000	272.000	7/1.000	1.017.600	6.5/1.000	1.202.520	6/1.000	1.422.564	5.5/1.000	1.508.315
1	3	1	7	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	0%	0%	270.000	30%	2.105.990	65%	2.840.000	100%	3.140.000	100%	3.350.000	100%	3.650.000
1	3	1	8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0%	15%	0	25%	0	35%	511.000	40%	531.000	45%	581.000	50%	611.000
				<b>TOTAL KESEHATAN</b>				<b>83.299.832</b>		<b>120.905.639</b>		<b>280.627.640</b>		<b>284.931.398</b>		<b>249.414.483</b>		<b>383.267.374</b>
1	4			<b>RUMAH SAKIT UMUM</b>														
1	4	1		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.069.500	100%	1.664.375	100%	1.700.000	100%	1.750.000	100%	2.000.000	100%	2.300.000



1	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70%	70%	260.000	80%	400.000	100%	400.000	100%	500.000	100%	600.000	100%	700.000
1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	NA	NA	0	NA	0	NA	0	96%	115.000	NA	0,00	NA	0,00
1	4	4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	7.000	100%	7.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	12.000	100%	12.000
1	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Rumah Sakit yang profesional	NA	90%	110.000	92%	120.000	94%	130.000	96%	140.000	98%	150.000	100%	160.000
1	4	6	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	75	50.000	77	75.000	79	75.000	81	100.000	83	100.000	85	100,000.00
1	4	7	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	60%	5%	1.500.000	7,5%	1.250.000	7,5%	1.500.000	10%	1.500.000	10%	2.000.000	10%	2.000.000
1	4	8	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	60%	65%	2.450.000	70%	3.200.000	75%	3.500.000	80%	4.000.000	90%	5.000.000	100%	7.500.000



			jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata														
1	4	8	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	NA		150.000	dasar	200.000	dasar	300.000	dasar	400.000	dasar	500.000	Pratama	750.000
				Angka Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	29,50%	31,00%		35,00%		45,00%		55,00%		65,00%		100%	
				Angka Long of Stay (LOS) Rumah Sakit	4 hari	5 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari	
			TOTAL RUMAH SAKIT UMUM				5.596.500		6.916.375		7.615.000		8.515.000		10.362.000		13.422.000
1	5		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	5	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	2.320.380	100%	1.356.500	100%	1.492.150	100%	1.641.365	100%	1.805.502	100%	1.986.052
1	5	2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.420.750	100%	1.082.000	100%	1.190.200	100%	1.309.220	100%	1.440.142	100%	1.584.156
1	5	3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	27.250	100%	810.000	100%	93.000	100%	119.000	100%	145.000	100%	146.000
1	5	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90%	1.277.750	92%	91.253	94%	95.000	96%	100.000	98%	105.000	100%	110.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	5	5	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase Panjang drainase di sepanjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	13,7%	20%	100.500	22%	1.161.250	24%	1.200.000	26%	1.300.000	29%	1.400.000	32%	1.663.457
1	5	6	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	60%	63%	2.916.113	65%	3.002.650	70%	3.100.000	75%	3.200.000	80%	3.300.000	85%	3.600.000
1	5	7	Program Pengembangan Sistem Informasi Database Jaringan Ruas Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan ruas jalan dan jembatan yang masuk dalam database		0	0	0	0	200.000	25%	300.000	50%	400.000	75%	500.000	
1	5	8	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan turap/ talud/ bronjong	Persentase panjang turap/ talud/ bronjong dalam kondisi baik	NA	-	1.616.432	-	1.699.375	-	1.700.000	-	1.800.000	-	1.987.077	-	2.000.000
1	5	9	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,68%	54,74%	50.000.000	63,8%	56.000.000	72,86%	64.000.000	81,92%	76.500.000	90,98%	90.000.000	100%	100.000.000
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	64,01%	72,47%		75,93%		79,39%		82,86%		86,32%		87,05%	
1	5	10	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik			7.000.000		10.807.832		12.164.042		15.235.541		30.000.000		41.300.000



1	5	1	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase Panjang drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik	13,7%	20%	0	22%	5.254.178	24%	6.500.000	26%	7.500.000	29%	8.500.000	32%	11.300.000
1	5	2	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Persentase panjang turap/ talud/bronjong dalam kondisi baik	NA		0		1.641.484		2.000.000		2.500.000		3.000.000		4.000.000
1	5	3	Program Pengembangan Data/Informasi		NA	20%	352.500	40%	407.000	50%	500.000	60%	600.000	80%	700.000	100%	800.000
1	5	4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	67,60%	75%	2.590.500	80%	2.787.970	84%	6.000.000	87%	8.000.000	95%	10.000.000	100%	15.000.000
1	5	5	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	NA	0.0%	0	39.3%	2.178.220	43.9%	2.500.000	48.32%	4.000.000	53.16%	4.000.000	58.46%	5.000.000
1	5	6	Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Persentase Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif	6,25%	16,25%	0	26,25%	385.000	36,25%	400.000	46,25%	450.000	56,25%	550.000	65,25%	650.000
1	5	7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	volume air baku yang dikelola	10 L/det	20 L/det	0	25 L/det	1.000.000	30 L/det	1.000.000	35 L/det	1.500.000	40 L/det	1.500.000	50 L/det	1.500.000





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	5	1	Program Pengembangan, Pengolahan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase peningkatan volume ketersediaan air baku	10 L/det	20 L/det	2.620.000	25 L/det	2.565.000	30 L/det	2.500.000	35 L/det	2.500.000	40 L/det	5.500.000	50 L/det	5.500.000
1	5	1	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang masuk dalam database			0	10%	1.540.000	30%	1.600.000	50%	1.700.000	75%	1.800.000	90%	1.900.000
1	5	2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik			0	-	0	25%	15.150.000	35%	19.770.000	65%	23.900.000	75%	28.720.000
1	5	2	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik			0		0	25%	10.600.000	35%	11.330.000	65%	13.830.000	75%	15.850.000
1	5	2	Program Penguatan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang baik				25%	200.000	30%	250.000	35%	350.000	45%	450.000	65%	600.000
1	5	2	Program Pembinaan Kelembagaan Irigasi	Persentase kelompok P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif (%)	6,25%	16,25%	305.988	26,25%	198.984	36,25%	250.000	46,25%	300.000	56,25%	350.000	65,25%	450.000
1	5	2	Program Penyediaan dan Pengolahan Daerah Rawa Sebagai Tangkapan Air	Persentase daerah rawa yang dikelola			1.430.000		1.500.000		1.750.000		2.000.000		2.250.000		2.500.000
			<b>TOTAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>73.978.163</b>		<b>97.829.820</b>		<b>140.323.142</b>		<b>169.087.938</b>		<b>213.361.721</b>		<b>254.458.852</b>



1	6		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	6	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	746.400	100%	828.600	100%	1.250.800	100%	1.223.000	100%	1.314.200	100%	1.164.200
1	6	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	765.850	100%	964.250	100%	2.874.200	100%	936.200	100%	1.065.750	100%	775.250
1	6	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (10 Laporan)	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	25.000	100%	25.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	35.000	100%	35.000
1	6	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	0	100%	115.000	100%	120.000	100%	125.000	100%	130.000	100%	130.000
1	6	5	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	5,92%	6,2 %	3.000.000	6,5%	3.000.000	6,7%	3.840.000	7 %	4.070.000	7,5 %	4.065.000	8%	4.690.000
1	6	6	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah)	1,10%	1,50%	9.287.000	1,90%	14.132.000	2,30%	38.497.000	2,70%	38.450.000	3,10%	13.720.000	3,50%	13.720.000



				Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih		60,77%		61,27%		61,78%		62,28%		62,79%		63,30%	
1	6	7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase RT bersanitasi	72,40%	73,72%	6.250.000	75,04%	10.250.000	76,36%	13.075.000	77,68%	6.425.000	79%	6.425.000	80,32%	6.425.000
1	6	8	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	32%	32%	0	32%	3.750.000	34%	4.275.000	36%	4.225.000	38%	4.275.000	40%	4.225.000
1	6	9	Program Pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun)	87,00%	90,13%	0	90,15% (82 Unit)	1.500.000	90,32% (250 Unit)	4.775.000	90,49% (250 Unit)	4.775.000	90,74% (300 Unit)	7.775.000	90,99% (300 Unit)	7.775.000
1	6	10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah titik PJU yang dibangun	NA	125 titik	1.600.000	88 titik	1.100.000	150 titik	2.000.000	150 titik	2.100.000	150 titik	2.200.000	150 titik	2.300.000
				Persentase kecamatan yang memiliki RTH (Jumlah RTH yang dibangun)	0%	0%		30% (2 Kec.)	500.000	50% (4 Kec.)	1.000.000	70% (5 Kec.)	1.000.000	90% (4 Kec.)	1.250.000	100% (2 Kec.)	1.500.000
1	6	11	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh	Luas permukiman kumuh (ha)	60,03	34,15	0	27,32	0	20,49	4.788.986	13,66	10.225.000	6,83	10.225.000	0	10.225.000
1	6	12	Program Pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal pemakaman yang ditata		17%	-	17%	0	18%	825.000	19%	775.000	20%	775.000	21%	825.000



1	6	1	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi setiap tahun					100%	175.000	100%	225.000	100%	275.000	100%	275.000	
1	6	1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah persil lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten				1 persil	2.610.000	2 persil	25.975.000	2 persil	10.925.000	2 persil	10.875.000	1 persil	10.875.000
			TOTAL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				20.974.250		38.074.850		104.573.986		86.232.200		65.354.950		65.769.450
1	8		PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
1	8	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.674.504	100%	991.650	100%	2.250.000	100%	2.500.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000
1	8	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.069.332	100%	1.013.251	100%	600.000	100%	700.000	100%	700.000	100%	750.000
1	8	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	22.000	100%	5.500	100%	6.500	100%	7.500	100%	8.500	100%	9.500
1	8	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90%	602.690	91%	494.340	92%	450.000	93%	500.000	94%	550.000	95%	600.000



1	8	5	Program Pengembangan data/informasi	Tingkat Integrasi data OPD ke dalam Serdang Bedagai satu data	NA	20%	684.995	80%	659.835	85%	900.000	90%	1.000.000	95%	1.100.000	100%	1.200.000
1	8	6	Program Perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan kabupaten trhdg dokumen perencanaan OPD:			539.945		599.197		650.000		700.000		750.000	100%	800.000
				- RPJMD dengan Renstra	NA	86%		88%		90%		92%		94%		96%	
				- RPJMD dengan RKPD	84%	86%											
				- RKPD dengan Renja	NA	86%											
				Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	NA	85%		87%		89%		90%		92%		94%	
1	8	7	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang diterapkan	NA	NA	349.789	100%	632.500	100%	650.000	100%	700.000	100%	750.000	100%	800.000
1	8	8	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya/SDM	Persentase hasil kajian bidang sosial budaya/SDM yang diterapkan	NA	NA	808.731	100%	707.520	100%	750.000	100%	800.000	100%	850.000	100%	900.000



1	8	9	Program Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang			568.040		837.320		850.000		1.000.000		1.200.000		1.400.000
1	8	10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase hasil kajian bidang prasarana wilayah yang diterapkan	NA	NA	602.690	100%	309.155	100%	450.000	100%	500.000	100%	550.000	100%	600.000
			<b>TOTAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				<b>6.922.716</b>		<b>6.250.268</b>		<b>7.556.500</b>		<b>8.407.500</b>		<b>9.208.500</b>		<b>9.809.500</b>
1	9		<b>PERHUBUNGAN</b>														
1	9	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	797.000	100%	740.000	100%	1.250.000	100%	1.350.000	100%	1.450.000	100%	1.500.000
1	9	2	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	25.000	100%	25.000	100%	60.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000
1	9	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	802.205	100%	690.000	100%	1.250.000	100%	1.350.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000



1	9	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90%	200.000	91%	100.000	92%	100.000	93%	150.000	94%	150.000	95%	200.000
1	9	5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		380.000	100%	455.000	100%	455.000	100%	455.000	100%	455.000	100%	455.000
1	9	5	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	708.000	77	2.964.000	79	1.000.000	81	1.100.000	83	1.250.000	85	1.500.000
1	9	6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan kecelakaan	NA	10%	456.000	10%	1.791.000	10%	800.000	10%	900.000	10%	1.000.000	10%	1.100.000
1	9	7	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas prasarana LLAJ dalam kondisi baik	70%	70%	75.000	70%	100.000	80%	130.000	80%	160.000	80%	190.000	80%	220.000
1	9	8	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan	82 %	82 %	105.001	82 %	250.000	82 %	400.000	85 %	350.000	85 %	500.000	90 %	600.000
			<b>TOTAL PERHUBUNGAN</b>				<b>3.063.205</b>		<b>6.410.000</b>		<b>4.590.000</b>		<b>5.085.000</b>		<b>5.640.000</b>		<b>6.720.000</b>
<b>1</b>	<b>10</b>		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>														
1	10	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	854.000	100%	1.687.200	100%	2.043.355	100%	1.526.586	100%	1.754.388	100%	2.531.648
1	10	2	Program Peningkatan pengembangan sistem	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan	100%	100%	55.000	100%	45.000	100%	50.000	100%	51.600	100%	52.600	100%	72.200



			pelaporan capaian kinerja dan keuangan	keuangan (10 Laporan)													
1	1 0	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	0%	0	100%	638.000	100%	30.000	100%	660.000	100%	730.000	100%	806.000
1	1 0	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	0%	0	6%	40.000	12%	76.000	14%	150.000	0%	0	16%	114.000
1	1 0	5	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Tingkat kualitas air titik pantau yang memenuhi baku mutu  Tingkat kualitas udara ambien titik pantau yang memenuhi baku mutu	NA  NA	30%  65%	926.000	32%  67%	986.500	35%  70%	1.255.500	38%  72%	1.509.240	40%  74%	1.198.394	42%  76%	2.488.361
1	1 0	6	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase luas lahan kritis yang diidentifikasi tingkat kerusakannya	36,8%	45%	462.600	50%	390.000	55%	682.500	60%	1.178.750	65%	853.125	70%	1.962.330
1	1 0	7	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Cakupan layanan informasi lingkungan yang tersedia	100%	100%	165.600	100%	261.120	100%	531.000	100%	543.000	100%	662.500	100%	860.000





1	10	8	Program Peningkatan pengendalian polusi	Tingkat emisi gas rumah kaca	NA	90%	30.000	88%	15.000	86%	50.000	84%	65.000	82%	80.000	80%	100.000
1	10	9	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3 R Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	2% 28,7%	2% 32%	2.030.000	3% 34%	3.700.705	3% 36%	6.487.400	3,5% 38%	7.326.700	3,5% 40%	9.596.200	4% 42%	8.647.100
1	10	10	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	NA	0%	0	0%	0	100%	90.000	100%	105.000	100%	120.000	100%	130.000
<b>TOTAL LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>4.492.600</b>		<b>7.763.525</b>		<b>11.295.755</b>		<b>13.039.376</b>		<b>15.148.207</b>		<b>17.048.809</b>
1	11		<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>														
1	11	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	868.100	100%	1.160.000	100%	1.331.500	100%	1.307.500	100%	1.400.500	100%	7.512.600
1	11	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang tersedia	100%	100%	880.000	100%	1.385.000	100%	1.615.000	100%	1.545.000	100%	1.300.000	100%	1.345.000
1	11	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	55.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	75.000	100%	80.000



1	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	0	80%	245.000	92%	285.000	93%	305.000	94%	310.000	95%	327.500
1	1	5	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	60%	65%	2.385.000	70%	3.463.500	75%	4.758.250	80%	5.413.250	85%	5.523.250	90%	5.440.000
			<b>TOTAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				<b>4.188.100</b>		<b>6.313.500</b>		<b>8.049.750</b>		<b>8.630.750</b>		<b>8.608.750</b>		<b>7.175.000</b>
<b>1</b>	<b>12</b>		<b>SOSIAL</b>														
1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	300.500	100%	522.322	100%	574.553	100%	632.009	100%	695.210	100%	764.730
1	1	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	300.000	100%	30.800	100%	33.880	100%	37.268	100%	40.995	100%	45.094
1	1	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (10 Laporan)	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)			12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500
1	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	92%	50.000	93%	75.000	94%	100.000	95%	125.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	1	5	Program Pelayanan & Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS yang ada	7000 PMKS		148.862		598.862		600.000		700.000		800.000		900.000
1	1	6	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	13%	14%	1.751.063	14.5%	1.615.000	15%	1.200.000	17%	1.300.000	18.5%	1.400.000	20%	1.500.000
1	1	7	Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti asuhan/jompo yang difasilitasi	8	8	100.000	8	100.000	0	8	9	300.000	9	500.000	9	700.000
1	1	8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang ditangani			193.000		200.000		200.000		350.000		400.000		500.000
1	1	9	Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	7000 orang		500.250		130.000		250.000		350.000		450.000		550.000
1	1	10	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK)	35673		0		0		250.000		350.000		450.000		550.000
			<b>TOTAL SOSIAL</b>				<b>3.306.175</b>		<b>3.209.484</b>		<b>3.170.941</b>		<b>4.106.777</b>		<b>4.848.705</b>		<b>5.647.324</b>
			<b>KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>														



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	825.400	100%	1.000.000	100%	1.300.000	100%	1.400.000	100%	1.500.000	100%	1.550.000
1	1	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	60%	63,14%	1.255.600	75,60%	950.000	80%	1.100.000	85%	1.100.000	90%	1.150.000	95%	1.150.000
1	1	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	40.000	100%	50.000	100%	60.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000
1	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	92%	50.000	93%	75.000	94%	100.000	95%	125.000
1	1	5	Program Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja yang di tempatkan (orang)	NA	2440 Orang	160.000	2540 Orang	1.553.000	2640 Orang	1.960.950	2740 Orang	2.242.592	2840 Orang	2.551.481	2940 Orang	2.841.703
1	1	6	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM tenaga kerja	Bertambahnya lapangan kerja baru	NA	500	775.016	500	1.742.250	1000	2.003.587	1000	2.304.125	1000	2.649.744	2000	3.047.206
				Bertambahnya tenaga kerja yang bersertifikasi	0	0		500		500		500		500		500	



1	1	7	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100%	100%	350.500	100%	500.000	100%	600.000	100%	750.000	100%	850.000	100%	950.000
				Jumlah kejadian kecelakaan kerja													
1	1	8	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah	Jumlah UMKM yang sudah ada memiliki Izin	NA	500	357.500	1.000	737.500	1.500	848.125	2.000	975.343	2.500	1.121.645	3.000	1.289.892
1	1	9	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	1.084	27,94%	330.774	31,02%	738.774	34,28%	1.010.574	37,21%	1.134.929	40,00%	1.262.150	42,65%	1.342.590
1	1	10	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru yang mendapat akses modal	NA	0	0	75	50.000	75	190.000	75	211.000	75	235.150	75	262.922
				Jumlah wirausaha baru	250	250		250		250		500		500		1.000	
			<b>TOTAL KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>				<b>4.094.790</b>		<b>7.321.524</b>		<b>9.123.236</b>		<b>10.267.989</b>		<b>11.520.170</b>		<b>12.659.313</b>
1	1	4	<b>PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>														
1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.080.602	100%	1.058.960	100%	1.188.500	100%	1.257.500	100%	1.352.500	100%	1.447.500



1	1 4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90,76%	90,76%	500.595	91,61%	704.200	92%	570.000	93%	582.000	94%	590.000	95%	665.000
1	1 4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	0	100%	0	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000
1	1 4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		3.200		0	50%	150.000	60%	200.000	70%	250.000	80%	300.000
1	1 4	5	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata (orang)	266.666	333.334	358.400	400.000	1.020.000	500.000	2.010.000	650.000	2.242.500	850.000	2.010.750	1.000.000	2.429.825
1	1 4	6	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Baru	14	14	120.320	14	8.928.000	14	7.620.000	15	8.405.000	16	9.170.000	17	10.540.000
1	1 4	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Persentase kegiatan ekonomi kreatif yang dilestarikan	NA	NA	0	50%	980.000	60%	1.165.000	70%	1.389.000	80%	1.590.400	90%	1.819.440
1	1 4	8	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Kampung Budaya Lokal	0	0	0	0	0	1	775.000	1	900.000	1	1.050.000	2	1.850.000
1	1 4	9	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase tradisi yang masih dijalankan di masyarakat	NA	53%	382.000	59%	835.000	65%	2.130.000	71%	2.827.500	76%	3.989.750	82%	5.617.625
1	1 4	10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang	0	2	100.000	2	350.000	2	1.135.000	3	1.373.500	5	1.698.850	7	2.105.785



				dilestarikan													
1	1 4	1	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang terampil	0	1	40.000	1	450.000	1	1.190.000	1	715.000	1	930.000	1	940.000
	1 4	2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah organisasi pemuda yang terampil	NA	0	380.750	0	150.000	0	635.000	1	731.500	1	829.350	1	946.410
1	1 4	3	Program Pembinaan pemasyarakatan olah raga	Jumlah prestasi olah raga yang diraih	NA	45	657.370	49	1.053.400	51	2.465.000	54	1.903.700	56	2.283.700	59	2.268.500
1	1 4	4	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah GOR dan sarana olahraga yang terbangun	4	0	762.280	0	1.010.000	12	2.724.500	12	2.437.500	12	2.057.500	12	1.937.900
			TOTAL PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				4.385.517		16.539.560		23.783.000		24.989.700		27.827.800		32.892.985
1	1 5		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI														
1	1 5	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	459.689	100%	566.000	100%	618.500	100%	692.000	100%	764.000	100%	814.000
1	1 5	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	406.000	100%	793.000	100%	670.000	100%	238.000	100%	210.000	100%	200.000



1	15	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	36.600	100%	30.000	100%	27.000	100%	28.000	100%	30.000	100%	32.000
1	15	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	93%	110.000	93%	130.000	94%	150.000	95%	200.000	96%	250.000
1	15	5	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase konflik sosial yang dideteksi dan ditangani	65%	70%	1.360.836	80%	1.650.000	90%	2.165.000	100%	2.530.000	100%	2.850.000	100%	3.150.000
1	15	6	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pembinaan ideologi	60%	60%	1.515.390	65%	455.000	70%	520.000	75%	580.000	80%	615.000	90%	645.000
1	15	7	Program kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Angka konflik SARA	0	0	0	0	505.000	0	545.000	0	595.000	0	630.000	0	665.000
1	15	8	Program Peningkatan kelembagaan masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	40%	50%	206.000	55%	620.000	60%	1.235.000	65%	1.395.000	70%	1.555.000	80%	1.730.000
1	15	9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu			577.530		620.000		972.000		1.052.000		1.185.000		740.000
				- Pilgub	NA				60%								
				- Pileg	74%						74%						





				- Pilpres	66%						68%						
				- Pilkada	59%								63%				
1	15	10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kasus narkoba yang ditangani	NA	25	623.108	22	705.000	20	770.000	18	830.000	15	885.000	10	950.000
1	15	11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda yang ditetapkan	NA	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				5.185.153		6.204.000		7.652.500		8.090.000		8.924.000		9.176.000
1	16		SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA														
1	16	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	366.801	100%	359.446	100%	383.435	100%	396.210	100%	405.680	100%	435.427
1	16	2	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	28.500	100%	30.200	100%	37.350	100%	34.500	100%	34.500	100%	34.500
1	16	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	702.388	100%	1.368.384	100%	7.108.686	100%	3.898.007	100%	3.310.163	100%	3.286.757
1	16	4	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	NA		0		0		0	95%	125.000		0		0



1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	138.406	92%	420.000	93%	632.200	94%	672.200	95%	580.000	96%	560.000
1	1	6	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	45%	60%	3.827.700	70%	4.340.250	80%	4.364.410	90%	4.364.410	100%	4.364.410	100%	4.364.410
1	1	7	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	3.691.358	100%	1.103.800	100%	1.258.800	100%	1.283.800	100%	763.800	100%	1.053.800
1	1	8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	100%	100%	0	100%	115.200	100%	265.200	100%	265.200	100%	265.200	100%	265.200
			<b>TOTAL SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA</b>				<b>8.755.153</b>		<b>7.737.280</b>		<b>14.050.081</b>		<b>11.039.327</b>		<b>9.723.753</b>		<b>10.000.094</b>
1	1	7	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	28.967.220	100%	28.988.207	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	36.000.000
1	1	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparat	Persentase sarana dan prasarana aparat dalam kondisi baik	100%	100%	8.371.538	100%	10.554.999	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000



1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat	100%	100%	396.000	100%	409.500	100%	451.000	100%	510.000	100%	620.000	100%	730.000
1	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	610.500	92%	929.335	93%	650.000	94%	700.000	95%	750.000	96%	800.000
1	1	5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nilai LPPD	2.5018	2.57	1.474.370	2.623	1.469.066	2.793	1.000.000	2.953	1.100.000	3.05	1.250.000	3.21	1.500.000
1	1	6	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah tanda batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai	25 tanda batas	2 tanda batas	250.000	2 tanda batas	693.000	2 tanda batas	400.000	2 tanda batas	450.000	2 tanda batas	500.000	2 tanda batas	550.000
1	1	7	Program Perlombaan Lembaga Pemerintahan	Persentase kecamatan yang mengikuti perlombaan kecamatan terbaik	100%	100%	401.995	100%	500.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	800.000	100%	900.000
1	1	8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi MoU setiap tahun	50%	50%	179.872	60%	103.015	70%	110.000	80%	120.000	90%	130.000	100%	140.000
1	1	9	Program Penataan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum yang difasilitasi setiap tahun:			100.000		150.000		250.000		325.000		375.000		425.000
				Perda yang ditetapkan	133	8		11		11		12		12		12	



				Perda yang diundangkan	133	8		11		11		12		12		12	
				Peraturan Bupati	270	20		20		20		20		20		20	
				Keputusan Bupati	2281	400		400		400		400		400		400	
1	17	0	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Persentase jumlah kasus-kasus yang difasilitasi	100%	100%	100.000	100%	150.000	100%	250.000	100%	325.000	100%	375.000	100%	425.000
1	17	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai rencana arus kas	70%	80%	463.650	85%	829.180	90%	500.000	95%	600.000	100%	700.000	100%	800.000
1	17	2	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase capaian inflasi daerah	100%	100%	462.000	100%	830.000	100%	913.000	100%	1.015.000	100%	1.200.000	100%	1.395.000
1	17	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-procurement	100%	100%	2.420.000	100%	2.500.000	100%	2.750.000	100%	3.000.000	100%	3.250.000	100%	3.500.000
				Persentase kegiatan yang dilelang sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1	17	4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan fisik kegiatan	37, 5 %	100%	127.636	100%	191.500	100%	210.650	100%	240.000	100%	270.000	100%	305.000



1	1 7	1 5	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Persentase pengusaha yang paham tentang peraturan jasa konstruksi	100%	100%	362.464	100%	49.000	100%	228.900	100%	295.000	100%	350.000	100%	425.000
1	1 7	1 6	Program Hari-Hari Besar Keagamaan	Persentase fasilitas aktifitas keagamaan di masyarakat umum	NA	80%	2.508.880	80%	3.652.000	80%	3.000.000	80%	3.200.000	80%	3.500.000	80%	4.200.000
1	1 7	1 7	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan	Jumlah aliran sesat	0	0	4.696.515	0	4.055.820	0	2.000.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0	3.500.000
1	1 7	1 8	Program Peningkatan Hubungan Silaturahmi	Persentase kegiatan hari besar keagamaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten	80%	80%	3.043.215	80%	3.146.900	80%	3.000.000	80%	3.200.000	80%	3.500.000	80%	4.200.000
1	1 7	1 9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase usulan Hibah dan Bansos yang difasilitasi	100%	100%	0	100%	110.000	100%	110.000	100%	120.000	100%	130.000	100%	140.000
1	1 7	2 0	Program Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	56	58	0	60	187.000	62	200.000	65	220.000	68	240.000	70	260.000
1	1 7	2 1	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang melaporkan Dokumen Kinerja tepat waktu	70%	80%	163.446	85%	515.000	90%	861.500	95%	1.107.000	100%	1.010.000	100%	1.250.000
				Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	C	CC		B		B		B		BB		BB	



1	1	2	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaan	NA	10%	99.343	20%	140.000	30%	824.000	50%	1.150.000	75%	1.060.000	100%	1.375.000
				Persentase OPD yang menerapkan SOP dan SPP	70%	80%		85%		90%		95%		100%		100%	
1	1	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	75	0	77	0	79	25.000	81	25.000	83	35.000	85	35.000
			<b>TOTAL SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>55.198.644</b>		<b>60.153.522</b>		<b>61.334.050</b>		<b>65.902.000</b>		<b>70.045.000</b>		<b>75.855.000</b>
1	1	8	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														
1	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pencapaian standart pelayanan prima administrasi perkantoran	100%	100%	322.158	100%	1.030.000	100%	2.811.000	100%	2.935.000	100%	2.940.000	100%	2.945.000
1	1	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	182.285	90%	288.880	95%	2.283.760	95%	1.931.520	95%	1.931.520	95%	1.931.520
1	1	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	0	100%	0	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000



1	18	4	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi	84%	78%	268.712	100%	350.000	100%	1.165.000	100%	1.165.000	100%	1.165.000	100%	1.165.000
1	18	5	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	NA	0%	0	0%	0	60%	826.500	75%	1.330.000	90%	1.395.000	100%	1.470.000
1	18	6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan internet	NA	0%	0	0%	0	100%	100.000	100%	0	100%	0	100%	0
1	18	7	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	100%	100%	1.555.312	100%	1.782.000	100%	2.307.000	100%	2.357.000	100%	2.357.000	100%	2.357.000
1	18	8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase OPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	NA	0%	0	0%	0	50%	635.000	65%	575.000	80%	585.000	100%	575.000
				Persentase pengaduan yang diselesaikan	NA	0%	0	0%	0	100%		100%		100%		100%	
1	18	9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi melalui petunjuk dan Media Cetak	100%	100%	1.089.597	100%	998.620	100%	2.088.120	100%	2.075.620	100%	2.093.120	100%	2.075.620
1	18	10	Program Perlombaan Kehumasan	Persentase minat masyarakat ikut perlombaan	NA	0%	0	0%	0	100%	260.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000



			TOTAL KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.418.064		4.449.500		13.431.380		13.229.140		13.326.640		13.379.140
1	19		SEKRETARIAT DPRD														
1	19	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	2.095.600	100%	2.199.600	100%	3.362.860	100%	3.644.146	100%	4.008.560	100%	4.409.416
1	18	2	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	60.000	100%	40.000	100%	44.000	100%	48.400	100%	53.240	100%	58.564
1	18	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	2.230.850	100%	3.028.650	100%	3.281.515	100%	3.944.701	100%	4.029.136	100%	4.430.053
1	18	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	464.000	100%	464.000	100%	575.400	100%	689.084	100%	640.090	100%	647.955
1	18	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	330.000	92%	360.000	93%	396.000	94%	435.600	95%	479.160	96%	527.076
1	18	6	Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Persentase Penguatan Dan Peningkatan Kualitas/Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	23.077.582	100%	25.163.250	100%	27.679.575	100%	30.447.532	100%	33.492.285	100%	36.841.514





1	18	7	Program peningkatan hubungan silaturahmi	Persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan/ kegiatan silaturahmi	NA	80%	137.000	80%	137.000	80%	150.700	80%	165.770	80%	182.347	80%	200.581
			<b>TOTAL SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>28.395.032</b>		<b>31.392.500</b>		<b>35.490.050</b>		<b>39.375.233</b>		<b>42.884.818</b>		<b>47.115.159</b>
1	19		<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>														
1	19	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	5.674.280	100%	2.911.200	100%	2.518.330	100%	2.770.163	100%	2.933.779,3	100%	3.173.157,23
1	19	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	2.966.095,3	100%	462.952	100%	706.000	100%	776.600	100%	854.260	100%	939.686
1	19	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	474.000	100%	154.200	100%	903.500	100%	680.350	100%	748.385	100%	823.223,5
1	19	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	220.000	92%	20.000	93%	94.000	94%	24.000	95%	26.620	96%	29.282
1	19	5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.415.950	Tepat Waktu	1.876.010	Tepat Waktu	3.599.190	Tepat Waktu	3.838.109	Tepat Waktu	3.677.419,9	Tepat Waktu	4.045.161,89



1	19	6	Program Peningkatan pengelolaan barang daerah	Persentase kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	100%	100%	618.000	100%	167.500	100%	483.925	100%	532.317,5	100%	585.549,25	100%	644.104,175
1	19	7	Program Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Pemerintah	Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersertifikat	45,67%	56,44%	315.000	67,21%	313.700	77,97%	321.070	88,74%	353.177	100%	388.494,7	100%	427.344,17
1	19	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Keuangan	NA	63	70.000	68	60.000	73	381.000	78	130.900	82	143.990	85	158.389
1	19	9	Program Penataan Perundang-Undangan	Penataan perundangan-undangan barang milik daerah	-	-	-	100%	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>				<b>13.753.325,3</b>		<b>6.115.562</b>		<b>9.007.015</b>		<b>9.105.816,5</b>		<b>9.358.498,15</b>		<b>10.240.347,965</b>
1	20		<b>PENDAPATAN</b>														
1	20	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	5.984.659	100%	1.271.700	100%	2.275.550	100%	2.416.205	100%	2.570.925	100%	2.741.118
1	20	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.395.093	100%	1.338.850	100%	1.357.735	100%	1.183.508	100%	1.016.859	100%	1.258.545



			aparatur	dalam kondisi baik													
1	20	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	217.500	100%	460.450	100%	1.450.900	100%	1.596.540	100%	1.713.884	100%	1.852.772
1	20	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	247.000	0%	300.000	92%	565.000	93%	541.500	94%	520.650	95%	552.715
1	20	5	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	6.30%	6.50%	2.017.950	6.70%	1.814.500	6.90%	2.850.950	7.10%	2.470.045	7.30%	2.703.049	7.50%	3.096.354
1	20	6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	63	125.000	68	65.000	73	150.000	78	178.650	82	170.000	85	235.166
1	20	7	Program Peningkatan/ Pembinaan Sadar Pajak	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat membayar pajak	57,48 %	62,08 %	523.500	67,04 %	194.000	72,41 %	730.000	78,20 %	803.000	84,46 %	883.300	91,21 %	971.630
			TOTAL PENDAPATAN				11.510.702		5.444.500		9.380.135		9.189.448		9.578.667		10.708.300
1	21		INSPEKTORAT														
1	21	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	389.550	100%	428.505	100%	471.355	100%	518.491	100%	570.340	100%	630.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	995.344	100%	599.658	100%	1.426.624	100%	1.022.300	100%	1.224.258	100%	1.400.000
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	NA	47%	750.000	50%	1.232.500	65%	1.431.450	75%	1.593.845	85%	1.858.217	95%	2.000.000
1	2	4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	76.000	100%	117.100	100%	121.550	100%	134.020	100%	147.050	100%	165.000
1	2	5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/ daerah	42%	65%	2.686.000	75%	3.044.600	80%	4.549.060	90%	5.003.966	95%	5.504.362	100%	6.000.000
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang telah ditindaklanjuti	65%	65%		75%		80%		90%		95%		100%	
1	2	6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase OPD yang menerapkan SPIP level 3 (terdefinisi)	NA	0%	277.500	0%	390.250	50%	429.275	75%	472.202	95%	519.422	100%	575.000



1	2	7	Program Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	NA	50%	40.000	75%	40.000	85%	44.000	95%	48.400	100%	53.240	100%	60.000
			<b>TOTAL INSPEKTORAT</b>				<b>5.214.394</b>		<b>5.852.613</b>		<b>8.473.314</b>		<b>8.793.224</b>		<b>9.876.889</b>		<b>10.830.000</b>
1	2	2	<b>PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL</b>														
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	753.866	100%	723.800	100%	991.500	100%	971.500	100%	1.001.500	100%	1.011.500
1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	150.000	100%	842.000	100%	1.681.500	100%	110.000	100%	500.000	100%	170.000
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	21.000	100%	15.000	100%	23.000	100%	23.000	100%	23.000	100%	23.000
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	25.000		0	93%	125.000	94%	50.000	95%	135.000	96%	140.000
1	2	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pertumbuhan jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	NA	3,70%	192.500	7,30%	195.000	7,90%	500.000	8,10%	540.000	8,40%	580.000	8,90%	590.000



1	2	6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)	NA	1%	45.000	1,51%	15.000	1,53%	95.000	1,56%	70.000	1,58%	95.000	1,60%	70.000
1	2	7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Pelayanan Perizinan	Rata-rata lama proses perizinan (hari)	7	5	30.000	5	45.000	3	585.000	3	87.500	3	95.000	2	95.000
1	2	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,12	153.900	78,18	165.000	78,25	350.000	78,28	265.000	78,34	260.000	78,38	370.000
1	2	9	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi Retribusi	100%	100%	35.000	100%	35.000	100%	85.000	100%	95.000	100%	95.000	100%	95.000
			<b>TOTAL PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>1.406.266</b>		<b>2.035.800</b>		<b>4.436.000</b>		<b>2.212.000</b>		<b>2.784.500</b>		<b>2.564.500</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN</b>														
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	760.000	100%	890.000	100%	981.500	100%	1.081.650	100%	1.191.315	100%	1.311.446
1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	620.000	100%	682.000	100%	1.113.200	100%	1.224.520	100%	1.346.972	100%	1.481.669
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	25.000	100%	26.250	100%	27.562	100%	28.940	100%	30.387	100%	44.669
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase ASN yang memiliki	NA	15%	4.816.375	13%	4.206.600	15%	7.045.330	17%	7.310.851	19%	8.409.518	21%	9.838.155



			Sumber Daya Aparatur	sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial													
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Teknis	NA	60,15%		68%		70%		72%		74%		76%	
1	2 3	5	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	59.17%	80%	770.000	85%	1.069.750	87%	1.202.987	90%	1.529.336	92%	1.326.293	95%	1.714.710
1	2 3	6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan BKD	NA	75%	90.000	80%	304.500	83%	1.008.787	85%	711.939	90%	954.172	95%	912.541
1	2 3	7	Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Persentase data ASN yang sesuai Surat Edaran Kepala BKN No. 11 Tahun 2012	NA	20%	0	80%	0	85%	500.000	90%	600.000	95%	700.000	100%	800.000
1	2 3	8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	NA	100%	435.000	100%	577.500	100%	644.962	100%	691.693	100%	668.528	100%	811.624
				Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	NA	90%		90%		90%		90%		90%			
				Persentase tingkat kehadiran ASN	NA	NA		85%		88%		90%		92%		95%	
			TOTAL KEPEGAWAIAN				7.516.375		7.756.600		12.799.328		13.453.929		14.907.185		17.204.814



1	2	4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
1	2	4	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.094.308	100%	1.037.328	100%	1.175.400	100%	1.322.400	100%	1.428.400	100%	1.474.400
1	2	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70%	70%	42.000	75%	10.000	75%	505.000	75%	125.000	75%	145.000	80%	165.000
1	2	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	39.000	100%	163.800	100%	250.000	100%	115.000	100%	475.000	100%	195.000
1	2	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	70%	70%	10.000	70%	25.000	71%	190.000	72%	40.000	73%	450.000	75%	280.000
1	2	4	5	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, Posyandu) yang aktif	75%	90%	1.048.560	90%	1.458.028	100%	2.144.090	100%	2.236.360	100%	2.296.860	100%	2.461.480





1	2	6	Program Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	Persentase aparaturn pemerintahan desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	55%	80%	275.000	90%	600.000	95%	700.000	100%	750.000	100%	800.000	100%	850.000
1	2	7	Program Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna	Jumlah TTG yang dapat dimanfaatkan masyarakat	12	14	256.570	16	177.660	18	300.000	20	200.000	22	950.000	25	350.000
1	2	8	Program Pengembangan Usaha Ekonomi pedesaan	Persentase BUMDES yang memiliki laba	0%	0%	675.089	1%	452.950	5%	1.025.000	15%	1.295.000	35%	1.235.000	50%	1.010.000
1	2	9	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase permasalahan pemerintahan desa yang diselesaikan	90%	90%	170.420	95%	240.575	95%	585.000	96%	440.000	97%	560.000	97%	455.000
1	2	10	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan pembinaan Desa yang sudah tertata	65%	75%	70.000	76%	535.000	80%	855.000	90%	883.000	92%	1.067.000	94%	1.245.000



1	2	1	Program Peningkatan Swadaya Masyarakat	Jumlah kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui kegiatan gotong-royong	237	237	356.725	237	336.875	474	455.000	474	475.000	474	520.000	711	1.675.000
1	2	2	Program Peningkatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk	0	0	55.000	0	110.000	5	295.000	10	385.000	15	474.000	25	534.000
			<b>TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				<b>4.092.672</b>		<b>5.147.216</b>		<b>8.479.490</b>		<b>8.266.760</b>		<b>10.401.260</b>		<b>10.694.880</b>
1	2	5	<b>PERTANIAN</b>														
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	884.800	100%	1.507.600	100%	1.658.360	100%	1.017.436	100%	1.118.937	100%	1.170.510
1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	635.000	100%	2.395.000	100%	1.182.500	100%	1.494.150	100%	617.265	100%	670.192
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	53.500	100%	41.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91%	90.000	92%	20.000	93%	20.000	93%	20.000	94%	65.000	95%	69.500



1	2	5	Program Peningkatan produksi pertanian	Produksi (ton)			9.090.800		9.994.250		11.247.300		12.519.830		13.846.313		15.152.444
				Padi	408.335	428.748		438.520		446.880		454.480		463.600		471.200	
				Ubi Kayu	532.873	501.479		511.221		514.523		517.842		521.126		524.427	
				Jagung	15.868	18.109		10.440		10.723		11.007		11.269		11.553	
				Kedelai	845												
				Jumlah Produksi hasil pertanian yang telah disertifikasi : - Beras (Ton) - Organik Benih Padi Unggul (Ton)	NA NA	87 1.916		93 2.022		99 2.128		105 2.234		111 2.340		117 2.446	
1	2	5	6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pameran yang diikuti	4	71.390	4	76.800	4	190.000	4	90.000	4	200.000	4	100.000
1	2	5	7	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas padi dan palawija :		940.000		1.919.000		6.180.900		7.386.990		8.540.689		9.364.758
				Padi				1,76%		1,91%		1,7%		2,01%		1,64%	
				Ubi Kayu				2,8%		2,72%		2,65%		2,38%		2,52%	
				Jagung				0,99%		0,98%		1,03%		0,45%		0,56%	
				Jumlah Produksi hasil pertanian yang memiliki nilai tambah : - Padi (Ton) - Karet (Ton)	NA NA	128.624 52		135.941 52		143.002 100		149.978 100		157.624 150		164.920 150	



1	2	8	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi			617.000		854.000		2.604.000		3.146.000		3.622.000		4.654.000
	5			Sayur-Sayuran (ton)	NA	2%		2%		2%		2%		2%		2%	
				Buah-Buahan (ton)	NA	2%		2%		2%		2%		2%		2%	
				Tanaman Obat (%)	NA	1%		1%		1%		1%		1%		1%	
1	2	9	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air	Persentase jaringan tersier dalam kondisi baik (%)	NA	50%	9.152.200	55%	10.390.000	60%	13.620.000	65%	15.159.000	70%	16.391.200	75%	17.504.320
1	2	1	Program pengembangan prasarana dan sarana lahan/jalan	panjang jalan pertanian	61 km	4 km	4.015.715	9 km	2.600.000	7,5 km	4.400.000	7,5 km	6.600.000	7,5 km	7.800.000	7,5 km	11.500.000
	5	0		Optimasi lahan yang kurang subur (ha)	4900	0		50		50		50		50		50	
				Penambahan luas baku lahan sawah (ha)	0	0		50		50		50		50		50	
1	2	1	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan/ pencegahan penyakit utama hewan ternak	100%	100%	775.000	100%	1.064.000	100%	891.400	100%	1.037.540	100%	1.232.794	100%	1.232.573
1	2	1	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi (ekor) :			1.465.000		1.256.000		1.764.100		1.841.760		1.964.686		2.058.655
	5	2		- Sapi	43.615	43.700		44.051		44.492		44.937		45.386		45.840	
				- Kerbau	621	636		651		666		681		696		711	
				- Domba	47.700	48.105		48.510		48.915		49.320		49.725		50.133	
				- Kambing	77.306	77.400		78.174		78.956		79.745		80.542		81.347	
				- Itik	275.341	277.681		280.021		282.361		284.701		287.041		289.386	
				Produksi daging (ton)	1.715	1.715		1.732		1.749		1.767		1.775		1.785	



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	2	1	Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan	Persentase peningkatan nilai tambah tanaman karet	NA	10%	393.000	10%	525.000	10%	1.070.000	10%	1.470.000	10%	1.520.000	10%	1.445.000
	5	3		Persentase peningkatan nilai tambah tanaman kakao	NA	30%		30%		30%		30%		30%		30%	
1	2	1	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Peningkatan hasil kelahiran IB (ekor)	NA	8.067	783.000	8.147	3.567.000	8.228	2.006.000	8.310	5.064.200	8.393	1.997.620	8.476	2.323.932
1	2	1	Program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan	Produksi			1.165.000		5.600.000		4.525.000		5.230.000		5.720.000		6.350.000
	5	5		kelapa sawit		1.154.467		1.177.921		1.201.375		1.224.829		1.248.283		1.271.736	
				karet		39.134		40.505		41.876		42.247		43.618		44.897	
				kakao		1.077		1.105		1.125		1.175		1.193		1.210	
				kelapa		2.451		2.456		2.475		2.493		2.495		2.499	
1	2	1	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah temuan pangan asal hewan yang tidak ASUH	NA	NA	175.000	50	265.000	40	273.250	30	582.325	20	642.308	10	703.288
1	2	1	Program Peningkatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	Persentase kelompok P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif (%)	15%	15%	305.988	16,25%	198.984	26,25%	0	0	0	0	0	0	0
			<b>TOTAL PERTANIAN</b>				<b>30.612.393</b>		<b>42.273.634</b>		<b>51.912.810</b>		<b>62.989.231</b>		<b>65.658.811</b>		<b>74.779.172</b>
1	2		<b>KETAHANAN PANGAN</b>														
	6																



1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.284.395	100%	1.034.145	100%	1.137.560	100%	1.250.000	100%	1.376.418	100%	1.513.033
1	2	2	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100%	100%	35.000	100%	50.000	100%	44.000	100%	48.400	100%	53.240	100%	69.564
1	2	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	207.000	100%	251.250	100%	276.375	100%	304.013	100%	334.414	100%	367.855
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	2	5	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH	84,60%	84,60%	1.163.540	85,50%	1.567.425	86,00%	1.723.750	87,00%	1.896.125	88,00%	2.085.738	90,00%	2.294.311
1	2	6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase kompetensi penyuluh	NA	30%	2.659.570	40%	3.780.000	50%	4.158.000	70%	4.573.800	80%	5.031.180	100%	5.534.298
1	2	7	Program peningkatan SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan pertanian	Persentase kelompok tani dengan kualitas baik	30%	50%	1.340.810	65%	1.881.110	70%	1.550.461	80,00%	1.898.258	90%	1.873.175	100%	2.590.253



			TOTAL KETAHANAN PANGAN				6.840.315		8.713.930		9.040.146		10.120.595		10.904.164		12.519.314	
1	2	7	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
1	2	7	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	757.000	100%	767.000	100%	844.000	100%	850.000	100%	900.000	100%	950.000
1	2	7	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	157.000	100%	160.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000.00	100%	400.000
1	2	7	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100%	100%	162.000	100%	120.000	100%	175.000	100%	175.000	100%	180.000	100%	180.000
1	2	7	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	0		0	0	60%	200.000	70%	200.000	80%	200.000	95%	200.000
1	2	7	5	Program Pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	25.363	25.670	750.000	25.980	1.000.000	26.295	6.500.000	26.600	5.000.000	26.909	4.500.000	27.232	5.000.000
					Cakupan bina kelompok nelayan (KUB)	22	30		35		40		45		50		60	
1	2	7	6	Program Pengembangan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	27.258	31.335	4.500.000	34.469	1.600.000	37.915	10.000.000	41.707	9.000.000	45.878	8.000.000	50.465	8.500.000



			perikanan	Cakupan bina kelompok budidaya (Pokdakan)	52	56		63		70		77		84		91	
1	2	7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Volume produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	3.349	4.120	1.935.000	4.161	1.960.000	4.203	1.900.000	4.245	1.900.000	4.287	1.900.000	4.330	2.000.000
				Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	38	40		42		44		46		48		50	
				Jumlah pelaku pengusaha produk olahan perikanan dan kelautan (unit)	24	15		15		16		20		20		20	
				Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	24	80		90		100		110		120		130	
1	2	8	Program pengawasan sumber daya perikanan	Cakupan bina kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	4	4	200.000	5	150.000	6	350.000	6	350.000	6	350.000	7	350.000
				Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Budidaya terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	30	40		45		50		55		60		65	





				Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Pengolahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	25	30		35		40		45		50		55	
1	2	9	Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah SDM Kelautan dan Perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan (orang) Persentase kelompok perikanan dengan kualitas baik	NA	50	200.000	60	250.000	70	400.000	80	400.000	90	400.000	100	400.000
					NA	0%	0	3%		7%		11%		16%		22%	
<b>TOTAL KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>8.661.000</b>		<b>6.007.000</b>		<b>20.719.000</b>		<b>18.225.000</b>		<b>16.430.000</b>		<b>17.980.000</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	600.193	100%	741.493	100%	766.100	100%	777.100	100%	788.100	100%	737.193
1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	250.000	100%	265.000	100%	460.000	100%	490.000	100%	460.000	100%	430.000
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100%	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000



1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	92%	50.000	93%	75.000	94%	100.000	95%	125.000
1	2	5	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	5.21	5.21	494.978	0,0523	520.676	0,0525	663.676	0,053	690.676	0,0532	691.676	0,0534	965.676
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11.47	11.47		11.50		11.53		11.55		11.57		11,57	
1	2	6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	100%	100%	160.000	100%	195.000	100%	388.000	100%	394.000	100%	403.000	100%	398.000
				Jumlah Desa Layak Anak	6	6		3		3		3		3		3	
1	2	7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Desa Prima yang dibentuk	NA	1	45.000	1	30.000	1	155.000	1	161.500	1	172.000	1	173.500



1	28	8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	36	38	58.000	40	733.000	44	1.034.500	48	1.076.500	52	1.076.500	56	1.066.500
1	28	9	Program Keluarga Berencana	Tingkat Penurunan TFR	2,9%	2,9%	1.098.230	2,89%	2.434.674	2,85%	2.589.674	2,7%	2.661.474	2,68%	2.661.474	2,65%	2.661.474
				Jumlah peserta KB baru	12.305	12.305		12.472		13.096		13.750		14.438		15.160	
1	28	10	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Jumlah Lembaga/ Organisasi yang mendukung program KB	10	10	205.000	12	308.000	15	615.000	17	692.000	20	732.000	22	732.000
1	28	11	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK remaja yang aktif	60%	60%	13.000	65%	115.000	70%	240.000	76%	240.000	83%	240.000	90%	240.000
				Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang aktif	7,00%			67,56%		68,85%		70,16%		71,50%		72,86%	
1	28	12	Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU	Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif	8.00%	9.50%	45.000	68,95%	45.000	70,27%	145.000	71,60%	150.000	72,97%	150.000	74,36%	150.000
				Persentase bina keluarga lansia	66,60%	66,60%		68,40%		69,77%		71,16%		72,59%		74,04%	



1	2	1	Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase keluarga sejahtera dan KS I	17,71	17,71	15.000	18,52	25.000	19,49	128.000	20,49	130.000	21,44	135.000	22,32	135.000
1	2	1	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	73.64 %	76.38 %	1.059.230	74.04 %	142.000	74.23 %	146.000	74.43 %	146.000	74.64 %	146.000	74.84 %	1.230.230
			<b>TOTAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>4.068.631</b>		<b>5.579.843</b>		<b>7.405.950</b>		<b>7.709.250</b>		<b>7.780.750</b>		<b>9.069.573</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>														
1	2	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.300.800	100%	1.837.900	100%	1.300.000	100%	1.400.000	100%	1.500.000	100%	1.600.000
1	2	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	952.000	100%	1.087.500	100%	1.122.500	100%	1.192.500	100%	1.254.500	100%	1.334.500
1	2	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100%	100%	44.000	100%	30.000.00	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	0	0.00	11%	30.000	14%	50.000	18%	750.000	21%	100.000	25%	125.000



1	2	5	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah dan jenis produk IKM dan Industri RT yang dipasarkan di luar daerah (jenis)	22	22	580.000	22	785.000	37	1.500.000	52	1.250.000	59	1.000.000	65	750.000
1	2	6	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra cluster industri kreatif	2	2	340.000	3	1.000.000	4	1.000.000	5	1.000.000	5	450.000	5	550.000
1	2	7	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM dan Industri RT berbasis komoditi lokal (unit usaha):	1600	100	452.000	100	778.000	100	800.000	200	900.000	200	1.000.000	200	750.000
				- IKM	1.400	0		0		200		200		100		100	
				- Industri RT	200	0		0		75		75		75		75	
1	2	8	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15.32	15.43	561.000	15.54	685.000	15.65	725.000.00	15.76	790.000	15.87	855.000	15.98	745.000
1	2	9	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	100%	963.000	100%	846.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	450.000	100%	450.000
1	2	10	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang difasilitasi	5%	5%	165.000	10%	175.000	20%	250.000	20%	350.000	20%	350.000	25%	400.000



1	2	1	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase pasar sehat	4%	8%	1.583.000	12%	2.000.000	16%	3.500.000	20%	5.500.000	24%	8.000.000	24%	7.000.000
1	2	1	Program Peningkatan Kapasitas IKM	Jumlah IKM serta Industri RT yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan usaha bisnis di luar daerah (unit usaha)	1.400	100	580.000	50	785.000	100	1.500.000	100	1.250.000	100	1.000.000	100	750.000
				Jumlah industri kreatif yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan usaha bisnis di luar daerah (unit usaha)	25	30		35		55		70		85		100	
1	2	1	Program Investasi dan Promosi Daerah	Jumlah dan jenis produk IKM dan Industri RT yang dipamerkan	8	9	360.000	10	923.000	12	500.000	15	500.000	17	400.000	20	400.000
			<b>TOTAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				<b>7.880.800</b>		<b>10.932.400</b>		<b>12.052.500</b>		<b>15.412.500</b>		<b>16.389.500</b>		<b>14.884.500</b>
1	3	0	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.090.356	100%	1.199.392	100%	1.319.331	100%	1.451.264	100%	1.596.390	100%	1.650.000



1	30	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78,26%	78,26%	0	78,26%	289.343	79,59%	318.277	80,49%	190.823	80,77%	208.315	81%	230.000
1	30	3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	NA		0		0		0		0	98%	100.000		0
1	30	4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100%	100%	15.000	100%	28.000	100%	30.000	100%	32.000	100%	34.000	100%	40.000
1	30	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	95%	96%	0	97%	171.000	98%	180.000	99%	209.000	100%	238.000	100%	250.000
1	30	7	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Persentase desa tangguh bencana	1%	1%	607.736	3%	4.437.811	5%	3.116.701	7%	3.356.784	9%	3.275.917	11%	3.500.000
				Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	39%	39%		39,67%		40,33%		41%		41,67%		42,33%	
1	30	8	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/Sosial	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertangani	100%	100%	350.000	100%	5.933.973	100%	6.533.370	100%	7.199.707	100%	7.919.678	100%	8.200.000



1	30	9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100%	120.000	100%	120.000	100%	120.000	100%	120.000	100%	120.000	100%	120.000
				Tingkat waktu tanggap darurat ( <i>Response Time Rate</i> ) kejadian bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			TOTAL PENANGGULANGAN BENCANA				2.183.092		12.179.519		11.617.680		12.559.578		13.492.300		13.990.000
1	31		KECAMATAN TEBING TINGGI														
1	31	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	114.000	100%	203.300	100%	125.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	31	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	68.500	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000
1	31	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	31	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	0%	0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000





1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	35.000	5	75.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	70.500	87%	145.000	89%	150.000	90%	150.000	92%	150.000	94%	150.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	36.400	1	100.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	150.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	125.000	100%	150.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN TEBING TINGGI</b>				<b>414.400</b>		<b>688.300</b>		<b>790.000</b>		<b>815.000</b>		<b>840.000</b>		<b>890.000</b>
1	3	2	<b>KECAMATAN KOTARIH</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	166.000	100%	175.000	100%	100.000	100%	125.000	100%	125.000	100%	150.000
1	3	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	39.300	100%	135.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	3	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	0%	0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	75.900	5	51.500	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/p erwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	48.950	87%	36.000	89%	150.000	90%	150.000	92%	150.000	94%	150.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	17.000	1	13.500	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	150.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	125.000.00	100%	150.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN KOTARIH</b>				<b>422.165</b>		<b>501.000</b>		<b>765.000</b>		<b>790.000</b>		<b>690.000</b>		<b>890.000</b>



1	3		KECAMATAN DOLOK MASIHL														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	167.000	100%	188.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000
1	3	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	125.501	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	3	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		50.000	96%	107.048	97%	100.000	98%	125.000	99%	125.000	100%	125.000
1	3	7	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	146.950	5	144.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	3	9	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	63.210	87%	68.210	89%	150.000	90%	150.000	92%	150.000	94%	150.000
1	3	8	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	55.000	1	55.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	150.000



1	3	1	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	125.000	100%	150.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN DOLOK MASIHUL</b>				<b>697.661</b>		<b>732.258</b>		<b>845.000</b>		<b>870.000</b>		<b>920.000</b>		<b>970.000</b>
1	3		<b>KECAMATAN SIPISPIS</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	152.600	100%	193.709	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000
1	3	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	67.540	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (9 laporan)	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	51.700	100%	12.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutik diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	0%	0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	76.360	5	97.860	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000



1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	51.700	87%	66.700	89%	125.000	90%	150.000	92%	175.000	94%	200.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	23.550	1	38.772	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN SIPISSIP</b>				<b>498.450</b>		<b>559.041</b>		<b>845.000</b>		<b>870.000</b>		<b>920.000</b>		<b>945.000</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>KECAMATAN PERBAUNGAN</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	119.700	100%	135.426	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000
1	3	3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	72.544	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	16.500	100%	16.500	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	3	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		240.000	0%	333.644	97%	200.000	98%	200.000	99%	200.000	100%	200.000
1	3	7	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	115.800	5	160.600	5	150.000	5	150.000	5	150.000	5	150.000
1	3	8	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	35.330	87%	33.830	89%	125.000	90%	150.000	92%	175.000	94%	200.000
1	3	9	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	72.200	1	75.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
1	3	10	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.880	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN PERBAUNGAN</b>				<b>747.074</b>		<b>905.880</b>		<b>995.000</b>		<b>1.020.000</b>		<b>1.070.000</b>		<b>1.095.000</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>KECAMATAN PANTAI CERMIN</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	192.720	100%	234.049	100%	210.000	100%	210.000	100%	220.000	100%	220.000



1	3	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	84.708	100%	178.200	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	33.000	100%	12.100	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	0%	0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	79.618	5	113.850	5	125.000	5	125.000	5	125.000	5	125.000
1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/p erwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	68.346	87%	52.800	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	75.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	24.230	1	36.300	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			TOTAL KECAMATAN PANTAI CERMIN				557.622		702.299		770.000		805.000		815.000		840.000	
1	3	7	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH															
1	3	7	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	154.000	100%	214.930	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000
1	3	7	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	58.200	100%	172.020	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	7	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	3	7	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	7	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	75.000	5	81.300	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000





1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	47.000	87%	56.300	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	75%	27.000	75%	31.900	80%	65.000	80%	75.000	85%	75.000	85%	75.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	15.000	100%	22.500	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN BANDAR KHALIFAH</b>				<b>391.200</b>		<b>593.950</b>		<b>660.000</b>		<b>670.000</b>		<b>695.000</b>		<b>720.000</b>
1	3	8	<b>KECAMATAN DOLOK MERAWAN</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	120.980	100%	135.741	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000
1	3	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	75.160	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000



1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0	96%	127.048	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	74.550	5	125.000	5	150.000	5	150.000	5	150.000	5	150.000
1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	71.360	87%	80.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	14.800	1	66.000	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	15.000	100%	25.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN DOLOK MERAWAN</b>				<b>386.850</b>		<b>653.789</b>		<b>715.000</b>		<b>725.000</b>		<b>750.000</b>		<b>775.000</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>KECAMATAN TELUK MENGKUDU</b>														
1	3	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	184.000	100%	257.700	100%	150.000	100%	150.000	100%	175.000	100%	175.000



1	3	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	50.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	3	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	3	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	85.000	5	97.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	3	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	76.000	87%	75.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	3	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	15.800	1	25.000	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
1	3	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	35.000	100%	35.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			TOTAL KECAMATAN TELUK MENGKUDU				465.800		584.700		665.000		675.000		700.000		725.000



1	40		KECAMATAN TANJUNG BERINGIN														
1	40	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	201.600	100%	239.100	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000
1	40	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	74.000	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	40	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	28.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	39	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	40	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	52.000	5	53.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	5	100.000
1	40	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	62.000	87%	62.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	40	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	15.350	1	16.000	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000



1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN TANJUNG BERINGIN</b>				<b>474.950</b>		<b>528.100</b>		<b>690.000</b>		<b>700.000</b>		<b>725.000</b>		<b>750.000</b>
1	4	1	<b>KECAMATAN SEI RAMPAH</b>														
1	4	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	147.000	100%	192.800	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	53.700	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	10.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	100.000	98%	100.000	99%	100.000	100%	100.000
1	4	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	148.450	5	210.000	5	150.000	5	150.000	5	150.000	5	150.000



1	4	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	58.000	87%	95.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	4	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	27.800	1	19.000	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	30.000	100%	33.680	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN SEI RAMPAH</b>				<b>479.950</b>		<b>635.480</b>		<b>715.000</b>		<b>725.000</b>		<b>725.000</b>		<b>750.000</b>
1	4	2	<b>KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR</b>														
1	4	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	184.000	100%	174.000	100%	214.000	100%	211.000	100%	211.000	100%	211.000
1	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	70.300	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000



1	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000	100%	75.000
1	4	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	48.950	5	116.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	4	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	46.000	87%	75.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	75.000
1	4	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	65.000	1	65.000	1	65.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	39.750	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR</b>				<b>465.000</b>		<b>605.000</b>		<b>640.000</b>		<b>650.000</b>		<b>650.000</b>		<b>650.000</b>
1	4	3	<b>KECAMATAN SEI BAMBAN</b>														
1	4	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	154.000	100%	182.800	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	82.700	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
1	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	33.000	100%	23.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000	100%	75.000
1	4	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	110.000	5	132.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	4	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	81.700	87%	89.899	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	4	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	75%	33.000	75%	61.000	80%	55.000	80%	55.000	85%	65.000	85%	65.000
1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	35.000	100%	45.000	100%	45.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			TOTAL KECAMATAN SEI BAMBAN				529.400		608.699		620.000		630.000		640.000		665.000





1	4	4	<b>KECAMATAN PEGAJAHAN</b>													
1	4	4	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	181.800	100%	245.800	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	4	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	125.000	100%	205.100	100%	125.000	100%	125.000	100%	125.000
1	4	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	24.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
1	4	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikutui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		50.000		53.780	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000
1	4	4	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	65.500	5	106.500	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	4	4	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	76.650	87%	93.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000



1	4	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	41.400	1	42.500	1	55.000	1	55.000	1	65.000	1	65.000	
1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	45.000	100%	45.000	100%	45.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			TOTAL KECAMATAN PEGAJAHAN				600.350		815.680		645.000		655.000		665.000		690.000	
1	4	5	KECAMATAN SERBA JADI															
1	4	5	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	133.700	100%	222.118	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	4	5	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	58.220	100%	46.290	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000
1	4	5	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	11.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	4	5	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000	100%	75.000



1	4 5	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	70.728	5	64.788	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
1	4 5	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	57.951	87%	81.886	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	4 5	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	42.000	1	23.972	1	55.000	1	55.000	1	65.000	1	65.000
1	4 5	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	49.581	100%	41.031	100%	45.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			TOTAL KECAMATAN SERBA JADI				427.180		491.085		590.000		600.000		610.000		635.000
1	4 6		KECAMATAN BINTANG BAYU														
1	4 6	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	144.200	100%	306.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000



1	4	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	51.800	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000
1	4	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	4	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengiktui diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		0		0	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000	100%	75.000
1	4	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	71.000	5	71.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000
1	4	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	49.000	87%	60.000	89%	75.000	90%	75.000	92%	75.000	94%	100.000
1	4	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	25.000	1	40.000	1	55.000	1	55.000	1	65.000	1	65.000
1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	45.000	100%	45.000	100%	45.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
				Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			TOTAL KECAMATAN BINTANG BAYU				401.000		612.000		565.000		575.000		585.000		610.000



1	4	7	KECAMATAN SILINDA													
1	4	7	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	166.000	100%	248.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000
1	4	7	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	66.800	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000
1	4	7	3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (9 laporan)	100%	100%	15.000	100%	20.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000
1	4	5	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan manajerial	NA		0		0	97%	75.000	98%	75.000	99%	75.000
1	4	7	5	Program Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	NA	5	45.500	5	82.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000
1	4	7	6	Program Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	85%	44.000	87%	61.000	89%	65.000	90%	65.000	92%	65.000
1	4	7	7	Program Hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	NA	1	28.000	1	30.000	1	55.000	1	55.000	1	65.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1	4	8	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PBB	100%	100%	45.000	100%	45.000	100%	45.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
	7			Persentase realisasi Retribusi IMB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>TOTAL KECAMATAN SILINDA</b>				<b>410.300</b>		<b>561.000</b>		<b>555.000</b>		<b>565.000</b>		<b>575.000</b>		<b>585.000</b>
			<b>TOTAL</b>				<b>812.446.086</b>		<b>725.419.564</b>		<b>1.502.012.029</b>		<b>1.566.752.648</b>		<b>1.591.653.120</b>		<b>1.818.757.597</b>

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

#### **9.1. Indikator Kinerja Daerah**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. **Aspek kesejahteraan masyarakat** diukur melalui

indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Miskin terhadap total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

**Aspek pelayanan umum** merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

**Aspek daya saing daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

## **9.2. Indikator Kinerja Penentu Keberhasilan Pembangunan Daerah.**

Sejalan dengan indikator kinerja daerah pada beberapa aspek di atas, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan 21 indikator penentu keberhasilan pembangunan selama periode sampai akhir tahun 2021 yang dikenal dengan istilah “21 Peraihan”. Secara lengkap 21 peraihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan APBD mencapai 2,4 Triliun, (tersaji dalam Bab III pada Tabel 3.13)
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 127 Miliar, (tersaji dalam Bab III pada Tabel 3.13)





3. Tidak ada lagi daerah terisolir dan tidak teraliri listrik, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada poin 3.5 dan 3.7 serta pada urusan energi dan sumber daya mineral poin 5.1)
4. Penambahan energi terbarukan melalui sumber daya air, (tersaji pada tabel 9.1. urusan energi dan sumber daya mineral poin 5.1)
5. Terbangunnya jalan dan jembatan penghubung dari ibukota kecamatan ke pemukiman penduduk, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang poin 3.4 dan 3.6)
6. Terbangunnya jalan penghubung menuju objek wisata dan kawasan sentra produksi, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang poin 3.9, s/d 3.14)
7. Terbukanya lapangan kerja baru sebanyak 6.000 lapangan kerja, (tersaji pada tabel 9.1. urusan tenaga kerja poin 1.9)
8. Terbentuknya wirausaha baru sebanyak 3.000 wirausaha, (tersaji pada tabel 9.1. urusan tenaga kerja poin 1.10)
9. Tersedianya layanan dalam perlindungan tenaga kerja dan layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, (tersaji pada tabel 9.1. urusan tenaga kerja poin 3.6)
10. Terbangunnya dan terpeliharanya jaringan irigasi dalam peningkatan produktivitas padi hingga mencapai 6,2 ton per hektar, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pertanian poin 3.1)
11. Meningkatnya lembaga P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif di setiap daerah irigasi, (tersaji dalam tabel 9.1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang poin 3.34)
12. Terbangunnya ruang terbuka hijau (RTH) di 17 kecamatan, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang poin 3.25)
13. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 8,98% menjadi 5%, (tersaji pada tabel 9.1. fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada poin 4)
14. Bebas kawasan kumuh dan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 1180 unit, (tersaji pada tabel 9.1. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada poin 4.4)



15. Tersambungnya air bersih ke rumah tangga sebanyak 5.250 rumah tangga, (tersaji pada tabel 9.1. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada poin 4.1)
16. Terciptanya 5 kampung budaya lokal, pelestarian budaya dalam peningkatan pariwisata, (tersaji pada tabel 9.1. urusan kebudayaan poin 15.1)
17. Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu destinasi wisata dengan kunjungan wisata mencapai 1.000.000 wisatawan, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pariwisata poin 2.1.)
18. Bertambahnya destinasi pariwisata dengan mengembangkan ekowisata, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pariwisata poin 2.3.)
19. Terbangunnya gedung olah raga dan sarana olah raga dalam meningkatkan atlet yang berprestasi, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pemuda dan olahraga poin 2.2)
20. Bertambahnya jumlah siswa SMA/SMK sederajat yang lulus di perguruan tinggi negeri menjadi 10%, (tersaji pada tabel 9.1. urusan pendidikan poin 1.16)
21. Seluruh puskesmas sudah terakreditasi. (tersaji pada tabel 9.1. urusan kesehatan poin 2.15)



**Tabel 9.1.**  
**Indikator Kinerja Daerah**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
A. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
1.	Pertumbuhan ekonomi	5,2	%	5,25	5,4	5,65	5,8	6	6,15	6,15	BAPPEDA
2.	PDRB per kapita	26025,92	Ribu Rupiah	27277,73	28481,42	29684,78	30888,14	31091,5	32295,19	32295,19	BAPPEDA
3.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91,02*	%	91,1	91,3	92,0	93,0	94,0	95,0	95,0	Dinsos; BPS
4.	Angka Kemiskinan	8,98*	%	8,9	8,7	8,0	7,0	6,0	5	5	Dinsos; BPS
5.	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	41,08	-	45,9	50,72	55,54	60,36	65,18	70	70	BAPPEDA
6.	Nilai Investasi Nilai investasi skala national dan provinsi (PMA/PMDN)	1,91 Triliun	Rupiah	0,09 Triliun	0,10 Triliun	0,50 Triliun	0,15 Triliun	0,15 Triliun	0,10 Triliun	3 Triliun	Dinas PMPPTSP
7.	Rasio Gini	0,2906	-	0,857	0,777	0,726	0,685	0,634	0,579	0,579	BAPPEDA; BPS
B. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,01	Skor	68,23	68,69	69,14	69,59	70,05	70,5	70,5	BAPPEDA
2.	PENDIDIKAN										
2.1.	Angka melek huruf	99,85	%	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95	100	100	Disdik



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,08	tahun	9	9,5	10	10,5	11	12	12	Disdik
2.3.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,31	tahun	12,4	12,9	13,4	13,9	14,4	14,9	14,9	Disdik
2.4.	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>										
2.4.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,32	%	109,50	114,69	115,19	115,69	116,19	116,19	116,19	Disdik
2.4.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,75	%	99,00	99,20	99,50	99,70	99,85	100,0	100,0	Disdik
2.5.	<b>Angka Pendidikan Yang Ditamatkan:</b>										
2.5.1.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	12028	Siswa	12509	13000	13500	14000	14500	15000	15000	Disdik
2.5.2.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs/Paket B	10115	Siswa	10520	12000	12500	13000	13500	14000	14000	Disdik
2.6.	<b>Angka Partisipasi Murni</b>										
2.6.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,84	%	95,11	95,61	96,11	96,61	97,11	97,61	97,61	Disdik
2.6.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	83,6	%	84	85	86	87	88	89	89	Disdik
3.	<b>KESEHATAN</b>										
3.1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	67,47	tahun	71,1	71,9	72	72,1	72,2	72,3	72,3	Dinkes



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3.2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	127	/100000 KH	105	100	95	90	85	80	80	Dinkes
3.3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	6	/1000 KH	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3,5	Dinkes
3.4.	Angka Kematian Balita	8	/1000 KH	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5,5	Dinkes
<b>C. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA</b>											
<b>1.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>										
1.1.	Jumlah grup kesenian	1	Tim	0	0	1	1	1	1	5	Disporaparbud
1.2.	Jumlah gedung	1	buah	0	0	1	1	1	1	5	Disporaparbud
<b>2.</b>	<b>PEMUDA dan OLAHRAGA</b>										
2.1.	Jumlah klub olahraga	7	Organisasi	0	3	3	3	3	3	22	Disporaparbud
2.2.	Jumlah gedung olahraga	4	Lap	0	1	1	1	1	1	9	Disporaparbud
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>											
<b>A.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>1.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>										
1.1.	Pendidikan dasar:										
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah										
	SD/MI	99,97	%	99,97	99,98	99,99	100	100	100	100	Disdik



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
	SMP/MTs	99,86	%	99,86	99,87	99,99	100	100	100	100	Disdik
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah										
	SD/MI	68/10.000	sekolah/penduduk usia sekolah	68/10.000	69/10.000	70/10.000	71/10.000	72/10.000	73/10.000	73/10.000	Disdik
	SMP/MTs	41/10.000	sekolah/penduduk usia sekolah	41/10.000	42/10.000	43/10.000	44/10.000	45/10.000	48/10.000	48/10.000	Disdik
1.1.3.	Rasio guru/murid										
	SD/MI	1/16	guru/murid	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	Disdik
	SMP/MTs	1/17	guru/murid	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	Disdik
<b>1.2.</b>	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>										
1.2.1.	Persentase Bangunan Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	86,34	%	86,34	88,34	90,36	92	94	96	96	Disdik
1.2.2.	Persentase Bangunan Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,76	%	80,76	82,76	84,8	86	88	90	90	Disdik
<b>1.3.</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b>										



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.3.1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,96	%	74,96	80	86	89	93	95	95	Disdik
1.3.2.	Persentase TK/RA/PAUD terakreditasi	3,8	%	3,8	4	5	5,7	6	6,5	6,5	Disdik
<b>1.4.</b>	<b>Angka Putus Sekolah:</b>										
1.4.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	%	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	Disdik
1.4.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,15	%	0,15	0,05	0,03	0	0	0	0	Disdik
<b>1.5.</b>	<b>Angka Kelulusan:</b>										
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
<b>1.6.</b>	<b>Angka Melanjutkan (AM)</b>										
1.6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98	%	98	98,53	99,03	99,53	100	100	100	Disdik
1.6.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98	%	90,17	92,27	94,5	95	95,25	95,50	95,50	Disdik
1.7.	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	88	%	90	90,05	91	91,5	92	92,5	92,5	Disdik



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.8.	Persentase guru yang telah mengikuti Pelatihan Keprofesian Berkelanjutan (PKB):	35,50	%	35,50	37,50	39,50	41,50	43,50	45,50	45,50	Disdik
<b>1.9.</b>	<b>Persentase siswa miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa:</b>										
1.9.1.	Persentase siswa SD/MI miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	25,64	%	30	50	70	80	90	100	100	Disdik
1.9.2.	Persentase siswa SMP/MTs miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	27,51	%	35	50	70	80	90	100	100	Disdik
<b>1.10.</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Menerapkan Materi Keterampilan Berdasarkan Kearifan Lokal/ Budaya Lokal</b>										
	SD/MI	10	%	10	11	12	13	14	15	15	Disdik
	SMP/MTs	20	%	20	22	24	26	28	30	30	Disdik
<b>1.11.</b>	<b>Persentase sekolah terakreditasi A:</b>										
	SD/MI	0,8	%	0,8	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	Disdik
	SMP/MTs	1	%	1	6,7	7,2	7,7	8,2	8,7	8,7	Disdik
	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	3,61	%	3,61	10	12	14	16	20	20	Disdik





NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.12.	Persentase Siswa Yang Lulus Di PTN	2,86	%	3	4,5	6	7,5	9	10	10	Disdik
1.13.	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun:										
	- Perpustakaan sekolah	37,07	%	37,07	40	45	50	55	60	60	Disdik
2.	<b>KESEHATAN</b>										
2.1.	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	20	%	25	35	45	55	65	75	75	Dinkes
2.2.	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	52,30	%	82	90	95	100	100	100	100	Dinkes
2.3.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	62,50	%	62,50	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2.4.	Persentase Rumah Tangga berperilaku keluarga sehat	28	%	45	50	55	60	65	70	70	Dinkes
2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	23	%	70	75	80	85	90	100	100	Dinkes
2.6	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	34	%	35	36	37	38	39	40	40	Dinkes
2.7	Angka Kematian Ibu (AKI)	127	/100.000 KH	105	100	95	90	85	80	80	Dinkes
2.8	Angka Kematian Bayi (AKB)	6	/1.000 KH	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3,5	Dinkes



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.9	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2.10.	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	5,6	%	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Dinkes
2.11.	Prevalensi ketersediaan obat dan vaksin	90	%	91	92	93	94	95	100	100	Dinkes
2.12.	Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	42	%	50	55	65	75	85	100	100	Dinkes
2.13	Persentase kawasan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	11,11	%	11,11	11,11	20	25	30	35	35	Dinkes
2.14.	Angka keberhasilan pengobatan TB BTA+ atau Success Rate	80,70	%	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	Dinkes
2.15.	Annual Paracyte Index (malaria)	<1	/ 1.000 Pddk	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Dinkes
2.16.	Insidenncce Rate DBD	<40	/ 100.000 pddk	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	Dinkes
2.17.	Persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	62	%	64	66	68	68	69	69	69	Dinkes
2.18.	Angka Kematian Balita	8/1.000	KH	8/1.000	7.5/1.000	7/1.000	6.5/1.000	6/1.000	5.5/1.000	5.5/1.000	Dinkes
2.19.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	0	%	0	30	65	100	100	100	100	Dinkes



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.20.	Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0	%	0	0	35	40	45	50	50	Dinkes
2.21.	Persentase desa yang melaksanakan pos pembinaan terpadu	27,57	%	20	30	40	45	50	55	55	Dinkes
2.22.	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan kesehatan	0	%	10	10	15	20	25	30	30	Dinkes
2.23.	Prevalensi balita pendek (stunting)	17	%	16,6	16	15,5	15	14,3	14	14	Dinkes
2.24.	Cakupan pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	20,8	%	35	50	65	85	95	100	100	Dinkes
2.25.	Persentase desa yang mencapai UCI	80,7	%	86	88	90	92	94	95	95	Dinkes
2.26.	Prevalensi hipertensi	NA	%	24,20	24,20	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	Dinkes
2.27.	Persentase penanggulangan kasus diabetes melitus	NA	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2.28.	Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	75	%	77	78	79	79	80	80	80	Dinkes
2.29.	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	%	78	78	79	80	80	81	81	Dinkes



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.30.	Persentase penduduk yang stop buang air besar sembarangan (stop BABS)	NA	%	58	68	75	85	95	100	100	Dinkes
2.31.	Akreditasi Rumah Sakit	NA		dasar	dasar	dasar	dasar	dasar	pratama	pratama	RSU
2.32.	Angka Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	29,50	%	31	35	45	55	65	100	100	RSU
2.33.	Angka Long of Stay (LOS) Rumah Sakit	4 hari	5 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	RSU
2.34.	Persentase rumah tangga berperilaku keluarga sehat	28	%	45	50	55	60	65	70	70	Dinkes
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
3.1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik	45,68	%	54,74	63,8	72,86	81,92	90,98	100	100	Dinas PUPR
3.2.	Persentase drainase dalam kondisi baik	13,70	%	20	22	24	26	29	32	32	Dinas PUPR
3.3.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	64,01	%	72,47	75,93	79,39	82,86	86,32	87,05	87,05	Dinas PUPR
3.4.	Persentase kecamatan yang memiliki RTH (Jumlah RTH yang dibangun) (%)	0	%	0	0	30 (5 Kec.)	50 (4 Kec.)	70 (4 Kec.)	90 (4 Kec.)	100 (17 Kec.)	Disperwakim
3.5.	Luas ruang terbuka hijau	37,29	ha	0	1,2	1,8	5	5	4	54,29	Disperwakim
3.6.	Pembangunan PJU	243	titik	125	88	150	150	150	150	1.056	Disperwakim



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3.7.	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	67,6	%	70	80	84	87	95	100	100	Dinas PUPR
3.8.	Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	NA	%	0	39,3	43,9	48,32	53,16	58,46	58,46	Dinas PUPR
3.9.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	10	Liter/det	20	25	30	35	40	50	50	Dinas PUPR
3.10.	Persentase Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif di setiap Daerah Irigasi	6,25	%	16,25	26,25	36,25	46,25	56,25	65,25	65,25	Dinas PUPR
3.11.	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	60	%	63	65	70	75	80	85	85	Dinas PUPR
3.12.	Persentase jaringan ruas jalan dan jembatan yang masuk dalam database	0	%	0	0	0	25	50	75	75	Dinas PUPR
3.13.	Persentase jaringan irigasi yang masuk dalam database	0	%	0	10	30	50	75	90	90	Dinas PUPR
3.14.	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	0	%	0	0	25	35	65	75	75	Dinas PUPR
3.15.	Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang baik	0	%	0	25	30	35	45	65	65	Dinas PUPR



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
4.	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
4.2.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah)	1,1	%	0,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,5	Disperwankim
4.3.	Persentase RT bersanitasi	72,4	%	73,72	75,04	76,36	77,68	79	80,32	80,32	Disperwankim
4.5.	Persentase Rumah Layak Huni	87	%	90,13	90,15	90,32	90,49	90,74	90,99	90,99	Disperwankim
4.8.	Luas permukiman kumuh (ha)	60,03	ha	34,15	27,32	20,49	13,66	6,83	0	0	Disperwankim
4.9.	Persentase areal pemakaman yang ditata	17	%	17	17	18	19	20	21	21	Disperwankim
4.10	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi setiap tahun	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disperwankim
4.11.	Jumlah persil lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten	NA	1	3	5	7	8	9	10	10	Disperwankim
4.12.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	NA	%	60,77	61,27	61,78	62,28	62,79	63,30	63,30	Disperwankim
4.13.	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	32	%	32	32	34	36	38	40	40	Disperwankim
4.14.	Persentase panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	5,92	%	6,2	6,5	6,7	7	7,8	8	8	Disperwankim



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
5.	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
5.1.	Persentase konflik sosial yang dideteksi dan ditangani	65	%	70	80	90	100	100	100	100	Bankesbangpol
5.2.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pembinaan ideologi	60	%	60	65	70	75	80	90	90	Bankesbangpol
5.3.	Angka konflik SARA	0	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	Bankesbangpol
5.4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	40	%	50	55	60	65	70	80	80	Bankesbangpol
5.5.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu										Bankesbangpol
	- Pilgub	NA	%	-	-	60	-	-	-	60	Bankesbangpol
	- Pileg	74	%	-	-	-	76	-	-	76	Bankesbangpol
	- Pilpres	66	%	-	-	-	68	-	-	68	Bankesbangpol
	- Pilkada	59	%	-	-	-	-	63	-	63	Bankesbangpol
5.6.	Jumlah kasus narkoba yang ditangani	NA	Kasus	25	22	20	18	15	10	10	Bankesbangpol
5.7.	kasus kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan	1755	kasus	1650	1535	1500	1445	1420	1375	1315	Bankesbangpol



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	45	Persen	60	70	80	90	100	100	100	Satpol PP
5.9	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5.10	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	65	%	70	80	90	100	100	100	100	Satpol PP
<b>6.</b>	<b>SOSIAL</b>										
6.1.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	95,54	%	95,54	91.19	88	85.36	83.23	81.56	81.56	Dinas Sosial
6.2.	Persentase PSKS yang diberdayakan	13	%	14	14.5	15	17	18.5	20	20	Dinas Sosial
6.3.	Jumlah panti asuhan/jompo yang difasilitasi	8	Panti	8	8	8	9	9	1	9	Dinas Sosial
6.4.	Persentase penyandang cacat dan trauma yang ditangani	NA	%	1	2	3	4	5	6	6	Dinas Sosial
6.6.	Persentase penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK)	35.673 (100)	%	90	80	70	60	50	40	40	Dinas Sosial
<b>A.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>1.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>										





NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.1.	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	NA	orang	2.440	2.540	2.640	2.740	2.840	2.940	2.940	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.2.	Bertambahnya lapangan kerja baru	NA	Orang	500	500	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.3.	Bertambahnya tenaga kerja yang bersertifikasi	0	Orang	0	500	500	500	500	500	2.500	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.4.	Tingkat pengangguran terbuka	7,18	%	7,12	7,11	7,09	6,8	6,5	6,1	6,1	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.5.	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.6.	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.7.	Jumlah kejadian kecelakaan kerja	NA	Kecelakaan	13	10	9	8	7	6	6	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.8.	Jumlah UMKM yang sudah ada memiliki izin	NA	Orang	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.9.	Persentase Koperasi Aktif	27,94	%	27,94	31,02	34,28	37,21	40,00	42.65	42.65	Disnakerkop dan Usaha Mikro
1.10.	Jumlah wirausaha baru yang mendapat akses modal	NA	Orang	0	75	75	75	75	75	375	Disnakerkop dan Usaha Mikro
2.	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK</b>										



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.1.	Jumlah OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	36	OPD	1	2	2	2	2	2	47	Dinas P2KBP3A
2.2.	Jumlah Desa Layak Anak	3	Desa	6	9	12	15	18	21	21	Dinas P2KBP3A
2.3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	5,21	%	5,21	5,23	5,25	5,3	5,32	5,34	5,34	Dinas P2KBP3A
2.4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,47	%	11,47	11,47	11,50	11,53	11,55	11,57	11,57	Dinas P2KBP3A
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
2.6.	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	85	%	85	85	85	85	90	90	90	Dinas P2KBP3A
2.7.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan	NA	%	75	78	80	82	83	85	85	Dinas P2KBP3A
<b>3.</b>	<b>PANGAN</b>										
3.1.	Skor PPH	84,6	%	84,6	85,5	86	87	88	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
3.2.	Persentase kompetensi penyuluh	NA	%	30	40	50	70	80	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
3.3.	Persentase kelompok tani dengan kualitas baik	30	%	50	65	70	80	90	100	100	Dinas Ketahanan Pangan



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
<b>4.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40,35	%	42	45	47	50	53	55	55	Dinas LH
4.2	Tingkat penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	NA	%	90	88	86	84	82	80	80	Dinas LH
4.3	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	2	%	2	3	3	3,5	3,5	4	4	Dinas LH
4.4	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	28,7	%	32	34	36	38	40	42	42	Dinas LH
4.5	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH
4.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	Skor	50	63	65	67	70	73	73	Dinas LH
4.7	Tingkat kualitas air titik pantau yang memenuhi baku mutu	NA	%	30	32	35	38	40	42	42	Dinas LH
4.8.	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau yang memenuhi baku mutu	NA	%	65	67	70	72	74	76	76	Dinas LH
4.9	Persentase luas lahan kritis yang diidentifikasi tingkat kerusakannya	36,8	%	45	50	55	60	65	70	70	Dinas LH
4.10.	Cakupan layanan informasi lingkungan yang tersedia	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
6.	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>										
6.1.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	60	%	65	70	75	80	85	90	90	Disdukcapil
7.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA</b>										
7.1.	Persentase Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, Posyandu) yang aktif	75	%	90	90	100	100	100	100	100	Dinas PMD
7.2.	Persentase aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	55	%	90	95	100	100	100	100	100	Dinas PMD
7.3.	Jumlah TTG yang dapat dimanfaatkan masyarakat	12	TTG	14	16	18	20	22	25	25	Dinas PMD
7.4.	Persentase BUMDES yang memiliki laba	0	%	0	1	5	15	35	50	50	Dinas PMD
7.5.	Persentase permasalahan pemerintahan desa yang diselesaikan	90	%	90	95	95	96	97	97	97	Dinas PMD



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
7.6.	Persentase Desa yang sudah tertata	65	%	75	76	80	90	92	94	94	Dinas PMD
7.7.	Jumlah kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong	237	Keg	237	237	474	474	474	711	711	Dinas PMD
7.8.	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk	0		0	0	5	10	15	20	20	Dinas PMD
7.9.	Indeks Pembangunan Desa	61,7		61,7	61,9	62	62,2	62,5	63	63	Dinas PMD
<b>8.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>										
8.1.	Cakupan peserta KB aktif	73,64	%	73,84	74,04	74,23	74,43	74,64	74,84	74,84	Dinas P2KBP3A
8.2.	Jumlah peserta KB baru	12.305	akseptor	12.305	12.472	13.096	13.750	14.438	15.160	15.160	Dinas P2KBP3A
8.3.	Persentase keluarga sejahtera dan KS I	17,71	%	17,71	18,52	19,49	20,49	21,44	22,32	22,32	Dinas P2KBP3A
8.4.	Jumlah lembaga/ organisasi yang mendukung program KBA	10	Lembaga	10	12	15	17	20	22	22	Dinas P2KBP3A
8.5.	Jumlah PIK remaja yang aktif	60	Kelompok	60	65	70	76	83	90	90	Dinas P2KBP3A
8.6.	Persentase pasangan yang menikah dengan umur ideal	35,21	%	35,21	35,89	37,2	39,12	41,61	44,64	44,64	Dinas P2KBP3A



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
8.7.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KB	NA	%	75	75	75	75	75	75	75	Dinas P2KBP3A
8.8.	Tingkat penurunan TFR	2,9	%	2,9	2,89	2,85	2,7	2,68	2,65	2,65	Dinas P2KBP3A
8.9.	Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif	8	%	9,5	68,95	70,27	71,6	72,97	74,36	74,36	Dinas P2KBP3A
8.10.	Persentase bina keluarga Remaja (BKR) yang aktif	7	%	7	67,56	68,85	70,16	71,50	72,86	72,86	Dinas P2KBP3A
8.11.	Persentase bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	3,5	%	5	6,1	7	8,2	9,3	10,1	10,1	Dinas P2KBP3A
<b>9.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>										
9.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perhubungan	NA	Skor	NA	77	79	81	83	85	85	Dishub
9.2.	Persentase penurunan kecelakaan	NA	%	10	10	10	10	10	10	10	Dishub
9.3.	Persentase angkutan umum yang baik jalan	82	%	82	82	82	85	85	90	90	Dishub
9.4.	Kecepatan tempuh rata-rata kendaraan	50	km/ jam	50	50	50	50	50	50	50	Dishub
9.5.	Persentase fasilitas prasarana LLAJ yang berfungsi dan kondisi baik	70	%	70	70	80	80	80	80	80	Dishub



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
<b>10.</b>	<b>KOMUNIKASI dan INFORMATIKA</b>										
10.1	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	NA	%	0	0	60	75	90	100	100	Disinfokom
10.2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan internet	NA	%	0	0	100	100	100	100	100	Disinfokom
10.3	Persentase aplikasi OPD berbasis web yang terintegrasi	NA	%	0	0	60	75	90	100	100	Disinfokom
10.4	Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disinfokom
10.5	Persentase OPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	NA	%	0	0	50	65	80	100	100	Disinfokom
10.6	Persentase pengaduan yang diselesaikan	NA	%	0	0	100	100	100	100	100	Disinfokom
10.7	Persentase Publikasi melalui petunjuk dan Media Cetak	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Disinfokom
10.8	Persentase minat masyarakat ikut perlombaan	NA	%	0	0	100	100	100	100	100	Disinfokom
<b>11.</b>	<b>KOPERASI USAHA KECIL dan MENENGAH</b>										



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
11.6	Jumlah UMKM yang sudah memiliki izin	NA	UMKM	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	Disnakerkop dan Usaha Mikro
11.7	Persentase Koperasi Aktif	27,94	%	27,94	31,02	34,28	37,21	40	42,65	42,65	Disnakerkop dan Usaha Mikro
11.8	Jumlah wirausaha baru yang mendapat akses modal	NA	Wirausaha	0	0	75	75	75	75	300	Disnakerkop dan Usaha Mikro
<b>12.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>										
12.1.	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	100	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMP2TSP
12.2.	Persentase pengaduan yang diselesaikan/ ditindaklanjuti	NA	%	0	100	100	100	100	100	100	DPMP2TSP
12.3.	Pameran investasi yang diikuti	1	kegiatan	1	1	2	2	2	2	11	DPMP2TSP
12.4.	Persentase pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)	0	%	0	1,51	1,53	1.56	1.58	1.6	1.6	DPMP2TSP
12.5.	Persentase pertumbuhan jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	2,9	%	3,7	7,3	7,9	8,1	8,4	8,9	8,9	DPMP2TSP
12.6.	Rata-rata lama proses perizinan	7	Hari	5	5	3	3	3	2	2	DPMP2TSP
12.7.	Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu	90	%	90	90	95	95	95	95	95	DPMP2TSP





NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
12.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	78.00	NRR	78.12	78.18	78.25	78.28	78.34	78.38	78.38	DPMP2TSP
12.9.	Persentase realisasi retribusi perizinan	NA	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMP2TSP
<b>13.</b>	<b>KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA</b>										
13.1.	Jumlah organisasi pemuda	60	OKP	2	2	2	2	2	2	72	Disporaparbud
13.2.	Jumlah organisasi olahraga	7	Organisasi	1	2	3	3	3	3	22	Disporaparbud
13.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	Keg	7	8	9	10	10	10	57	Disporaparbud
13.4.	Jumlah kegiatan olahraga	0	event	1	1	1	1	1	2	7	Disporaparbud
13.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	buah	0	0	1	1	2	2	6	Disporaparbud
13.6.	Lapangan olahraga	2	Lap	0	0	1	0	1	1	5	Disporaparbud
13.7.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional yang diraih	4	Prestasi	5	7	7	8	8	9	49	Disporaparbud
13.8.	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi yang diraih	40	Prestasi	40	42	44	46	48	50	310	Disporaparbud



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
13.9.	Jumlah Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional	45	Prestasi	45	49	51	54	56	59	359	Disporaparbud
13.10.	Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti	0	event	1	1	2	2	2	2	10	Disporaparbud
13.11.	Jumlah GOR dan sarana olahraga yang terbangun	4	unit	0	0	0	1	0	1	6	Disporaparbud
13.12.	Jumlah organisasi pemuda yang terampil	0	Organisasi	0	0	0	1	1	1	3	Disporaparbud
13.13.	Jumlah pemuda pelopor	1	orang	0	1	1	1	1	1	6	Disporaparbud
13.14.	Jumlah Prestasi pemuda di tingkat Prov dan Nasional	0	Prestasi	0	0	0	0	1	1	2	Disporaparbud
<b>14.</b>	<b>STATISTIK</b>										
14.1.	Tingkat Integrasi data OPD kedalam Serdang Bedagai satu data	NA	%	20	40	50	60	80	100	100	BAPPEDA dan Dinas PUPR
<b>15.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>										
15.1.	Jumlah Kampung Budaya Lokal	0		0	0	1	1	1	2	5	Disporaparbud
15.2.	Cakupan pagelaran dan festival seni budaya	1	Keg	2	2	3	4	4	5	5	Disporaparbud



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
15.3.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	Unit	2	2	3	3	4	5	5	Disporaparbud
15.4.	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	0	buah	2	2	2	3	5	7	7	Disporaparbud
15.5.	Persentase tradisi yang masih dijalankan di masyarakat	NA	%	53	59	65	71	76	82	82	Disporaparbud
15.6.	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	53	%	53	59	65	71	76	82	82	Disporaparbud
15.7.	Jumlah seniman dan budayawan Kab. Serdang Bedagai	35	orang	0	1	1	1	1	1	40	Disporaparbud
<b>16.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>										
16.1.	Jumlah perpustakaan:										Dinas Perpus dan Kearsipan
	- Perpustakaan Umum	62	unit	3	2	2	2	2	2	75	
	- Perpustakaan Sekolah	307	unit	6	6	6	6	6	6	343	
16.2.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun										Dinas Perpus dan Kearsipan
	- Perpustakaan Umum (dari total wajib baca 597813 jiwa)	11,96	%	12,12	12,31	12,61	12,96	13,27	13,63	13,63	
	- Perpustakaan Umum (dari total pelajar 142327 orang)	29,25	%	29,41	29,6	29,9	30,22	30,56	30,92	30,92	



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
16.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25794	eks	1000	2000	2000	2500	2750	3000	39044	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.4.	Persentase peminjam buku perpustakaan	35,8	%	37,5	39	40,5	42	43,5	45	45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	NA	skor	65	67	69	70	71	72	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>17.</b>	<b>KEARSIPAN</b>										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.1.	Persentase jumlah arsip Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan yang dikelola secara baku	0,5	%	0	4,5	5	5	5	10	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	Orang	0	0	0	1	1	1	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3.	Persentase jumlah OPD yang arsipnya dikelola secara baku	1,81	%	1,81	18,18	27,27	36,36	45,45	54,54	54,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>											
<b>1.</b>	<b>KELAUTAN dan PERIKANAN</b>										
1.1.	Produksi perikanan budidaya (ton)	27.258	ton	31.335	34.469	37.915	41.707	45.878	50.465	50.465	Dinas Kelautan dan Perikanan
	- air tawar	21.106	ton	22.075	24.283	26.712	29.384	32.323	35.558	35.558	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
	- air payau	6.152	ton	9.260	10.186	11.203	12.323	13.555	14.907	14.907	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2.	Produksi perikanan tangkap (ton)	25.363	ton	25.670	25.980	26.295	26.600	26.909	27.232	27.232	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	22	KUB	30	35	40	45	50	60	60	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.4.	Jumlah konsumsi ikan	38	(Kg/Kapita/Tahun)	40	42	44	46	48	50	50	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.5.	Volume produksi pengolahan hasil perikanan	3.349	ton	4.120	4.161	4.203	4.245	4.287	4.330	4.330	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.6.	Jumlah pelaku pengusaha produk olahan perikanan dan kelautan	24	Upi/Orang	39	54	70	90	110	130	130	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.7.	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	52	POKDAKAN	56	63	70	77	84	91	91	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.8.	Produksi Olahan Ikan Kelompok Pengolah	2.000	ton	1.826	1.890	1.956	2.025	2.095	2.168	2.168	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.9.	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan	24	POKLAH SAR	80	90	100	110	120	130	130	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.10.	Cakupan Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	22	POKMAS WAS	24	27	30	33	36	39	39	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.11.	Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Budidaya terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	25	%	40	45	50	55	60	65	65	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.12.	Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Pengolahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	20	%	30	35	40	45	50	55	55	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.13.	Persentase kelompok perikanan dengan kualitas baik	0	%	0	3	7	11	16	21	21	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>2.</b>	<b>PARIWISATA</b>										
2.1.	Jumlah kunjungan wisata	266.666	Orang	333.334	450.000	600.000	750.000	900.000	1.000.000	1.000.000	Disporaparbud
2.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,0104	%	0,1120	0,3169	0,5109	0,7051	0,8449	1,0177	1,0177	Disporaparbud
2.3.	Pengembangan Obyek Wisata	14	lokasi	14	14	14	15	16	17	17	Disporaparbud
<b>3.</b>	<b>PERTANIAN</b>										
3.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:										Distan
	- Padi	5,621	ton/Ha	5,67	5,77	5,88	5,98	6,10	6,20	6,20	



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
	- Ubi Kayu	39,747	ton/Ha	40	40,26	40,52	40,78	41,04	41,3	41,3	
	- Jagung	4,611	ton/Ha	4,656	4,78	4,91	5,04	5,16	5,29	5,29	
3.2.	Jumlah teknologi pertanian yang dapat diadopsi	4	teknologi	4	4	5	6	7	7	7	Distan
3.3.	Populasi ternak :										Distan
	- Sapi	43.615	ekor	43.700	44.051	44.492	44.937	45.386	45.840	45.840	
	- Kerbau	621	ekor	636	651	666	681	696	711	711	
	- Domba	47.700	ekor	48.105	48.510	48.915	49.320	49.725	50.133	50.133	
	- Kambing	77.306	ekor	77.400	78.174	78.956	79.745	80.542	81.347	81.347	
	- Itik	275.341	ekor	277.681	280.021	282.361	284.701	287.041	289.386	289.386	
3.4.	Produksi daging	1.715	ton	1.715	1.732	1.749	1.767	1.775	1.785	1.785	Distan
3.5.	Jumlah teknologi peternakan yang dapat diadopsi	3	teknologi	3	4	5	5	5	5	5	Distan
3.6.	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	19	km	0	5	2,5	2,5	2,5	2,5	34	Distan
3.7.	Jumlah kelompok usaha tani (ternak) yang mendapat kredit KKP-E, KUPS, KUR	26	kelompok usaha tani (ternak)	28	30	32	34	36	38	38	Distan
3.8.	Luas usaha tani sawah yang terlindungi oleh asuransi usaha tani tanaman padi (AUTP)	535	ha	2.535	4.535	6.535	8.535	10.535	12.535	12.535	Distan



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3.9.	Luas lahan sawah yang beralih fungsi sesuai dengan ketentuan Perda No. 1/2015	1.866	ha	1.866	1.866	1.976	2.086	2.196	2.306	2306	Distan
3.10.	Optimasi lahan yang kurang subur	4.900	ha	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100	5.150	5.150	Distan
3.11.	Penambahan luas baku lahan sawah	0	ha	0	50	50	50	50	50	1200	Distan
3.12.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	41,42	%	42,85	44,28	45,71	47,14	48,57	50	50	Distan
3.13.	Cakupan bina kelompok petani	NA	%	11,79%	20,00%	20,00%	20,000%	20,00%	20,00%	20,00%	Dinas ketapang
3.14.	Jumlah produksi kelapa sawit	1.131.014,07	Ton	1.154.467,85	1.177.921,64	1.201.375,42	1.224.829,21	1.248.283,78	1.271.736,78	1.271.736,78	Distan
3.15.	Jumlah produksi karet	37.762,90	Ton	39.134,05	40.505,20	41.876,35	42.247,50	43.618,63	44.897,42	44.897,42	Distan
3.16.	Jumlah produksi kakao	971,51	Ton	1.077,66	1.105,72	1.125,72	1.175,77	1.193,79	1.210,51	1.210,51	Distan
3.17.	Jumlah produksi kelapa	2.321,27	Ton	2.451,19	2.456,93	2.475,02	2.493,10	2.495,30	2.499,15	2.499,15	Distan
3.18.	Produktivitas kelapa sawit	14.651,92	Kg/Ha	14.700,59	14.723,51	14.765,71	14.800,00	14.950,85	15.133,35	15.133,35	Distan
3.19.	Produktivitas karet	978,42	Kg/Ha	989,07	1.003,62	1.015,10	1.026,63	1.031,01	1.050,18	1.050,18	Distan
3.20.	Produktivitas kakao	826,04	Kg/Ha	937,87	977,01	986,02	1.017,94	1.069,95	1.102,56	1.102,56	Distan
3.21.	Produktivitas kelapa	1.144,38	Kg/Ha	1.145,20	1.165,12	1.183,00	1.216,01	1.234,83	1.299,10	1.299,10	Distan





NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3.22.	Jumlah Produksi hasil pertanian yang memiliki nilai tambah : - Padi - Karet	NA NA	Ton Ton	128.624 52	135.941 52	143.002 100	149.978 100	157.624 150	164.920 150	164.920 150	Distan
3.23.	Jumlah Produksi hasil pertanian yang telah disertifikasi : - Beras Organik - Benih Padi Unggul	NA NA	Ton Ton	87 1.916	93 2.022	99 2.128	105 2.234	111 2.340	117 2.446	117 2.446	Distan
3.24.	Panjang Jalan Produksi	42	Km	4	4	5	5	5	5	70	Distan
3.25.	Persentase kelompok tani dengan kualitas baik	30	%	40	50	60	70	85	100	100	Dinas ketapang
3.26.	Persentase kompetensi penyuluh	NA	%	30	40	50	70	80	100	100	Dinas ketapang
3.27.	Persentase jaringan tersier dalam kondisi baik (%)	NA	%	50	55	60	65	70	75	75	Distan; Dinas PUPR
<b>4.</b>	<b>ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL</b>										
4.1.	Jumlah kawasan/unit usaha yang menggunakan energi terbarukan	NA	Unit	0	0	1	1	1	1	4	Dinas PUPR; Dinas LH; Dinas PMD
4.2.	Jumlah lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	NA	Lokasi	5	5	4	3	2	1	1	Dinas Perwankim
<b>5.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>										



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,32	%	15,43	15,54	15,65	15,76	15,87	15,98	15,98	Disperindag
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	8	%	9	10	11	12	14	15	15	Disperindag
5.3.	Persentase pasar sehat	4	%	8	12	16	20	24	24	24	Disperindag
5.4.	Jumlah Pasar Tradisional	25	unit	25	26	27	28	29	30	30	Disperindag
5.5.	Jumlah Pasar Hewan	-	-	-	-	-	-	1	2	2	Disperindag
5.6.	Jumlah Pasar Buah Lokal	-	-	-	-	-	-	1	2	2	Disperindag
5.7.	Jumlah pusat pemasaran hasil IKM, Industri RT dan industri kreatif	150	Kios /toko/mini market/ mall	155	160	165	170	175	180	180	Disperindag
5.8.	Persentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang difasilitasi	5	%	5	10	20	20	20	25	25	Disperindag
<b>6.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>										
6.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,53	%	19,975	20,48	20,98	21,49	21,95	22,50	22,50	Disperindag
6.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	6,02	%	6,03	6,04	6,05	6,07	6,08	6,1	6,1	Disperindag
6.3.	Pertumbuhan Industri	2	%	2,43	2,74	3,05	3,56	3,97	4,24	4,68	Disperindag
6.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	3	Sentra	3	3	4	5	5	5	5	Disperindag



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
		32	kelompok	32	32	34	36	38	40	40	
		1.600	UU	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2200	
6.5.	Jumlah IKM dan Industri RT berbasis komoditi lokal	1.600	UU	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500	2500	Disperindag
	- IKM	1.400	UU	1.400	1.400	1.600	1.800	1.900	2.000	2000	Disperindag
	- Industri RT	200	UU	200	200	275	350	425	500	500	Disperindag
6.6.	Jumlah dan jenis produk IKM dan Industri RT yang dipasarkan di luar daerah	22	Jenis	22	22	37	52	59	65	65	Disperindag
6.7.	Jumlah IKM serta Industri RT yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan usaha bisnis di luar daerah	1.400	UU	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1800	Disperindag
6.8.	Jumlah sentra cluster industri kreatif	2	Sentra	2	3	4	5	5	5	5	Disperindag
6.9.	Jumlah industri kreatif yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan usaha bisnis di luar daerah	25	UU	30	35	55	70	85	100	100	Disperindag
6.10.	Jenis-jenis produk unggulan daerah	3	Produk	4	5	7	8	9	10	10	Disperindag
<b>C. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MELIPUTI:</b>											
<b>1.</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>										



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	56	Skor	58	60	62	65	68	70	70	Setdakab
1.2	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	0	%	5	10	20	30	40	50	50	Setdakab, Badan Pendapatan dan semua OPD
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	Skor	75	77	79	81	83	85	85	Setdakab
1.4	Nilai LPPD	2,5018	Skor	2,57	2,623	2,793	2,953	3,05	3,21	3,21	Setdakab
1.5	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai	C	Skor	CC	B	B	B	BB	BB	BB	Setdakab
1.6	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	76,31	%	78,94	84,21	89,47	92,1	94,73	100	100	Setdakab
1.7	Persentase OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik	70	%	75	80	85	90	95	100	100	Setdakab
1.8	Persentase OPD yang menetapkan SOP dan SPP	70	%	80	85	90	95	100	100	100	Setdakab
1.9	Jumlah produk hukum yang difasilitasi:										Setdakab dan Setwan
	- Perda yang ditetapkan	133	Raperda	8	11	11	12	12	12	199	
	- Perda yang diundangkan	133	Perda	8	11	11	12	12	12	199	
	- Peraturan Bupati	270	Perbup	20	20	20	20	20	20	390	



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
	- Keputusan Bupati	2281	Kepbup	400	400	400	400	400	400	4681	
1.10	Persentase OPD yang melaporkan Dokumen Kinerja tepat waktu	70	%	75	80	85	90	95	100	100	Setdakab
1.11	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-procurement	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Setdakab
1.12	Persentase laporan fisik kegiatan yang disampaikan tepat waktu	37,5	%	100	100	100	100	100	100	100	Setdakab
1.13	Persentase kegiatan yang dilelang sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Setdakab
1.14	Persentase capaian inflasi daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Setdakab
1.15	Persentase realisasi anggaran sesuai rencana arus kas	70	%	75	80	85	90	95	100	100	Setdakab
1.16	Persentase fasilitasi aktifitas keagamaan di masyarakat umum	NA	%	80	80	80	80	80	80	80	Setdakab
1.17	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah	NA	%	80	80	80	80	80	80	80	Setdakab



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.18	Persentase guru dan pengurus keagamaan di masyarakat yang dibina	NA	%	80	80	80	80	80	80	80	Setdakab
1.19	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi MoU setiap tahun	50	%	50	60	70	80	90	100	100	Setdakab
1.20	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	NA	Skor	80	80	80	80	80	80	80	Setwan
1.21	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat dan Badan PKA
1.22	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	NA	Level	2	2	3	3	3	3	3	Inspektorat
1.23	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	NA	%	0	0	50	75	95	100	100	Inspektorat
1.24	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara	42	%	65	75	80	90	95	100	100	Inspektorat
1.25	Persentase rekomendasi tindak lanjut yang mendapat status selesai										
	- Badan Pemeriksa Keuangan	65	%	65	75	80	90	95	100	100	Inspektorat
	- Inspektorat Provinsi	65	%	65	75	80	90	95	100	100	Inspektorat
	- Inspektorat Kabupaten	65	%	65	75	100	100	100	100	100	Inspektorat



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.26	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal "B"	0	%	50	75	85	95	100	100	100	Inspektorat
1.27	Tingkat Kapabilitas APIP	1	Level	2	2	2	3	3	3	3	Inspektorat
1.28	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	NA	%	50	65	75	85	90	95	95	Kecamatan
1.29	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	NA	%	75	75	80	80	85	85	85	Kecamatan
<b>2.</b>	<b>APARATUR dan KEPEGAWAIAN</b>										
2.1	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial	NA	%	15	15	15	17	19	21	21	BKD
2.2	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Teknis	NA	%	60,15	68	70	72	74	76	76	BKD
2.3	Tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan BKD	NA	Skor	75	80	83	85	90	95	95	BKD
2.4	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	59,17	%	80	85	87	90	92	95	95	BKD



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.5	Persentase data ASN yang sesuai Surat Edaran Kepala BKN No. 11 Tahun 2012	NA	%	20	80	85	90	95	100	100	BKD
2.6	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100	%	100	100	100	100	100	100	100	BKD
2.7	Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	NA	%	90	90	90	90	90	90	90	BKD
2.8	Persentase tingkat kehadiran ASN	NA	%	NA	85	88	90	92	95	95	BKD
<b>3.</b>	<b>KEUANGAN DAERAH</b>										
3.1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	6,3	%	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5	7,5	Badan Pendapatan Daerah
3.2	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	32793,33	jt rupiah	42340	46574	51231,4	56354,54	61989,99	68188,99	68188,99	Badan Pendapatan Daerah
3.3	Persentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah	57,48	%	62,08	67,04	72,41	78,20	84,46	91,21	91,21	Badan Pendapatan Daerah
3.4	Persentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu	34,68	%	38,15	43,87	50,45	58,028	66,73	76,74	76,74	Badan Pendapatan Daerah
3.5	IKM bidang pelayanan pajak daerah	NA	Skor	63	68	73	78	82	85	85	Badan Pendapatan Daerah





NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
3.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan PKA
3.7	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	40,82	%	61,22	71,43	81,63	100	100	100	100	Badan PKA
3.8	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan PKA
3.9	Persentase kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan PKA
3.10	Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersertifikat	45,67	%	56,44	67,21	77,97	88,74	100	100	100	Badan PKA
3.11	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	NA	Skor	63	68	73	78	82	85	85	Badan PKA
4.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>										
4.41	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan kabupaten terhadap dokumen perencanaan OPD										BAPPEDA
	- RPJMD dengan Renstra	NA	%	86	88	90	92	94	96	96	



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
	- RPJMD dengan RKPD	84	%	86	88	90	92	94	96	96	
	- RKPD dengan Renja	NA	%	86	88	90	92	94	96	96	
4.2.	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	NA	%	85	87	89	90	92	94	94	BAPPEDA
4.3.	Tingkat Integrasi data OPD kedalam Serdang Bedagai satu data	NA	%	20	80	85	90	95	100	100	BAPPEDA
4.4.	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan	NA	%	80	83	86	88	90	92	92	BAPPEDA
4.4.	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang	NA	%	80	83	86	88	90	92	92	BAPPEDA
4.6.	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan	NA	%	86	88	90	92	94	96	96	BAPPEDA
5.	<b>PENANGGULANGAN DAERAH</b>										
5.1.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
5.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5.3.	Persentase desa tangguh bencana	1	%	1	3	5	7	9	11	11	BPBD
5.4.	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	39	%	39	39,67	40,33	41	41,67	42,33	42,33	BPBD
5.5.	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.6.	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertangani	100	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.7.	Persentase koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.8.	Persentase Satgas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	7,547	%	11,32	15,09	18,87	22,64	26,42	30,19	30,19	Satpol PP
5.9.	Tingkat waktu tanggap darurat ( <i>Response Time Rate</i> ) kejadian bencana	100	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
A. KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH											
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	673.031	Rp	701.240	744.250	778.320	800.200	825.000	837.500	837.500	Bappeda; BPS
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	272.196	Rp	303.500	335.200	356.300	377.470	400.500	427.500	427.500	Bappeda; BPS
B. FASILITAS WILAYAH/INFRASTUKTUR											
1.	AKSESIBILITAS DAERAH										
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,1654	Km/unit	1,0042	0,8817	0,7854	0,7077	0,6437	0,5900	0,5900	Dishub
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.224,00	org/ton	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dishub
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.200	org/ton	1.250	1.250	1.250	1500	1500	1500	1500	Dishub
2.	PENATAAN RUANG										
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	NA	%	25	35	45	55	65	75	75	BAPPEDA
2.2.	Luas wilayah produktif	39.191	Ha	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130	Distan
		106.441,93	Ha	106.443,13	106.470,04	106.585,15	106.828,60	107.000,63	107.426,33	107.426,33	Distan
2.3.	Luas wilayah industri	NA	Ha	0	0	200	300	400	500	500	Disperindag



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.4.	Luas wilayah banjir	134,3320	Km2	134,3320	134,3320	134,3320	134,3320	134,3320	134,3320	134,3320	BPBD
<b>3.</b>	<b>KETERSEDIAAN RUMAH MAKAN/RESTORAN dan PENGINAPAN</b>										
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran dan rumah makan	35	Buah	35	38	41	44	47	50	50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN P2TSP
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	7	Buah	7	8	9	10	11	12	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN P2TSP
<b>4.</b>	<b>KETERSEDIAAN AIR BERSIH</b>										
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	60,77	%	60,77	61,27	61,78	62,28	62,79	63,30	63,30	Disperwakim
<b>C.</b>	<b>IKLIM BERINVESTASI</b>										
1.	Angka kriminalitas	26,32		26	25	23	20	19	15	15	Satpol PP
2.	Jumlah demo	12	Demo	10	10	9	8	7	5	5	Satpol PP
3.	Lama proses perijinan	3	Hari	3	3	3	2	2	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN P2TSP
4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	11 16	Jenis (pajak) Jenis (retribusi)	11 16	11 16	11 16	11 16	11 16	11 16	11 16	Badan Pendapatan Daerah
5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	Perda	0	0	1	0	0	0	2	Setdakab



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN 2015		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
D. SUMBER DAYA MANUSIA											
1.	Rasio ketergantungan	55,58		55,32	55,14	55,02	54,83	54,65	54,41	54,41	Disnakerkop dan Usaha Mikro



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Revisi RPJMD dilakukan tanpa mengubah target-target yang telah ada terutama 21 (dua puluh satu) perairan.

Dalam menyusun RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.